



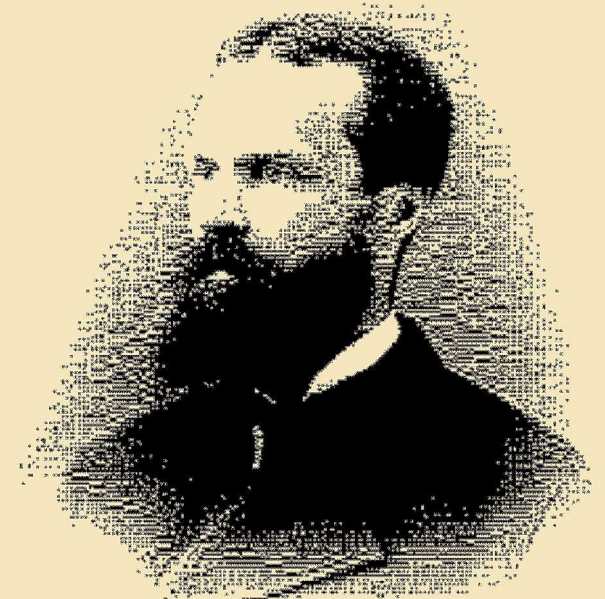
MENINJAU ULANG DAN MENYIKAPI
PRAGMATISME DEWASA INI

ISBN 978-602-37055-5-1



9 786021 705551

P MENINJAU ULANG DAN MENYIKAPI **PRAGMATISME DEWASA INI**



PENYUNTING:
ANASTASIA JESSICA ADINDA. S
EMANUEL PRASETYONO



MENINJAU ULANG DAN MENYIKAPI PRAGMATISME DEWA\$A INI

OLEH:

Agustinus Pratisto Trinarso
Agustinus Ryadi
Aloysius Widyawan L.
Anastasia Jessica Adinda S.
Aribowo
Emanuel Prasetyono
Herlina Yoka Roida
Pius Pandor
Xaverius Chandra

Penyunting:

Anastasia Jessica Adinda S.
Emanuel Prasetyono

**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA
MANDALA SURABAYA
2015**

Meninjau Ulang dan Menyikapi Pragmatisme Dewasa Ini

Penulis : Agustinus Pratisto Trinarso, Agustinus Ryadi,
Aloysius Widyawan L., Anastasia Jessica Adinda S., Aribowo,
Emanuel Prasetyono, Herlina Yoka Roida, Pius Pandor dan
Xaverius Chandra

Penyunting : Anastasia Jessica Adinda S. dan Emanuel
Prasetyono



2015

Diterbitkan oleh:

FAKULTAS FILSAFAT

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Cetakan Pertama, 2015

Ukuran Buku : 15,5 x 23 cm

Desain Cover : Datu Hendrawan

ISBN: 978-602-17055-5-1

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta:

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 27, AYAT (1), (2), DAN (6).

KATA PENGANTAR

Pragmatisme merupakan salah satu aliran pemikiran yang semakin berkembang di abad 20. Pengaruh pragmatisme ini menyebar ke berbagai ranah kehidupan seperti agama, pendidikan, sosial-budaya, politik, hukum, dan ekonomi. Pragmatisme ialah aliran pemikiran yang menekankan konsekuensi dan kegunaan praktis.

Pembahasan mengenai Pragmatisme dirasa masih relevan menyadari bahaya yang dihadapi masyarakat dengan meluasnya pemahaman pragmatisme, salah satunya, masyarakat cenderung menilai segala sesuatu berdasar konsekuensi praktis dan nilai guna. Nilai guna menjadi tolok ukur pengujian validitas kebenaran dan nilai kebaikan tindakan. Hal-hal yang abstrak dan tidak memiliki nilai guna akan dikesampingkan. Pragmatisme juga meninggalkan persoalan lain yaitu mereduksi relasi antar manusia

sebatas berdasarkan asas kebermanfaatannya. Cinta dan ketulusan yang yang menjadi tanda hubungan antar manusia direduksi sebatas menjadi asas manfaat.

Buku yang berjudul “Meninjau Ulang dan Menyikapi Pragmatisme Dewasa Ini” berusaha menilik kembali pemahaman serta praktek-praktek pragmatisme yang selama ini terjadi. Setelah memahami prinsip-prinsip dasar Pragmatisme dan meninjau kembali pengaruh-pengaruhnya di berbagai ranah kehidupan, Pembaca diharapkan dapat menyikapi pengaruh Pragmatisme dalam hidup sehari-hari.

Buku ini terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah pragmatisme dalam ranah teoritis. Bagian ini mengklarifikasi pengertian pragmatisme serta memaparkan sejarah teori pragmatisme dari awal kemunculan hingga era neo-pragmatisme. Bagian kedua bertajuk pragmatisme dalam ranah sosial-budaya.

Bagian kedua berisi empat tulisan yang masing-masing mengangkat tema sebagai berikut: Refleksi kritis atas pandangan pragmatisme William James tentang agama, pragmatisme dalam perubahan sosial-budaya, etika pragmatisme Richard Rorty dan perbandingan antara etika pragmatisme William James dengan etika kristiani. Sedang, Bagian ketiga berjudul pragmatisme dalam ranah politik-ekonomi. Bagian ketiga ini terdiri dari dua tulisan yaitu melawan ekonomi hyperpragmatisme dan mewaspadaikan kaum pragmatis Machiavellian. Karya-karya tersebut ditutup oleh epilog berjudul “Melampaui Pragmatisme” yang mengajukan beberapa kritik terhadap pragmatisme. Pertama, pragmatisme membiarkan orang menjadi korban hegemoni nilai dari para pemilik modal yang memiliki kuasa untuk menentukan yang paling bernilai dan bermakna. Kedua, bahasa dalam pragmatisme memiliki keterbatasan dan maknanya bersifat jangka pendek. Ketiga, ‘pengalaman’ yang dimaksudkan oleh

pragmatisme tak pernah tampil tunggal dan selalu berada dalam proses pemaknaan sepanjang sejarah.

Buku ini merupakan kumpulan makalah yang ditulis oleh para pemateri dalam *Extension Course* 2014 yang berjudul “Meninjau Ulang dan Menyikapi Pragmatisme Dewasa Ini”. Buku ini ditujukan bagi para mahasiswa, dosen dan seluruh masyarakat yang memiliki perhatian pada pragmatisme.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya buku ini.

Surabaya, 13 Juli 2015

Anastasia Jessica Adinda S.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	5
 PROLOG : MENINJAU ULANG DAN MENYIKAPI PRAGMATISME DEWASA INI oleh Anastasia Jessica A.S.....	 7
 BAGIAN I : PRAGMATISME DALAM RANAH TEORITIS	
 PRAGMATISME AWALI oleh Aloysius Widyawan Louis dan Anastasia Jessica A. S.....	 38
 PERKEMBANGAN PRAGMATISME oleh Anastasia Jessica A. S. dan Aloysius Widyawan Louis	 71
 BAGIAN II : PRAGMATISME DALAM RANAH SOSIAL-BUDAYA	
 MEMBUKA SELUBUNG PRAGMATISME AGAMA: BELAJAR BERSAMA WILLIAM JAMES oleh Pius Pandor	 113
 PRAGMATISME DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA oleh Aribowo	 159

ETIKA PRAGMATIS ala RICHARD RORTY oleh Agustinus Ryadi.....	200
MENIMBANG ETIKA PRAGMATISME WILLIAM JAMES DENGAN ETIKA KRISTIANI oleh Xaverius Chandra H	229
BAGIAN III : PRAGMATISME DALAM RUMPUN POLITIK- EKONOMI	
MELAWAN EKONOMI HYPERPRAGMATISME oleh Herlina Yoka Roida.....	275
MEWASPADAI KAUM PRAGMATIS MACHIARELLIAN oleh Agustinus Pratisto Trinarso	287
EPILOG : MELAMPAUI PRAGMATISME oleh Emanuel Prasetyono.....	321

PROLOG

EXTENSION COURSE 2014

**“MENINJAU ULANG DAN MENYIKAPI
PRAGMATISME DEWASA INI”**

Oleh:

Anastasia Jessica Adinda S.

1. PENGANTAR

Pragmatisme merupakan salah satu aliran pemikiran yang semakin berkembang di abad 20. Pengaruh pragmatisme ini menyebar ke berbagai ranah kehidupan seperti agama, pendidikan, sosial-budaya, etika, hukum, politik, dan ekonomi. Pragmatisme dalam anggapan populer dipahami sebagai aliran yang menyatakan bahwa suatu tindakan bernilai apabila memberi keuntungan secara cepat. Bahaya yang dihadapi masyarakat dengan meluasnya pemahaman pragmatisme yang demikian ialah pandangan sempit yang menilai segala sesuatu dari nilai guna. Nilai guna bahkan direduksi lagi menjadi sebatas mengejar rasa nikmat dan menghindari rasa sakit. Hal-hal yang tidak memberi rasa nikmat dinilai tidak berguna. Prinsip yang hanya memberi penghargaan pada hal-hal yang memberi rasa nikmat disebut

prinsip hedonistik. Pandangan yang hedonistik ini dapat terjerumus pada penilaian yang relativistik yang berarti tidak ada standar universal dalam penilaian. Setiap orang dapat memiliki penilaian yang sah termasuk penilaian moral yang sesuai dengan kenikmatan yang ia rasakan. Bahaya yang dihadapi ketika penilaian menjadi relativistik ialah kehancuran nilai-nilai moral universal yang akan berujung pada hancurnya kehidupan bersama. Ketika tidak ada nilai moral bersama yang dipegang oleh masyarakat maka kehidupan bersama kehilangan pengikatnya dan akhirnya akan hancur.

Pragmatisme juga meninggalkan permasalahan lain seperti mereduksi relasi antar manusia sebatas berdasarkan kebermanfaatannya. Cinta dan ketulusan yang melatarbelakangi hubungan antar manusia direduksi menjadi asas manfaat. Pragmatisme, di samping itu, mengesampingkan potensi manusia untuk melakukan refleksi. Potensi manusia direduksi melulu pada tujuan pemenuhan kebutuhan dasar.

2. PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG MUNCULNYA PRAGMATISME

Pragmatisme secara etimologis berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu *pragma* yang berarti tindakan. Secara harafiah, pragmatisme berarti filsafat atau aliran pemikiran tentang tindakan.¹ Segala sesuatu bernilai sejauh dapat diwujudkan dalam tindakan. Istilah pragmatisme lahir di Amerika Serikat sekitar tahun 1870-an. Karakteristik khas pragmatisme ialah kemampuan untuk dapat diterapkan dalam praktek atau bekerja paling efektif. Prinsip ini yang kemudian menentukan kebenaran suatu pernyataan, tindakan dan penilaian.²

“Kelahiran” pragmatisme salah satunya distimulus oleh teori evolusi Darwin. Teori Evolusi Darwin menggeser fokus dari *being* (ada) menjadi *becoming* (menjadi) serta menumbangkan keyakinan terhadap doktrin-doktrin utama asal-usul kehidupan. Penggeseran perhatian pada *becoming* menyebabkan orang lebih mengutamakan diri untuk berbicara tentang metode daripada sibuk dengan persoalan tentang hakikat dari sesuatu. Pertanyaan “Bagaimana sesuatu

¹ SONNY KERAFF, *Pragmatisme menurut William James*, Kanisius, Yogyakarta 1987, 15.

² TED HONDERICH, *The Oxford Companion to Philosophy*, Oxford University Press, United Kingdom 1995, 709

terjadi?” menjadi lebih penting daripada pertanyaan “Apa itu sesuatu?”. Teori Evolusi Darwin juga memicu pertanyaan dan keraguan terhadap doktrin-doktrin yang sebelumnya dianggap sebagai satu-satunya sumber kebenaran mutlak tentang asal-usul kehidupan. Menyadari hal ini, kelompok pemikir Harvard³ yang menjadi cikal bakal pragmatisme Harvard berusaha membangun pragmatisme sebagai jalan untuk menghadapi krisis teologis tanpa mengorbankan ajaran agama yang esensial.⁴

Faktor lain yang menyebabkan munculnya pragmatisme ialah keinginan untuk mengakhiri perdebatan metafisik. Pierce berusaha membuat filsafat dapat diuji secara ilmiah atau eksperimental. Usaha Peirce bertujuan untuk menegaskan atau memperjelas suatu teori normatif

³ Kelompok pemikir Harvard yang kemudian dikenal dengan nama “Perkumpulan Metafisika” merupakan kelompok pemikir yang memiliki keprihatinan terhadap berkembangnya teori Darwin. Bagi mereka, interpretasi mekanistik tentang teori Darwin dapat menghancurkan agama dan mengarah ke ateisme yang fatalistik. Kelompok ini mengemukakan filsafat unitarian, yaitu pandangan bahwa orang tetap dapat meyakini agama dengan membuang hal-hal yang tidak rasional dari agama. Bdk. SONNY KERAFF, *Op.Cit.*, 19.

⁴ *Ibid.*

melalui investigasi objektif.⁵ Peirce kemudian merancang suatu filsafat yang disebut pragmatisme yang menguji kebenaran ide berdasar konsekuensi praktis atau hasil eksperimentalnya. Bagi Peirce, keyakinan yang tepat ialah keyakinan yang sungguh ditunjukkan untuk tindakan. Berdasar keyakinan tersebut manusia dapat mengambil tindakan yang tepat.⁶ William James juga mengemukakan pragmatisme-nya yang ia ambil alih dari istilah Peirce dengan maksud mengakhiri perdebatan metafisik. Bagi James, kita dapat memperdebatkan suatu ide yang berlawanan jika ide-ide tersebut membawa konsekuensi yang berbeda di masa depan. Jika tidak membawa konsekuensi yang berbeda, maka lebih baik perdebatan tersebut ditinggalkan. Perdebatan antara monisme dan pluralisme, misalnya, dapat dijernihkan dengan mengenali konsekuensinya di masa depan.⁷ Jadi, pertanyaannya: Konsekuensi apa yang saya dapatkan jika saya menganut monisme atau pluralisme?

⁵ VICENT M. COLAPIETRO, "Charles Sanders Pierce" dalam *A companion to Pragmatism*, John R. Shook, Joseph Margolis (.ed), Blackwell Publishing Ltd, United Kingdom 2006, 13

⁶ CHARLES SANDERS PEIRCE, "How To Make Our Ideas Clear" dalam *Popular Science Monthly* 12 (January 1878), online version, 6

⁷ S. E. Frost, JR, "Digest of Pragmatism: William James", dalam *Masterworks of Philosophy Vol.3*, McGraw-Hill Book Company, United States of America 1972, 124

Secara sosiologis, pragmatisme dianggap sebagai kristalisasi keyakinan hidup masyarakat Amerika. Pragmatisme merupakan hasil pemahaman dan interpretasi pengalaman hidup para perintis bangsa Amerika yang datang dari Eropa. Para perintis tersebut memandang kehidupan di Amerika sebagai perjuangan hidup, wadah belajar dan bekerja serta usaha untuk menyesuaikan diri di wilayah baru. Dalam upaya penyesuaian diri ini diperlukan strategi, improvisasi serta prioritas utama yang diletakkan pada pemecahan masalah dengan menempuh beragam cara.⁸ Harapan akan masa depan yang lebih baik memandu tindakan para perintis ini dalam menyesuaikan diri di lingkungan yang baru.

3. PENGGUNAAN ISTILAH PRAGMATIS YANG KABUR

Pengertian pragmatis pada perkembangannya telah mengalami pergeseran pemaknaan. Terjadi pergeseran semangat dari keinginan untuk “menjernihkan gagasan dengan tindakan” ke semangat “segala sesuatu berarti sejauh untuk mencapai kegunaan praktis”. Pengertian Pragmatisme yang sering dikaitkan dengan kegunaan praktis terjadi karena

⁸ ALBERTINE MINDEROP, *Pragmatisme Amerika*, Penerbit Obor, Jakarta 2005, 94

meluasnya anggapan populer tentang pragmatisme dan pengaruh pemikiran tokoh neo-pragmatis.⁹

Pragmatisme dalam anggapan populer sering dilihat sebagai budaya yang mengunggulkan kegunaan praktis, instan, tidak menyukai proses, atau hanya menyelesaikan masalah jangka pendek. Pengertian pragmatisme yang demikian berbeda dari pengertian Pragmatisme yang pada mulanya yang dicetuskan oleh Charles Sanders Peirce (1839-1914). Peirce mengartikan pragmatisme sebagai metode untuk menjelaskan makna dengan menunjukkan dalam tindakan. Prinsip Pragmatisme mulai berkembang ke arah kegunaan dan kepuasan personal sejak dikembangkan oleh William James (1842-1910). Kebenaran dalam pemikiran James berkaitan dengan dua hal yaitu kesesuaian dengan realitas dan kepuasan sebagai efek dari kebenaran. Sejak pemikiran James inilah pragmatisme dikaitkan dengan nilai guna, kemampuan memecahkan persoalan serta pembawa kepuasan.

⁹ RICHARD P. MULLIN, *The Soul of Classical American Philosophy*, State University of New York Press, Albany 2007, xii

4. EXTENSION COURSE 2014: MENINJAU ULANG DAN MENYIKAPI PRAGMATISME DEWASA INI

Berdasarkan pengamatan akan bahaya-bahaya yang dihadapi masyarakat akibat semakin meluasnya pengaruh pragmatisme ke berbagai ranah kehidupan, Fakultas Filsafat UKWMS merasa perlu menyelenggarakan Program *Extension Course* (EC) 2014 yang mengambil judul “Meninjau Ulang dan Menyikapi Pragmatisme Dewasa Ini”. Program EC 2014 ini berusaha memberi kontribusi berupa pencerahan kepada masyarakat umum di Surabaya dan sekitarnya mengenai pragmatisme baik dalam wacana filsafat maupun pengaruhnya dalam praktek kehidupan sehari-hari.

“Meninjau ulang” berarti melihat kembali pemahaman-pemahaman serta praktek-praktek pragmatisme selama ini. ‘Meninjau ulang’ dilakukan agar peserta semakin mengenali prinsip-prinsip dalam pragmatisme dan dapat mengkritisinya. Berbekal pengenalan akan prinsip-prinsip mendasar dalam pragmatisme, diharapkan peserta mampu mengambil sikap atas pengaruh pragmatisme dalam praktek hidup sehari-hari. Refleksi atas pragmatisme diharapkan dapat menjadi tuntunan dalam memilah dampak-dampak yang baik dan buruk dari gagasan Pragmatisme. Dengan

memilah, kita menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi Pragmatisme.

5. TEMA-TEMA DALAM EXTENSION COURSE 2014

5.1. Pragmatisme dari klasik ke kontemporer

Pragmatisme pada mulanya diambil dari istilah yang diberikan Immanuel Kant, filsuf kelahiran Jerman abad 18. Kant menyebut “keyakinan-keyakinan pragmatis” yang berarti keyakinan-keyakinan yang membawa kita pada suatu tujuan tertentu. Dokter yang menulis resep obat, misalnya, meyakini bahwa dengan resep obat tersebut maka penyakit akan sembuh.¹⁰ Charles Sanders Pierce (1839-1914), salah satu tokoh pelopor Pragmatisme, menggunakan istilah pragmatisme sebagai jalan untuk membuat suatu gagasan menjadi lebih jelas. Pierce menulis *How to Make Our Ideas Clear* (1878) di *Popular Science Monthly*. Suatu gagasan dapat menjadi lebih jelas dengan jalan mengenali konsekuensi atau efek-efek yang ditimbulkan. Bahkan bagi Pierce, seluruh pengetahuan kita mengenai sesuatu adalah pengenalan

¹⁰ SONNY KERAFA, *Op.Cit.*, 15-16

kita terhadap efek-efek yang ditimbulkan. *“consider what effect, that might be conceivably have practical bearings we conceive the object of our conception to have. Then, our conception of these effect is the whole of our conception of object.”*¹¹ Peirce memberi contoh pengetahuan kita mengenai sifat keras. Kita mengetahui “apa itu keras?” dari efek-efek yang ditimbulkan oleh sifat keras, misalnya jika dibebani barang lain maka dia akan tetap padat, permukaannya yang tidak lunak, atau ketika dibanting akan menimbulkan suara tertentu. Segala pengetahuan kita mengenai sifat keras adalah efek-efek yang dimiliki oleh sifat keras.¹²

William James (1842-1910) kemudian mengadopsi pragmatisme Peirce. James menggunakan pragmatisme untuk menguji makna gagasan baik saintifik maupun ide filosofis. Usaha James bermula dari keinginannya untuk mengakhiri perdebatan metafisik. James mendefinisikan gagasan yang benar sebagai apa yang dapat orang temukan dalam realitas¹³. Untuk memecahkan dua atau lebih pendapat yang

¹¹ CHARLES SANDERS PIERCE, *Op.Cit.*, 8

¹² *Ibid.*, 8-9

¹³ RICHARD P. MULLIN, *Op.Cit.*, xiii

bertentangan kita perlu mengenali konsekuensi dari pendapat tersebut di masa mendatang.

Realitas, bagi James, dilihat sebagai yang dapat dibentuk sesuai kepentingan pemikiran dan tindakan manusia. William James berpendapat bahwa manusia membentuk dunia melalui interaksinya dengan realitas. Namun manusia tidak selalu dapat membentuk dunia sesuai dengan semua yang diinginkannya. Dunia tidak hanya terbentuk dari campur tangan manusia tetapi juga dari evolusi dan warisan budaya. Manusia dengan kehendak bebasnya dapat memilih apa yang menjadi perhatiannya dan demikian memilih tindakan dan untuk mengembangkan dunia. Ide kehendak bebas menjadi pusat dalam hidup personal dan filosofi James.¹⁴

Beberapa sejarawan pragmatisme Amerika memasukan John Dewey sebagai salah satu figur penting. Dewey mencetuskan gagasan instrumentalisme yang menyatakan bahwa intelegensi atau akal adalah alat untuk memecahkan persoalan sosial. Instrumentalisme Dewey berhubungan dekat dengan pragmatisme James, tetapi Dewey lebih

¹⁴ *Ibid.*

menekankan konteks biologis. Semua pemikiran Dewey terjadi dalam interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Dewey berusaha mengatasi dikotomi antara *mind and matter* (jiwa dan materi) serta antara sarana dan tujuan. Dewey menantang pembedaan rasio murni dan tujuan. Rasio selalu ada dalam kerangka untuk mencapai tujuan. Bagi Dewey, terjadinya masalah sosial dan moral menandakan penyesuaian yang buruk terhadap perubahan lingkungan dan hasil dari ketidakpedulian manusia. Manusia tidak mau memaksimalkan rasionya untuk memecahkan persoalan sosial dan moral tersebut. Esensi diri manusia, bagi Dewey, ialah dimensi ke-sosial-annya. Semua pikiran manusia oleh karena itu juga terjadi di konteks sosial. Semua organisasi, baik sosial, politik, ekonomi, religius maupun pendidikan harus dievaluasi berdasar “apakah mendukung kebebasan dan perkembangan personal?”.¹⁵ Demikian pragmatisme digunakan oleh para pelopornya dalam kaitan dengan pengetahuan, kebebasan manusia, serta interaksi manusia dengan lingkungannya.

¹⁵ RICHARD P. MULLIN, Op. Cit.,xiii-xiv

Pragmatisme kerap disalahpahami sebagai pemikiran yang kurang memiliki prinsip sehingga mengijinkan setiap orang untuk melakukan perbuatan yang nampaknya paling berguna. Deskripsi ini sebenarnya tidak sesuai dengan hidup dan pemikiran dari filsuf awal yang menemukan dan mengembangkan pragmatisme. Pragmatisme di awal kemunculannya justru banyak bicara mengenai pengetahuan, kebenaran, kehendak bebas manusia, nilai moral, komunitas hingga hubungan kita dengan Yang Transenden.¹⁶

Kesalahpahaman terhadap pragmatisme tidak hanya disebabkan oleh pemahaman populer tetapi juga dari pemikiran filsuf kontemporer neo pragmatisme. Ada pergeseran fokus proyek dari pragmatisme klasik ke neo-pragmatisme. Proyek pragmatisme klasik ialah memikirkan kembali pengetahuan, kebenaran dan nilai. Sedang, beberapa tokoh neo-pragmatis mengembangkan pandangan menuju relativisme dan subjektivisme. Beberapa pemikir neo-pragmatis menolak masalah klasik karena

¹⁶ RICHARD P. MULLIN, *Op.Cit.*, xii

tidak memiliki basis di realitas.¹⁷ Kebenaran, kebebasan, nilai dan Yang Transenden adalah contoh beberapa pemikiran yang dinilai oleh neo-pragmatis sebagai yang tidak memiliki basis di realitas.

Setelah pragmatisme Dewey, pragmatisme diperkenalkan sebagai pemikiran khas Amerika, yang berbeda dari *western philosophy* yang dianggap ketinggalan zaman. Pragmatisme Peirce menginspirasi para filsuf analitik, khususnya kontribusi Peirce pada logika dan filsafat ilmu. W.V.O Quine menyusun artikel *two dogmas of empiricism* yang menantang ke-ortodok-an positivistis dengan menawarkan warisan pragmatisme. Pragmatisme kemudian dibicarakan lagi setelah publikasi karya Richard Rorty, *Philosophy and the Mirror of Nature*.¹⁸ Rorty menolak andaian dasar fondasionalisme¹⁹ dalam filsafat modern.

5.2. Pengaruh Pragmatisme dalam Ranah Hidup Sehari-hari Dewasa Ini

5.2.1. Rumpun Sosial dan Budaya

¹⁷ JOSEPH MARGOLIS, *A companion to Pragmatism*, John R. Shook, Joseph Margolis (.ed), Blackwell Publishing Ltd, United Kingdom 2006, 4

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Fondasionalisme menyatakan bahwa ada hal yang mendasari atau menjadi landasan utama bagi semua bangunan pengetahuan.

5.2.1.1. Pragmatisme dan Agama

Agama dalam kerangka pemikiran Pragmatisme bukanlah teori-teori teologi melainkan “apakah keyakinan kita terbukti berguna dalam hidup sehari-hari?”. Bagi kaum pragmatis, hipotesis tentang Tuhan benar apabila hipotesis tersebut bekerja secara memuaskan.²⁰ Bagi kaum pragmatis seperti William James, apapun pilihan keyakinan seseorang harus selalu diletakkan dalam kerangka “apakah membawa konsekuensi kegunaan dan kepuasan bagi hidup kita?”. Orang dapat memilih jenis agama apapun tergantung dari kebutuhan hidupnya.

Kerangka pikir pragmatisme dalam hidup keagamaan membawa hal baik tapi juga buruk. Baik apabila cara berpikir pragmatisme tersebut diartikan sebagai agama harus membawa perubahan dalam pengalaman hidup seseorang menuju ke arah yang lebih baik. ‘Keyakinan tanpa perbuatan’ tidak berlaku dalam nalar pragmatisme. Perang dan kebencian antar

²⁰ S. E. Frost, JR, *Op.Cit.*, 145

agama seharusnya tak terjadi, bila agama dihayati sebagai yang membawa perubahan dalam hidup. Fenomena intoleransi umat beragama seperti penutupan Gereja HKBP di Bekasi atau penyerangan terhadap umat Islam Syiah di Sampang tak perlu terjadi. Namun kerangka pikir pragmatisme dapat membawa hal yang buruk apabila kegunaan diartikan hanya semata sesempit kebergunaan praktis dan kepuasan diri.

Nalar pragmatisme mengenai agama mengalami kendala dengan munculnya pertanyaan: “Apakah jika terjadi kejahatan atau hal buruk menimpa maka kita akan meninggalkan agama yang kita yakini?” Keyakinan kemudian menjadi usang karena tidak membawa pada kegunaan dan kepuasan. “Tepatkah kita memaknai agama yang di dalamnya mengandung penghormatan dan kekaguman akan Yang Kudus semata sejauh memberi kegunaan dan kepuasan bagi kita?”

5.2.1.2. Pragmatisme dan Perubahan Sosial-Budaya

Pragmatisme yang disempitkan semata menjadi kegunaan praktis membawa bahaya bagi manusia. Masyarakat yang melulu mempedulikan kegunaan praktis kehilangan kesempatan untuk melakukan refleksi atas hidupnya. Semua realitas yang ditemui hanya berlalu begitu saja. Semua diukur melulu dari apakah berguna bagi diriku atau tidak. Pemaknaan atas realitas menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Pemaknaan yang demikian sekaligus menjadi pendorong perubahan sosial yang begitu cepat.

Laju perubahan sosial bertambah cepat didorong oleh teknologi yang tiada habisnya menggempur manusia di zaman modern. Dua dekade terakhir ini dapat dirasakan demikian cepatnya teknologi komunikasi dan transportasi berkembang. Kini semua dimensi kehidupan dapat berjalan dengan mudah dan cepat. Kemudahan dan kecepatan yang biasa didapatkan membuat manusia enggan untuk menunggu lama. Refleksi dianggap tidak berguna dan memperlambat proses. Kapasitas manusia untuk berefleksi atas apa yang dijalani

telah ditinggalkan. Manusia direduksi keutuhannya hanya sebagai makhluk yang melulu berusaha untuk bertahan hidup (*survive*). Pertimbangan manusia direduksi hanya dalam kerangka pengetahuan instrumental (*herrschaftwissen*) /berguna-tidak berguna. Kemampuan manusia untuk melakukan refleksi dan menemukan makna telah dikesampingkan.

Budaya²¹ sejatinya merupakan perwujudan dari keberadaan dan keutuhan manusia. Namun cita-cita luhur budaya sebagai aktualisasi diri manusia kini telah pupus. Budaya menjadi semata mengabdikan pada kepentingan modal ekonomi. Tidak ada lagi keunikan sebagai tanda eksistensi individu. Keunikan ditelan gelombang budaya massa. Orang beramai-ramai memakai pakaian, bentuk rambut, cara berbicara, aksesoris bahkan cara

²¹ Kata “budaya” memiliki akar kata dalam bahasa sansekerta *Buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi dan akal. Budaya dengan demikian, dapat diartikan sebagai hasil dari aktivitas akal budi manusia. Budaya memiliki cakupan yang amat luas. Sistem pengetahuan, sistem pemerintahan, bahasa, seni, agama, teknologi merupakan produk budaya. Hampir seluruh bidang kehidupan merupakan produk dari budaya. Budaya merupakan hasil aktualisasi dari eksistensi manusia.

berpikir yang sama. Segala yang sama itu mudah didapatkan dari saluran informasi yang tak terbatas jumlahnya mulai dari majalah, televisi hingga internet. Budaya tidak lagi menunjukkan keberpikiran. Budaya nihil dari akal budi. Orang terpaksa di depan televisi tanpa peduli situasi sosial. Banjir, gempa bumi, ataupun kisruh pemilihan umum tidak pernah mengganggu keceriaan di televisi. Kesenian sebagai bagian dari kebudayaan bukan lagi tanda keluhuran martabat manusia tetapi menjadi budak karena mengabdikan pada keuntungan ekonomi sembari terus membuat orang menjadi apolitis.

Budaya yang mengagungkan keuntungan modal ekonomi ini juga tidak lepas dari meluasnya cara berpikir pragmatis yang populer. Budaya dalam kerangka pemikiran pragmatis populer bukanlah budaya yang memiliki prinsip universal yang mengatur. Setiap budaya memiliki prinsip yang tidak bisa disamakan satu sama lain, semua tergantung dari kegunaan praktis masing-masing budaya. Jika hari ini yang dianggap kegunaan paling praktis adalah menghasilkan uang, maka tidak

heran jika seluruh himpunan bagian dari budaya diabdikan untuk satu tuhan yaitu uang.

5.2.1.3. Pragmatisme dan Etika

Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari mengenai nilai dari tindakan manusia. Pertanyaan mendasar dalam etika adalah “apa itu nilai kebaikan?” dan “Apa itu tindakan yang bernilai?”. Salah satu ciri khas pemikiran Pragmatisme ialah tidak mempertanyakan hal-hal yang bersifat normatif seperti “apa itu Kebaikan yang sejati?” atau “apa itu Kebenaran yang sesungguhnya?”. Kaum pragmatis justru ingin mengakhiri perdebatan-perdebatan yang metafisik seperti ini dengan langsung menerapkan gagasan pada suatu tindakan. Oleh karena semangat tidak ingin mempertanyakan hal normatif, para pemikir pragmatisme jarang membicarakan bidang etika yang sangat berkaitan dengan hal-hal normatif.

Sekalipun kaum pragmatis enggan membicarakan etika, namun pada tema “Pragmatisme dan Etika” ini berusaha digali

implikasi pemikiran Pragmatisme pada bidang etika. Pertanyaan-pertanyaan utamanya ialah “Seperti apa etika dari sudut pandang pragmatisme?”, “Adakah nilai yang universal dalam etika pragmatisme?”, “Apabila tidak ada nilai universal seperti nilai kemanusiaan, apa yang akan terjadi?”

Etika dalam pemikiran Pragmatisme seringkali terjatuh dalam subjektivisme dan relativisme. Subjektivisme adalah aliran pemikiran yang menyakini bahwa penilaian tergantung pada individu. Sedang, relativisme menyatakan bahwa tidak ada patokan universal mengenai nilai. Dalam pragmatisme, suatu tindakan dikatakan bernilai sejauh dapat terbukti memiliki kebergunaan dalam hidup sehari-hari. Pandangan ini dapat terjerumus dalam subjektivisme apabila kebergunaan dipandang bergantung pada masing-masing individu. Subjektivisme yang ekstrem akan berujung pada tidak adanya nilai moral bersama yang diyakini masyarakat atau disebut relativisme.

Etika dalam diskursus pragmatisme mulai dibicarakan secara eksplisit oleh pemikir neo-pragmatis. Pertanyaan yang muncul dalam pembicaraan pragmatisme mengenai etika ialah “Apakah nilai etis itu dapat bersifat objektif?”. Para pemikir neo-pragmatisme memiliki jawaban yang berbeda-beda. Bagi Hilary Putnam (1926-sekarang), nilai etis yang objektif itu mungkin, sekalipun ia tidak ingin terjebak dalam dikotomi subjektif dan objektif ini. Putnam menolak dua aliran dalam filsafat yaitu realisme metafisik dan relativisme. Realisme metafisik menyatakan bahwa ada penjelasan yang lengkap tentang dunia dan tidak tergantung dari pikiran manusia. Bagi Putnam, keyakinan realisme metafisik ini tidak mungkin, sebab di setiap penilaian termasuk mengenai apa yang baik bagi manusia tidak pernah independen dari apa yang diketahui manusia. Sedang, penilaian yang relativis pun bagi Putnam juga tidak mungkin sebab ketika mengatakan mengenai ‘budaya kita masing-

masing' sebenarnya mengasumsikan nilai yang dapat dipahami bersama.²² Putnam menyatakan adanya suatu standar rasional bagi nilai etis, sekalipun nilai etis menampakkan wajahnya yang berbeda-beda di setiap budaya.²³ Berbeda dari Putnam, Richard Rorty sama sekali menolak adanya standar yang universal mengenai suatu nilai. Richard Rorty (1931-2007) dalam karyanya *Consequences of Pragmatism* menyatakan bahwa kini yang diperlukan adalah *post philosophical culture* (budaya setelah filsafat). *Post philosophical culture* menolak seluruh teori-teori normatif (anti-teori) dan menganggap usaha untuk mencari prinsip yang mendasari seluruh bangunan pengetahuan di atasnya sudah usang (anti-fondasionalisme). Dalam *Post philosophical culture* tidak ada kriteria dalam praktek dan tidak ada standar rasionalitas. Akhirnya yang dapat diterapkan adalah pragmatisme yang berusaha *melakukan filsafat*

²² HILARY PUTNAM, *Pragmatism and Realism*, James Conant and Ursula Zeglen (eds.), Taylor & Francis e-Library, 2005, 16.

²³ Ursula M. Z'eglen'. "Introduction" dalam HILARY PUTNAM, *Pragmatism and Realism*, James Conant and Ursula Zeglen (eds.), Taylor & Francis e-Library, 2005, 4

sehingga memperoleh pengertian tentang sesuatu. Dalam pemikiran pragmatis, kriteria bukanlah kriteria yang bergelut dengan interpretasi, tetapi kriteria untuk mendapatkan sesuatu yang dapat dilakukan.²⁴ Pandangan tentang *Post Philosophical Culture* inilah yang menyebabkan Rorty sering digolongkan sebagai penganut relativisme.

5.2.1.4. Pragmatisme dan Moral Kristiani

Sebagai bagian dari institusi pendidikan katolik, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mempunyai visi mengembangkan komunitas akademik yang reflektif, kritis dan kreatif berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip kristiani. Nilai-nilai kristiani yang akan dibahas dalam tema “Pragmatisme dan Moral Kristiani” dimaksudkan bukan sebagai nilai yang eksklusif tetapi inklusif. Terbuka bagi siapa saja yang ingin mengetahui prinsip-prinsip dalam moral

²⁴ RICHARD RORTY, *Consequences of Pragmatism* (Essays: 1972-1980), University of Minnesota Press, Mineapolis 1982, xli

kristiani. Pertanyaan mendasar dalam tema pragmatisme dan moral kristiani ialah: “Apa itu moral kristiani?” dan “Bagaimana pandangan moral kristiani mengenai pragmatisme?”.

5.2.2. Rumpun Politik-Ekonomi

5.2.2.1. Pragmatisme dan Politik

Politik merupakan upaya untuk mengatur kehidupan bersama demi terciptanya kebaikan bersama. Cara pandang pragmatis dalam arti segala keputusan diarahkan pada tindakan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, memang dibutuhkan dalam politik. *Blusukan* sebagai metode pendekatan untuk menyelesaikan secara langsung persoalan di masyarakat merupakan contoh dari prinsip pragmatis semacam ini. Namun, apa yang terjadi apabila pragmatis yang merasuki politik adalah pragmatis dalam arti segala tindakan harus diukur berdasar nilai guna untuk kepentingan individu, golongan dan bersifat chauvisnistik? Apa yang terjadi jika negara mengambil kebijakan dalam negeri dan luar negeri dengan berpedoman pada prinsip

pragmatis yang hanya menguntungkan segelintir pihak? Kebijakan dalam negeri tidak akan menguntungkan rakyat miskin serta perdamaian dunia bisa terganggu karena masing-masing negara hanya mengutamakan kepentingan nasionalnya. Sebagai contoh, kebijakan pemberlakuan pasar bebas tanpa proteksi bagi produk dalam negeri akan merugikan usaha kecil dan menengah. Atau contoh lain, kebijakan luar negeri untuk mendukung perang atau gecatan senjata selalu berdasarkan kepentingan nasional apa yang akan diperoleh dari keputusan tersebut.

Cara pikir pragmatis yang populer juga mempengaruhi praktek politik di Indonesia. Hingga tahun 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap sejumlah pelaku korupsi dan di antaranya adalah para pejabat yang duduk di kursi pemerintahan. Beberapa tokoh yang dapat kita sebutkan misalnya Surya Dharma Ali (Menteri Agama), Anas Urbaningrum (Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat), dan Akil Mochtar (Mantan

Ketua Mahkamah Konstitusi). Motivasi terjun ke dunia politik tidak lagi untuk kepentingan publik tetapi untuk mendapatkan keuntungan rupiah yang lebih besar. Munculnya calon-calon legislatif yang tidak mendapatkan kaderisasi pendidikan politik menandai cara berpikir pragmatis dalam praktek politik. Calon legislatif tidak berjuang atas nama kepentingan umum tapi kepentingan pribadi dan partai. Logika politik yang digunakan adalah logika jual beli. Politik dilihat sebagai pasar yang di dalamnya terjadi jual-beli. Para calon legislatif dengan modal ekonomi, budaya, sosial dan simbolik berlomba-lomba mengiklankan diri. Sedang, rakyat yang tak bermodal tidak memiliki kekuatan dan nilai tawar. Pertanyaan dalam tema “pragmatisme dan politik” ini ialah: Adakah prinsip-prinsip pragmatisme dalam bidang politik? Apakah Indonesia dalam bidang politik juga menerapkan prinsip-prinsip pragmatisme? Jika iya, apa dampak dari prinsip pragmatisme dalam bidang politik tersebut?

5.2.2.2. Pragmatisme dan Ekonomi

Kata “ekonomi” berasal dari kata dalam bahasa Yunani *Oikos* (keluarga, rumah tangga) dan *Nomos* (aturan, hukum). Secara harafiah, ekonomi berarti manajemen rumah tangga yang baik. Istilah ekonomi berkembang penggunaannya. Ekonomi kini tidak hanya berkaitan dengan usaha mengatur pemasukan dan pengeluaran kebutuhan dalam suatu rumah tangga tetapi juga mencakup segala kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat.

Beberapa persoalan ekonomi di Indonesia disikapi pemerintah dengan memproduksi kebijakan yang sifatnya hanya menyelesaikan masalah jangka pendek. Sebagai contoh, kebijakan yang melonggarkan impor pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan dalam negeri. Kebijakan ini tidak membuat petani semakin bergairah untuk menanam sehingga bisa terwujud swa-sembada pangan. Justru sebaliknya, produk yang dihasilkan petani akhirnya harus bersaing dengan produk pangan impor yang seringkali dijual dengan harga lebih murah dan kualitas lebih baik. Kebijakan ekonomi yang hanya menyelesaikan masalah

sesaat ini seringkali dinilai sebagai kebijakan ekonomi yang pragmatis. Pertanyaan yang muncul dalam tema “pragmatisme dan ekonomi” ini ialah: Seperti apakah prinsip pragmatisme dalam ekonomi? Apakah perekonomian di Indonesia juga menerapkan prinsip pragmatisme? Apakah prinsip tersebut selalu membawa dampak baik atau sebaliknya?

6. PENUTUP

Program Extension Course 2014 ini merupakan usaha dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) untuk terlibat dalam persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Program ini diharapkan dapat memantik pemikiran filosofis mengenai pragmatisme baik dalam wacana filsafat maupun dalam ranah hidup sehari-hari. Keberagaman tema dan disiplin ilmu yang digunakan dalam program ini diharapkan dapat memperluas wawasan sehingga dapat menyikapi pragmatisme dengan bijaksana. Program Extension Course ini sekaligus dapat menjadi wadah komunikasi antar disiplin ilmu mengingat kini semakin sulit terjadi pertemuan antara spesialisasi-spesialisasi dalam ilmu. Pencerahan yang didapatkan dari program ini hendaknya dapat diteruskan dan dikembangkan di komunitas masing-masing. Semoga usaha

kecil yang dilakukan oleh Fakultas Filsafat UKWMS ini dapat mengawali bertumbuhnya generasi yang peduli dan kritis pada persoalan masyarakat serta memiliki komitmen dan antusias dalam usaha membangun Indonesia.

SUMBER PUSTAKA:

DEWEY, JOHN, *Democracy and Education*, The Project Gutenberg Ebook, 2008

FROST, S. E., JR, “*Digest of Pragmatism: William James*”, dalam Masterworks of Philosophy Vol.3, McGraw-Hill Book Company, United States of America 1972

HONDERICH, TED. *The Oxford Companion to Philosophy*, Oxford University Press United Kingdom 1995

KERAF, SONNY, *Pragmatisme Menurut William James*, Kanisius, Yogyakarta 1987

MINDEROP, ALBERTINE, *Pragmatisme Amerika*, Penerbit Obor, Jakarta 2005

MULLIN, RICHARD P., *The Soul of Classical American Philosophy*, State University of New York Press, Albany 2007

PUTNAM, HILARY, *Pragmatism and Realism*, James Conant and Ursula Zeglen (eds.), Taylor & Francis e-Library, 2005

PEIRCE, CHARLES S, “*How to Make Our Ideas Clear*” dalam
Popular Science Monthly 12 (January 1878),
286-302 (online version)

RORTY, RICHARD, *Consequences of Pragmatism* (Essays:
1972-1980), University of Minnesota Press,
Mineapolis 1982

SHOOK, JOHN R. AND JOSEPH MARGOLIS,, *A
Companion to Pragmatism*, Blackwell Publishing,
UK 2006

PRAGMATISME AWALI

Oleh:

Aloysius Widyawan L. dan Anastasia Jessica A.S.

Pragmatisme adalah suatu tradisi filosofis yang paling penting, paling inventif, paling *gamblang*, ‘paling asli’ dari Amerika Serikat. Pragmatisme lahir pada kurun waktu sesudah Perang Sipil akhir abad ke-19. Lahirnya pragmatisme tak bisa lepas dari keberadaan “*The Metaphysical Club*”²⁵ Filsuf-filsuf pragmatis awali yang paling penting adalah Charles Sanders Peirce²⁶, William James²⁷, dan John

²⁵*Metaphysical Club* adalah kelompok studi para pemikir Harvard yang bertemu secara informal dalam kurun waktu Januari-Desember 1872 untuk berdiskusi tentang tema-tema filsafat di Cambridge, Massachusetts. Beberapa tokoh penting *studi club* tersebut adalah: Chauncey Wright (1830-1875), Oliver Wendell Holmes (1841-1935), Charles Sanders Peirce, dan William James

²⁶**Charles Sanders Peirce** (1839-1914) dikenal sebagai bapak Pragmatisme. Ia lebih dikenal sebagai peneliti dan ahli logika saintifik. Sepanjang hidup, ia menulis banyak karya dalam bentuk manuskrip-manuskrip yang tersebar, tak beraturan, dan baru dipublikasikan beberapa tahun setelah kematiannya. Kehidupan dan kematiannya dianggap banyak kalangan sangatlah tragis. Ia lahir dari keluarga akademisi Harvard, pernah menjadi pengajar ternama di Harvard dan John Hopkins University, namun akhirnya meninggal dalam kemiskinan dan terisolir. Bdk. VINCENT M. COLAPIETRO, “*Charles Sanders Peirce*” dalam *A companion to Pragmatism*, John R. Shook, Joseph Margolis (.ed), Blackwell Publishing Ltd, United Kingdom 2006, 13

Dewey²⁸. Meskipun pengaruhnya sempat menurun, pragmatisme kembali hidup sejak tahun 1970an dengan para filsuf dan pemikir-praktisi/profesional yang bersemangat menggunakan beberapa tulisan dan ide-ide pragmatisme awali. Mereka adalah Richard Rorty, Jürgen Habermas, Hilary Putnam, Robert Brandom, dll. Mereka mengembangkan wacana filosofis yang merepresentasikan tradisi pemikiran pragmatis tahap lanjut di berbagai bidang hukum, pendidikan, politik, sosiologi, psikologi, dan kritik sastra, ekonomi, dan kehidupan intelektual di Amerika dan negeri-negeri lain.

²⁷ **William James** (1842-1910) dikenal sebagai cendekiawan di bidang fisiologi, psikologi, dan filsafat. Karya-karyanya berisi berbagai pandangan tentang kebenaran, pengetahuan, realitas, psikologi, agama dan moral. Dialah yang berjasa menyebarluaskan pemikiran pragmatisme pada khalayak umum meskipun ia mengakui bahwa pragmatisme bukan benar-benar berasal dari pemikiran aslinya. Ia mempengaruhi banyak generasi pemikir setelahnya, seperti Edmund Husserl, Bertrand Russell, John Dewey, dan Ludwig Wittgenstein.

²⁸ **John Dewey** (1859-1952) dijuluki oleh surat kabar *New Yorker* pada tahun 1926 sebagai *"The Man Who Made Us What We Are"*. Ia mengenal dan belajar langsung dari kuliah-kuliah psikologi James dan logika matematika Peirce. Karya-karya awalnya berbicara banyak tentang metafisika, fenomenologi, pedagogi, etika, dan filsafat religi. Kemudian, ia lebih fokus pada pemikiran-pemikiran praktis, terutama terkait dengan temapedagogiyang inovatif dengan paradigma pragmatis. Bdk. PHILIP W. JACKSON, *"John Dewey"* dalam *A companion to Pragmatism*,...54

Kita akan menelusuri pokok-pokok pemikiran pragmatisme awali dari para filsuf-filsuf utamanya. Mereka bertiga mengembangkan sistem pragmatisme yang berbeda-beda. Bahkan, mereka memiliki nama yang khas untuk menyebut “sistem berfilsafat” masing-masing.

1. Kontroversi Istilah dan Makna Pragmatisme

Orang yang pertama kali membuat istilah “pragmatisme” dikenal oleh khalayak umum adalah William James. Pada tahun 1907, James memublikasikan suatu serial kuliahnya yang dia beri judul *Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking*. Dalam tulisannya itu, James mengatakan bahwa istilah pragmatisme sudah digunakan tiga dekade lebih dulu oleh Charles (Sanders) Peirce dalam tulisannya *How to Make our Ideas Clear* di *The Popular Science Monthly* yang terbit 1878.²⁹ James sendiri memberi nama lain pada pragmatisme, yakni empirisme radikal dan humanisme. Karena merasa tidak cocok dengan penafsiran James atas pemikiran pragmatisnya, Peirce kemudian mengubah istilah

²⁹ Lih. **WILLIAM JAMES**, *Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking*, edited and with an introduction with Louis Menand, Vintage Books, New York: Random House, ..., p. 94; bdk. **JOSEPH MARGOLIS**, *The First Pragmatists*, dalam **ARMEN T. MARSOOBIAN** and **JOHN RYDER** (eds.), *The Blackwell Guide to American Philosophy*, Blackwell Publishing, New York, 2004, p. 36

pragmatisme menjadi pragmatisme (*pragmaticism*).³⁰ Dewey, filsuf pragmatis awal yang paling akhir muncul, juga memakai istilah lain, yakni instrumentalisme.

Dari kenyataan di atas, kita bisa melontarkan beberapa pertanyaan antara lain: mengapa soal istilah atau penamaan saja terjadi perbedaan (bahkan diwarnai pula dengan perdebatan ilmiah)? Mengapa perbedaan itu bisa terjadi dalam rentang kurang dari tiga dekade dan bahwa masing-masing filsuf saling mengenal terkait pribadi ataupun pemikiran? Apakah hal-hal mendasar yang sama sehingga mereka bertiga dapat digolongkan sebagai filsuf pragmatis?

³⁰ Peirce sendiri mengaku bahwa istilah pragmatisme diambil dari khasanah istilah dalam Filsafat Kantian. Dalam filsafat Kantian, ada dua term yang nampaknya mirip, namun sejatinya berbeda pengertian, yakni *praktisch* (dari bahasa Yunani *praktikos*) dan *pragmatisch* (dari *pragmatikos*). Istilah *praktisch* dimengerti sebagai suatu tendensi untuk melakukan tindakan dengan tujuan pada dirinya sendiri sehingga pengertian tindakan ini hanya ada dalam ranah akal budi, bukan dalam pengalaman langsung. Sedangkan, *pragmatisch* menekankan suatu gerak dari kehendak manusia ke pelaksanaan suatu tujuan definitif sebagai tahap penting untuk mengklarifikasi pemikiran. Peirce kemudian mengubah istilah pragmatisme menjadi pragmatismetampa maksud mengubah isi pemikirannya, namun hanya sekedar membedakan secara teknis dengan istilah pragmatisme yang diperkenalkan James yang ia anggap telah mengkhianati “jiwa” pragmatismenya. Lih. **CHARLES SANDERS PEIRCE**, “What Pragmatism Is”, dalam *The Monist*, 15:2 (April 1905), pp. 161-181

Hal mendasar yang harus dipertimbangkan untuk memahami kontroversi istilah ini adalah latar belakang masing-masing filsuf pragmatistis awal. Peirce adalah seorang ahli logika saintifik dan ilmuwan di lembaga penelitian US Coast and Geodetic Survey selama 32 tahun.³¹ Latar belakang itu memicunya untuk menelaah lebih jauh apakah konsep-konsep intelektual dapat benar-benar dijelaskan secara *gamblang* dan tanpa keraguan dengan metode saintifik. Pragmatisme Peirce akhirnya harus dipahami dalam kaitannya dengan tujuan mendapatkan konsep-konsep yang jelas dan *gamblang*. Peirce kemudian mengembangkan pemikiran pragmatismenya dalam ranah logika dan filsafat ilmu pengetahuan.

Berbeda dengan Peirce, James memiliki latar belakang kuat di bidang fisiologi, kedokteran, dan psikologi. Dari karya-karyanya, ia nampaknya tertarik pada telaah atas kehidupan moral dan religi.³² James berangkat dari sebuah pengandaian bahwa cara berfilsafat bergantung pada temperamen manusia. Sejarah filsafat sebenarnya berisi sejarah pertentangan temperamen manusia.³³ Secara khusus,

³¹VINCENT M. COLAPIETRO, *Op.Cit.*, 13

³²Beberapa karya James adalah: *The Will to Believe* (1897), *Varieties of Religious Experience* (1902), *A Pluralistic Universe* (1909)

³³Bdk. WILLIAM JAMES, *Pragmatism*, p. 6-10

ia menyoroti rasionalisme yang mewakili temperamen “*tender minded*” (*man of principle* yang intelektualistik, idealistik, optimistik, religius, monistik, dogmatikal) dan empirisme yang “*tough minded*” (*man of facts* yang sensasional, materialistik, pesimistik, fatalistik, pluralistik, skeptis). Dua hal ini juga ada dalam kehidupan religius, yakni religius yang rasionalistik dan yang empiris. Yang dibutuhkan oleh James akhirnya adalah filsafat yang menggambarkan temperamen *fair-minded* (elastis, penuh kompromi, mencari *modus vivendi* di atas segalanya, menerima darwinisme, fakta-fakta psikologi cerebral, loyal pada sains pada fakta dan kehendak untuk memeperhitungkan mereka.

James menyebut pragmatismenya empirisme radikal. Dia mengatakan:

”Pragmatisme merepresentasikan suatu sikap yang sangat familiar dalam filsafat, yakni sikap empiris; pragmatisme menampilkan sikap empiris itu, sebagaimana yang saya lihat, baik dalam bentuk yang lebih radikal dan lebih sedikit ditentang daripada yang pernah diasumsikan....seorang pragmatis bergerak menuju kenyataan konkret dan kecukupan, menuju fakta-fakta, menuju aksi, dan menuju kekuatan. Hal itu berarti temperamen empiris berkuasa dan temperamen rasionalis menyerah... melawan dogma, hal-

hal yang artifisial dan kepura-puraan finalitas dalam kebenaran.”³⁴

James juga menyebut pragmatisme-nya sebagai humanisme. Ia menggunakan istilah humanisme ini karena istilah tersebut merujuk pada teori pragmatis tentang kebenaran yang memberi tekanan pada elemen manusia dalam keyakinan dan pengetahuan. Ia menyebut contohnya: humanisme berpendapat bahwa kepuasan adalah sesuatu yang membedakan kebenaran dan kesalahan. Nampak bahwa kebenaran diraih dengan mengganti opini yang kurang memuaskan dengan opini yang lebih memuaskan.³⁵ Dengan kata lain, bagi James, pokok pemikirannya disebut humanisme karena seluruhnya bersandar pada pengalaman dalam segala aspeknya. Tidak ada kebenaran yang berada di luar pengalaman manusia. Lebih jauh lagi, James menyebut dirinya humanis teistik dan pluralistik. Dari pemahaman humanis inilah, ia berpikir tentang Tuhandan sikap melioris-nya.³⁶

³⁴ *Ibid.*, p. 96-97 (diterjemahkan sendiri oleh penulis)

³⁵ Bdk. **FREDERICK COPLESTON**, *The History of Philosophy vol. VIII*, Doubleday, New York, 1994 (image edition), p.341

³⁶ James membahas Tuhan dan sikap melioris ketika mencoba memecahkan perdebatan sengit antara theisme dan materialisme. Sebagai seorang pragmatis, mana yang harus dipilih? Jika dipahami secara retrospektif (yang terkait dengan masa lalu), theisme dan materialisme memiliki perspektif yang bertolak belakang. Theisme

Dewey mengenal baik dua “perintis” pragmatisme, yakni Peirce dan James. Ia sendiri merasa kurang setuju dengan istilah pragmatisme. Ia berkata, “*the radical empirist, the humanist, the pragmatist, label him as you will...*”. Ia lebih senang menyebut pragmatisme sebagai “*empirical naturalism or*

menambahkan “hipotesa” tentang Tuhan yang mengatur keberlangsungan dunia, sedangkan materialis mengesampingkan hipotesa teisme itu karena tidak penting, tetapi mengedepankan materi sebagai ganti Tuhan. Bagi pragmatis, perdebatan itu tanpa makna karena yang diperdebatkan adalah masa depan yang dideduksi dari hipotesa, bukan pengalaman. Jika keduanya dipandang secara prospektif (melihat ke depan), keduanya menjanjikan yang sedikit berbeda. Materialisme akan membawa kita menuju suatu kondisi dunia yang baik bagi ideal-ideal manusia, pencapaian-pencapaian baru, kesadaran, dan buah-buah pikiran yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Sedangkan teisme menjamin bahwa ideal-ideal manusia secara permanen akan terjaga. Pada cara pandang kedua, pragmatisme bisa terkait karena keduanya berbicara tentang ideal-ideal yang diharapkan oleh manusia. Secara khusus, pandangan pragmatis James tentang Tuhan terkendala dengan realitas penderitaan dan kejahatan. Baginya, Tuhan tidak lagi tak terbatas. “Tuhan” (*sengaja diberi tanda kutip sekedar untuk membedakan dengan Tuhan yang tak-terbatas*) hanyalah kesadaran akan “*superhuman*” yang terbatas karena kekuatan dan pengetahuannya terbukti terbatas di hadapan realitas negatif itu. Karena itu, di hadapan masa depan yang akan dihadapi, James mengajukan sikap melioris, yakni sikap antara optimis dan pesimis. Bagi seorang melioris, tidaklah penting bahwa dunia akan menjadi lebih baik, tidak juga penting menjadi lebih buruk. Dunia hanya dapat menjadi lebih baik jika manusia secara bebas bertindak bersama (*co-operate*) dengan “Tuhan” yang terbatas untuk menjadikan dunia lebih baik. Dengan kata lain, masa depan tidaklah ditentukan menjadi lebih baik atau lebih buruk, bahkan oleh “Tuhan” sendiri. Kerja keras manusia untuk dunia merupakan yang utama. (lih. Ibid., p. 342-344)

naturalistic empiricism or naturalistic humanism.” Istilah pragmatisme tak pernah ia pakai dalam karya-karyanya. Baginya, istilah itu membawa pragmatisme itu sendiri dalam kesalahpahaman (*misconception*).³⁷ Sudah terlalu banyak kesalahpahaman dan kontroversi yang muncul dari penggunaan istilah pragmatisme itu sehingga menurut Dewey penggunaan istilah pragmatisme itu sebaiknya dihindari.

Meskipun demikian, dalam interpretasi yang wajar, Dewey meyakini adanya poin-poin penting pragmatis, yakni fungsi konsekuensi-konsekuensi sebagai ujian-ujian yang penting bagi validitas proposisi-proposisi, konsekuensi-konsekuensi yang tersedia itu secara institusional dibentuk untuk memecahkan persoalan yang spesifik dengan cara-cara operasional. Contoh: kucing itu ada di kolong. Pernyataan itu nampaknya sebuah jawaban atas pertanyaan “Di manakah kucing itu?”. Supaya pernyataan itu benar, seharusnya pernyataan itu adalah sebuah jawaban jika benar-benar ada upaya mencari kucing yang hilang itu.³⁸

Karena itu, bagi Dewey, istilah-istilah empirisisme, humanisme, instrumentalisme, dan pragmatisme sebagai

³⁷ PHILIP W. JACKSON, *Op.Cit.*, 59

³⁸ *Ibid.*

istilah-istilah yang dapat memiliki makna sama dan dapat dipertukarkan satu sama lain. Posisi pragmatisme Dewey ada di antara Peirce dan James. Menurut Dewey, Peirce adalah ahli logika, sedangkan James adalah seorang humanis dan melioris. Dia sendiri ingin menjadi kedua-duanya. Ia ingin menjembatani apa yang real dan yang ideal, yang aktual dan yang mungkin. Jadi, Dewey lebih suka menggunakan adjektif “pragmatis” daripada kata benda “pragmatism”.

Dewey sebenarnya ingin mengakhiri segala bentuk kontroversi penggunaan istilah pragmatisme. Bagi Dewey, ada hal yang lebih penting dari perdebatan teoritis tersebut, yakni mengembalikan prinsip pragmatis pada komitmen tujuan-tujuannya, menghentikan perdebatan filsafat yang tidak berarti, membangun dan merealisasikan ide-ide yang mungkin, relevan dan teruji oleh pengalaman dan situasi-situasi tertentu di segala bidang studi yang selalu terbuka.

2. Pragmatisme sebagai Metode

Peirce berpendapat bahwa pragmatisme pertama-tama bukanlah filsafat, melainkan suatu metode refleksi yang memiliki tujuan membuat ide-ide menjadi jelas. Pragmatisme itu metodologi atau *methodentic*. Peirce merumuskan maksim pragmatisnya: “untuk menegaskan

makna dari konsepsi intelektual, seseorang haruslah mempertimbangkan apa konsekuensi-konsekuensi praktis yang mungkin secara masuk akal menghasilkan keniscayaan dari kebenaran konsepsi tersebut.”

Ada dua alasan mendasar mengapa Peirce mengajukan maksim pragmatis tersebut. Pertama, ia mengkritik pandangan Descartes tentang metode keraguan untuk bisa sampai pada suatu ide yang terang dan jelas (*idea clara et distincta*). Yang kedua, ia memberi tekanan pada konsekuensi-konsekuensi pragmatis sebagai tolok ukur mendapatkan ide-ide yang terang dan jelas itu.

Yang pertama, Peirce menolak metode Cartesian bahwa kita harus meragukan segala sesuatu sampai kita menemukan pijakan pengetahuan yang tidak dapat diragukan lagi dan bebas dari segala prasangka. Dalam hal ini, Peirce berpendapat bahwa keraguan yang asli dan real muncul ketika beberapa pengalaman, baik eksternal maupun internal, berlawanan atau nampaknya bertumbukan dengan satu keyakinan kita. Ketika hal itu terjadi, kita harus melakukan penyelidikan lebih jauh dengan suatu pandangan untuk mengatasi keadaan yang meragukan, baik dengan cara memperbaiki keyakinan lama dengan dasar yang lebih kuat

atau dengan menggantinya dengan keyakinan yang dasarnya lebih baik.

Bagi Peirce, spirit saintifik menuntut seseorang untuk siap setiap saat membuang semua muatan keyakinannya. Jika seseorang memegang keyakinan x , ia percaya bahwa dalam keadaan tertentu, y seharusnya terjadi. Dan ketika y itu tak terjadi, ia akan meragukan kebenaran keyakinan x tsb. Di sini, terjadi tumbukan antara pengalaman dan keyakinan. Orang yang memiliki spirit saintifik akan siap-siap meninggalkan keyakinannya tentang dunia jika tumbukan tersebut terjadi. Karena itu, bagi Peirce, keyakinan-keyakinan semacam itu adalah subjek yang dapat direvisi.

Alasan yang kedua beranjak dari pemahaman Peirce bahwa ilmu pengetahuan saintifik (disingkat sains) adalah sesuatu yang hidup dari hipotesa. Hipotesa itu dibentuk dan teruji. Sains juga merupakan suatu cara hidup yang memiliki satu tujuan yang menghidupkannya, yakni menemukan kebenaran sejati yang dikejar dengan metode yang baik. Sains secara esensial menjadi perjuangan komunal. Peirce antipati pada filsafat modern yang memiliki tendensi yang

menunjukkan “pengingkaran absurd bagi opini-opini yang lain”³⁹

Secara instrinsik, menurut Peirce, pengetahuan teoritis berhasrat untuk menjadi berharga dan inteligible. Ia akhirnya mencoba meruntut asal mula pengetahuan kita pada insting kita dan menyederhanakannya pada konjungsi dinamis antara intelek manusia dan inteligibilitas kosmik sebagai berikut: Insting makan mengarahkan manusia pada pengetahuan dasar tentang kekuatan-kekuatan fisik, tentang ruang, dll. Insting bernafas mengarahkan manusia pada pengetahuan dasar tentang motif-motif psikis, tentang waktu, dll.

Manusia mampu menemukan secara intuitif prinsip-prinsip alam karena menjadi bagian dari alam dan karena itu, tunduk pada prinsip-prinsip itu. Akan tetapi, intelek manusia adalah inteligensi yang mampu belajar dari pengalaman dan kapasitas kita belajar dari pengalaman itu, menguji semua tindakan yang menguntungkan dari kecenderungan-kecenderungan instingtif. Kemampuan kita belajar dari pengalaman sangat erat kaitannya dengan kapasitas kita

³⁹ Yang dimaksud adalah bahwa Peirce menganggap bahwa filsafat modern terlalu fanatik memegang klaim-klaim kebenarannya tanpa menguji klaim-klaim itu lebih dalam. Kaum rasionalis mengesampingkan kaum empiris, begitu pula sebaliknya.

untuk menentukan konsepsi-konsepsi, penegasan-penegasan, dan penyimpulan-penyimpulan kritis. Menurutnya, “rational” berarti *self-critizing, self controlling, self-controlled* dan terbuka pada pertanyaan-pertanyaan yang datang tanpa henti.

Pengalaman memiliki otoritas yang besar dan tak dapat dihalang-halangi. Kekuatannya berada pada fakta-fakta. Limit pengalaman sekaligus merupakan limit pengetahuan. menurutnya, “*all our knowledge is, and forever must be, relative to human experience and to the nature of man*”.⁴⁰

Limit pengalaman tak hanya menunjuk pada limit pengetahuan, tetapi juga limit makna. Pikiran manusia sangatlah terbatas untuk menjadi instrumen-instrumen dari kebutuhan dan hasratnya, tidak bisa memaknai segala sesuatu lepas darinya. Kita memiliki pengalaman langsung akan sesuatu dalam dirinya sendiri. Apa yang kita miliki secara ekperiensial berasal dari perjumpaan kita dengan realitas, dan itulah yang menjamin pengetahuan kita.

Peirce bekerja keras mengubah filsafat menjadi filsafat yang memiliki sisi pertanyaan-pertanyaan saintifik dan komunal. Objek filsafat adalah keseluruhan realitas atau

⁴⁰VINCENT M. COLAPIETRO, *Op.cit*, 16

peristiwa dari pengalaman langsung kita. Cara filsafat menginvestigasi objeknya ini haruslah seperti observasi ilmiah yang hati-hati, generalisasi konseptual, dan dugaan-dugaan terkontrol. Filsafat harus meninggalkan pretensi agar bisa menggapai pengetahuan yang teruji. Karena itu, bahasa filsafat bukan “sastra”, opini, tetapi haruslah bahasa saintifik.

Karena itu, bagi filsafat, pengalaman hanya dapat berarti keseluruhan hasil kognitif tentang hidup, termasuk interpretasi-interpretasi yang sebenar-benarnya. Fungsi inteligensi tidak hanya mengarahkan pada pemahaman akan fakta-fakta dan penemuan hukum-hukum, tapi juga modifikasi dari apapun sejauh pengalaman itu terbukti sangat berpengaruh

Ketika Peirce mengatakan bahwa seluruh makna dari suatu konsepsi berada pada seluruh rangkaian konsekuensi-konsekuensi praktisnya, dalam benaknya, konsepsi yang bermakna harus memiliki makna eksperensial yang langsung atau “tunai” (*cash value*), dan harus bisa terkait dengan beberapa kumpulan observasi empirik yang mungkin di bawah kondisi-kondisi spesifik tertentu. Peirce berpendapat bahwa seluruh makna dari suatu konsepsi mengandung keseluruhan spesifikasi observasi yang mungkin.

Dengan demikian, baginya, pragmatisme adalah suatu metode atau aturan untuk membuat ide-ide menjadi jelas agar dapat membatasi makna ide-ide. Contoh: seseorang berbicara pada kita tentang objek yang keras. Andaikan saja, kita tidak tahu makna kata “keras”. Yang harus dilakukan oleh orang itu adalah menjelaskan makna kata keras tadi sehingga kita semua mengerti dengan benar. Cara menjelaskan tidak bisa hanya dengan penjelasan teoritis panjang lebar. Peirce tidak menganjurkan bahwa untuk memahami atau menjelaskan arti dari suatu konsep intelektual kita harus melakukan sesuatu secara aktual, atau menampilkan suatu tindakan tertentu yang menjelaskan makna. Cukuplah membangkitkan dalam pikiran ide yang sama dengan pengalaman tertentu. Misalnya, orang itu harus mengatakan: “Keras itu kita rasakan ketika kita menekan potongan besi atau balok kayu. Pengalaman yang sama tidak kita rasakan ketika kita menekan permukaan sabun colek atau mentega dengan jari-jari tangan kita. Keras juga tidak kita rasakan ketika kita merebahkan diri di tumpukan kapas atau kapuk.”⁴¹

⁴¹CHARLES SANDERS PEIRCE, “How To Make Our Ideas Clear” dalam *Popular Science Monthly* 12 (January 1878), digital version, 8

Hampir mirip dengan pemikiran Peirce, James meyakini bahwa pragmatisme adalah suatu metode yang mencoba menafsirkan setiap ide dengan melacak apa saja konsekuensi-konsekuensi praktis yang dihasilkannya sehingga pemahaman kita tentang ide-ide itu benar-benar jelas. Mereka berdua sepertinya juga sepakat bahwa metode pragmatis ini pertama-tama mendasarkan diri pada pengalaman konkret manusia. Hanya saja, James menambahkan secara eksplisit bahwa ia membahas pragmatisme sebagai metode karena ingin menghentikan perdebatan metafisika yang tak juga selesai dan juga memiliki ketertarikan untuk membawa prinsip pragmatis ini pada aplikasi-aplikasi konkret, khususnya terkait dengan tema-tema khusus seperti kebenaran, makna, dan kehidupan moral dan religius.

Bagi James, tidak ada yang baru dari metode pragmatis ini. Ia menyebutkan bahwa metode ini sudah diterapkan sejak zaman Sokrates. Akan tetapi, mereka menggunakannya dalam fragmen-fragmen. Pragmatisme menjadi suatu metode yang sangat dekat dengan metode empiris, hanya lebih radikal dan lebih sedikit ditolak. Di sini, James menegaskan pentingnya menempatkan pengalaman manusiawi sebagai tolok ukur dan dasar pemahaman kita

akan realitas. Ia mengatakan, "Metode Pragmatis pertama-tama berarti perubahan orientasi dalam bersikap, yakni sikap mengabaikan (term-term metafisika) hakikat, prinsip-prinsip pertama, kategori-kategori, keniscayaan, dan sikap mengarahkan diri pada tujuan terakhir, buah-buah, konsekuensi-konsekuensi, fakta-fakta."⁴²

Sikap James semacam ini menunjukkan adanya tendensi *anti-intelektualis*. Ia tidak ingin ada dogma atau doktrin dalam metode pragmatis. Ia mengatakan bahwa metode pragmatis sejalan dengan nominalisme⁴³, utilitarianisme⁴⁴ dan positivisme⁴⁵. Hal inilah yang menjadi

⁴² WILLIAM JAMES, *Pragmatism*, p. 98

⁴³ Nominalisme adalah aliran filsafat yang menolak adanya entitas universal dan/atau objek yang abstrak. Akan tetapi, nominalisme tidak hanya sekedar penolakan entitas universal atau objek-objek yang abstrak. Jika ada seorang nihilis atau orang yang percaya bahwa tidak ada entitas apa pun, maka ia akan dihitung sebagai nominalis. Begitu pula jika seseorang menolak yang universal dan objek abstrak tetapi agnostik terhadap eksistensi objek-objek konkret atau partikular, ia juga akan dihitung sebagai nominalis. Akan tetapi, dalam pemahaman filsafat kontemporer, nihilis dan agnostik tadi bukanlah nominalis. Nominalisme membawa implikasi bahwa doktrin terkait menegaskan bahwa segala sesuatu adalah konkret atau partikular dan bahwa ini bukanlah kebenaran kosong. Maka, nominalisme berarti menegaskan bahwa hanya ada objek-objek partikular atau konkret dan bahwa segala sesuatu itu partikular. Tokoh utamanya adalah William Ockham

⁴⁴ Utilitarianisme adalah aliran etika yang menegaskan bahwa tujuan dari setiap tindakan manusia adalah kegunaan yang sebesar-besarnya atau biasa pula dikatakan memaksimalkan keuntungan dan

salah satu perbedaan mendasar pragmatisme James dan Peirce.⁴⁶

Dewey juga berbicara tentang keharusan pragmatisme untuk setia pada pengalaman manusia. Atas dasar ini pula, Dewey merumuskan tujuan filsafat sebagai memberikan garis-garis pengarahan bagi perbuatan dalam kenyataan hidup. Oleh karena itu, filsafat tidak boleh tenggelam dalam pemikiran-pemikiran metafisis yang tidak bermanfaat. Dalam konteks ini, filsafat digunakan sebagai dasar dan fungsi sosial. Pokok pandangan ini muncul sebagai kritiknya atas pokok dari filsafat jaman sebelumnya. Menurutnya, kaum empiris telah beranggapan bahwa pikiran selalu menunjuk pada obyek-obyek dari alam, dan bahwa

meminimalkan penderitaan atau hal-hal negatif lainnya. Tokoh-tokohnya antara lain Jeremy Bentham, John Stuart Mill

⁴⁵Positivisme secara umum adalah aliran filsafat yang menekankan data pengalaman dan mengabaikan spekulasi *a priori* atau metafisis. Tokoh pencetusnya adalah Auguste Comte (1798–1857). Dasar pernyataan positivisme adalah bahwa: 1) setiap pengetahuan yang bernilai didasarkan pada data positif pengalaman. 2) bahwa di luar bukti fakta hanya ada logika murni dan matematika murni yang dipahami sebagai relasi ide-ide

⁴⁶Peirce menegaskan bahwa pragmatismenya justru harus menolak nominalisme dan menerima realisme, khususnya realisme sebagaimana yang diajarkan oleh filsuf skolastik Duns Scotus. Hanya saja, ia mendukung sikap positivisme terkait dengan pragmatisme sebagai metode logika saintifiknya (bdk. **FREDERICK COPLESTON**. *History of Philosophy vol. VIII*. P. 313)

setiap ide selalu berhubungan dengan suatu realitas. Dengan kata lain, pengetahuan seakan-akan dibentuk setelah subyek berhadapan dengan atau memandang sesuatu di luar dirinya. Inilah yang disebut “*a spectator theory of knowledge*”. Menurut teori ini, subyek pengetahuan bertindak bagaikan seorang penonton yang hanya dengan memandang sudah mendapatkan ide tentang obyeknya. Inilah pandangan kaum rasionalis. Menurut pandangan ini, rasio merupakan suatu instrumen untuk memperhatikan apa yang tetap dan pasti pada alam. Alam dan rasio adalah dua hal yang terpisah dan berbeda. Ia beranggapan bahwa baik apa yang dikembangkan oleh kaum empiris maupun kaum rasionalis terlalu statis di satu pihak dan terlampau mekanistik di lain pihak.

Karena pengaruh Hegel, Ia mengakui bahwa antara manusia dan lingkungan alamiahnya terdapat dialektika yang konfliknya “terselesaikan” dalam pengalaman. Hal ini disebabkan karena setiap pengalaman adalah kekuatan yang berdaya guna. Maksudnya, pengalaman merupakan pertemuan antara manusia dengan lingkungan alam yang mengitarinya dan itu membawa manusia pada pemahaman yang baru.

Pengalaman juga bersifat dinamis karena lingkungan juga bercorak dinamis. Inteligensi pada hakikatnya merupakan kekuatan yang dimiliki manusia untuk menghadapi lingkungan hidup yang terserap dalam pengalamannya. Dalam konteks ini, berpikir adalah suatu aktivitas inteligensi yang lahir karena adanya pengalaman manusia dan bukan suatu aktivitas yang terisolasi dalam pikiran semata. Menurutny, aktivitas berpikir selalu merupakan sarana untuk memecahkan masalah-masalah. Hal ini mengandaikan bahwa aktivitas inteligensi lebih luas dari sekedar aktivitas kognitif, yaitu meliputi keinginan–keinginan yang muncul dalam diri subyek ketika berhadapan dengan kesekitarannya. Inilah yang disebut Dewey *teori instrumentalialia* tentang pengetahuan.

Teori *instrumentalia* adalah suatu usaha untuk menyusun suatu teori yang logis dan tepat dari konsep-konsep, pertimbangan-pertimbangan, penyimpulan-penyimpulan dalam bentuknya yang bermacam-macam, dengan cara pertama-tama menyelidiki bagaimana pikiran berfungsi dalam penentuan-penentuan yang berdasarkan pengalaman, yang mengenai konsekuensi-konsekuensi di masa depan. Maka, ia lebih suka menggunakan *instrumentalisme* daripada *pragmatisme*.

3. Kebenaran Pragmatis

Pragmatisme bisa memiliki pengertian definitif yang beragam. Akan tetapi, yang tidak bisa ditolak adalah kaitannya dengan hakikat dan makna kebenaran.

Peirce membedakan beberapa macam kebenaran. Secara khusus, ia membahas kebenaran proposisi yang dapat dibagi dalam berbagai macam kebenaran-kebenaran yang lebih kecil. Ada kebenaran etis yang mendasarkan diri pada kesesuaian antara proposisi dan keyakinan seseorang. Ada kebenaran logis yang merupakan kesesuaian antara proposisi dan realitas.

Ketika kita berbicara tentang kebenaran dan kekeliruan, kita merujuk pada kemungkinan bahwa suatu proposisi ditolak. Suatu proposisi bisa jadi salah jika pengalaman menolaknya. Jika pengalaman tidak menolaknya, proposisi itu benar. Di sini, Peirce menekankan apakah terjadi penolakan terhadap identifikasi atau tidak. Dengan kata lain, Peirce lebih menekankan falsifikasi empirik, bukan verifikasi empirik.

Beberapa proposisi secara rasional tidak dapat ditolak, misalnya kebenaran matematika murni. Matematika murni mendasarkan diri pada hipotesis-hipotesis yang tidak

ada kaitannya dengan realitas, tetapi terkait dengan imajinasi akal budi. Kebenaran dimengerti jika suatu makna memiliki referensi tertentu. Dengan demikian, matematika murni tidak peduli apakah realitas terkait dengan tanda-tandanya atau tidak. Absen-nya makna dengan sendirinya membuat matematika murni tidak mungkin ditolak dan karenanya, kebenarannya sungguh-sungguh niscaya.

Sementara itu, James menolak teori tradisional tentang kebenaran, yakni teori koherensi dan korespondensi. Teori koherensi berpusat koherensi pernyataan yang satu dengan pernyataan-pernyataan yang lain dalam satu sistem pengetahuan yang kebenarannya sampai saat ini sudah diandaikan. Teori ini banyak dianut oleh kaum rasionalis seperti Descartes, Leibniz, Spinoza, Hegel yang digunakan, terutama dalam matematika dan ilmu-ilmu pasti. Contoh: (1) Semua manusia pasti mati. (2) Sokrates adalah manusia. (3) Sokrates pasti mati. Kebenaran ketiga merupakan implikasi logis dari sistem kebenaran yang ada dalam (1) dan (2). Kebenaran (3) sudah ada dalam kebenaran (1). Karena itu, kebenaran (3) tidak bergantung pada realitas Sokrates masih hidup atau sudah mati

James menolak teori korespondensi karena baginya kenyataan manusiawi tidak pernah lepas dari keyakinan

manusia atas realitas itu. Baginya, teori korespondensi mestinya menjadi teori “persetujuan” (subjek yang yakin) dengan realitas. Yang benar bukan proposisinya karena sesuai dengan kenyataan, tetapi yang benar adalah subjek yang yakin (*believer*) yang setuju pada realitas itu. *“to agree... with reality can only mean to be guided either straight up to it or into its surroundings, or to be put into such working touch with it as to handle, either it or something connected with it better than if we disagree”*

Baik teori koherensi maupun teori korespondensi, menurut James, hanya cocok untuk dipakai sebagai konsep transeksperensial (sesuatu yang melampaui pengalaman). Karena itu, ia mengajukan teori kebenaran pragmatis bahwa kebenaran itu hanya dapat dijabarkan secara pragmatis sejauh manusia baik secara aktual maupun mungkin bisa mempraktikkan dan membuktikannya. Keyakinan manusia bahwa ia terpuaskan, menjadi pusat pencarian makna kebenaran. Dan hal yang dipuaskan pastilah menyangkut tujuan dan maksudnya sendiri. Validitas terletak pada pengalaman konkret.

James memulai analisa teori kebenarannya dari konteks yang terbatas dari hidup seorang individu. Berawal dari serangkaian keyakinan yang secara memuaskan individu

lebih dari periode waktu yang terbatas, James membangun suatu ide yang secara progresif menunjukkan tingkatan kebenaran yang nantinya memuncak pada apa yang ia sebut kebenaran absolut. *“the absolutely true, meaning what no farther experience will ever alter, is that ideal vanishing point towards which we imagine that all our temporary truths will someday converge”*.

4. Dari Teori (Metode) Pragmatis ke Pragmatisme Praktis

Pengaruh pragmatisme awali lebih bisa diruntut dari pemikiran pragmatis John Dewey karena Dewey-lah yang secara tegas merumuskan tujuan filsafat adalah memberikan garis-garis pengarahan bagi perbuatan dalam kenyataan hidup. Dengan kata lain, filsafat digunakan sebagai dasar untuk perubahan sosial. Karena itu, ia ingin mereformasi sains, pendidikan dan politik yang merupakan tiga pilar utama institusi sosial. Ia peduli pada hak-hak individu berupa: a) potensi inteligensi yang dimurnikan; b) *common sense* yang kuat; c) keplastisan kodrat manusia; d) idealitas kemerdekaan subjektif. Empat kebaikan individual itu menentukan kebaikan-kebaikan sosial atau kultural yang mewujudkan dalam relasi keluarga dan persahabatan, seni, politik, ilmu pengetahuan, pemerintahan demokratik, dll. Sampai akhir hayatnya, Dewey konsisten memperjuangkan

reformasi sosial di negerinya maupun di luar negeri melalui dua jalan, yakni 1) perbaikan sekolah-sekolah berbasis pada konsepsi yang lebih modern tentang kodrat manusia, dan 2) meningkatkan demokratisasi dalam kebijakan pemerintah dengan semakin meningkatkan partisipasi rakyat di bidang politik, sosial ekonomi dan sumber daya kultural.

Dewey juga menjadi sangat terkenal karena pandangan-pandangannya tentang filsafat pendidikan karena mempengaruhi perkembangan pendidikan modern di Amerika. Ketika ia pertama kali memulai eksperimennya di Universitas Chicago, ia telah mulai mengkritik tentang sistem pendidikan tradisional yang bersifat determinasi. Sekarang ini, pandangannya tidak hanya digunakan di Amerika, tetapi juga di banyak negara lainnya di seluruh dunia. Ia mengkritik praksis pendidikan yang hanya menekankan pentingnya peranan guru dan mengesampingkan para siswa dalam sistem pendidikan. Penyiksaan fisik dan indoktrinasi dalam bentuk penerapan doktrin-doktrin menghilangkan kebebasan dalam pelaksanaan pendidikan. Tak lepas dari kritiknya juga yakni sistem kurikulum yang hanya “ditentukan dari atas” tanpa memperhatikan masukkan-masukkan dari bawah. Baginya, pendidikan penting karena mengubah dan membaharui

suatu masyarakat. Ia begitu percaya bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana untuk peningkatan keberanian dan disposisi inteligensi yang terkonstitusi. Pendidikan membangun kesadaran akan pentingnya pengormatan pada hak dan kewajiban yang paling fundamental dari setiap orang.

Baginya ilmu mendidik tidak dapat dipisahkan dari filsafat. Maksud dan tujuan sekolah adalah untuk membangkitkan sikap hidup yang demokratis dan untuk mengembangkannya. Pendidikan merupakan kekuatan yang dapat diandalkan untuk menghancurkan kebiasaan yang lama, dan membangun kembali yang baru. Bagi Dewey, lebih penting melatih pikiran manusia untuk memecahkan masalah yang dihadapi, daripada mengisisnya secara sarat dengan formulasi-formulasi secara sarat teoretis yang tertib.

Pendidikan harus pula mengenal hubungan yang erat antara tindakan dan pemikiran, antara eksperimen dan refleksi. Pendidikan merupakan kontinuitas dari refleksi atas pengalaman juga akan mengembangkan moralitas dari anak didik. Dengan demikian, belajar dalam arti mencari pengetahuan, merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Dalam proses ini, ada perjuangan terus-

menerus untuk membentuk teori dalam konteks eksperimen dan pemikiran.

Bagi Dewey, kehidupan masyarakat yang berdemokratis dapat terwujud bila dalam dunia pendidikan hal itu sudah terlatih menjadi suatu kebiasaan yang baik. Ia menyatakan bahwa ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan bersama. Ia menekankan bahwa demokrasi merupakan suatu keyakinan, suatu prinsip utama yang harus dijabarkan dan dilaksanakan secara sistematis dalam bentuk aturan sosial politik. Maka, demokrasi bukan sekedar menyangkut suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi berarti setiap orang mengalami kebebasannya untuk berkreasi dan mengungkapkan pengalaman humanitasnya dalam partisipasi bersama. Sekolah menjadi medium yang mengungkapkan bagaimana hidup dalam suatu komunitas yang demokratis.

Dewey selalu mengatakan bahwa sekolah merupakan suatu kelompok sosial yang kecil (minoritas); yang menggambarkan atau menjadi cerminan dari kelompok

sosial yang lebih besar (mayoritas). Ia menegaskan bahwa sosialisasi nilai-nilai demokratis harus dilaksanakan oleh sekolah yang demokratis, antara lain dengan menekankan pentingnya kebebasan akademik dalam lingkungan pendidikan. Ia dengan secara tidak langsung menyatakan bahwa kebebasan akademik diperlukan guna mengembangkan prinsip demokrasi di sekolah yang bertumpu pada interaksi dan kerjasama, berdasarkan pada sikap saling menghormati dan memperhatikan satu sama lain; berpikir kreatif menemukan solusi atas problem yang dihadapi bersama, dan bekerjasama untuk merencanakan dan melaksanakan solusi. Secara implisit hal ini berarti sekolah yang demokratis harus mendorong dan memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, merencanakan kegiatan dan melaksanakan rencana tersebut.

Kontribusi Dewey bagi perkembangan kebudayaan Amerika yang paling besar adalah formulasinya tentang filsafat yang harus terarah pada masalah-masalah sosial dalam setiap waktu dan berusaha untuk diklarifikasikan dengan masalah filsafat politik dan ekonomi. Dalam bahasa lain, tradisi epistemologi dan problem metafisika juga patut

diperhitungkan dalam tempat yang kedua. Semuanya berpengaruh pada atau membentuk konsep filsafat sosial.

Filsafat membawa pengaruh pada perkembangan pendidikan. Sebagai akibatnya pendidikan telah memberikan pertimbangan argumen. Liberalisme Dewey telah mempengaruhi bidang-bidang seperti religius, politik dan estetika. Hal ini juga bergeser pada ilmu pengetahuan sekaligus mewakili potensi-potensi yang ada pada budaya Amerika. Dari pragmatisme dan juga naturalisme serta evolusionisme Darwin, Dewey membangun suatu teori pengetahuan yang mengambil bagian dalam persaingan dualisme pikiran dan dunia, pikiran dan aksi, dan yang telah dipahami oleh Filsafat Barat sejak abad ke-17.

Untuk mewujudkan impiannya tentang pendidikan yang ideal, Dewey bereksperimen di “School of Dewey” pada tahun 1896. Ia membangun sekolah itu dengan semangat menumbuhkembangkan anak untuk mencapai aktualisasi dirinya sekaligus mengambil peran yang nyata dalam masyarakatnya. Dewey sangat menolak pendidikan formal yang memberikan materi yang terisolasi dari pengalaman hidup. Pendidikan yang demikian mengabaikan

kebutuhan sosial dan identitas kelompok. Belajar, bagi Dewey, bukan hanya kemahiran membaca.⁴⁷

Bagi Dewey, pendidikan formal dianggap gagal ketika mampu membuat anak menguasai informasi dan ketrampilan teknis tetapi tidak mampu mempengaruhi kecenderungan sosialnya. Pendidikan, bagi Dewey, merupakan medium untuk melanjutkan kehidupan sosial. Sebagaimana kehidupan fisik membutuhkan nutrisi untuk bertahan hidup, kehidupan sosial membutuhkan pendidikan untuk keberlanjutannya.⁴⁸ Pendidikan menjaga keberlanjutan hidup sosial melalui komunikasi yang terjadi di dalamnya. Komunikasi menjadi jembatan penting untuk meningkatkan kualitas pengalaman orang muda. Kontribusi pemikiran Dewey pada pendidikan ini sekaligus merupakan usaha untuk membuat pragmatisme menjadi semakin aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- COPLESTON, FREDERICK, *The History of Philosophy vol. VIII*, Doubleday, New York, 1994 (image edition)
- DEWEY, JOHN, *Democracy and Education*, Aakar Books, Delhi 2004

⁴⁷ JOHN DEWEY, *Democracy and Education*, Aakar Books, Delhi 2004, 9

⁴⁸ *Ibid.*, 9-10

FRIEDMAN, RANDY L, *Deweyan Pragmatism*, William James Studies, diunduh dari <http://williamjamesstudies.org/1.1/friedman.html> pada tanggal 20 Mei 2014, pk. 12.46

GONZÁLES, ÁNGEL LUIS, *Diccionario de filosofía*, Eunsa, Pamplona, 2010

JAMES, WILLIAM, *Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking*, edited and with an introduction with Louis Menand, digital version from <http://www.guttenberg.org>. Diunduh pada tanggal 20 Mei 2014, pk. 14.34

MARGOLIS, JOSEPH, “The First Pragmatists”, dalam MARSOOBIAN, ARMEN T. and RYDER, JOHN (eds.), *The Blackwell Guide to American Philosophy*, Blackwell Publishing, New York, 2004, p. 36

MARGOLIS, JOSEPH and JOHN R. SHOOK (.ed), *A companion to Pragmatism*, Blackwell Publishing Ltd, United Kingdom 2006

PEIRCE, CHARLES SANDERS, “What Pragmatism Is”, dalam *The Monist*, 15:2 (April 1905), pp. 161-181

PEIRCE, CHARLES SANDERS, “How To Make Our Ideas Clear” dalam Popular Science Monthly 12 (January 1878), digital version

Standford Encyclopedia of Philosophy, “Charles Sanders Peirce”, diunduh dari <http://plato.stanford.edu/entries/peirce/> pada tanggal 20 Mei 2014, pk. 13.02

_____, “William James”, diunduh dari <http://plato.stanford.edu/entries/james/> pada tanggal 20 Mei 2014, pk. 13.21

PERKEMBANGAN PRAGMATISME

Oleh:

Anastasia Jessica A.S. dan Aloysius Widyawan L.

Pendahuluan

Pengaruh pragmatisme menurun selama awal abad ke 20, tetapi mulai mengalami kejayaan sejak tahun 1970an dengan meningkatnya filsuf yang menulis dan menggunakan gagasan pragmatisme klasik. Pragmatisme C.S. Peirce, khususnya kontribusinya pada logika menginspirasi para filsuf analitik. W.V.O Quine, seorang logikawan dan filsuf Amerika misalnya, menyusun artikel “*two dogmas of empiricism*” yang menantang kekakuan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman dalam aliran empirisme dengan menawarkan warisan pragmatisme. Hilary Putnam yang dikenal sebagai tokoh neo-pragmatisme dalam bidang filsafat ilmu, menggunakan pandangan pragmatisme untuk mengatasi kekurangan relativisme dan realisme. Richard Rorty, seorang filsuf Amerika era abad 20-an, lebih radikal lagi, ia menolak segala bentuk teori sebagai konsekuensi dari teori kebenaran yang dianut pragmatisme. Para pemikir pragmatisme baru (neo-pragmatisme) juga dipengaruhi oleh Pragmatisme John Dewey. Pragmatisme John Dewey yang

menekankan relasi manusia dengan lingkungannya menginspirasi George Herbert Mead untuk mencetuskan psikologi sosial. Teori psikologi sosial menyatakan bahwa pemahaman akan diri dan dunia bukanlah bawaan biologis tetapi hasil dari interaksi sosial. Pragmatisme William James yang berusaha menggunakan gagasan pragmatisme C.S Peirce untuk kajian yang lebih luas (meliputi moral, humanisme, religi) juga telah menginspirasi para pemikir pragmatisme baru. Jürgen Habermas misalnya, menggunakan pragmatisme untuk memahami pengetahuan kita akan dunia objektif dan tindakan-tindakan komunikatif kita dengan sesama.

Pertanyaan yang muncul dalam bahasan perkembangan pragmatisme ini ialah “bagaimana pengaruh gagasan pragmatisme awal pada pemikiran-pemikiran berikutnya?” serta “bagaimana analisis kritis terhadap perkembangan pragmatisme ini?” Dalam tulisan ini, perkembangan pragmatisme yang akan dibahas ialah perkembangan pada bidang epistemologi dan filsafat ilmu, psikologi serta sosial-politik.

1. Pengaruh Perkembangan Pragmatisme pada Bidang Epistemologi dan Filsafat Ilmu

Realisme Internal Hilary Putnam

Seperti William James, para pemikir neo-pragmatisme termasuk Hilary Putnam, W.V. Quine dan Richard Rorty menolak konsep tradisional yang memandang filsafat sebagai *Master Science* yang menyediakan dasar ontologis dan epistemologis bagi ilmu-ilmu lain. Hilary Putnam⁴⁹, sebagaimana pragmatisme awali, berusaha meninjau ulang kejelasan keyakinan dan gagasan-gagasan. Hilary Putnam ialah filsuf Amerika yang banyak menulis karya di bidang filsafat matematika, filsafat ilmu alam, filsafat bahasa dan filsafat pikiran (*philosophy of mind*). Kontribusi Putnam pada pragmatisme terletak pada konsep realisme internal-nya.

⁴⁹ Hilary Putnam lahir pada 31 juli 1926 di Chicago Illinois. Putnam belajar matematika dan filsafat di Universitas Pennsylvania. Ia menerima gelar PhD dalam bidang filsafat tahun 1951 dari Universitas California di Los Angeles, ketika ia bekerja dengan positivis logis Hans Reichenbach. Putnam mengajar di Northwestern and Princeton Universities hingga 1961. Putnam adalah seorang Profesor Filsafat ilmu di MIT sebelum bergabung dengan fakultas filsafat di Universitas Harvard di tahun 1976. Putnam juga merupakan Profesor logika matematika di Harvard. Bdk. HARVEY J. CORMIER, "Hilary Putnam" dalam *A Companion to Pragmatism*, John R. Shook dan Joseph Margolis (.eds), Blackwell Publishing, USA 2006, 108

Putnam mempertanyakan bagaimana kita dapat mengetahui gagasan-gagasan epistemik seperti “benar”, “terverifikasi”, “pernyataan yang sah” atau “dapat dipertanggungjawabkan”. Gagasan epistemik tersebut dapat dijawab dengan bersandar pada rasionalitas. Terbentuknya ide-ide rasionalitas kita dipengaruhi oleh bahasa, budaya, tradisi dan praktik-praktik kehidupan konkret. Tetapi di pihak lain, ide-ide rasionalitas juga dipengaruhi penilaian-penilaian individual. Konsep internal realisme yang ditawarkan Putnam berusaha mengakomodasi pengaruh pembentukan rasionalitas baik dari praktik sosial maupun dari penilaian individual.

Putnam tidak ingin terjebak pada realisme metafisik ataupun relativisme. Realisme metafisik memandang “dunia terdiri dari objek-objek yang pada dasarnya tidak tergantung dari akal budi” dan bahwa “hanya ada satu saja deskripsi yang lengkap dan benar tentang dunia tersebut”. Relativisme di pihak lain, adalah gagasan yang menganggap bahwa tidak mungkin ada standar rasionalitas dan kebenaran yang

mengatasi komunitas linguistik dan budaya partikular.⁵⁰

Bagi Putnam, keduanya sama-sama tidak koheren. Realisme metafisik mengasumsikan suatu teori yang seolah bisa membuat kita melihat dengan posisi seperti mata Tuhan (*God's Point of View*). Posisi kita dalam realisme metafisik seolah mampu menangkap dunia yang sesungguhnya secara keseluruhan.⁵¹ Sekaligus realisme metafisik mempunyai kekurangan yaitu tidak ada realitas yang sungguh independen dari pengamat. Relativisme, di sisi sebaliknya, tidak melihat perbedaan antara keyakinan yang memang benar dengan keyakinan yang seolah-olah benar. Putnam berusaha memecahkan ketegangan antara realisme metafisik dan relativisme dengan menawarkan pandangan realisme internal. Realisme internal menyatakan bahwa ada norma yang mengatur semua aktivitas rasional, namun demikian, norma ini diwujudkan dalam budaya-budaya tertentu dalam berbagai cara, tergantung pada kondisi

⁵⁰ HILARY PUTNAM, *Pragmatism and Realism*, James Conant dan Urszula M. Żegleń (eds), Taylor & Francis e-Library, 2005, 5

⁵¹ HARVEY J. CORMIER, *Op.Cit.*, 113

historis.⁵² Ibarat permainan, ada banyak jenis permainan dengan aturan main yang berbeda-beda, misalnya permainan catur, sepak bola, basket, monopoli, ular tangga atau *brigde*. Sekalipun berbeda jenis dan aturan, tetapi kita bisa menyebut hal-hal tersebut sebagai permainan. Mengapa demikian? sebab ada *family resemblance* (keserupaan keluarga) dalam jenis-jenis tersebut yang membuat kita bisa menyebutnya sebagai permainan.⁵³ Putnam dalam pandangan realisme internal memperhitungkan penilaian-penilaian individual tentang prinsip-prinsip umum seperti rasionalitas tanpa menjadi seorang yang relativis.

Putnam memadukan pragmatisme dengan kuliah yang ia dapatkan dari Kant dan Wittgenstein. Putnam berhutang pada Kant khususnya dalam rumusan ‘konstruktivis’ awal dalam realisme internalnya. Putnam mengikuti pragmatis klasik (Peirce, James, John Dewey) dalam hal terus melihat ulang keyakinan saintifik dan filosofis serta teori.

⁵² HILARY PUTNAM, Op.Cit., 4

⁵³ Konsep *family resemblance* ada dalam teori *language games* (permainan bahasa) yang dikemukakan oleh Ludwig Wittgenstein (filsuf bahasa asal Austria yang hidup dalam kurun waktu 1989-1951).

Keyakinan dan teori Putnam mengandaikan pemikiran tentang ‘kebaikan’ (*Goodness*). ‘Kebajikan’ sebagai nilai *pragmatic guiding value* harus selalu merefleksikan pengetahuan kekinian dan kekayaan budaya, sosial dan konteks historis tindakan saintis dan filsuf. Namun, ini bukan berarti, nilai tergantung budaya, relatif tergantung waktu dan lokalitas tertentu. Pandangan realisme internal Putnam melihat bahwa tetap ada norma yang mengatur semua aktivitas rasional, tetapi norma ini diwujudkan dengan cara yang berbeda-beda sesuai konteks budaya.⁵⁴

Teori Putnam, sebagaimana teori pragmatis yang lain, sering salah dibaca sebagai relativisme. Pragmatisme menolak asumsi bahwa hanya ada satu kebenaran dan teori saintifik yang lengkap, satu kebenaran dan keyakinan tentang dunia yang lengkap. Pragmatisme bahkan merekomendasikan agar kita tetap terbuka pada konsep pluralitas tentang dunia. Putnam setuju dengan pendapat bahwa kebenaran bukanlah gagasan normatif, tetapi putnam

⁵⁴ *Ibid.*

menekankan bahwa normatifitas tidak dapat direlatifkan tergantung pada budaya atau praktek.⁵⁵

Berdasar pada pandangan yang menolak realisme metafisik dan relativisme, Putnam menunjukkan bagaimana sains seperti fisika sesungguhnya tergantung pada justifikasi yang non-saintifik. Bagi Putnam, sains membutuhkan justifikasi informal tentang ke-masuk-akal-an (plausibility), kesederhaan (simplicity) teori, koherensi, dsb.⁵⁶ Putnam menilai sains eksak yang menghabiskan tenaga mencari rasionalitas merupakan sebuah kesalahan sebab dalam sains juga terdapat andaian-andaian yang tidak saintifik seperti justifikasi informal yang disebut di atas. Dengan mengakui justifikasi yang non-saintifik, sains membuka ruang bagi prediksi dan pernyataan filosofis.

Pragmatisme Quine dalam Sains

Artikel W.V.O Quine⁵⁷ yang memberi sumbangan bagi Pragmatisme berjudul “*Two Dogmas of*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, 15

⁵⁷ Willard Van Orman Quine, Logikawan dan filsuf Amerika. Ia terkenal sebagai filsuf analitik pada paruh kedua abad 20. Quine lahir pada 25

Empiricism". Dalam tulisan tersebut, Quine menyatakan bahwa Empirisme modern dikondisikan oleh 2 dogma besar. Pertama, perbedaan mendasar antara kebenaran yang analitik (makna tidak tergantung fakta tetapi kebertautan logis antar pernyataan) dan kebenaran yang sintetik (makna berdasar pada fakta). Kedua, dogma reduksionisme yang meyakini setiap wacana yang bermakna dapat diterjemahkan dalam bahasa. Bagi Quine, kedua dogma tersebut, sama-sama tidak sempurna. Mengabaikan keduanya akan mengakibatkan kaburnya batas antara metafisika spekulatif dan sains alam. Efek yang lain dari pengabaikan keduanya ialah pergeseran pandangan menuju pragmatisme.⁵⁸

juni 1908 di Akron, Ohio. Tahun 1926, Quine masuk ke Oberlin College, dengan mayor studi: matematika. Quine mempelajari masterpiece Alfred North Whitehead dan Bertrand Russell, *Principia Mathematica*. pada tahun 1930 mengirim rancangan (honors) thesis dengan fokus pada logika matematika secara umum dan *Principia Mathematica* secara khususnya. Quine merupakan murid Rudolf Carnap yang merupakan tokoh positivisme logis. Quine memberikan kontribusi dalam bidang metafisika, epistemologi, etika, philosophy of mind, philosophy of language, logika. Karyanya diterbitkan dalam banyak bahasa. Quine meninggal pada bulan desember tahun 2000. Bdk. ROGER F. GIBSON Jr, "W.V.Quine" dalam *A Companion to Pragmatism*,..., 101

⁵⁸ W.V.O. QUINE, "*Two Dogmas of Empiricism*" dalam *The Philosophical Review* 60 (1951), 20-43, digital version, 1

Quine menyatakan sia-sia untuk mencari batas antara pernyataan sintetik dan pernyataan analitik. Di satu sisi, pengalaman berperan membentuk pernyataan dalam ilmu pengetahuan. Tidak ada pernyataan yang kebal terhadap revisi. Jika ditemukan pengalaman yang bertentangan dengan pernyataan, maka pernyataan tersebut harus direvisi. Revisi bahkan terjadi pada hukum logika, mekanika kuantum dan prinsip fisika dan astronomi seperti pergeseran Kepler yang meniadakan Ptolemy, atau konsep Einstein yang menggeser konsep Newton, atau teori Darwin yang menggantikan pandangan Aristoteles.⁵⁹ Namun demikian, di sisi lain, sekalipun pernyataan memiliki hubungan yang dekat dengan pengalaman, Quine menyatakan kita hanya dapat memperkirakan yang terjadi di hari depan sebagai sebuah kemungkinan, tidak lebih dari itu.

Bagi Quine, sebagai seorang empiris, skema konseptual sains dipandang sebagai alat, yang fungsi utamanya ialah untuk memprediksi pengalaman masa depan berdasarkan pengalaman masa lampau. Objek fisika secara konseptual menjadi media yang

⁵⁹ *Ibid.*, 22

meyakinkan—bukan dalam arti sebagai pengalaman tetapi hanya sebagai asumsi yang tidak dapat direduksi lagi. Keyakinan terhadap objek fisika dapat dibandingkan secara epistemologis dengan kepercayaan terhadap dewa-dewa Homer. Bagi Quine, dalam pijakan epistemologis objek fisika dan dewa-dewa berbeda hanya dalam derajat dan bukan jenis. Kedua entitas tersebut memasuki konsepsi kita hanya sebagai asumsi kultural. Mitos objek fisika dianggap lebih superior sebab memiliki bukti daripada mitos lain sebagai alat untuk mengerjakan secara lebih teratur struktur dalam pengalaman yang berubah-ubah.⁶⁰

Sebagai analogi, Quine mengambil andaian angka rasional dan irasional.⁶¹ Mengembangkan penalaran teori aljabar, dan menemukan hal kompleks yang tidak meyakinkan, karena fungsi seperti akar kuadrat sebenarnya kurang didukung argumen. Akhirnya kita menemukan bahwa aturan dalam aljabar dapat disederhanakan secara konseptual dengan

⁶⁰ *Ibid.*, 16

⁶¹ bilangan irasional adalah bilangan riil yang tidak bisa dibagi (hasil baginya tidak pernah berhenti). Contoh bilangan irasional adalah π , $\sqrt{2}$ dan e . π sebenarnya tidak 3,14 tapi 3,1415926535.... $\sqrt{2} = 1,4142153623...$ dan bilang $e : 2,7182818$

entitas mitis, yang disebut angka irasional. Penggabungan antara objek fisika dan penyederhanaan dari angka irasional ke angka rasional dalam teori membuat kita lebih mudah untuk menganalisis. Objek fisika pada tataran atomis juga diasumsikan untuk membuat hukum objek makroskopik. Asumsi dan penyederhanaan membuat objek atomis lebih sederhana dan lebih teratur. Kita tidak harus berharap atau menuntut definisi yang penuh dari entitas atomis ini. Asumsi dan penyederhanaan dibuat untuk memudahkan analisis dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena penyederhanaan ini, secara epistemologis, bagi Quine, asumsi objek fisika dan dewa-dewa sama-sama merupakan mitos. Tidak ada yang lebih baik dan buruk. Perbedaan keduanya hanya pada derajat kedekatan dengan pengalaman inderawi.⁶²

Quine menegaskan bahwa perbedaan antara objek fisika dan mitos yang hanya pada derajat kedekatan pada pengalaman ini, mengakibatkan pergeseran menuju ke keputusan pragmatik untuk menyesuaikan hasil jalinan ilmu pengetahuan. Bagi

⁶² *Ibid.*, 24

Quine, pengetahuan merupakan sebuah tenunan yang di dalamnya perubahan-perubahan dibuat berdasarkan pertimbangan pragmatis. Sebelum Quine, para pemikir empirisme logis seperti R. Carnap dan Lewis telah mengambil posisi pragmatik dalam pertanyaan mengenai pilihan bentuk bahasa dan kerangka pikir saintifik. Namun demikian, pragmatisme mereka bertolak dari batas antara analitik dan sintetik. Quine menolak batas antara analitik dan sintetik ini. Quine mendukung pragmatisme. Bagi Quine, setiap manusia diberi warisan saintifik sekaligus rentetan stimulasi indrawi; dan pemahaman yang memandu manusia untuk membelokkan warisan saintifik tersebut sehingga cocok dengan penginderaan yang terus-menerus dan berjalan dengan cepat, di sinilah peran rasional dan pragmatik. *“Each man is given a scientific heritage plus a continuing barrage of sensory stimulation; and the considerations which guide him in warping his scientific heritage to fit his cotinuing sensory promptings are, where rational, pragmatic.”*⁶³

⁶³ W.V.O. QUINE, *“Two Dogmas of Empiricism”*,... ,25

Anti-teori Richard Rorty

Pragmatisme Richard Rorty⁶⁴ merupakan serangan terhadap epistemologi dan metafisika. Richard Rorty ialah seorang yang *Anti-theoreticism* dari pembicaraan epistemologi, metafisika, etik hingga politik-nya. Ini karena ketidakpercayaan Rorty pada teori. Sumbangan Rorty pada pragmatisme dituliskan dalam karyanya *The Consequences of Pragmatism*. Esai ini berusaha untuk menarik konsekuensi dari teori pragmatis tentang kebenaran. Kaum pragmatis meragukan bahwa ada unsur yang umum dalam berbagai pernyataan yang benar. Kaum pragmatis juga meragukan bahwa ada unsur umum yang sama dalam tindakan moral yang disebut terpuji. Bagi Rorty, kaum pragmatis memandang tindakan tertentu sebagai

⁶⁴ Richard Rorty merupakan filsuf kontemporer yang lahir di kota New York tahun 1931. Rorty ialah seorang profesor filsafat di *Princeton University* dari tahun 1961-1982, profesor ilmu-ilmu sosial di *University of Virginia* dari 1982-1998, dan sejak 1998 menjadi profesor *comparative literature* di *Stanford University*. Rorty pernah menjadi murid positivis logis, Rudolph Carnap ketika studi di *University of Chicago*. Rorty mengambil tesis mengenai Whitehead dan menulis disertasi dengan judul "*The Concept of Potentiality*". Rorty dikenal sebagai filsuf yang kontroversial karena serangannya terhadap epistemologi dan metafisika. Karyanya yang termasyur adalah *Philosophy and The Mirror of Nature* (1979). Dalam karya tersebut, Rorty menyatakan bahwa pengetahuan lebih merupakan praktek sosial daripada cermin alam semesta. Rorty menolak teori epistemologi yang berusaha mencari satu bangunan pengetahuan yang dapat mendeskripsikan alam secara persis layaknya sebuah cermin.

sesuatu yang baik untuk dilakukan, tergantung pada situasi. Mereka meragukan bahwa ada sesuatu yang umum dan bisa mengatakan apa yang membuat kesemuanya itu baik.

Rorty ragu akan Filsafat dalam artian sesuai dengan pemikiran Plato dan Kant, yang mempertanyakan mengenai pemikiran normatif (seperti kebenaran, rasionalitas, kebaikan) dengan harapan mematuhi norma seperti itu dengan lebih baik. Rorty membedakan penulisan *Filsafat* dengan *F* besar dan italic yang dimaksudkan sebagai posisi metafisis-epistemologis tradisional yang ditolak Rorty. Sedangkan, *filsafat* dengan huruf “f” kecil dan italic ialah filsafat yang dinilai Rorty bebas masalah dan bernilai untuk dilakukan sebab melihat segala sesuatu sederhana, tidak ada yang lebih mendasari dan saling berhubungan, “*seeing how things hang together*”. Bagi Rorty, Pragmatisme merupakan harapan terbaik bagi *filsafat* tapi bukan untuk *Filsafat*. Kaum Pragmatis berpikir bahwa *Filsafat* tradisional tidak akan mengatakan sesuatu secara benar hanya dengan berpikir tentang Kebenaran, atau berbuat baik dengan hanya berpikir tentang Kebaikan, atau menjadi

rasional hanya dengan berpikir tentang rasionalitas. Rorty mengkritik pemikiran Plato, tradisi Cartesian, dan Kantian. Bagi Rorty semuanya tidak bermanfaat. Pragmatis menyadari bahwa ia dapat melakukan filsafat yang terbaik dengan menjadi anti-Filsafat.⁶⁵ Penolakan Rorty akan Filsafat membuat Rorty mengajukan pemikirannya mengenai *post-philosophical Culture* (budaya setelah-filosofis).

Pertanyaan yang muncul mengenai *post-philosophical Culture* adalah apakah mungkin budaya dapat berlangsung tanpa Filsafat, tanpa usaha untuk mencari yang esensial? Dalam *Post-philosophical Culture* tidak ada bidang pengetahuan, ilmu atau profesi yang lebih superior dan menjadi dasar dari yang lain. Ilmu sejarah, politik, sastra tidak lebih rendah dari ilmu kimia, fisika atau biologi. Tidak ada seorang pendeta, fisikawan, penyair, atau aktivis partai yang dipikirkan sebagai yang lebih ‘rasional’ atau lebih ‘saintifik’ atau ‘lebih dalam’ dari orang lain. Tidak ada prinsip-prinsip pertama atau paling dasar dalam budaya ini. Juga tidak ada pengertian yang melampaui kriteria intra-

⁶⁵ KAI NIELSEN, “Richard Rorty” dalam *A Companion to Pragmatism*,...,130

disipliner, sebagai contoh, pendeta yang baik atau fisikawan yang baik. Dalam post-philosophical culture yang ada ialah transdisipliner, transkultural dan kriteria ahistoris.⁶⁶

Dalam *Post-Philosophical Culture* tidak ada orang yang paling mengetahui Kebenaran. Dengan demikian, tidak ada juga seorang ‘Filsuf’ yang dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana pengetahuan manusia dapat sungguh terhubung dengan realitas. Platonis melihat budaya ini sebagai budaya yang tidak memiliki struktur dan prinsip yang mengatur. Sedang, Positivis melihat budaya ini sebagai dekadensi karena tidak memiliki penghargaan terhadap fakta.⁶⁷

Apa yang sesungguhnya diharapkan dalam *Post-Philosophical Culture* ini? Manusia diharapkan tidak hanya menemukan kebenaran tetapi menciptakan kebenaran. Dalam *post-philosophical culture*, manusia tidak hanya membaca melalui buku-buku di perpustakaan tetapi diharapkan menambah jilid baru. Manusia berusaha mendeskripsikan diri dan dunia

⁶⁶ RICHARD RORTY, *The Consequences of Pragmatism*, University of Minnesota Press, United States of America 1982, xxxviii

⁶⁷ Ibid., xxxiv

sesuai dengan pemahaman dan pengalaman masing-masing.⁶⁸

Post-philosophical culture tidak bertujuan untuk menampilkan teori yang dapat menjelaskan semuanya. Dalam budaya ini, kriteria dilihat seperti kaum pragmatis memandangnya yaitu sebagai tempat-pemberhentian sementara untuk tujuan kebergunaan. Dalam pemikiran pragmatis, kriteria merupakan kriteria yang bukan bergelut dengan interpretasi, tetapi untuk mendapatkan sesuatu yang dapat dilakukan. Semua kriteria dalam *post-philosophical culture* dibuat di dalam praktek sosial. Tidak ada standar rasionalitas dalam menentukan kriteria tersebut. Semua argumen patuh pada kesepakatan masyarakat.⁶⁹

Post-philosophical Culture tidak memiliki hubungan dengan sesuatu yang berada melampaui dirinya. Budaya ini tidak seperti positivisme yang mengagungkan sains. Pragmatisme yang diterapkan dalam *post-philosophical culture* tidak seperti sains dalam positivisme yang diperlakukan sebagai idol (berhala) yang menggantikan tuhan. Dalam positivisme, sains,

⁶⁸ Ibid., xl

⁶⁹ Ibid., xli

sastra, seni, etika dan segala penyelidikan haruslah merupakan pendekatan saintifik. Berbeda dari itu, *post-philosophical culture* yang menerapkan pragmatisme menganggap berbagai penyelidikan memiliki pendekatan yang khas dan saling melengkapi satu sama lain. Fisika adalah jalan untuk meraih beragam bagian kecil dari alam semesta, etika mencoba bagian lain, matematika membantu fisikawan melakukan kerjanya, sastra dan seni juga membantu etika melakukan kerjanya. Dengan demikian, Rorty ingin menegaskan bahwa semua pertanyaan yang diajukan dalam penyelidikan adalah semua pertanyaan tentang hal yang dapat membantu kita untuk mendapatkan hal yang kita inginkan.⁷⁰

2. Pengaruh Perkembangan Pragmatisme pada Psikologi Sosial Herbert Mead

Herbert Mead⁷¹ terinspirasi oleh pemikiran teori instrumental John Dewey. Teori instrumental

⁷⁰ RICHARD RORTY. *The Consequences of Pragmatism*. xlii-xliii

⁷¹ George Herbert Mead lahir 27 februari 1863 di South Hadley, Massachusetts. George herbert Mead lulus sarjana dari Oberlin College di tahun 1883. Mead memulai karir profesional pada 1891 di Universitas Michigan, di mana ia mengajar filsafat dan psikologi dengan kepala departemen dipegang oleh John Dewey. Mead bersama Dewey pernah mendirikan *Chicago School of Pragmatism*. Dewey mengundurkan diri dari

menyatakan aktivitas berpikir adalah sarana untuk memecahkan masalah. Dewey menolak setiap pemisahan teori dengan praktek, berpikir dan bertindak. Pengenalan manusia bukan pencerminan dari dunia luar, tetapi hasil aktivitas manusia sendiri. Manusia terlibat aktif dalam proses pengenalan.⁷²

Mead dipengaruhi oleh Dewey. Bagi Mead, Pikiran (*mind*) adalah sebagai suatu proses sosial dan bukan sebagai benda. Pikiran muncul dan berkembang dalam proses sosial dan merupakan bagian integral dalam proses sosial. Cara manusia mengenali dunia dan diri sendiri berhubungan erat dengan masyarakatnya. Sama seperti Dewey, Mead juga melihat pikiran dan kedirian menjadi bagian perilaku manusia, yaitu bagian interaksinya dengan orang-orang lain.

Mead memiliki asumsi bahwa manusia secara kualitatif berbeda dengan hewan. Perbedaan kualitatif

posisinya di Universitas Chicago tahun 1904, diikuti dengan ketidaksepatakannya dengan Pimpinan Universitas atas sekolah laboratorium eksperimental Dewey. Dewey, sesudah itu pindah ke Universitas Columbia, sedang Mead tetap menjadi anggota Universitas Chicago hingga akhir hidupnya di tahun 1931.

⁷² GARY A. COOK, "George Herbert Mead" dalam *A Companion to Pragmatism*, John R. Shook dan Joseph Margolis (eds), Blackwell Publishing, USA 2006, 75

ini dapat dicontohkan dalam dinamika proses interaksi antar sesama spesies yang diungkapkan dalam *percakapan gestur* (*The Conversation of Gesture*). Pada *percakapan gestur*, tindakan individu yang diekspresikan sebagai gerak sosial kemudian mengundang respon dari yang lain. Andaikan tindakan awal yang direspon oleh individu kedua mengundang respon dari individu pertama dan seterusnya, hingga terjadilah *percakapan gestur* tersebut. Dinamika *percakapan gestur* pada hewan berbeda dari manusia. Ambil contoh tindakan antara anjing yang bertarung satu sama lain dan orang yang melihat kawannya mengepalkan tangan. Pada anjing, ketika salah satu anjing mulai menatap dan menggeram, maka anjing lain dengan bulu lehernya yang berdiri akan siap menyerang. Tidak ada kemungkinan lain selain menyerang dan bertarung. Tidak demikian dengan manusia, kepalan tangan orang lain dapat berarti ingin berkelahi tapi juga berarti memberi semangat. Pada hewan yang terjadi adalah *unconscious conversation of gestures*. Disebut *unconscious* (tidak disadari) karena walaupun yang satu merespon gestur yang lain, tetapi hewan tidak berpikir gestur itu sebagai tindakan yang bermakna. Berbeda dari hal tersebut, tindakan sosial manusia dapat

melebihi tahap ‘ketidaksadaran’ ini. Manusia dapat menangkap tindakan sosial sesamanya sebagai simbol yang bermakna. Simbol-simbol ini diartikan berdasarkan pemahaman secara sosial. Mead dalam *the mechanism of social consciousness*, menyatakan bahwa “manusia dapat menstimulasi dirinya sendiri sebagaimana ia menstimulasi orang lain dan dapat menjawab stimulasinya sendiri seperti ia menjawab stimulasi orang lain”. Keuntungan dari kemampuan ini ialah manusia dapat memerintahkan tindakannya berdasarkan respon sosial yang mungkin terjadi dari orang lain.⁷³

Teori psikologi sosial Herbert Mead menyatakan bahwa kesadaran diri lebih merupakan perolehan sosial daripada bawaan biologis manusia. Kita menjadi sadar akan diri kita sebagai objek sosial ketika mampu mengandaikan tindakan orang lain sebagai respon atas tindakan kita. Demikian juga, kemampuan pemikiran rasional kita dapatkan dari simbol-simbol dalam bahasa yang memperoleh pemaknaan secara sosial. Simbol-simbol itu kemudian kita gunakan untuk menginterpretasi pengalaman dan

⁷³ GARY A.COOK, “George Herbert Mead”,... ,72-73

menganalisis masalah yang dihadapi dalam tindakan kita. Mead juga menyatakan bahwa praktek dari kemampuan ini menciptakan kemahiran diri individual untuk memahami struktur sosial, yang kemudian berkembang menuju *inner dialogue of human thought*, dan menjadi basis dari organisasi sosial khas manusia.⁷⁴

Kemudian, di mana letak pragmatisme Mead? Pragmatisme, bagi Mead, memiliki dua pengertian. Pertama, psikologi yang menempatkan pikiran manusia dan kecerdasan di dalam tindakan atau perilaku. Kedua, pandangan tentang pengetahuan yang didasarkan penyelidikan eksperimental dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Herbert Mead merujuk pada pemikiran Charles Sanders Peirce mengenai keyakinan yang mengarah pada kebiasaan bertindak, William James mengenai keyakinan yang membawa perubahan dan kegunaan bagi hidup serta John Dewey mengenai interaksi manusia dengan lingkungannya dan kebergunaan intelegensi untuk memecahkan masalah.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*, 74

⁷⁵ *Ibid.*, 75-76

Mead memperlebar pandangan John Dewey dalam penyelidikan tentang bagaimana pengalaman sosial seseorang membentuk fungsi diri manusia untuk memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat. Mead berusaha menunjukkan bagaimana pola tingkah laku sosial kita—khususnya pelaksanaan dari kapasitas kita untuk mengambil peran perilaku orang lain—memainkan peranan penting dalam membentuk pengalaman perseptual terhadap objek fisik dalam ruang dan waktu. Oleh karena berusaha menempatkan pikiran manusia dan objeknya dalam proses sosial yang terus berkembang, pemikiran Mead sering disebut Pragmatisme sosial.

3. Pengaruh Perkembangan Pragmatisme pada Bidang Sosial

Argumen Transendental Pragmatis Jürgen Habermas

Ketika menyusun teori-teori sosialnya, Jürgen Habermas⁷⁶ dipengaruhi secara langsung oleh tulisan-tulisan

⁷⁶ Jürgen Habermas lahir pada tanggal 1 Juni 1929 di Düsseldorf, dari keluarga Jerman yang menerima begitu saja realitas Nazi tanpa secara aktif terlibat dalam proses politik. Sebagaimana pemuda Jerman yang lain, pada tahun 1945, ia bergabung dengan *Hitler Jugend*, gerakan kaum muda Nazi. Setelah perang, ia menjadi sadar akan kekejaman Nazi,

Peirce dan Mead melalui dorongan dan interpretasi kawannya, Karl-Otto Apel. Beberapa pemikir pragmatis lain memberi pengaruh tidak langsung seperti Lawrence Kohlberg dan Michael Dummet. Dari Peirce, ia terinspirasi pada konsepsi-epistemologis tentang kebenaran, terutama ketika berpendapat bahwa kognitivisme moral adalah suatu posisi filosofis yang dapat dipertahankan/dibela. Sementara dari Mead, ia terinspirasi oleh pemikiran Mead tentang interaksionisme sosial untuk membangun teorinya tentang tindakan komunikatif (*Theory of Communicative Action*). Di samping terinspirasi oleh pemikiran pragmatis, Habermas juga memberi kontribusi berarti bagi perkembangan tradisi

khususnya genosida terhadap kaum Yahudi. Ia kemudian belajar filsafat di Göttingen, Zurich, and Bonn dan akhirnya meraih gelar doktor pada tahun 1954 dengan disertasi tentang Schelling. Ia kemudian bergabung dengan *Institute for Social Research* di Frankfurt sebagai asisten Adorno (1903-1969). Di sana, ia dipengaruhi oleh Adorno dan Horkheimer (1895-1973) dalam tradisi teori kritik mazhab Frankfurt sampai akhirnya, ia pun ditunjuk menjadi suksesor institut tersebut di kemudian hari. Ia pernah pula menjadi profesor di beberapa universitas di Jerman seperti di Marburg, Frankfurt, dan ketua Max Planck Institute. Pada tahun 1960, ia terlibat aktif dalam gerakan sosial mahasiswa, namun kemudian kecewa karena gerakan itu menjadi sangat radikal. Ia menjadi saksi bersatunya Jerman, tetapi mengkritik proses penyatuannya. Pada tahun 1990-an, ia sempat belajar tradisi demokrasi dan liberal konstitusional Amerika Serikat sambil tetap mengkritik tradisi kapitalistik dan liberalis. Ia di dikenal sebagai sosiolog dan filsuf Jerman generasi kedua Mazhab Frankfurt sekaligus dalam tradisi pragmatisme. Khususnya, ia dikenal sebagai pemikir teori-teori tentang rasionalitas komunikatif dan hal-hal terkait dengan ruang publik.

pragmatisme, terutama pada argumen-argumen yang ia sebut argumen transendental pragmatis. Akan tetapi, tidak semua pemikir sepaham bahwa Habermas bisa dikategorikan sebagai seorang pemikir pragmatis.⁷⁷

Argumen transendental pertama kali kita kenal melalui filsafat Kant. Kant menggunakan istilah (deduksi) transendental untuk menunjuk pada (kemampuan) intelek subjek yang berusaha mencapai pengetahuan tertentu yang tidak hanya melalui persepsi inderawi seperti pemikiran para

⁷⁷ Mitchell Aboulafia memaparkan bahwa ada beberapa pandangan terkait dengan keterlibatan Habermas sebagai bagian dari gerakan pragmatis. Aboulafia mencatat bahwa dalam suatu wawancara, Habermas melalui temannya Karl-Otto Aple, mengakui pengaruh Peirce, Mead, dan Dewey. Baginya, para pragmatis Amerika itu adalah jawaban produktif ketiga atas Hegel setelah yang pertama Marx, kemudian Kierkegaard. Richard Bernstein malah menyebut Habermas sebagai “the real pragmatist”. Baginya, Habermas memiliki visi yang berpusat pada tradisi pragmatik, khususnya untuk memahami rasionalitas sebagai sesuatu yang secara intrinsik dialogal dan komunikasi untuk menghasilkan konsekuensi-konsekuensi etis dan politis. Tradisi pragmatik Habermas dipertajam oleh analisa kritisnya terhadap tradisi pemikir-pemikir Jerman mulai dari Kant melalui Hegel sampai Marx. Akan tetapi, Hans Joas menolak anggapan Habermas sebagai seorang pragmatis. Menurutnya, Habermas sangat sedikit sekali mengadaptasi pragmatisme dalam keseluruhan teorinya. Baginya, pragmatisme hanya digambarkan secara sangat sedikit dan sederhana oleh Habermas sebagai bagian dari teori tindakannya (lih. Mitchell Aboulafia, “Introduction”, dalam Mitchell Aboulafia, Myra Bookman, and Catherine Kemp (eds.), *Habermas and Pragmatism*, London and New York: Routledge, 2002

filosof empirik (Hume dkk), melainkan juga melalui konseptualisasi yang terjadi di pikiran subjek. Dapat dikatakan bahwa konseptualisasi Kantian itu dibangun secara internal dalam pikiran manusia sehingga inti pemikiran Kant ini cenderung psikologistis atau menekankan aspek kesadaran individual subjek.

Habermas sepakat dengan Kant bahwa manusia berupaya menggapai pengetahuan dengan jalan deduksi transendental tersebut. Akan tetapi, Habermas menyadari bahwa ada satu aspek yang terlewatkan oleh Kant, yakni aspek sosial. Habermas menambahkan “social turn” dalam epistemologi yang diakibatkan oleh tradisi pragmatis. Argumen transendental bukan hanya suatu struktur psikologis belaka yang mencapai status postulat yang secara transendental harus ada, tetapi Habermas menambahkan (tujuan-tujuan) praksis sosial. Menurutnya, semua ilmu pengetahuan tumbuh dan berkembang pada konteks sosial tertentu. karena itu, ilmu pengetahuan itu mencerminkan kepentingan-kepentingan praktis dari kelompok sosial tertentu. Kepentingan-kepentingan itu tidaklah bersifat sewenang-wenang, tetapi merupakan hasil pencapaian struktur kognitif sosial yang memiliki konteks sosial tertentu

pula. Jelas di sini bahwa Habermas memasukkan aspek sosial praktis pada epistemologi.

Di samping argumentasi pragmatis, kita juga bisa melihat bahwa pragmatisme merupakan suatu metode analisa kritis yang digunakan oleh Habermas. Habermas menyusun teori kritisnya dengan merespon aporia pesimistis dari generasi pertama para pemikir Mazhab Frankfurt.⁷⁸ Pendekatan metodologisnya dimulai dari suatu analisa kritis bahasa dan maknanya. Ia menyebut analisa kritisnya ini “*Linguistic Turn*”⁷⁹ dan mengontraskan pemikirannya ini dengan paradigma filsafat kesadaran yang didasarkan pada asumsi-asumsi dasar yang pasti, yakni Subjektivitas Cartesian, dualisme metafisika cartesian, distingsi metafisik antara Subjek-Objek, dasar pengetahuan pada data inderawi, dankebutuhan akan “Filsafat Pertama” yang akan menyajikan pembuktian akan validitas penyelidikan saintifik.

⁷⁸ Bdk. MARIAN HILLAR, “Jürgen Habermas: A Practical Sense Sociologist and A Kantian Moralist in a Nutshell”, Center o Philosophy and Socinian Studies, diunduh dari <http://www.socinian.org> pada tanggal 3 September 2014, pukul 22.29

⁷⁹ Ketika bicara konseptualisasi, Kant membuka diskusi baru tentang “*linguistic turn*” yang kemudian dibahas secara khusus oleh filsafat analitik sejak awal abad ke-20. Hal ini bisa diamati misalnya dari pernyataan Wittgenstein bahwa batas bahasa adalah batas duniaku, batas segala hal yang kuketahui. Mau tidak mau, bahasan tentang pengetahuan dan dunia menyangkut pula beberapa teori makna. Habermas menolaknya. Karena itu, ia mengajukan paradigma baru yang ia sebut *linguistic turn*.

Bagi Habermas, Filsafat Kesadaran macam ini membangun kriteria pengetahuan yang benar, atomisme sosial (bahwa komunitas dibangun oleh individu-individu yang berelasi satu sama lain, sedangkan subjek-subjek individual tidak dibangun oleh relasi antar mereka atau dengan masyarakat secara keseluruhan). Masyarakat hanyalah melayani kebutuhan dan keinginan subjek. Masyarakat hanyalah sekumpulan persona, makro subjek.

Habermas menolak semua premis filsafat kesadaran semacam itu. Ia melihat bahwa masyarakat adalah medium tempat kita hidup. Dalam pandangannya, masyarakat bukanlah kumpulan atau kesatuan individu belaka, tetapi sesuatu yang jauh lebih kompleks, multifarious, struktur intersubjektif dengan berbagai macam hal berbeda yang saling tumpang tindih. Lebih jauh lagi, filsafat tidak memiliki prioritas di atas ilmu-ilmu pengetahuan alamiah.

Donald Davidson, misalnya, berpendapat bahwa interpretasi yang saling kita berikan pada perilaku linguistik satu dengan yang lain sangatlah ditentukan oleh kepastian (*evidence, belief*) yang tersedia bagi kita. Misalnya, satu ucapan berisi satu keyakinan bisa diinterpretasi macam-macam. Satu-satunya cara yang mungkin untuk bisa mengerti adalah

memilih/menyeleksi satu di antara sekian banyak kemungkinan interpretasi. Kriteria seleksi adalah seberapa jelas makna yang bisa ditangkap dan seberapa besar kebenaran dalam ucapan itu yang bisa ditangkap oleh individu tersebut. Prinsip ini ia sebut *Principle of Charity*.

Habermas mencari penjelasan yang berbeda. Ia lebih tertarik pada pembahasan epistemologi daripada pembahasan murni linguistik. Dalam berbagai esainya tentang kebenaran empiris, habermas biasanya memandang proposisi-proposisi sebagai pembawa kebenaran (*truth-bearer*). Ia mengatakan: saya menyatakan bahwa proposisi yang saya tegaskan adalah benar. Akan tetapi, dalam laporan awalnya, ia segera mengartikan kebenaran empiris dengan justifikabilitas ideal, yakni teori konsensus tentang kebenaran. Menurut teori tersebut, kondisi kebenaran proposisi adalah persetujuan potensial dari semua yang lain. Karena itu, pengertian pragmatis universal dari kebenaran dibatasi oleh kebutuhan untuk mencapai konsensus rasional. Formulasi semacam ini menunjukkan bahwa Habermas mengartikan makna kebenaran dengan hasil dari suatu konsensus rasional yang dimengerti dalam kaitan dengan situasi pembicaraan yang ideal. Akan tetapi, ia kemudian melihat kesulitan-kesulitan terkait dengan teori konsensus

dan ia tidak pernah lagi mengizinkan *Warbeitstheorien*, esai utamanya tentang teori konsensus tentang kebenaran dengan penegasan yang terjamin idealnya seperti dalam pemikiran Putnam atau Wright, teori konsensus yang menggunakan karakter transenden justifikasi kebenaran.

Habermas kemudian mengajukan suatu realisme epistemologis pragmatis sebagai gantinya. Teori kebenaran ini realis dalam memandang bahwa dunia objektif, lebih dari sekedar konsensus ideal adalah pembuat kebenaran (*truth-maker*). Jika suatu proposisi atau pernyataan yang kita klaim sebagai benar-benar benar, hal itu sungguh benar karena secara akurat menunjuk pada objek yang ada atau secara akurat pula menghadirkan keadaan aktual dari persoalan yang dibahas, sekalipun objek dan keadaan-keadaan yang kita nyatakan faktanya itu hanya di bawah deskripsi yang bergantung pada sumber-sumber linguistik kita. Tak dapat dipungkiri bahwa bahasa mendikte karakter epistemologis pragmatis realismenya. Khususnya, habermas menjauhkan diri dari usaha menjelaskan secara lengkap hubungan antara proposisi dan dunia secara metafisik (misalnya dalam teori korespondensi). Lebih jauh lagi, ia menjelaskan makna representasi yang secara pragmatis akurat dalam arti implikasi-implikasinya bagi praktik dan diskursus sehari-hari.

Sejauh kita mengambil isi proposisional sebagai kebenaran tidak secara problematik dalam praktis sehari-hari dengan realitas, kita telah bertindak secara meyakinkan pada dasar keyakinan-keyakinan yang teguh tentang objek-objek di dunia ini. Apa yang disebut habermas sebagai diskursus teoritik-empirik atau teoritis menjadi penting ketika keyakinan-keyakinan kehilangan status takbermasalahnya sebagai hasil dari kesulitan-kesulitan praktis, atau ketika situasi-situasi baru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang dunia natural. hal semacam itu membutuhkan penyelidikan empirik yang di dalamnya kebenaran menyatakan dunia, tunduk pada pengujian kritis. Meskipun habermas cenderung secara tajam memisahkan antara tindakan dan diskursus, nampak lebih masuk akal untuk menerima pengujian kritis semacam itu sebagai diskursus yang dikombinasikan dengan tindakan-tindakan eksperimental.

Berangkat dari metode kritisnya ini, ia menyusun teori makna. Pada teori makna yang standar, makna suatu kalimat berada pada kebenaran proposisi, yakni untuk mengetahui apakah yang membuat sesuatu itu benar atau salah. Inilah makna proposisional dan inilah yang membuat beberapa kalimat deskriptif menjadi masuk akal, misalnya:

salju itu putih. Akan tetapi, kebenaran proposisional ini tidak cocok untuk kalimat-kalimat misalnya: Bagaimana Kabarmu? Karena itu, Habermas menyusun suatu pandangan bahwa bahasa memiliki fungsi pragmatis atau performatif untuk membangun kesepakatan intersubjektif agar bisa memahami apa maksud ucapan yang disampaikan. Hillar mengutip pernyataan Habermas: "Orang tidak akan tahu apa itu pengertian makna ekspresi linguistik jika seseorang tidak tahu bagaimana seseorang dapat menggunakannya untuk mencapai pemahaman dengan seseorang tentang sesuatu."⁸⁰

Bagi Habermas, makna yang diungkapkan nampak pada rasionalitas dan kaitannya dengan konsensus yang disebutnya validitas. Kita memahami makna apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan ketika kita tahu apa yang akan membuat hal itu dapat diterima. Lebih jauh lagi, makna yang diungkapkan atau makna dari tindakan bersifat publik karena alasan-alasannya publik atau dibagikan. Habermas menunjukkan bahwa makna dan pemahaman adalah satu aspek dari berbicara karena keduanya terkait pada interaksi antara orang-orang yang berkomunikasi. Karena itu, makna dan pengertian bersifat intersubjektif. Secara spesifik, ada

⁸⁰ Marian Hillar, *op.cit.*, p. 4

tiga tipe validitas yang terkait dengan tiga ragam makna, yakni kebenaran yang epistemik (ada alasan yang baik untuk mempercayai pernyataan, isinya, dan ungkapannya), ketepatan yang normatif (bahwa pembicara menyatakan ketepatan dari norma moral yang digarisbawahi karena ada alasan-alasan yang menentukan), dan kejujuran yang ekspresif. Ada empat aktor yang ada dalam pengertian makna dari suatu ungkapan, yakni pengakuan atas makna literal, evaluasi atas intensi-intensi pembicara atau pendengar, pengetahuan akan alasan-alasan yang akan dikemukakan untuk melakukan justifikasi atas pernyataan, dan penerimaan atas alasan-alasan tersebut.

4. Kritik Max Scheler terhadap Pragmatisme

Bagi Max Scheler⁸¹, pragmatisme dilihat sebagai sebuah metode yang melabuhkan seluruh keinginannya untuk mendominasi alam. Sebagai konsekuensinya, pragmatisme gagal menyadari pemahaman yang dalam mengenai relasi manusia yang ditandai dengan *transcendence of love*. Kritik Scheler

⁸¹ Max Scheler ialah seorang intelektual Jerman yang menjadi salah satu perintis perkembangan fenomenologi di awal abad 20. Hidup dalam kurun waktu 1874-1928. Bidang-bidang kajiannya meliputi teori nilai, etika, antropologi filosofis dan fenomenologi.

tentang pragmatisme dituangkan dalam *karyanya Erkenntnis und Arbeit* yang pertama kali terbit 1926.

Scheler membedakan tiga tipe pengetahuan yaitu *Herrschaftswissen* (*Instrumental knowledge*/Pengetahuan untuk kepentingan tindakan atau kontrol), *Bildungswissen* (*intellectual knowledge*/pengetahuan untuk kepentingan aspek budaya yang non-material), and *Erlösungswissen* (*spiritual knowledge*/pengetahuan untuk kepentingan keselamatan). Awal kritik Scheler terhadap pragmatisme ialah bahwa pragmatisme mereduksi pernyataan *Herrschaftswissen* menjadi satu-satunya tipe pengetahuan yang memiliki beragam nilai kebenaran. Scheler menyakini bahwa secara genetis *Herrschaftswissen* merupakan bentuk pertama dari pengetahuan dan merupakan relasi dasar manusia dengan dunia praktis. Awal semua pengetahuan muncul dari masalah dalam kehidupan praktis seseorang. Namun perhatian pada praktek yang membawa kegagalan atau keberhasilan, hanya merupakan titik awal untuk pertanyaan yang lebih mendalam mengenai makna atau esensi objek. *Herrschaftswissen* ini hanya permulaan untuk menggali lebih dalam makna dari menjadi subjek yang

mengetahui dan perkembangan historisnya serta makna dan tujuan eksistensi segala sesuatu. Pragmatisme tidak memberikan posisi penting pada pertanyaan yang 'lebih mendalam' ini. Bagi pragmatis, pertanyaan yang penting ialah tentang kegunaan, apa *cash-value* dari pengetahuan esensial, pengetahuan metafisik, atau pengetahuan mengenai keselamatan.⁸²

Reduksi pengetahuan, yang dimaksud Scheler ialah berarti bahwa nilai dari *bildungswissen* dan *erlosungswissen* bersifat relatif tergantung dari kontribusinya terhadap penguasaan atau dominasi terhadap alam. Reduksi pengetahuan ini membawa konsekuensi pada relasi manusia dan dunia. Pragmatisme gagal untuk memahami relasi spiritual (*geistig*) manusia dengan dunia. Sifat relasi ini disingkapkan melalui pengetahuan. Bagi Scheler, pengetahuan dalam bentuknya yang paling mendasar merupakan *seinsverhältnis*, relasi ontologis. Definisi ini kembali pada pemikiran Aristoteles. Mengetahui sebuah objek berarti terlibat dalam *sein* (Ada)nya, dalam apa yang menjadikan sesuatu sebagai sesuatu.

⁸²http://www.american-philosophy.org/openconf-3_5/modules/request.php?module=oc_program&action=view.php&id=24 diakses pada 6 januari 2014

Tidak ada pandangan mengenai konsekuensi ke depan, juga bukan untuk tindakan. Bagi Aristoteles, mengetahui adalah kemauan/kerelaan untuk mempelajari objek dalam dirinya sendiri. Pembelajaran ini lebih merupakan hubungan Ada (*being*) atau menjadi orang atau hal lain. Artinya mau untuk menjadi seperti Ada tersebut, untuk berpartisipasi, terlibat dalam Ada itu. Demikian, bagi Scheler, tidak ada jalan lain untuk menjelaskan relasi dan aktivitas ini selain *cinta*. Dengan menjadi orang atau hal lain, pengetahuan merupakan relasi transenden, membawa seseorang melampaui dirinya, melebihi dirinya sendiri. Cinta sebagai transendensi merupakan elemen paling mendasar dari jiwa. Sebagai makhluk spiritual, manusia dapat berelasi dan memikirkan dunia tidak hanya melulu nilai praktikalnya, tetapi juga tentang apa itu dunia, atau esensinya. Kecintaan, kerelaan dan kerendahan hati berarti bahwa manusia merupakan suatu keterbukaan, proses menjadi, terbuka pada kelimpahan makna dunia, makna yang melampaui dunia menuju ketakterbatasan. Bagi Scheler, *for all knowledge is ultimately from the divine and for the divine.*⁸³

⁸³ *Ibid.*

Tuduhan Scheler bahwa pragmatisme mereduksi semua bentuk pengetahuan ke dalam satu tipe yang disebut *Herrschaftswissen*, merupakan tuduhan bahwa pragmatisme mereduksi relasi cinta manusia dengan dunia relasi dominasi dan kuasa. Pragmatisme selalu menguji metodenya, tetapi, menurut Scheler, tidak pernah mempertanyakan keinginannya untuk mendominasi. Apabila kita ingin menguji metode pragmatis, kita harus melakukan pengukuran lebih dari nilai instrumental dan *cash-value*. Ketika pertentangan dengan pragmatisme dihadapi, ketegangan ini memunculkan pendekatan fenomenologi. Scheler tetap pada pendirian bahwa fenomenologi bukan metode tetapi sikap. Fenomenologi mensyaratkan kita menagguhkan perhatian praktis kita, memperlambat relasi kita untuk me-devaluasi kehidupan praktis, tetapi membuat kita bergelut dengan cinta terhadap dunia. Sikap fenomenologis adalah ekspresi dari cinta ini yaitu kerelaan untuk “melihat” dunia sebagaimana dirinya tampil.⁸⁴

⁸⁴ *Ibid.*

Daftar istilah

- Logika : Inggris: *logic* , Latin: *logica*, Yunani: *logikos*. Apa yang termasuk ucapan yang dapat dimengerti atau akal budi yang berfungsi dengan baik, teratur sistematis dan dapat dimengerti. Pada perkembangannya, digunakan untuk menyebut studi tentang penalaran yang tepat, serta bentuk dan pola pikiran yang sah.
- Empirisme : aliran pemikiran yang menyatakan bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman.
- Realisme : Inggris: *realism*, Latin: *res* (hal, benda, barang). Upaya untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa idealisasi atau spekulasi. Menerima fakta apa adanya. Hilary Putnam menggunakan istilah realisme metafisik yang berarti memandang “dunia terdiri dari objek-objek yang pada dasarnya tidak tergantung dari

pikiran manusia atas dunia” dan bahwa “hanya ada satu saja deskripsi yang lengkap dan benar tentang dunia tersebut”

Relativisme : aliran yang memandang bahwa semua kebenaran adalah relatif. Tidak ada kriteria absolut bagi kebenaran atau kebaikan.

epistemologi : Yunani: *episteme* (pengetahuan, ilmu pengetahuan). cabang filsafat yang mengkaji mengenai pengetahuan. disebut juga filsafat pengetahuan.

epistemik : berhubungan dengan epistemologi

koheren : keruntutan gagasan

positivisme logis: disebut juga neo-positivisme. Menurut teori ini, semua kalimat yang bermakna harus bersifat analitik dan sintetik. Benar dan salahnya kalimat-kalimat analitik tergantung pada bentuk logisnya dan tidak tergantung pada informasi aktual.

Kalimat-kalimat sintetik merupakan laporan tentang pengamatan indera atau generalisasi yang didasarkan pada pengamatan empiris. Pernyataan metafisik dan teologis tidak cocok dengan kedua kategori di atas sehingga kemudian oleh teori ini dianggap pernyataan semu yang tak bermakna.

anti-theoriticism : paham yang menolak teori

ontologis : cabang filsafat yang menggeluti tata dan struktur realitas, mencoba melukiskan hakikat Ada yang terakhir (Yang Satu, Yang Absolut, Bentuk Abadi Sempurna)

Sumber Pustaka:

COOK, GARY A., “George Herbert Mead” dalam *A Companion to Pragmatism*. John R. Shook dan Joseph Margolis (.eds). Blackwell Publishing. USA 2006

CORMIER, HARVEY J., “Hilary Putnam” dalam *A Companion to Pragmatism*. John R. Shook dan Joseph Margolis (.eds). Blackwell Publishing. USA 2006

GIBSON Jr, ROGER F., “W.V.Quine” dalam *A Companion to Pragmatism*. John R. Shook dan Joseph Margolis (.eds). Blackwell Publishing. USA 2006

NIELSEN, KAI, “Richard Rorty” dalam *A Companion to Pragmatism*. John R. Shook dan Joseph Margolis (.eds). Blackwell Publishing. USA 2006

PUTNAM, HILARY, *Pragmatism and Realism*, James Conant dan Urszula M. Żegleń (.eds), Taylor & Francis e-Library, 2005

QUINE, W.V.O., “*Two Dogmas of Empiricism*” dalam *The Philosophical Review* 60 (1951), 20-43, digital version

RORTY, RICHARD, *The Consequences of Pragmatism*, University of Minnesota Press, United States of America 1982

Website:

http://www.american-philosophy.org/openconf-3_5/modules/request.php?module=oc_program&action=view.php&id=24 diakses pada 6 januari 2014

**MEMBUKA SELUBUNG PRAGMATISME AGAMA:
BELAJAR BERSAMA WILLIAM JAMES**

Oleh:

Pius Pandor, Lic. Phil

1. Pendahuluan

Kehadiran agama dalam ruang publik Indonesia memainkan salah satu peran kunci. Kehadirannya berwajah ganda seperti wajah dewa Janus dari mitologi Romawi kuno yang darinyalah kata Januari berasal. Satu sisi melihat ke masa depan, siap menyongsong yang tak terduga dan yang sedang datang tetapi di sisi lain memandang ke belakang yaitu ke masa lalu, seakan tak mau meninggalkan yang silam.⁸⁵ Persis seperti bulan Januari kita sadar bahwa hari-hari baru sudah tiba, tapi kenangan pada yang silam tetap enggan beranjak. Seperti dewa Janus itu pula wajah agama dalam ruang publik Indonesia saat ini. Pada satu sisi agama menampilkan sinar pembebasannya karena ia merupakan tempat di mana orang menemukan kedamaian, kedalaman hidup, dan harapan yang kokoh. Namun di sisi lain, agama

⁸⁵ ARMANDO PLEBE, *Storia della Filosofia 1*, Casa Editrice G. D'anna, Firenze, 1985, hlm.99

dipakai untuk melakukan diskriminasi, dijadikan sebagai ideologi politik, dan digunakan sebagai justifikasi atas tindakan kekerasan, bahkan sampai pada pembunuhan. Kita sendiri menyaksikan dan sejarah mencatat betapa besar andil agama dalam membakar kebencian dan meniupkan kecurigaan, membangkitkan salah pengertian dan mengundang konflik.

Dua wajah agama yang di tampilkan di atas, membawanya dalam tantangan. Terkait hal ini, Magnis-Suseno menandaskan, “..agama di satu pihak berada di bawah tekanan untuk membuktikan diri sebagai kekuatan yang maju dan bukan mundur, progresif dan bukan reaksioner, humanis dan bukan primordial, positif dan bukan tandon sentimen dan kebencian, terbuka dan bukan eksklusif, rendah hati dan bukan penuh klaim, positif dan bukan negatif. Di pihak lain agama harus membuktikan relevansi untuk membantu manusia memecahkan masalah-masalahnya, bukan secara negatif, tertutup, *skriptural*, reaksioner, melainkan secara terbuka, bersedia belajar, inklusif dan positif”.⁸⁶

⁸⁶ FRANZ MAGNIS-SUSENO, *Kata Pengantar*, dalam AL ANDANG, *Agama yang berpijak dan berpihak*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 6.

Berdasarkan gagasan dasar di atas, dalam artikel ini akan diuraikan tema: *“Membuka selubung Pragmatisme Agama: Belajar Bersama William James”*. Bertitik tolak dari tema ini, pertama-tama penulis akan menguraikan dasar epistemologis pragmatisme agama William James. Setelah itu dijelaskan gagasannya tentang pragmatisme agama. Hal-hal yang diuraikan dalam bagian ini adalah dasar untuk percaya, isi dan karakter pengalaman religius, dampak-dampak kepercayaan, dan eksistensi dan objek kepercayaan. Uraian dilanjutkan dengan menampilkan sumbangan dan tanggapan kritis atas pemikiran William James. Dengan meminjam ‘kaca mata’ William James ini, kita diajak untuk belajar bersamanya ‘membaca’ fenomena pragmatisme agama yang terpampang luas dalam ruang publik Indonesia.

2. Landasan Epistemologis Pragmatisme Agama William James

Pragmatisme agama yang digagas William James berakar pada pandangannya tentang epistemologi. Menurutnya tujuan hidup manusia adalah bertindak.⁸⁷ Suatu tujuan tidak dapat tercapai lepas dari tindakan. Tindakan

⁸⁷ WILLIAM JAMES, *Pragmatism and The Meaning of Truth (Introduction by A.J.Ayer)*, Harvad University, Press Cambridge. Massachussetts and London, England, 1975, hlm. 28.

yang dimaksudkan di sini adalah tindakan yang membawa konsekuensi praktis dalam hidup manusia sehari-hari. Oleh karena itu, suatu teori yang terpenting bukanlah sifat esensinya tetapi konsekuensi yang ditimbulkannya bagi kehidupan praktis manusia. Dalam bahasa James, “*Something is true if it works*”.⁸⁸

Ciri pragmatisme James ialah mempertautkan relasi antara pemikiran dan perbuatan. Akal dengan segala perbuatannya ditaklukkan oleh perbuatan. Akal atau pengetahuan hanya berfungsi sebagai pemberi informasi bagi praktek hidup dan sebagai pembuka jalan baru bagi perbuatan-perbuatan kita. Setelah menerima informasi akal tersebut kemudian kita memiliki suatu keyakinan sementara yang membuka jalan baru bagi perbuatan yang kita perlukan.⁸⁹ Pemikiran terarah kepada perbuatan, sedangkan perbuatan terarah kepada hasilnya.⁹⁰ Dengan demikian nilai suatu teori hanya diukur dari apa yang dihasilkannya. Hasil merupakan

⁸⁸ J. SUDARMINTA, *Epistemologi Dasar (Pengantar Filsafat Pengetahuan)*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hlm.134.

⁸⁹ HARUN HADIWIJONO, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Kanisius, Yogyakarta, 1980, hlm. 132.

⁹⁰ BERNARD DELFGAAWPUW, *Filsafat Abad 20*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988, hlm. 65.

verifikasi dari teori. Pemikiran harus berhubungan dengan praktek dan aksi.⁹¹

Dari akar epistemologis ini, James menemukan bahwa pragmatisme perlu dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, pragmatisme perlu dilihat sebagai sebuah metode dan di sisi lain, ia perlu dilihat juga sebagai teori. Metode erat kaitannya dengan signifikansi tindakan, sedangkan teori berkaitan erat dengan metafisika kebenaran.⁹² Keduanya saling terkait dan itulah yang menjadi dasar pandangannya tentang pragmatisme agama.

2.1. Pragmatisme Sebagai Sebuah Metode

Filsafat pragmatisme merupakan sebuah metode filsafat yang berusaha menemukan solusi praktis bagi persoalan yang tak pernah selesai. Metode ini menekankan konsekuensi praktis dari sebuah teori. Suatu dalil filosofis yang berbeda dan bertentangan, bila tidak mempunyai konsekuensi praktis yang berbeda maka pada hakikatnya teori yang berbeda itu sama. Perbedaannya hanya terjadi secara verbal atau pada tingkah formulasinya saja.

⁹¹ LORENS BAGUS, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 877.

⁹² NICOLA ABBAGNANO, *Storia della filosofia: La filosofia moderna e contemporane*, Utet Libreria, Torino, 1993, hlm. 617.

Dengan demikian pragmatisme mereduksi suatu perbedaan filosofis dengan melihat hasil praktisnya. Sebagai metode untuk menentukan konsekuensi praktis dari suatu gagasan, pragmatisme sering disebut sebagai filsafat tindakan. Namun hal ini tidak boleh diartikan bahwa pragmatisme adalah suatu sistem filosofis siap pakai, yang memberikan jawaban akhir dari suatu pergulatan filosofis. Pragmatisme tidak memberikan dogma-dogma dengan memutlakkan pandangannya.

Cara berpikir pragmatis tidak berusaha mendominasi dalam menyelesaikan persoalan dengan satu persepsi saja, justru sebaliknya berusaha menyerap setiap aspirasi yang mungkin ada. Pragmatisme menolak cara pendekatan yang bersifat memaksa pendapatnya. Hal yang sangat dikedepankan adalah penggalian kemungkinan-kemungkinan melalui analisis-analisis masalah. Pencarian dan penalaran secara bersama-sama mengenai metode-metode kreatif untuk kehidupan yang lebih adalah bentuk imperatif kategoris pendekatan pragmatis.

Dengan melihat konsekuensi praktis dari gagasan atau teori, pragmatisme mencoba untuk

kembali kepada sikap dasar filsafat yaitu empirisme. Kaum pragmatis berbalik dari abstraksi ke fakta-fakta atau objek-objek konkret, dari alasan-alasan *a priori* dan berpijak pada pengalaman, *a posteriori*. Yang membedakan pragmatisme dengan empirisme adalah bahwa pragmatisme mengambil sikap secara radikal suatu pengalaman konkret dalam usahanya untuk mendeskripsikan pandangannya. Karena itu pragmatisme James juga sering disebut empirisme radikal.

Prinsip dasar pragmatisme melihat hal terpenting dari ide adalah pengaruhnya bukan hakikatnya. Pengetahuan kita tentang sesuatu adalah tidak lain dari gambaran yang kita peroleh tentang akibat yang kita saksikan. Daya pengetahuan itu hendaklah kita lihat hanya sebagai sarana bagi perbuatan kita. Dengan demikian pertanyaan adalah apa hasil ide itu bagi kita? Oleh karena itu, kegunaan, konsekuensi praktis, efisiensi, kepuasan merupakan kata kunci atau *key words* dalam metode pemikiran kaum pragmatis. Terkait pragmatisme sebagai sebuah metode, James menganalogikannya dengan koridor-koridor hotel yang menghubungkan banyak kamar. Hotel itu memiliki banyak kamar dan dalam

kamar pertama ada seorang yang sedang menulis teori *ateistik*, di kamar berikut ada yang sedang berdoa, dan kamar berikut ada seorang ahli kimia yang sedang menyelidiki bagian-bagian tubuh, di kamar keempat ada yang sedang merenungkan sistem metafisik idealistis dan kamar kelima ada yang sedang merefleksikan ketidakmungkinan yang metafisik diperlihatkan. Mereka semua menggunakan koridor yang sama untuk masuk dan keluar kamar mereka masing-masing. Koridor adalah metode dan apa yang sedang berlangsung di dalam kamar adalah doktrin-doktrin yang berbeda dari metode. Mereka semua harus menggunakan metode yang sama untuk membuktikan kebenaran doktrin mereka masing-masing dan untuk menerapkannya. Pragmatisme sama dengan koridor tadi.⁹³

Oleh karena itu, untuk menjawab perselisihan metafisik yang tiada akhirnya misalnya apakah dunia ini satu atau banyak, sudah di determinasi atau belum, spiritual atau material, kita hanya menginterpretasikan tiap-tiap gagasan itu dengan menjajaki konsekuensi praktisnya yang akan timbul

⁹³ WILLIAM JAMES, *Pragmatism and The Meaning of Truth*, Ibid., hlm. 47-48.

dari gagasan tersebut. Pragmatisme merupakan sarana untuk mencapai kejelasan gagasan mengenai objek tertentu berdasarkan konsekuensi praktisnya.

2.3. Pragmatisme sebagai teori.

Selain sebagai metode, pragmatisme yang digagas James juga dilihat sebagai teori yaitu teori tentang arti dan kebenaran. Terkait teori arti, James menegaskan bahwa suatu gagasan mempunyai arti bila memberikan konsekuensi praktis dan orientasi pada hidup. Gagasan ini didasarkan pada pandangan instrumental pengetahuan manusia. Menurut James pengetahuan merupakan ringkasan pengalaman di masa lampau yang mampu membimbing manusia untuk tindakannya di masa yang akan datang. Secara lebih mendalam dalam bukunya *Pragmatisme: A New Name for the Old Way*, ia menegaskan bahwa arti suatu konsep dapat diperoleh dengan mempertimbangkan dampak praktis apa yang dapat dipikirkan atau diperkirakan dari suatu objek-sensasi-sensasi apa yang kiranya diharapkan darinya dan reaksi-reaksi apa yang mestinya harus kita siapkan. Konsekuensi kita tentang keseluruhan dari

dampak ini, apakah itu dampak langsung atau dampak yang muncul pada masa yang akan datang, merupakan seluruh konsep kita tentang objek itu.

Terkait teori kebenaran, James menegaskan bahwa kebenaran adalah suatu sifat tertentu dari suatu gagasan. Menurutnya, realita-realita itu bukan suatu kebenaran, realita-realita itu ada, dan keyakinan-keyakinan kita benar karena realita-realita itu⁹⁴. Dengan afirmasi ini, James mau menegaskan bahwa kebenaran bukan sesuatu yang statis melainkan peristiwa yang diproduksi ide. Ide menjadi benar karena divalidasi oleh pengalaman. James berargumentasi bahwa kebenaran adalah suatu relasi satu pengalaman dengan pengalaman lain. Pengalaman pertama adalah suatu ide yang mempunyai karakter subjektif dan pengalaman berikutnya adalah realitas objektif. Kaum pragmatis menafsirkan ide pertama itu sebagai rencana tindakan. Ide pertama itu benar jika mengarahkan kita kepada untuk menemukan ide yang kedua. Untuk menjelaskan ini, James dalam esai

⁹⁴ WILLIAM JAMES, *Essay in Pragmatism*, Hapner Publishing, New York, 1984, hlm. 161.

“Pragmatism’s Conception of Truth” memberikan contoh demikian: “suatu saat saya tersesat di hutan belantara dan saya menemukan suatu jalan setapak. Saya yakin bahwa jalan itu akan mengarahkan saya pada suatu tempat di mana saya dapat menemukan jalan bantuan atau petunjuk pulang ke rumah. Jika saya melakukan apa yang dikonsepsikan ide itu dan ternyata benar saya menemukan jalan ke desa di mana saya dapat memperoleh pertolongan maka ide itu benar”.⁹⁵

Dengan contoh di atas James ingin menjelaskan bahwa ide itu merupakan suatu instrumen untuk bertindak dan kebenaran itu merupakan suatu proses.⁹⁶ Suatu ide dapat menjadi benar, yaitu oleh peristiwa-peristiwa yang merupakan akibat-akibat atau buah dari ide itu. Maka, kebenaran itu hanya sesuatu yang potensial. Dikatakan demikian karena kebenaran sesungguhnya hanya terbukti setelah melalui proses verifikasi praktis yaitu dengan melihat buah-buah yang dihasilkan. Kebenaran potensial akan menjadi real lewat hasil

⁹⁵ WILLIAM JAMES, Op. Cit., hlm.162-163.

⁹⁶ PATRICK KIARAAN DOOLEY, *Pragmatism as Humanism*, Nelson Hall, Chicago, 1974, hlm. 123-125.

dari tindakan. Berkaitan dengan gagasan di atas, James mengatakan bahwa kebenaran itu sinonim dengan kegunaan. Ide-ide “*benar karena berguna*” atau “*berguna karena benar*”. Kata “*benar*” dan “*berguna*” memiliki pengertian yang sama, yakni mengungkapkan kebenaran ide karena dipenuhi dalam tindakan serta dapat diverifikasi. “*Benar*” adalah sebutan bagi ide apa yang berawal dari proses verifikasi, sementara “*berguna*” sebutan bagi ide yang telah berhasil terpenuhi dalam pengalaman konkret hidup manusia.⁹⁷ Karena itu berdasarkan prinsip pragmatis ide benar karena berguna dalam pengalaman hidup manusia dan ide yang berguna adalah benar.

Setelah kita mengenal rancang bangun pragmatisme William James, kita akan berusaha untuk menyibak bagaimana pandangannya tentang pragmatisme agama. Karena itu, berikut akan diuraikan pragmatisme agama dalam pandangan William James.

⁹⁷ SONNY KERAFA, *Pragmatisme menurut William James*, Kanisius, Yogyakarta, 1987, hlm. 42.

3. Pragmatisme Agama dalam Pandangan William James.

Saya percaya cara pragmatis dalam memperlakukan agama sebagai cara yang lebih mendalam⁹⁸.

Afirmasi ini menjadi semacam kredo sekaligus rangkuman dari gagasan William James tentang pragmatisme agama. Dari afirmasi ini muncul beberapa pertanyaan. Mengapa manusia memiliki kecenderungan untuk percaya? Atau mengapa kita beriman? Sejauh mana pilihan untuk percaya/beriman dapat dibenarkan? Apakah yang menjadi ciri-ciri sebuah agama? Apa fungsi agama dalam kehidupan manusia? Atau apa dampak agama bagi kehidupan manusia? Bagaimana dengan eksistensi Allah atau objek kepercayaan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita temukan dalam buku-buku William James yang berjudul *The Varieties of Religion Experience*, *The Will to Believe* dan *A Pluralistic Universe*.

3.1. Kecenderungan untuk percaya.

⁹⁸ WILLIAM JAMES, *The Varieties of Religion Experience*, A Mentor Books, New York, 1959, hlm.309

Kecenderungan untuk percaya (beriman) menurut William James merupakan suatu keadaan sadar yang berkaitan dengan emosi, dan ditandai oleh kesadaran untuk bertindak. Dalam konteks ini, ada dua unsur penting yang menjadi kodrat dasar kepercayaan. *Pertama*, hasrat (*pasional*) mengatur pilihan-pilihan kita terhadap sesuatu. *Kedua*, tindakan merupakan konsekuensi dari keyakinan kita.⁹⁹ Jadi, hasrat menjadi semacam '*kompas*' yang memberi petunjuk bagi kita untuk bertindak. Bertindak dalam konteks ini adalah percaya.

Walaupun tindakan untuk percaya/beriman digerakkan oleh hasrat, James lebih lanjut mengatakan bahwa percaya kepada Allah merupakan sesuatu yang rasional. Rasional karena kita menemukan ketenteraman dan kedamaian dengan kepercayaan itu. Dari pengalaman dasar ini, muncul sebuah penerimaan akan Allah sebagai Pencipta alam semesta. Penerimaan ini pada giliran membimbing kita pada reaksi moral berupa kerja sama dengan tujuan yang telah ditetapkan Allah. *Reaksi* moral ini dalam pandangan James sesuai

⁹⁹ Ibid, hlm.85-86

dengan *persepsi* kita tentang misteri dunia dan *konsepsi* kita tentang Allah yang mengatur alam semesta ini dan menetapkan tujuan yang baik bagi manusia. Konsepsi tentang Allah itu pada gilirannya akan memengaruhi tindakan manusia.

Lebih lanjut James menegaskan bahwa beriman/kepercayaan merupakan sebuah proses dinamis yang melibatkan persepsi, konsepsi dan reaksi. Manusia menerima misteri dunia yang disatukan dalam konsep tentang Allah dan secara aktual diwujudkan dalam tindakan moral. Namun, menurut James manusia juga dapat menolak konsep Allah sebagai konsep penyatu. Manusia boleh jadi menemukan konsep penyatu lain di luar konsep Allah. Dengan kata lain, percaya kepada Allah merupakan suatu pilihan. Pilihan itu didasarkan pada pengalaman manusia.

James menyatakan bahwa pengalaman dalam menghadapi situasi yang genting mengajarkan kita untuk segera memutuskan. Dalam situasi seperti ini tindakan memutuskan tidak disertai bukti-bukti yang memadai. Yang penting dalam situasi ini adalah apakah keputusan tersebut menguntungkan kita atau

tidak. Demikian halnya dengan percaya kepada Allah. Dalam buku berjudul *The Will to Believe*, James berbicara tentang orang yang sudah terbiasa percaya tanpa berpikir tentang arti percaya yang sebenarnya.¹⁰⁰

Keputusan untuk percaya ini menurut James berkaitan dengan pilihan yang otentik. Pilihan tersebut disebut otentik jika pilihan itu tak terhindarkan, hidup dan penting.¹⁰¹ Pilihan itu ‘tak terhindarkan’ bila pada kenyataannya tidak memilih sama dengan memilih salah satu dari dua kemungkinan, berhubung hasil memilih salah satu dari kemungkinan itu sama dengan hasil tidak memilih. Pilihan itu dikatakan ‘hidup’ bila kedua hipotesa yang muncul cukup menarik dan sama-sama memberi kepuasan. Percaya kepada Allah atau tidak merupakan salah satu contoh pilihan yang hidup. Dikatakan demikian karena dalam diri manusia terdapat keinginan untuk percaya dan keinginan untuk tidak percaya. Akhirnya pilihan itu dikatakan ‘penting’ jika apa yang dipilih sama tinggi

¹⁰⁰ WILLIAM JAMES, “*The Will to Believe*,” dalam C.M Bakewell, *Selected Paper on Philosophy*, Sons LTD, London, 1956, hlm. 102.

¹⁰¹ Ibid.

nilainya. Pilihan itu hanya dapat dilakukan satu kali dalam hidup. Pilihan itu penting karena akan menentukan *modus vivendi* kita. Dalam konteks ini, pilihan beragama merupakan pilihan penting karena berkaitan dengan seluruh hidup kita dan menentukan cara hidup kita.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut James manusia bisa memilih antara beragama atau tidak. Keputusan ini tidak didasarkan pada argumentasi rasional. Dikatakan demikian karena formulasi iman belum memadai untuk percaya atau tidak. Di sini James membuka peluang untuk memilih yang terbaik menurut kecenderungan-kecenderungan dasariah manusia. Dengan demikian, pilihan beragama dibenarkan karena sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan perasaan manusia. Karena itu, percaya kepada Allah adalah sesuatu yang sah, walaupun tanpa bukti yang memadai. Jadi, kita mempunyai hak untuk percaya karena kecenderungan manusiawi kita menuntut demikian¹⁰².

¹⁰² Bdk PATRICK KIARAN DOOLEY, op.cit., hlm.91

3.2. Isi dan karakter pengalaman Religius.

Dalam buku berjudul *The Varieties of Religious Experience*, James mendefinisikan agama sebagai perasaan, tindakan dan pengalaman individu dalam kesendirian yang mendorongnya untuk menjalin relasi dengan yang Ilahi¹⁰³. Dengan definisi ini, agama pertama-tama dimengerti sebagai pengalaman manusiawi yang bersifat subjektif. Pengalaman subjektif inilah yang menjadi dasar dan titik tolak pembahasan James tentang agama. Jadi, bukan bertitik tolak dari argumen teoritis. Menurutnya, biarlah pengalaman itu berbicara sendiri dan menyatakan kebenarannya, sebab pengalaman merupakan cetusan batin seorang individu.

Refleksi selanjutnya adalah terkait isi kepercayaan religius. Dalam bagian akhir dari buku *The Varieties of Religious Experience*, James menampilkan beberapa isi keyakinan religius manusia. Keyakinan itu meliputi¹⁰⁴: 1) keyakinan

¹⁰³ WILLIAM JAMES, *The Varieties of Religious Experience*, A Mentor Books, New York, 1959, hlm. 42.

¹⁰⁴ Ibid, hlm. 367.

bahwa dunia yang tampak adalah bagian dari dunia yang lebih tinggi/ilahi; 2) relasi yang harmonis dengan alam semesta yang lebih tinggi itu merupakan tujuan hidup manusia; 3) kesatuan batin dan doa dengan yang lebih tinggi mempunyai dampak fenomenal pada dunia; 4) semangat baru untuk menghayati hidup lebih bermakna; 5) cinta kepada sesama.

Keyakinan-keyakinan di atas menurut refleksi James lebih bersifat personal. Untuk mendukung argumennya, ia mengemukakan tiga ciri agama¹⁰⁵.

Pertama, Personal (Personal). Bagi James agama merupakan suatu yang bersifat pribadi. Hal ini nampak jelas dari definisinya tentang agama sebagaimana telah diuraikan di atas. Definisi James tentang agama melampaui segi institusional agama. Afirmasi ini bukan berarti menafikan aspek kelembagaan agama tetapi hanya untuk

¹⁰⁵ WILLIAM JAMES, *The Varieties of Religious Experience*, hlm. 370-372 . Bdk ROBERT W.CRAPPS, *Dialog Psikologi dan Agama*, sejak William James hingga Gordon W. Allport, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm.147-154.

menonjolkan pengalaman pribadi dalam beragama itu jauh lebih penting dari institusi.

Kedua, Emosionalitas (Emotionality). Menurut James emosi keagamaan merupakan dasar utama bagi penganut agama untuk membangun struktur intelektual mereka. Dikatakan demikian karena dari dimensi emosional keagamaan orang mampu memahami secara lebih baik apa artinya beragama itu. Untuk menegaskan hal ini, James menekankan latihan kehendak untuk percaya ketimbang menghafal formulasi iman yang terangkum dalam kredo keagamaan.

Ketiga, Keanekaragaman (Variety). Pengalaman beragama itu universal dan tampil secara pribadi. Tidak mengherankan bila muncul aneka sekte keagamaan yang berusaha menonjolkan segi tertentu dari pengalaman religius. Karena itu, James menegaskan agar kita tidak membatasi munculnya aneka aliran keagamaan. Dikatakan demikian karena dalam pengalaman religius itu kesejatan agama diungkapkan. Jadi, keanekaragaman pengalaman religius melampaui formulasi iman.

3.3. Dampak kepercayaan religius.

Refleksi tentang dampak kepercayaan religius menurut James mengantar kita untuk melihat subjek yang percaya/beriman. Karena itu, ia menampilkan dampak-dampak beriman bagi seorang pribadi. Hal ini dapat kita baca dalam bukunya yang berjudul *The Varieties of Religious Experience*. Dalam buku tersebut, James menegaskan bahwa kecenderungan religius itu berkembang secara dinamis dalam pengalaman manusiawi. Perkembangan ini dimulai dari sentimen religius awal dan memuncak pada mistisisme¹⁰⁶.

3.3.1. Sentimen Religius.

Sentimen religius manusia muncul sebagai jawaban kekagumannya pada totalitas segala sesuatu dan menerima Allah sebagai Ada yang dapat menjawab kerinduan manusia yang paling dalam. Karena itu agama dalam pandangan James selalu dimengerti sebagai

¹⁰⁶ Ibid hlm.293-294. Bdk. ROBERT W. CRAPPS, *Gaya Hidup Beragama*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm. 52

‘reaksi total manusia terhadap kehidupan’.¹⁰⁷ Selain itu, agama juga ditandai oleh konsepsi kita tentang Yang Ilahi sebagai sumber dan arah seluruh dunia. Di sini konsepsi kita tentang Allah menimbulkan dalam diri kita suatu kegembiraan karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang ada itu tidak sia-sia dan mempunyai arti di dunia ini. Kepercayaan pada Allah menjamin keterarahan hidup kita, sebab Dialah kekuatan yang mampu mengerjakan segala sesuatu bagi manusia. Sentimen religius ini menyebabkan suatu komitmen yang menumbuhkan antusiasme. Di sini manusia memandang dirinya, sesama, dan Tuhan baik adanya. Karena itu, manusia berusaha menghayati hidupnya dengan penuh kegembiraan.

3.3.2. Konversi

Konversi menurut James merupakan perubahan sikap dan tindakan manusia dari yang kurang baik atau jahat menuju ke situasi

¹⁰⁷ WILLIAM JAMES, *Op.cit*, hlm. 45

yang lebih baik. Konversi merupakan sebuah proses penemuan jati diri manusia yang terbatas, rapuh, dan rusak. Pengakuan akan keterbatasan mengantarkan manusia untuk memercayakan diri kepada Allah, Sang Sumber kebaikan. Konversi pada gilirannya mengantarkan orang untuk mewujudkan kesalehan sosial.

3.3.3. Kesalehan

Dampak langsung dari konversi adalah adanya perasaan tenang dan adanya kedekatan baik dengan yang ilahi maupun dengan sesama. Di sini subjek membuka diri terhadap yang Ilahi dan menjalin keakraban dengan sesama. Penyerahan diri kepada Allah diungkapkan dalam keutamaan iman, harapan, dan kasih. Keutamaan *teologal* ini selanjutnya diwujudkan dalam membangun relasi dengan sesama. Singkatnya, kesalehan mengantarkan orang untuk lebih peduli terhadap sesamanya. Dengan demikian kesalehan yang benar dapat membangun suatu masyarakat yang lebih baik.

Di sini pola kehidupan manusia masuk dalam relasi intersubjektivitas dengan sesamanya.¹⁰⁸

3.3.4. Mistisisme

Dampak kepercayaan nampak dalam mistisisme. Menurut James, mistisisme terjadi pada setiap agama. Karena itu, fenomena ini bersifat universal. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa ada beberapa sifat khas mistisisme. *Pertama*, tak terlukiskan (*ineffability*). Menurut James kata-kata tidak mampu menjelaskan secara tuntas pengalaman mistis. Dikatakan demikian, karena ia merupakan disposisi perasaan ketimbang disposisi intelek. Karena itu, sangat sulit menjelaskan pengalaman mistik kepada orang yang belum mengalaminya. *Kedua*, unsur pengetahuan (*Noetic quality*). Pengalaman mistik menyampaikan pengetahuan khusus. Pengetahuan yang disampaikannya adalah pengetahuan akan kedalaman kebenaran. *Ketiga*, kesementaraan (*Transiency*). Keadaan

¹⁰⁸ WILLIAM JAMES, *Le Varie forme della coscienza religiosa*, Mondadori, Milano, 1985, hlm. 46

mistik berlangsung sekilas. Di sini orang terkadang tidak mampu melukiskan kembali apa yang telah dialaminya. Namun kesannya mendalam dan mampu membawa transformasi pada kehidupan seseorang. *Keempat*, Pasivitas (*passivity*). Dalam pengalaman mistik, subjek merasa ditangkap dan disentuh oleh yang ilahi, oleh kekuatan yang lebih tinggi. Pengalaman mistik menurut James memengaruhi kehidupan seseorang dan menjadi tolok ukur dalam perjalanan rohaninya.

3.4. Eksistensi Allah atau Objek Kepercayaan

Pilihan untuk percaya kepada Allah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya merupakan sebuah pilihan yang tepat karena mempunyai dampak yang konkret dalam hidup manusia. Dampak konkretnya adalah adanya kekuatan moral yang mengarahkan hidup kita. Dengan afirmasi ini, James mengakui bahwa Allah merupakan pendasaran moral yang tepat. Dengan

mengakui eksistensi Allah, norma moral disempurnakan. Di sini secara pragmatis percaya kepada Allah dapat dibenarkan. Pertanyaannya adalah apakah yang dapat kita katakan tentang eksistensi Allah?

Menurut James, dalam ranah pengalaman Allah terlibat dalam kehidupan kita. Allah memiliki tempat tinggal, ada dalam waktu dan berkarya dalam sejarah umat manusia. Dia menarik diri dari ketersembunyianNya, dari keadaannya yang statis, tak terjangkau dalam waktu, suatu ada yang absolut sempurna. Allah adalah mitra kerja manusia. Ia dapat membuat perbedaan real dalam tingkah laku manusia. Dalam *A Pluralistic Universe*, James mengungkapkan peran Allah yang demikian itu sebagai berikut:

Allah dalam hidup religius orang biasa adalah nama, bukan keseluruhan dari hal-hal, tersembunyi dalam surga, tetapi juga merupakan kecenderungan ideal dari sesuatu hal. Allah yang dipercayai sebagai pribadi yang mengatasi manusia yang memanggil kita untuk bekerja sama dalam tujuannya dan

*menyelamatkan mereka yang layak. Dia
berkarya dalam suatu lingkungan eksternal.
Dia membatasi manusia.¹⁰⁹*

Pandangan Allah sebagaimana diungkapkan James di atas digambarkan begitu jauh dari hidup manusia. Manusia seakan menjadi alat bagi Allah untuk memuliakan diriNya. Dalam perspektif ini jelas perubahan hanya terjadi atas kehendak Allah dan tindakan manusia berguna sejauh seirama dengan tujuan yang ditetapkanNya. Bagi James pandangan yang demikian ini malah kurang sesuai dengan pengalaman religius manusia. Jika Allah terlibat dalam hidup manusia dan menjadi mitra kerjanya maka Allah haruslah Allah yang terbatas. James mengamati bahwa gagasan Allah yang terbatas tidak hanya memecahkan problem teoritis. Allah yang terbatas berarti juga Allah yang mempunyai derajat kedekatan yang tinggi dengan manusia, karena berdampak praktis dalam hidup manusia. Dengan demikian, Allah diimani sebagai

¹⁰⁹ WILLIAM JAMES, *A Pluralistic Universe*, University of Nebraska Press, Lincoln, New York, 1996. hal. 124.

Ada yang personal yang bersatu dengan manusia untuk menentukan masa depan dunia.

Gagasan Allah yang terbatas ini merupakan konsekuensi lebih lanjut dari pandangan *melioristiknya*. Menurut James dunia dilihat sebagai dunia yang menjadi. Dunia yang menjadi tidak merupakan hasil determinasi manusia atau oleh Allah. Dalam dunia yang seperti ini terdapat ruang bagi pembaharuan dan Allah menjamin pemeliharaan yang permanen dari tata moral ideal. Namun walaupun ada jaminan, manusia tetap diberi tugas mengonkretkan tata moral itu. Dalam konteks ini, percaya kepada Allah secara praktis berarti mengubah dunia melalui tindakan-tindakan kita. Eksistensi Allah yang terbatas menjadikan manusia semakin berharga karena tindakannya. Di sini keselamatan merupakan hasil kerja sama antara Allah dan manusia.

4. Sumbangan dan Tanggapan Kritis atas Pragmatisme Agama William James

4.1. Sumbangan Pragmatisme Agama William James

4.1.1. Humanisme Agama

Bukan Tuhan, tetapi hidup, hidup lebih baik, lebih luas, lebih kaya, lebih memuaskan itulah tujuan akhir agama.¹¹⁰ Lewat afirmasi ini, James menekankan humanisme agama yang berorientasi pada manusia. Menurutnya agama itu benar jika ide-ide yang disampaikan oleh agama itu dapat memperkaya hidup manusia dan membuat dunia ini lebih baik. Humanisme agama yang dicetuskannya ini dalam diskursus filosofis merupakan sebuah tema yang ‘licin’. Dikatakan demikian karena humanisme bisa diselimuti oleh baju ideologi seperti ideologi agama, budaya, dan politik. Terkait hal ini, penulis tertarik dengan argumen F. Budi Hardiman dalam bukunya berjudul *Humanisme*

¹¹⁰ WILLIAM JAMES, *Ibid.*, hlm.479.

dan Sesudahnya, Meninjau Ulang Gagasan Besar tentang Manusia. Inti argumen yang dibangunnya adalah berkaitan dengan gagasan humanisme lentur. Dalam tilikan Hardiman, “kita harus membedakan antara dua aspek humanisme”¹¹¹. *Aspek pertama*, humanisme memiliki kekuatan *kritis normatif* untuk “menelanjangi kekuatan-kekuatan asing yang menindas manusia dan kemanusiaannya.”¹¹² Aspek ini menurut Hardiman ingin melindungi manusia dari paham apapun yang ingin memperbudak dirinya. *Aspek kedua*, sebagai suatu “isme”, humanisme tetap memiliki unsur dogmatis dalam dirinya yang sering kali menjelma sebagai kebenaran mutlak yang berlaku untuk siapa pun, di mana pun, dan kapan pun, maka harus dipaksakan kepada semua orang.

Dalam tilikan Hardiman, yang dapat diterima adalah sisi kritis dan normatif dari

¹¹¹ F. BUDI HARDIMAN, *Humanisme dan Sesudahnya: Meninjau ulang Gagasan Besar tentang Manusia*, Kanisius, Yogyakarta, 2012, hlm. 62.

¹¹² *Ibid.*

humanisme. Aspek kritis dan normatif humanisme ini dapat membuat kita waspada terhadap berbagai bentuk penindasan kebebasan dan pelecehan akal manusia yang bisa menyelip dalam membenaran-pembenaran sakral agama, politik dan budaya. Humanisme semacam ini tidak berarti menolak kebenaran agama dan tidak berpegang teguh pada kebenaran filsafat tetapi berusaha meletakkan segmen-segmen tersebut dalam tilikan normatif-kritis. Hardiman menyebut pendirian ini sebagai humanisme lentur. Menurutnya, humanisme lentur “adalah suatu bentuk humanisme tanpa metafisika kemanusiaan¹¹³. Versi ini tidak bertanya, ukuran-ukuran manakah yang harus kita tetapkan agar seseorang atau suatu kelompok termasuk ke dalam kemanusiaan kita, yaitu ‘orang-orang seperti kita’. Yang menjadi pertanyaan menurut Hardiman adalah, bagaimana mencapai titik temu berbagai ukuran yang dimiliki oleh berbagai

¹¹³ *Ibid.*

orang atau kelompok sehingga kita dan mereka dapat mengantisipasi suatu kemanusiaan yang akan datang. Inilah yang menandainya berseminya humanisme lentur. Humanisme lentur, terang Hardiman ditandai oleh dua hal¹¹⁴. *Pertama*, kelenturannya menyatakan keyakinannya bahwa universalitas kemanusiaan itu mungkin, bukan sebagai ukuran yang ditetapkan sebelumnya secara monologal, melainkan sebagai suatu visi yang diperjuangkan secara dialogal. *Kedua*, kelenturannya juga menyatakan tidak hanya keyakinannya akan potensi epistemis agama-agama yang dapat bertumpang tindih dengan kebenaran-kebenaran yang dicari dalam filsafat dan sains, melainkan juga respeknya pada batas-batas iman religius dan rasionalitas. Pada titik ini, ‘seorang humanis yang berhasil menolak godaan metafisika kemanusiaan akan menerima religiusitas sebagai salah satu dimensi hidupnya tanpa terjerumus ke dalam fideisme’.

¹¹⁴ *Ibid.*

Humanisme lentur yang digagas Hardiman di atas, menurut penulis, bisa membantu kita dalam ‘melihat’ peta pemikiran William James tentang pragmatism agama. Jantung pemikirannya ini mengantar kita untuk memahami bahwa James memperjuangkan humanisme agama. Humanisme agama yang memiliki wawasan luas dan *optimistik* selalu menolak segala kepicikan, fanatisme, dan politisasi agama.

4.1.2. Pengalaman religius.

James menerima kebenaran yang bersumber dari pengalaman karena menurutnya pengetahuan harus berdasarkan pada realitas konkret yaitu pengalaman.¹¹⁵ Dalam konteks ini, pandangannya mengacu pada suatu pandangan empirisme. Namun sebagai ilmu bersifat empiris, pragmatisme mengacu secara radikal ke suatu bentuk

¹¹⁵ Idem

empirisme yang dinamis. Bentuk empirisme demikian disebut James *empirisme radikal*.¹¹⁶

James mendasarkan bahwa filsafat dan ilmu pengetahuan harus dikembalikan pada pengalaman murni. Yang dimaksudkan dengan pengalaman murni adalah perubahan langsung yang terjadi secara terus-menerus dalam hidup ini, yang diperlukan bagi refleksi kita di kemudian hari. Menurutnya, pengalaman yang sintetis atau terus-menerus, mengajak orang untuk memahami bahwa sifat pengalaman umum itu sementara dan dapat berubah terus-menerus. Hanya pengalaman baru yang dapat mengubahnya. Empirisme radikal tidak mengakui setiap elemen konstruksi yang tidak langsung dialami, tetapi hanya mengakui setiap elemen yang dialami secara langsung. Hubungan yang menghubungkan pengalaman harus dialami sendiri, dan setiap hubungan dialami harus dipandang sebagai "*realitas*".¹¹⁷

¹¹⁶ GUY W. STROH, *American Philosophy*. D. Van Nostrand, Inc., Princeton, 1986, hlm. 148.

¹¹⁷ WILLIAM JAMES, *Essays In Radical Empirism*, Op. Cit., hlm.42

Personalitas pengalaman religius sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan sebuah pengalaman yang membawa dampak dalam hidup manusia. Pengalaman itu diawali dengan sentimen religius, konversi, kesalehan dan memuncak pada mistisisme. Semua pengalaman itu terkait dengan kehadiran Allah dalam hidup manusia. Allah tampil dihadapkan manusia sebagai suatu misteri yang menggetarkan (*mysterium tremendum*) sekaligus misteri yang memesonakan (*mysterium fascinans*)¹¹⁸. Kehadiran Allah yang menggetarkan dan memesona ini pada gilirannya mengubah hidup manusia menjadi lebih baik. Pengalaman religius yang membawa perubahan dalam hidup sejatinya mengantar kita untuk masuk dalam struktur agama yang meliputi *segi eksistensial* (segi yang menyangkut keseluruhan hidup), *segi intelektual* (segi yang menyangkut pemahaman), *segi institusi* (segi

¹¹⁸ G. SOVERNIGO, *Religione e Persona*, Edizione Dehoniana Bologna, Bologna, 1990, hlm. 11.

yang berkaitan dengan kelembagaan), dan *segi etikal* (segi perwujudan dalam tindakan).

4.1.3. Menguak simbolisme agama.

Menurut Sovernigo, pragmatisme agama yang digagas William James dapat membantu kita untuk menyibak simbolisme keagamaan.¹¹⁹ Menurutny, simbol-simbol keagamaan sejatinya menjadi sarana bagi manusia untuk meneguhkan dan memberi makna tindakan imannya. Namun dalam praksisnya, simbol-simbol keagamaan bisa disalahgunakan di mana ia hanya dipakai sebagai sarana untuk memuaskan libido kekuasaan baik ekonomi, politik, dan kerinduan lainnya yang bersifat egosentris. Penyalahgunaan simbol keagamaan ini bisa mengarah pada '*desakralisasi simbol*'. Artinya, simbol-simbol keagamaan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan menjadi profan.

¹¹⁹ Ibid, hlm. 195.

Tilikan kritis Sovernigo atas pragmatisme agama James di atas, kiranya bisa membantu kita dalam menafsirkan penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam ruang publik Indonesia saat ini. Tentu masih segar dalam ingatan kita seputar penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam Pemilu Presiden pada bulan Juli yang lalu. Simbol-simbol keagamaan dipakai untuk meraih dukungan publik, menutupi kelemahan atau kekurangan calon, membenarkan pernyataan dan tindakan tim sukses. Menurut Mazdar Hilmy, eksploitasi simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan yang tidak agamawi merupakan bentuk pembajakan besar-besaran atas doktrin agama untuk hal-hal yang tidak selaras dengan misi *profetis-liberatif* agama. Agama yang semestinya dibawa untuk mengejawantahkan idealisme peradaban dan nilai-nilai kemanusiaan justru dibajak untuk tujuan-tujuan profan yang sempit, dangkal dan *libidinal*.¹²⁰

¹²⁰ MASDAR HILMY, *Agama dan Demokrasi*, dalam Kolom Opini

Senada dengan Mazdar, Paulinus Yan Olla juga membaca adanya fenomena penggunaan simbol-simbol keagamaan untuk meraih dukungan politik. Terkait hal ini, ia mengatakan, “keinginan menjadikan bangsa ini sebagai bangsa saleh, suci ataupun beriman jangan sampai menjadi sekadar mainan segelintir orang yang dengan kelihaihan mengusung simbolisme agama hanya berjuang meraup kekuasaan bagi diri sendiri”.¹²¹ Karena itu, beliau menekankan pentingnya menegaskan spiritualitas politik. Katanya, spiritualitas politik pada hakikatnya mengusung nilai-nilai etis religius untuk membangun manusia dalam segala dimensinya dan menjangkau setiap orang, termasuk mereka yang umumnya tersingkir. Pembangunan spiritualitas politik yang mempertimbangkan manusia dalam segala

Kompas, Rabu 16 Juli 2014, hlm.6.

¹²¹ PAULINUS YAN OLLA MSF, *Mewaspada Simbolisme Agama*, dalam Kolom Opini Kompas, Sabtu 7 Juni 2014, hlm.6.

dimensinya akan menghindarkan bangsa ini dari politisasi agama.¹²²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan simbol-simbol keagamaan sejatinya bercorak positif karena ia menjadi penanda identitas bagi pemakainya. Kepemilikan ini memberi stabilitas sosial, status, pandangan hidup, cara berpikir, dan etos. Namun di sisi lain simbol-simbol keagamaan bisa disalahgunakan untuk kepentingan atau ideologi sesaat. Agama bisa dipakai untuk melakukan diskriminasi, dijadikan alasan tindakan kekerasan, bahkan sampai pada pembunuhan. Jadi, pragmatisme agama yang digagas James menjadi stimulasi bagi kita untuk bersikap kritis terhadap munculnya simbol-simbol keagamaan dalam ruang publik Indonesia.

¹²² Ibid.,

4.2. Tanggapan Kritis

Terlepas dari sumbangan khas yang telah diuraikan di atas, pragmatisme agama William James tetap tak sepi dari kritik.

Pertama, tentang relasi antara teori kebenaran dan kepercayaan. James menegaskan bahwa suatu kepercayaan yang benar akan menghasilkan suatu tindakan yang benar. Sovernigo tidak sependapat dengan argumentasi yang disampaikan James. Menurutnya “suatu kepercayaan mungkin saja berlaku dengan baik walaupun kepercayaan itu tidak benar, dan sebaliknya suatu kepercayaan mungkin saja berjalan dengan buruk, walau keyakinan itu benar”.¹²³ Argumentasi Sovernigo ini dapat kita lihat dalam ranah pengalaman religius di mana orang yang sungguh mengimani bahwa Allah itu ada dan memerintahkan manusia untuk berbuat baik, sering kali melakukan tindakan yang buruk atau tidak terpuji seperti korupsi, kebencian, dan melakukan kekerasan terhadap sesamanya. Dalam konteks ini,

¹²³ G SOVERNIGO, *Religione e Persona*, Edizione Dehoniana Bologna, Bologna, 1990, hlm.230.

kepercayaan yang benar tidak menjamin tindakan yang benar.

Kedua, soal pilihan dan motivasi beragama. Menurut James pilihan untuk beragama atau percaya kepada Allah merupakan sebuah pilihan yang bersifat personal karena didorong oleh alasan pragmatis yaitu demi memenuhi kebutuhan psikologis manusia. Menurut Ramon Lucas Lucas, pilihan manusia untuk percaya kepada Allah tidak hanya didorong oleh alasan pragmatis tetapi merupakan kodrat manusia. Sejak awal hidupnya, manusia selalu tergantung pada kepercayaan. Ada tendensi keterbukaan manusia (*tendenza apertura dell'uomo*) untuk percaya kepada sesuatu yang melampaui dirinya. Dengan demikian percaya kepada Allah merupakan bagian dari kodrat manusia.¹²⁴ Tanggapan yang sama juga diungkapkan Crapss, menurutnya pendekatan fungsional yang melihat motivasi beragama hanya dibatasi pada konteks kebutuhan dan kepuasan manusia bisa membawa dampak ideologis yang kerap kali tidak

¹²⁴ RAMON LUCAS LUCAS, *Orizzonte Verticale: Senso e significato della persona umana*, San Paolo, Milano, 2007, 127

disadari.¹²⁵ Dalam konteks ini, motivasi beragama harus dimengerti dalam konteks keseluruhan hidup manusia yang menyerahkan diri kepada Yang Tak Terbatas.

Ketiga, soal dunia dan eksistensi Allah. Telah dijelaskan bahwa James melihat dunia sebagai dunia yang menjadi. Masa depan manusia sangat ditentukan oleh aktivitas manusia. Suatu dunia yang *milioristis* ini mendorong manusia untuk bertindak dengan penuh optimis. Pandangan dunia yang lebih baik ini jelas mereduksi kemahakuasaan Allah. Peran Allah adalah sebagai mitra kerja manusia untuk membangun dunia yang lebih baik. Allah tidak *mendeterminasi* dunia. Allah tidak berkuasa penuh atas manusia dan dunia. James menyodorkan gagasan Allah yang terbatas ini karena menurutnya Allah tidak mampu mengatasi kejahatan dan penderitaan di dunia ini. Di sini Allah tidak membawa manfaat praktis dalam hidup manusia. Terhadap kenyataan ini, kita harus menegaskan bahwa adanya penderitaan tidak berarti Allah tidak berguna. Allah mengatasi kategori kegunaan. Ia *imanen* sekaligus

¹²⁵ Bdk. ROBERT W. CRAPPS, *Op.Cit*, hlm.50.

transenden. Kita diajak untuk percaya dan tenggelam dari misteri kasih-Nya.

5. Kesimpulan

Membuka Selubung Pragmatisme Agama: Belajar Bersama William James, yang menjadi judul artikel ini merupakan sebuah diskursus yang belum selesai. Kita ‘belum tuntas’ dan ‘belum sempurna’ memoles wajah agama yang berparas kemanusiaan. Agama belum sepenuhnya menjadi tempat sandaran jiwa yang penuh damai, dan bermakna. Ada hal-hal dari wajah agama itu yang belum sempurna, ada yang perlu dipoles lagi, dilihat lagi, bahkan dibongkar kembali. Dalam konteks ini, masa depan agama harus diinterpretasi lagi. Jika tidak, sikap ironis terhadap agama terus bermunculan dan ia akan kehilangan signifikasinya. Dalam konteks ini, agama harus dihayati sebagai sesuatu yang menjadi dan terus dibaharui dalam pengalaman keseharian kita, *hic* dan *nunc*. Agama yang menjadi dilukiskan oleh Robert Bonthius sebagai ‘jalan lebih baik’ (*the meliorist pathway*)¹²⁶ yang berusaha membangkitkan semangat dan mendorong kita untuk terus berproses demi terwujudnya humanisme integral.

¹²⁶ ROBERT BONTHIUS, *Christian Paths to Self-deceptance*, King’s Crown Press, New York, 1948, hlm.74.

Sumber Bacaan

- ARMANDO PLEBE, *Storia della Filosofia 1*, Casa Editrice G. D'anna, Firenze, 1985.
- BERNARD DELFGAAWPUW, *Filsafat Abad 20*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988.
- F. BUDI HARDIMAN, *Humanisme dan Sesudahnya: Meninjau ulang Gagasan Besar tentang Manusia*, Kanisius, 2012.
- FRANZ MAGNIS-SUSENO, Kata Pengantar, dalam AL ANDANG, *Agama yang berpijak dan berpihak*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- GUY W. STROH, *American Philosophy*. D. Van Nostrand, Inc., Princeton, 1986.
- G. SOVERNIGO, *Religione e Persona*, Edizione Dehoniana Bologna, Bologna, 1990.
- J. SUDARMINTA, *Epistemologi Dasar (Pengantar Filsafat Pengetahuan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- HARUN HADIWIJONO, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Kanisius, Yogyakarta, 1980.
- KIARAAN DOOLEY, *Pragmatism as Humanism*, Nelson Hall, Chicago, 1974.
- LORENS BAGUS, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta, 2005.
- MASDAR HILMY, *Agama dan Demokrasi*, dalam Kolom Opini Kompas, Rabu 16 Juli 2014.

NICOLA ABBAGNANO, *Storia della filosofia: La filosofia moderna e contemporane*, Utet Libreria, Torino, 1993.

PAULINUS YAN OLLA MSF, *Mewaspadai Simbolisme Agama*, dalam Kolom Opini Kompas, Sabtu 7 Juni 2014.

RAMON LUCAS LUCAS, *Orizzonte Verticale: Senso e significato della persona umana*, San Paolo, Milano, 2007.

ROBERT W. CRAPPS, *Dialog Psikologi dan Agama, sejak William James hingga Gordon W. Allport*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.

-----, *Gaya Hidup Beragama*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.

ROBERT BONTHIUS, *Christian Paths to Self-deceptance*, King's Crown Press, New York, 1948

SONNY KERAFA, *Pragmatisme menurut William James*, Kanisius, Yogyakarta, 1987.

WILLIAM JAMES, *Pragmatism and The Meaning of Truth (Introduction by A.J. Ayer)*, Harvard University Press Cambridge. Massachusetts and London, England, 1975.

-----, *The Will to Believe*, dalam C.M Bakewell, *Selected Paper on Philosophy*, Sons LTD, London, 1956.

-----, *Essay in Pragmatism*, Hapner Publishing, New York, 1984.

-----, *Le Varie forme della coscienza religiosa*, Mondadori, Milano, 1985.

-----, *The Varieties of Religious Experience*, A
Mentor Books, New York, 1959.

-----, *A Pluralistic Universe*, University of
Nebraska Press, Lincoln, New York, 1996.

PRAGMATISME DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA¹²⁷

1. PENGANTAR

Saya tahu bahwa saya tidak faham filsafat. Karena itu saya tidak berani “berenang” terlalu jauh dalam bahasan filsafat pragmatisme. Saya mengambil langkah pintas (mungkin pragmatis?) untuk fokus pada masalah perubahan sosial budaya: konsep dasar, teori, faktor, dan arah perubahan sosial. Itu artinya judul di atas saya balik menjadi Perubahan Sosial Budaya dan Pragmatisme. Saya memilih untuk fokus membahas perubahan sosial budaya dan dibagian akhir artikel ini baru saya menghubungkan dengan pragmatisme. Persoalan yang dikembangkan adalah apakah ada pengaruh pragmatism terhadap perubahan sosial budaya atau apakah perubahan sosial budaya sebenarnya didorong oleh filsafat pragmatisme?

¹²⁷ Tulisan ini banyak mengambil dari buku Robert H Lauer: *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003. Tulisan ini hanya untuk acara pelatihan yang diselenggarakan oleh Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 30/9/2014. Tulisan ini banyak mengambil uraian dan pikiran dari buku Robert H Lauer. Tujuannya praktis: agar peserta gampang membaca gejala perubahan sosial. Karena itu tulisan ini kurang layak untuk menjadi rujukan bagi makalah ilmiah.

Minimal apakah ada hubungan antara pragmatisme dan perubahan sosial budaya? Atau apakah perubahan sosial mengandung pragmatism? Persoalan yang saya pilih secara subyektif ini pastilah bukan ruang lingkup filsafat, utamanya filsafat pragmatisme, tetapi lebih banyak ke masalah sosial, budaya, dan politik.

Perubahan sosial merupakan gejala yang selalu hadir dalam sejarah masyarakat dunia. Mulai dari Pitirim A Sorokin sampai dengan Daniel Bell menganggap perubahan sosial selalu mewarnai perkembangan peradaban, negara, sistem politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Perubahan sosial diwarnai oleh dua perspektif besar yaitu materialism dan idealism. Persoalannya adalah, dimanakah pengaruh filsafat pragmatism dalam proses perubahan sosial tersebut? Atau paling tidak apakah ada hubungan antara perubahan sosial dengan pragmatism?

Secara teoritik ada kaitan erat antara pragmatism dan perubahan sosial karena berbagai varian teori materialisme dan idealisme menggambarkan kuatnya faktor dorongan untuk memperoleh kepuasan, hasil, kegunaan materialis, dan kekuasaan secara maksimal. Beberapa aspek ini, kalau

tidak salah, merupakan unsur dari pragmatisme. Ini berarti proses pembangunan, perkembangan, dan modernisasi sebenarnya banyak didorong oleh unsur pragmatism itu. Meskipun demikian, belajar dari sejarah sosial masyarakat bahwa perkembangan masyarakat tidak selalu satu arah, tetapi bersifat multi dimensi. Dari sini penjelasan tentang lahirnya teori-teori dan filsafat moral sebagai keseimbangan perubahan sosial itu sendiri.

2. PENGERTIAN PERUBAHAN SOSIAL

Sistem sosial selalu mengalami perubahan. Perubahan sosial bagi para teoritisi konflik (strukturalisme) sebagai sesuatu yang riil dan faktual. Mulai dari sosiolog kuno, seperti Ibnu Khaldun, sampai dengan Karl Marx menganggap sejarah sosial tampak sebagai sejarah perubahan. Sejarah sosial yang selalu berubah itu diformulasikan sangat beragam oleh para sosiolog tersebut: menurut Auguste Comte, misalnya, menganggap masyarakat berubah dari pola teologis ke pola ilmiah, Sedangkan Herbert Spencer merumuskan perubahan sosial budaya itu sebagai perubahan dari pola militan ke pola industri, sementara Durkheim merumuskan perubahan dari

pola solidaritas mekanik ke organik, dan menurut Karl Marx memformulasikan perubahan masyarakat dari masyarakat kuno ke masyarakat borjuis lalu sosialisme dan akhirnya menuju masyarakat komunisme¹²⁸.

Realitas sosial yang selalu berubah itulah menyebabkan Pitirim A Sorokin berpendapat bahwa sistem sosial selalu mengalami perubahan abadi. Artinya setiap sistem sosiokultural tertentu jelas akan mengalami perubahan berkat aktivitasnya sendiri: setiap sistem yang hidup dan aktif selalu berubah. Akibatnya perubahan selalu difahami sebagai fenomena yang normal. Itu artinya perubahan sosial, budaya, politik, dan ekonomi sebagai sesuatu yang normal, wajar, dan berkelanjutan.

Persoalannya adalah, apakah perubahan sosial yang dianggap abadi itu?

Wilbert Moore merumuskan perubahan sosial dengan sangat sederhana, sebagai **perubahan penting dari struktur sosial**. Lebih lanjut Moore merumuskan **Struktur sosial** sebagai **pola-pola perilaku dan interaksi sosial**. Bahkan Moore memasukkan ke dalam definisi perubahan sosial

¹²⁸ Robert H.Lauer: Perspektif tentang Perubahan Sosial, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.157

berbagai ekspresi mengenai struktur seperti **norma, nilai, dan fenomena kultural**.

Definisi lainnya tentang perubahan sosial adalah sebagai **variasi atau modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial, dan bentuk-bentuk sosial serta setiap modifikasi pola antar hubungan yang mapan dan standar perilaku**.

Definisi perubahan sosial di atas sangat luas dan melebar sehingga setiap hal yang berkaitan dengan norma, nilai, perilaku sosial, struktur sosial, dan institusi sosial bisa dikaitkan dengan perubahan sosial. Hal ini menyebabkan pemahaman tentang perubahan sosial menjadi tambah kabur dan luas. Untuk membuat definisi dan konsep perubahan sosial lebih kongkret dan kontekstual maka para teoritis sosial seringkali membacanya dengan kerangka teoritik tertentu.

3. PERSPEKTIF TEORITIS TENTANG PERUBAHAN SOSIAL

Robert H Lauer mengelompokkan berbagai konsep tentang perubahan sosial dengan menggunakan beberapa perspektif teori sosiologi. Perspektif teoritis itu bermula dari arah, faktor

penyebab, dan sifat perubahan sosial. Lauer menyusun pengelompokan teori perubahan sosial itu sebagai berikut: (1) teori sosiohistoris yang berbentuk siklus, (2) pembangunan, (3) psikologi sosial, (4) fungsional struktural, (5) materialism, (6) idealism¹²⁹

Perspektif **Teori Siklus** dikembangkan oleh para sosiolog seperti Ibnu Khaldun, Arnold Toynbee, dan Pitirim A. Sorokin. **Teori Perkembangan (Pembangunan)** dikembangkan oleh Auguste Comte, Herbert Spencer, dan Emile Durkheim. Sementara itu **Teori Psikologi Sosial** kita menemukan beberapa tokoh seperti Everett E. Hagen dan David Mc Clelland. Khusus **Teori Fungsional Struktural** banyak dikembangkan oleh Talcott Parsons dan Neil Smelser. Sedangkan **Teori Materialisme** banyak didapatkan dari teori radikal Karl Marx dan **Teori Idealisme** banyak didapatkan dari Engels dan Hegel.

Perspektif teori tentang gejala perubahan sosial pada dasarnya merupakan sistematika analisis dan kerangka berpikir untuk memusatkan gejala perubahan sosial pada substansi dan lokus tertentu.

¹²⁹ Disarikan dari Robert H Lauer, Op.Cit., 1-271

Begitulah teori siklus misalnya menjadikan peradaban sebagai pusat perhatian utamanya. Ibnu Khaldun ingin menerangkan siklus penaklukan dalam peradaban Arab. Sementara itu Arnold Toynbee tertarik pada perkembangan dan kemerosotan peradaban dunia. Di sisi lain Pitirim A. Sorokin memusatkan perhatian pada gerakan bolak-balik pola-pola sosiokultural sejarah umat manusia.

Masing-masing teoritis ini juga mengidentifikasikan perubahan di tingkat lain, tetapi seluruh perubahan di tingkat lain itu digunakan untuk menunjukkan sifat pusat perhatiannya yakni pada perubahan yang berbentuk siklus dari keseluruhan peradaban¹³⁰.

Sebaliknya teori pembangunan, memusatkan perhatian pada tingkat masyarakat dan mereka umumnya yakin bahwa semua masyarakat akan mengikuti garis perkembangan tertentu seperti yang mereka kenali. Perubahan yang menjadi pusat perhatian mereka adalah pola perkembangan satu masyarakat secara menyeluruh. Tokoh-tokoh seperti Auguste Comte dan Herbert Spencer semuanya

¹³⁰ *Op.Cit. hal. 35-252*

melihat perkembangan masyarakat menuju pada suatu tatanan sosial yang semakin manusiawi, sedangkan Durkheim berpandangan pesimis mengenai hasil evolusi sosial. Dapat disimpulkan bahwa setiap teorisi perubahan sosial itu melihat perubahan yang terjadi pada tingkat yang berlainan dan dalam perspektif yang berbeda pula.

Teoritis perkembangan melihat perubahan terjadi di seluruh tingkat, meskipun mereka memusatkan perhatian pada tingkat kemasyarakatan. Seperti teoritis siklus, mereka melihat perubahan sebagai fenomena normal dan sennatiasa ada. Perubahan terjadi karena sifat kehidupan masyarakat itu sendiri berubah. Perubahan terjadi menurut pola tertentu, tidak secara serampangan tanpa pola. Kita dapat memperhatikan jenis perubahan yang akan terjadi, dan menurut Comte dan Marx, kita dapat mempercepat laju perubahan menuju masyarakat masa depan yang lebih manusiawi.

Di sisi lain para teoritis fungsional-struktural memberikan prioritas pada struktur dari perubahan sosial. Teori fungsional struktural meanggap semua sistem sosial mengarah ke titik equilibrium. Karena itu struktur sosial menurut mereka cenderung stabil.

Perubahan dalam bentuk proses kemasyarakatan tertentu senantiasa terjadi, tetapi perubahan struktur yang sesungguhnya adalah soal luar biasa, dan biasanya disebabkan kekuatan luar yang menimpa sistem sosial. Artinya teori ini melihat faktor yang kuat mempengaruhi perubahan adalah faktor dari luar sistem. Sebab sistem cenderung mengarah ke stabilitas.

Pusat perhatian utamanya adalah masyarakat dan kebudayaan. Perubahan struktur berarti perubahan dalam nilai-nilai dasar yang menyatukan masyarakat itu. Bersamaan dengan itu terjadi perubahan di tingkat lain tetapi ini tidak akan terjadi tanpa perubahan struktural. Sebagai contoh, diferensiasi struktural mungkin terjadi dalam institusi seperti keluarga atau ekonomi tanpa terjadinya perubahan struktural dalam masyarakat.

Menurut Parsons gejala perubahan sosial yang paling signifikan adalah perubahan struktural dan evolusi sosial. Perubahan sosial berarti perubahan dalam sistem sosial itu sendiri (dalam nilai-nilai dasar yang menyatukan sistem). Jadi, perubahan sikap, pola-pola interaksi atau dalam sistem stratifikasi komunitas

dan sebagainya, secara teknis tidak termasuk ke dalam pengertian perubahan sosial¹³¹.

Sementara itu teori psikologi-sosial lebih banyak membahas masalah modernisasi dan pembangunan ekonomi. Hagen, McClelland dan peneliti lain yang mempelajari kemodernan individu, semuanya memusatkan perhatian pada peranan individu dalam masyarakat yang sedang membangun memodernisasi dan mengembangkan perekonomian). Asumsinya adalah bahwa masyarakat yang sedang membangun memerlukan sejenis individu khusus – individu yang didefinisikan Hagen sebagai individu yang berkepribadian kreatif dan oleh Mc Clelland disebut sebagai individu berkepribadian yang berorientasi pada prestasi. Sementara itu pribadi atau individu tersebut disebut oleh Kahl, Inkeles, dan Smith sebagai seorang manusia modern.

Tidak ada alasan yang secara implisit atau eksplisit menyatakan bahwa semua jenis perubahan memerlukan sejenis manusia khusus. Hanya ada argumen yang menyatakan bahwa di tingkat perubahan tertentu – yakni di tingkat institusional

¹³¹ *Op.Cit.hal158*

diperlukan sejenis individu yang membantu modernisasi institusional dan pertumbuhan ekonomi.

Teori Psikologi Sosial ini melihat perubahan sosial dari sudut tingkat-tingkat perubahan, terdapat perbedaan arti perubahan individual (perubahan sikap dan keyakinan) dan perubahan peradaban. Tetapi kebanyakan teoretisi ini berpandangan makrososiologis dengan memusatkan perhatian pada tingkat peradaban dan tingkat masyarakat. Kebanyakan mereka mengakui kenormalan perubahan dan menegaskan bahwa perubahan terjadi di semua tingkat realitas sosial.¹³²

4. FAKTOR PENYEBAB DAN MEKANISME PERUBAHAN SOSIAL

Perubahan sosial merupakan gejala serba hadir dalam sistem sosial. Persoalan mendasarnya adalah, apakah faktor penyebab terjadinya perubahan sosial tersebut? Kemudian bagaimanakah mekanisme perubahan itu terjadi?

a. Kelompok teoritisi Siklus

¹³² *Op.Cit. hal 159*

Para teoritisi ini menganggap arah perubahan sosial sebagai sesuatu yang melingkar. Mereka menganggap perjalanan kehidupan manusia lebih terperangkap dalam lingkaran sejarah yang luas dibandingkan sebagai garis lurus tertentu. Menurut pandangan ini alam semesta dibayangkan berada dalam perubahan berkepanjangan, namun perubahan itu mengikuti suatu:

“pola yang tetap dan karenanya dapat diramalkan terdiri dari ayunan abadi antara dua titik atau terdiri dari gerakan melingkar, di dalam suatu lingkaran tertutup; perubahan yang terjadi dalam ayunan abadi atau dalam gerakan melingkar itu lebih bersifat relative ketimbang mutlak, karena semua gerakan ke arah tujuan, justru hanya membantu membawa proses perubahan itu kembali ke titik bertolak semula”

Tokoh sosiologi kuno yang membangun sejarah perubahan sosial sebagai sesuatu

perubahan manusia yang bersifat melingkar ini adalah Ibnu Khaldun.

Khaldun membangun teori sosiologi perubahan didasarkan atas faktor **konflik**. Perubahan sosial masyarakat Arab terjadi karena pertentangan antara manusia nomaden dan manusia menetap. Menurut Khaldun, masyarakat nomaden padang pasir mendambakan kemewahan kehidupan kota (urbanisasi menjadi dambaan orang-orang Badui). Karena itu orang nomaden terus menerus menyerang dan menaklukkan kota. Penduduk yang menetap di kawasan urban tidak mampu menandingi kebuasan orang Badui. Itulah yang menyebabkan penaklukan kawasan urban, sebuah Negara atau kekaisaran. Tetapi begitu penakluk bermukim di kota, mereka akan runtuh pula, menjadi mangsa kemerosotan yang sama dengan yang dialami rakyat menetap yang mereka taklukan. Keruntuhannya hanya soal waktu, sebelum segerombolan nomaden baru datang menyapu bersih kekaisaran mereka. Dengan demikian, terdapat lingkaran perubahan. Dimulai dengan dibangunnya

sebuah kekaisaran, lapuk tidak berdaya, dan akhirnya hancur di hadapan kekuatan generasi nomaden padang pasir yang baru.

Negara dibangun dan dihancurkan melalui konflik. Sejarah adalah sebuah lingkaran tanpa ujung dari pertumbuhan dan kehancuran. Lingkaran tanpa ujung dari penaklukan dan keruntuhan.¹³³

Atas dasar fenomena masyarakat padang pasir itulah maka Khaldun membangun teori perubahan sosial sebagai berikut:

1. Metode historis menawarkan pendekatan terbaik untuk memahami perubahan sosial
2. Faktor yang menyebabkan perubahan sosial banyak dan beraneka macam dan faktor tunggal (seperti kepribadian atau teknologi) tidak mampu menerangkan perubahan sosial secara memadai.
3. Bentuk-bentuk organisasi sosial yang berbeda, menciptakan tipe kepribadian yang berbeda pula.

¹³³ *Op.Cit.hal 47*

4. Konflik adalah mekanisme mendasar dari perubahan
5. Berbagai faktor psikologi sosial-kepemimpinan, kepribadian, kekompakan kelompok-membantu kita dalam memahami penyebab dan akibat dari konflik antar kelompok
6. Perubahan cenderung merembes, terjadi di semua institusi sosial, agama, keluarga, pemerintah, dan ekonomi, dan sebagainya semuanya terlibat dalam proses perubahan itu¹³⁴.

- b. Teoritis yang dikategorikan dalam teori siklus di atas adalah Arnold Toynbee

Toynbee juga melihat perkembangan masyarakat selalu mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, kemandekan, dan kehancuran di dalam kehidupan sosial. Toynbee lebih menekankan pada masyarakat atau peradaban sebagai unit studinya, Menurut Toynbee studi mengenai satu bangsa tidak dapat dipahami

¹³⁴ *Op.Cit.hal 49*

sebagai sesuatu di dalam dirinya sendiri, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari proses yang lebih besar.

Toynbee memusatkan perhatiannya pada aspek sosio-psikologis perubahan sosial. Untuk memahami perubahan sosial, Toynbee mula-mula mencari penjelasannya pada faktor ras dan lingkungan fisik, tetapi kedua faktor itu akhirnya ditolaknya. Menurut Toynbee tidak ada ras yang superior dan tidak ada lingkungan fisik yang benar-benar menciptakan peradaban dengan sendirinya. Karena ras dan lingkungan fisik hanya bersifat membantu perkembangan peradaban. Peradaban muncul sebagai tanggapan atas tantangan.

Menurut Toynbee sebenarnya tidak mudah menerangkan hubungan antara kondisi alam tertentu dengan peradaban. Peradaban muncul berdasarkan perjuangan mati-matian. Peradaban hanya tercipta karena mengatasi tantangan dan rintangan, bukan karena menempuh jalan yang terbuka lebar dan mulus. Toynbee membahas 5 perangsang yang berbeda bagi kemunculan peradaban yaitu (1) kawasan

yang ganas, (2) kawasan baru, (3) kawasan diperebutkan, (4), kawasan ditindas, dan (5) kawasan tempat pembuangan¹³⁵.

Menurut Toynbee tantangan terhadap lingkungan tersebut menimbulkan gerak ke arah pertumbuhan peradaban. Bagi Toynbee proses pertumbuhan suatu peradaban dianggap sebagai proses “penghaluasan” yaitu pergeseran penekanan dari alam kemanusiaan atau perilaku yang lebih rendah ke taraf yang lebih tinggi. Penaklukan rintangan awal sehingga dengan demikian energi dapat tersalurkan untuk menanggapi tantangan yang kini lebih bersifat internal ketimbang eksternal, dan lebih bersifat spiritual ketimbang material. Pertumbuhan berarti peningkatan penentuan nasib sendiri, dan hal ini menimbulkan diferensiasi terus menerus diantara bagian-bagian masyarakat.

Diferensial ini terjadi karena sebagian masyarakat tertentu berhasil memberikan tanggapan memadai atas tantangan, sementara itu sebagian lainnya berhasil dengan jalan meniru

¹³⁵ *Op.Cit.hal 51*

bagian yang berhasil tersebut. Sebagian lain lagi gagal, baik dalam menciptakan maupun dalam hal meniru sehingga pada akhirnya akan mendekati kematian. Akibat dari kemampuan setiap masyarakat yang berbeda menghadapi tantangan itu maka berkembanglah ciri khas tertentu di dalam setiap peradaban. Misalnya peradaban Yunani dianggap unggul dalam pandangannya terhadap estetika kehidupan sementara itu India dan Hindu cenderung menuju kesuatu pandangan hidup yang mengutamakan keagamaan¹³⁶.

Dengan demikian Toynbee menganggap tantangan dan tanggapan manusia terhadap tantangan yang menjadi mekanisme perubahan sosial.

c. Pitirim A. Sorokin menyatakan setiap sistem sosiokultural berubah berdasarkan atas aktivitas di dalam sistem itu sendiri. Meskipun lingkungan tidak dapat berubah sama sekali, sistem akan berubah karena proses di dalam

¹³⁶ *Op.Cit.hal 52*

dirinya sendiri. Sorokin juga memasukkan beberapa faktor eksternal sebagai penyebab perubahan di dalam sistem sosiokultural. Tetapi tekanan utamanya diletakkan pada kekurangan penyebab khusus; pada umumnya sistem sosiokultural berubah sesuai dengan hukum dan logikanya sendiri.

Sorokin mengemukakan 3 model penyebab perubahan sosiokultural yaitu (1) perubahan diakibatkan faktor-faktor eksternal terhadap sistem sosiokultural. Kedua menurut teori keabadian yaitu perubahan terjadi karena faktor-faktor internal yang ada di dalam sistem itu sendiri. Sistem itu sendirilah yang bersifat berubah. Ketiga, perubahan sosial sebenarnya adalah perubahan abadi yaitu setiap sistem sosiokultural tertentu jelas akan mengalami perubahan berkat aktivitasnya sendiri: setiap sistem yang hidup dan aktif selalu berubah. Faktor eksternal memang berpengaruh, tetapi faktor internal merupakan faktor utama perubahan dan setiap perubahan tertentu mungkin dimulai melalui perantara

komponen: makna, wahana, atau agen pelaksananya.

Menurut Sorokin setiap sistem dan suprasistem selalu mengalami pertumbuhan (perubahan) dan kemunduran. Bagi Sorokin ada beberapa proposisi pertumbuhan dan kemunduran sistem dan suprasistem itu yaitu (1) di dalam sistem yang terintegrasi dengan erat, perubahan akan terjadi secara keseluruhan: seluruh bagian-bagian akan berubah bersama-sama. Kedua (2) jika sistem tidak terintegrasi secara ketat, perubahan mungkin terjadi di beberapa bagian (subsistem) tertentu saja tanpa terjadi di bagian lain. Hanya perubahan penting di bagian yang lebih penting saja yang akan mengalami perubahan menyeluruh, sehingga dengan demikian, keseluruhan kultur akan mengalami perubahan. Ketiga (3) jika suatu kultur hanya merupakan pengelompokan semata (tidak terintegrasi secara ketat) maka setiap bagian mungkin berubah tanpa mempengaruhi bagian lain. Keempat (4) jika kultur tersusun dari sejumlah sistem dan kumpulan-kumpulan yang hidup berdampingan

secara damai, maka kultur itu akan berubah secara berbeda di setiap bagian yang berbeda. Artinya seluruh bagian-bagian pentingnya akan berubah bersama-sama, sementara kumpulan sistem akan berubah secara terpisah tanpa mempengaruhi kumpulan sistem yang lain.

- d. Salah satu tokoh yang berada dalam posisi teori perkembangan adalah Auguste Comte. Comte menyusun perspektif perubahan sosial mengikuti mekanisme evolusi sosial. Menurut Comte, evolusi intelektual adalah mekanisme yang mendorong evolusi sosial. Karena manusia memerlukan cara berpikir baru, mereka membantu menciptakan tatanan masyarakat yang sesuai dengan cara berpikir baru itu. Perasaan bosan, usia lanjut, dan pertumbuhan penduduk dapat mempengaruhi laju perubahan, tetapi faktor utamanya adalah cara berpikir

Menurut Comte sosiologi terbagi menjadi dua yaitu sosiologi statis dan dinamis. Sosiologi statis didasarkan atas asumsi yang menyatakan bahwa masyarakat adalah organisme yang disatukan oleh konsensus, akibatnya

berkembang keharmonisan spontan antara keseluruhan dan bagian-bagian sistem sosial. Sementara itu sosiologi dinamis, menurut Comte, merupakan studi yang membahas tentang urutan perkembangan manusia dimana setiap tahap perkembangan merupakan hasil dari tahap sebelumnya.

Comte merumuskan tingkat perkembangan masyarakat dalam 3 tahap perkembangan pemikiran manusia yaitu (1) tahap teologis (khayalan), (2) tahap metafisika (abstrak), dan (3) tahap ilmiah (positif). Pada perkembangan masyarakat tingkat teologis pola pemikiran masyarakatnya beranggapan bahwa semua fenomena diciptakan oleh zat adikodrati. Tahap teologis ini terdiri dari 3 tingkat pola masyarakat yaitu (1) kepercayaan terhadap kekuatan jimat (fetishism) ditandai pemikiran manusia membayangkan semua benda di luar dirinya dihidupkan oleh kekuatan yang sama dengan yang menghidupkan dirinya , (2) kepercayaan terhadap banyak dewa (polytheism) ditandai dengan kehidupan perkotaan, sistem kasta, pola pemilikan tanah,

dan berperang sebagai jalan berkuasa; dan (3) kepercayaan terhadap keesahan Tuhan (monotheism) yang ditandai dengan pola tenaga kejadian pembagian kerja, emansipasi perempuan, dan perang bergeser dari tindakan agresif ke upaya pertahanan diri..

Pola masyarakat di tingkat metafisika mengasumsikan bahwa pikiran bukan lagi ciptaan adikodrati, tetapi ciptaan “kekuatan abstrak” yaitu sesuatu yang dianggap ada yang melekat dalam diri manusia dan mampu menciptakan semua fenomena. Tingkat metafisika ini masyarakat menganggap alam sebagai faktor penyebab mendasar dari alam semesta. Hukum abstrak lebih dari hukum Tuhan, menjadi penjelas semua fenomena.

Pola masyarakat dalam tahap positip dimana manusia sudah mencari hukum-hukum yang menentukan fenomena. Manusia berpikir positip, berkembang pola industrialisasi sehingga kekuatan militer diganti oleh kekuatan industri.

5. PERSPEKTIF MATERIALISTIS VS IDEALISTIS

Sejarah sosiologi dipenuhi perdebatan panjang tentang besar manakah pengaruh perspektif materialistis ataukah idealistis? Bahkan ditahun 1980an dunia ilmu sosial seolah-olah dibelah secara global dalam dua perspektif besar yaitu perspektif strukturalisme dan fungsionalisme struktural. Dua perspektif teori ini merembes secara luas ke berbagai disiplin ilmu sosial lainnya, seperti ilmu politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Dua perspektif teori ini saling kritik, saling serang, dan bahkan hasil pengumpulan dua perspektif itu melahirkan berbagai varian teori sosial baru. Salah satu dari varian itu adalah teori strukturasi dari Anthony Giddens.

Yang menarik dari diskusi tentang perubahan sosial ini adalah pertanyaan dasarnya, faktor mana yang lebih kuat mempengaruhi perubahan sosial: material atau ide? Baik kekuatan material maupun idea mempunyai dasar teoritik yang kuat dalam menjelaskan tentang fenomena perubahan sosial. Akibatnya para akademisi semakin mengakui arti penting kedua kekuatan tersebut. Hanya saja para

pemikir ini memberikan tekanan yang berbeda terhadap kedua faktor ini.

Menurut kelompok Marxisme berbagai perubahan sosial banyak ditentukan oleh material. Meskipun demikian sebenarnya Marxisme tidak mengabaikan sama sekali terhadap peranan ide. Metode Marxis menyangkut studi tentang realitas manusia, dan studi itu dapat menjurus kembali ke dunia ide jika bertolak dari faktor material, ketika orang didorong oleh realitas sosial ekonomi, ketika orang telah memulai memikirkan riwayat ide. Ide adalah penting; tetapi faktor utama yang menentukan sejarah manusia adalah material.

Setiap masyarakat ditandai oleh suatu infrastruktur yakni struktur ekonomi, dan supra-struktur yang terdiri dari ideology, hukum, pemerintahan, keluarga, dan agama. Supra-struktur muncul dari infrastruktur. Artinya, basis material (ekonomi) masyarakat adalah landasan tempat membangun semua basis kehidupan lainnya, dengan demikian perubahan cara produksi menyebabkan perubahan di dalam seluruh hubungan sosial manusia. Selanjutnya, manusia menciptakan “prinsip-prinsip, ide-ide, kategori-kategori, selaras dengan hubungan sosial mereka.”

Tetapi ini tidak serta merta berarti penegasan determinisme hubungan. Di dalam suratnya kepada Bloch, tahun 1890, Engels menyatakan bahwa cara produksi yang ada “pada hakikatnya” adalah unsur yang menentukan, namun berbagai unsur supra-struktur “juga menggunakan pengaruhnya terhadap jalannya perjuangan sejarah.”Jadi, infra-struktur memberikan kerangka yang menjadi tempat bagi berbagai bentuk supra-struktur untuk menekankan pengaruhnya.

Perubahan terjadi sebagai akibat kontradiksi antara kekuatan-kekuatan dan hubungan-hubungan produksi. Dalam perkembangan kekuatan-kekuatan produktif, akan dicapai suatu tahap di mana kekuatan-kekuatan produktif ini akan menjadi kekuatan yang menghancurkan. Menghancurkan, karena kekuatan-kekuatan produktif ini berkontradiksi dengan hubungan-hubungan produksi yang ada. Lalu apa yang dimaksud Marx dengan kontradiksi ini? Raymond Aron mengemukakan dua kemungkinan interpretasinya.¹Pertama, karena kekuatan-kekuatan produksi berkembang, maka kekuatan produksi ini mencapai suatu titik di mana “hak pemilik individual” menjadi perintang bagi kekuatan produktif itu. Karena

itu terdapat kontradiksi antara pengembangan kekuatan produktif selanjutnya dan hak pemilikan individual itu. Tetapi jika orang menganggap pertumbuhan perusahaan raksasa (yang menghalangi pemilikan individual) sebagai bagian bagian integral perkembangan masyarakat kapitalis, maka kontradiksi ini justru menjadi tidak muncul (karena hak pemilikan individual bukan merupakan bagian integral dari kapitalisme)¹³⁷.

Kkontradiksi bisa terjadi antara produksi dan distribusi: masyarakat kapitalis tidak mampu menyerap produksinya sendiri karena berlimpahnya produksi sosial masyarakat kapitalis. Produksi berkembang lebih cepat daripada perkembangan pasar, dan tanpa terelakkan, akan terjadi saling tabrakan yang tak terselesaikan selama perkembangan produksi itu tidak meledakkan cara produksi kapitalis itu sendiri. Meskipun kita masih belum melihat atau belum mampu meramalkan di titik mana masyarakat kapitalis akan menjadi tak mampu lagi menyerap produksinyasendiri, namuninterpretasi kedua ini nampaknya paling masuk akal.

¹³⁷ *Op.Cit.hal 93*

Menurut kelompok Marxis kontradiksi adalah inti kemajuan sosial. Artinya, kontradiksi bukan disebabkan oleh kekuatan dari luar atau oleh faktor-faktor yang menimpa masyarakat; kontradiksi adalah bagian integral perkembangan sosial. Masyarakat kapitalis menciptakan kondisi material yang pada hakikatnya akan menghancurkan masyarakat. Perkembangan dialektika berarti berarti bahwa kontradiksi muncul dari inti proses sosial. Menurut Marx dan Engels, untuk kemunculan kontradiksi ini tidak diperlukan tantangan atau proletariat dari luar; masyarakat perbudakan, feodal, dan kapitalis mengandung benih-benih penghancuran dirinya sendiri di dalamnya.

Kontradiksi antara kekuatan-kekuatan dan hubungan-hubungan produksi, terjelma di dalam pertentangan kelas. Menurut Marx Sejarah semua masyarakat yang ada hingga sekarang adalah sejarah perjuangan kelas. Hal ini terjadi karena selama perkembangan kekuatan-kekuatan produktif, terdapat sebuah kelas yang harus “memikul semua beban masyarakat tanpa menikmati keuntungannya, yang terusir dari masyarakat, yang terpaksa mengambil keputusan sangat berlawanan dengan seluruh kelas

yang lain. Kelas borjuis berkuasa dan hidup makmur berdasarkan pengorbanan kelas lain – kelas proletariat – yang terjerumus ke dalam kehidupan yang semakin sengsara. karena itu, masyarakat terbelah menjadi dua kubu yang saling bermusuhan (antagonistic). Kelas penguasa memperoleh kekuasaannya dari pengendaliannya atas kekayaan masyarakat dan mempertahankan kekuasaannya, sebagian karena negara telah diperalatnya.

Kelas tertindas – proletariat – berada dalam proses pemiskinan dan keterasingan yang semakin meningkat. Pemiskinan ini disebabkan oleh penghisapan dan pemerasan kapitalis. Keterasingan, termasuk pemisahan manusia dari produk tenaga kerjanya, dari dirinya sendiri, dari “jenisnya” sendiri, dan dari manusia lain”⁾ baik kemiskinan maupun keterasingan, diciptakan oleh cara kapitalis yang memusatkan kekuasaan dan kekayaan di tangan segelintir orang.

Hasil kontradiksi adalah revolusi. Kontradiksi antara kekuatan-kekuatan dan hubungan-hubungan produksi, perjuangan antar kelas, diselesaikan dengan revolusi. Revolusi di masa lalu masih memadai karena”cara bertindakya selalu tak berubah sedikit

pun dan yang diungkit-ungkit selalu persoalan ketimpangan distribusi. Sebaliknya revolusi komunis diarahkan untuk menentang cara bertindak sebelumnya; revolusi ini akan menenyapkan buruh (selaku sebuah kelas), menenyapkan kelas dan penguasa kelas. Bersamaan dengan itu adalah penghapusan negara, karena negara merupakan alat pengendali dari kelas yang berkuasa.

Bila revolusi berhasil, bila terjadi revolusi sosial maupun transformasi politik yang sesungguhnya, maka tentu akan terjadi perubahan berskala luas dalam kehidupan manusia. Karena itu, revolusi harus mengambil bentuk gerakan praktis. Tak ada cara lain untuk menggulingkan kelas yang berkuasa dan hanya kelas yang berhasil menggulingkan kelas yang berkuasa itulah yang akan berhasil membersihkan dirinya sendiri dari kotoran beabad-abad, dan yang pantas membangun masyarakat kembali dalam revolusi". Hanya jika kelas-kelas dan antagonisme kelas telah lenyap, manusia akan mengalami evolusi sosial tanpa revolusi fisik.

Pada dasarnya pendirian Marxis menyatakan ide muncul dari proses sosial dan kemudian menjadi penting dalam perkembangan sosial selanjutnya. Ide

menjadi kuat bila ia mencerminkan kebutuhan dan kepentingan nyata manusia. Kebutuhan nyata manusia itu berakar di dalam kondisi sosial ekonomi di mana manusia hidup. Jadi ide muncul dari kondisi sosial ekonomi tertentu dan penting untuk mendorong orang mempertahankan atau mengubah kondisi sosial ekonomi yang ada. Lagi pula, ide dapat dikomunikasikan melalui ruang dan waktu sehingga dengan demikian, ide dapat mempengaruhi masyarakat lain dan kondisi material masyarakat bersangkutan.

Pendekatan filsafat modern dilakukan oleh Whitehead yang mencoba menunjukkan cara ide mendorong manusia mengubah tatanan sosial mereka. Whitehead menyatakan, agama kristen menyediakan manusia Barat seperangkat ide yang telah berperan hebat dalam perkembangan peradaban Barat. Sebenarnya kita dapat memahami kemajuan manusia menurut perubahan berkelanjutan yang dipengaruhi oleh manusia dalam upaya mereka menjadikan ide kristen dapat diterapkan bagi seluruh umat manusia.

Pendirian teoritis idealis memberikan ide satu tempat dominan dalam perubahan sosial. Kita telah mencatat bahwa “bapak sosiologi”, Auguste Comte

berpendapat bahwa sejarah manusia harus dipahami “sejarah pemikiran manusia”. Karenanya, Comte pada dasarnya adalah seorang idealis dalam pendekatannya terhadap perubahan sosial, menekankan prestasi masyarakat yang lebih beradab melalui peningkatan penggunaan nalar¹³⁸.

Tetapi Whitehead pun mengakui bahwa kita berhadapan dengan persoalan yang lebih rumpil dari itu. Karena ide muncul sebagai penjelasan dari adat dan kebiasaan, dan suatu ide lenyap dengan ditemukannya metode dan institusi penjas yang baru. Peradaban tidak berasal dari kontrak sosial: manusia tidak berkumpul bersama-sama lalu menyepakati ide-ide yang kemudian menentukan jalannya sejarah. “Upaya mula-mula agaknya adalah memperkenalkan secara pelan ide-ide yang menjelaskan cara-cara berperilaku dan mengalirkan perasaan-perasaan yang telah menguasai kehidupan manusia”. Jelas, ide menentukan perilaku, tetapi perilaku pun mempengaruhi pemikiran. Jadi, Whitehead mengakui adanya sumber ide tetapi menekankan pada kekuatan ide dalam evolusi peradaban.

¹³⁸ *Op.Cit.hal 248*

Tokoh filsafat idealis paling berpengaruh adalah Hegel, yang membayangkan sejarah sebagai perkembangan semangat zaman. Menurut Hegel, semangat mencerminkan kemutlakan; semangat adalah prinsip utama segala sesuatu yang ada. Selanjutnya, semangat adalah suatu proses; perkembangannya diteruskan oleh proses dialektika dari tingkat kesadaran “di dalam diri sendiri” ketingkat kesadaran “untuk diri sendiri”. Proses dialektika ini termasuk menciptakan dan menghasilkan kontradiksi berkepanjangan. Satu kesatuan menciptakan lawannya sendiri dan terlibat dalam pertentangan dengannya. Hasil konflik itu adalah kehancuran sebagian-sebagian dari kedua kesatuan itu dan menciptakan kesatuan baru yang lebih besar dan lebih berdiferensiasi ketimbang kedua kesatuan semula, dan menggabungkan ke dalam dirinya sendiri segala aspek kesatuan semula itu menjadi sifatnya di masa datang.

Selanjutnya Hegel berpendapat, dialektika adalah ciri universal dari realitas. Dalam karyanya *the Lesser Logic* ia menulis bahwa dialektika adalah “prinsip dari semua gerakan dan aktivitas yang kita temukan

dalam realitas....Segala sesuatu yang mengelilingi¹³⁹ kita dapat dipandang sebagai contoh dari dialektika”. Hegel mengartikan dialektika baik sebagai metode penelitian maupun sebagai pola kehidupan seluruh makhluk. Dialektika adalah cara berpikir dan inti realitas, termasuk pengalaman kita tentang realitas.

Bagaimana cara perkembangan dialektika semangat zaman ini berhubungan dengan sejarah konkrit? Dalam arti paling sederhana individu dan ide menjadi alat dari semangat. Semangat tercipta dalam alam dan sejarah; sejarah adalah semangat yang mewujudkan, mengalir dalam waktu”. Yang terpenting dalam proses ini adalah negara yang merupakan manifestasi dari ide Tuhan di dunia. Perubahan berkepanjangan dalam negara menghasilkan kemajuan, karena semangat dunia semakin terjelma dalam aktivitas dan organisasi negara.

Pandangan ini secara tersirat membenarkan keadaan negara yang ada, dan Hegel secara tegas menyatakan hal ini: Bangsa yang melahirkan ide dalam bentuk prinsip alamiah akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan pengembangan kesadaran diri

¹³⁹ *Op.Cit.hal 249*

tentang pemikiran dunia. Bangsa ini akan menjadi bangsa dominan karena ia menjadi alat dari semangat zaman tertentu. Jadi, idealisme objektif Hegel bergabung menjadi pemujaan negara. Perubahan adalah akibat aktivitas semangat di dalam diri manusia dan bangsa, dan khususnya di dalam negara; individu menemukan kepuasannya karena ia berpartisipasi di dalam negara. Beberapa penulis tidak lagi menempatkan manusia bersikap tunduk kepada penguasa lalim yang teraba seperti dilakukan Hegel dalam gambarannya tentang evolusi dialektika dari Semangat.

Pendirian ketiga mengenai hubungan antara faktor material dan ideal adalah dari aliran interaksionis. Pendirian ini menyatakan, terdapat interaksi antara faktor material dan ideal, dan bobot keduanya kurang-lebih seimbang. Aspek keseimbangan pengaruh kedua faktor inilah yang membedakan pendirian interaksionis ini dari pendirian Marxis dan idealis yang mengakui juga interaksi keduanya, tetapi memberikan tekanan kepada salah satu faktor material atau ideal. Pendekatan

interaksionis dicontohkan oleh studi Bell di Jamaica¹⁴⁰. Di Jamaica telah terjadi perubahan berkenaan dengan hak-hak manusia. Berbagai hak sipil, politik, ekonomi dan sosial telah diperluas ke sebagian besar penduduk. Termasuk ke dalam hak-hak sipil ini adalah kebebasan beragama, persamaan hak di muka hakim, hak berserikat dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Hak-hak politik mencakup berbagai masalah seperti penentuan keputusan dengan pemungutan suara dan persamaan dalam mendapatkan pelayanan umum. Hak ekonomi mencakup keadilan dalam skala upah, jaminan hari tua dan hak untuk berserikat. Hak sosial mencakup berbagai jenis kebebasan baru seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, hak untuk memilih jodoh, dan pemenuhan kebutuhan material yang memadai untuk semua orang.

Bagaimana cara munculnya hak-hak baru ini? Menurut Bell terjadi sebagai akibat pemanfaatan kontradiksi antara ide dan realitas.

“Dapat ditunjukkan saling pengaruh antara ide dan institusi di seluruh sejarah . Institusi membantu perkembangan ide tertentu

¹⁴⁰ *Op.Cit. hal 250*

mengenai apa yang benar atau salah, apa yang boleh apa yang tidak boleh; dan ide – yang sering berasal dari luar Jamaica sendiri – telah mendorong timbulnya tindakan sosial yang terorganisasi yang sering berakibat mengubah,elenyapkan atau menciptakan institusi baru”.

Pendirian keempat adalah varasi dari ketiga pendirian di atas (Marxis, idealis, dan interaksionis). Menurut pendirian ini, faktor ide dan material berubah bersama-sama (meskipun tak harus serentak) dan tak mungkin mengetahui hubungan kausalnya. Pendirian ini sesuai dengan pandangan Brinton mengenai revolusi. Ia menyatakan, ide selalu merupakan bagian dari pra-revolusioner. Tanpa ide tak ada revolusi. Namun ini tak berarti bahwa ide menyebabkan revolusi; juga tak berarti bahwa revolusi dapat berhenti dengan penyensoran ide. Ini semata-mata berarti bahwa ide selalu merupakan bagian dari seperangkat variabel yang terlibat dalam revolusi.

Dalam situasi pra-revolusioner selalu terdapat sejumlah ketidakpuasan mengenai kondisi

ekonomi, politik, dan sosial¹⁴¹. Ketidakpuasan ini terbentuk melalui artikulasi ide dan alat untuk mewujudkan ide itu. Jadi, keseragaman dalam revolusi adalah perwujudan ide-ide ketimbang ide tertentu – yang mungkin juga sangat berbeda dari revolusi lain.

Masalah terakhir inilah yang menerangkan mengapa ide harus diperhatikan dalam studi perubahan sosial. Seperti dinyatakan Brinton, ide selalu diungkapkan di dalam situasi pra-revolusioner. Apakah orang berpegang pada salah satu di antara 4 pendirian di atas atau tidak, yang jelas ide selalu merupakan bagian dari variabel yang terlibat dalam perubahan sosial. Tak sukar memahami mengapa demikian. Manusia adalah makhluk yang harus memahami dunia ini. Seluruh mitos, agama, ilmu pengetahuan, ideologi, berfungsi memberi makna kepada dunia. Manusia primitif mungkin menerangkan suatu kecelakaan dengan mengacu kepada setan yang melarangnya menyandung batu yang menyebabkan ia celaka, sedangkan orang modern akan menerangkannya dengan mengacu kepada keadaan di sekitarnya. Namun keduanya, mitos

¹⁴¹ *Op.Cit.hal 251*

dan ilmu, membantu mencapai tujuan yang sama, memberikan makna atas segala sesuatu yang terjadi. Karena itu mungkin benar, bahwa ideologi yang beranekaragam dapat menyertai pola perubahan yang serupa. Ini tak berarti bahwa ideologi merupakan unsur yang tak dapat disingkirkan dari perubahan. Pertanyaan mendasar yang timbul selanjutnya adalah: apakah upaya untuk memberi makna selalu mengikuti perilaku ataukah perilaku itu sendiri dapat ditentukan oleh upaya untuk membuat realitas menjadi penuh makna? Urutan kedua faktor itu tetap menjadi persoalan mendasar kecuali jika orang menerima pendirian bahwa ide dan kondisi material hanyalah perkara perbedaan tekanan pandangan¹⁴².

6. PRAGMATISME DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA

Mencermati uraian di atas penulis beranggapan bahwa ada kaitan antara pragmatisme dan perubahan sosialbudaya. Secara teoritik berbagai faktor, konsep, dan arah perubahan social budaya banyak didorong oleh aspek pragmatis yang kuat

¹⁴² *Op.Cit.hal 252*

sekali. Teori Khaldun tentang konflik di gurun pasir, Marxisme tentang factor mode produksi, sampai dengan post modernism juga berisi pergelutan, perdebatan, dan kompetisi dengan aspek pragmatism tersebut. Banyak pula penelitian social, ekonomi, dan politik yang membeberkan data pengaruh kekuatan material terhadap perubahan social, politik, ekonomi, dan hokum.

Perspektif teoritik menunjukkan ada kaitan erat antara pragmatisme dan perubahan sosial karena berbagai varian teori materialisme dan idealisme menggambarkan kuatnya faktor dorongan untuk memperoleh kepuasan, hasil, kegunaan materialis, dan kekuasaan secara maksimal. Beberapa aspek ini, merupakan unsur dari pragmatisme. Ini berarti proses pembangunan, perkembangan, dan modernisasi sebenarnya banyak didorong oleh unsur pragmatisme itu. Meskipun demikian, belajar dari sejarah sosial masyarakat bahwa perkembangan masyarakat tidak selalu satu arah, tetapi bersifat multi dimensi. Dari sini penjelasan tentang lahirnya teori-teori dan filsafat moral sebagai keseimbangan perubahan sosial itu sendiri.

SUMBER PUSTAKA

Lauer, Robert H: *Perspektif tentang Perubahan Sosial*,
Rineka Cipta, Jakarta, 2003

ETIKA PRAGMATIS ala RICHARD RORTY

Oleh

Agustinus Ryadi

Pendahuluan

Ketika kita berpikir tentang bagaimana kita seharusnya hidup, sebenarnya kita sedang men-teori-kan etika. Banyak orang berpendapat bahwa teori etika merupakan cara untuk mendapatkan kriteria moral: beberapa daftar aturan atau prinsip-prinsip. Konsekuensinya, kita dapat membedakan mana yang baik dan jahat, mana yang benar dan salah atau sebuah daftar keutamaan yang kita coba tanamkan. Utilitarian mengajarkan bagaimana kita seharusnya mempromosikan kebahagiaan terbesar dari sebanyak-banyaknya orang; Kontraktualian mengajarkan bagaimana kita mencari kriteria yang timbul dari persetujuan nyata atau hipotetis; Kantian mengajarkan bagaimana kita harus memperlakukan *liyan* sebagai “tujuan dalam dirinya sendiri” dan tidak melulu sebagai sarana.

Penulis terkesan akan Richard McKay Rorty¹⁴³ karena ia mengkritik, mengevaluasi sistem-sistem pemikiran filsuf-filsuf pendahulu dan mengenakan hasil studinya dalam dunia yang majemuk ini dengan perspektif pragmatisme. Penulis membatasi diri pada “Etika Pragmatis Richard Rorty”, yang dapat ditemukan dalam lukisannya “manusia ironis liberal”. Untuk menanggapi tema “Pragmatisme dan Etika”, penulis akan menjelaskan kritik Rorty terhadap epistemologi, etnosentrisme, etika pragmatis Rorty, serta catatan yang berisi bagian yang menguatkan dan melemahkan etika Rorty.

1. Kritik Richard Rorty terhadap Epistemologi

Kaum postmodernis menyatakan bahwa “berakhirnya Modernisme” dalam arti bahwa anggapan modern mengenai “subjek” dan “dunia objektif” telah berakhir. Sementara itu, postmodernisme dipahami sebagai usaha-usaha untuk mengungkapkan segala konsekuensi

¹⁴³ Filsuf dan kritikus dari Amerika. Ia (1931-2007) menjalani pendidikan di Chicago dan Yale, mengajar di Wellesley College dan Princeton, menjadi professor humaniora di Universitas Virginia sejak 1982 sampai pindah ke Stanford sebagai professor perbandingan sastra pada 1998. Ia dikenal luas sebagai filsuf analitik yang berbalik melawan apa yang dianggapnya sebagai kategori tradisional terkait pokok ide dalam tradisi tersebut (kebenaran, pengetahuan, objektivitas & representasi) dan menggantinya dengan “putaran-bebas” pragmatisme versi postmodernis.

berakhirnya modernisme dan metafisika mengenai fondasionalisme dan representasionalisme.

Richard Rorty menyatakan bahwa epistemologi sudah mati dan tidak ada relevansinya untuk dibahas kembali¹⁴⁴. Inti masalahnya terletak pada karakter fondasional epistemologi¹⁴⁵. Fondasionalisme meyakini bahwa segala pengetahuan ilmiah positif memerlukan satu disiplin ilmu yang keras yang dapat mengecek dan mendasari pernyataan-pernyataannya mengenai kebenaran¹⁴⁶. Salah satu disiplin ilmu yang keras tersebut adalah epistemologi. Suatu ilmu adalah sah apabila penemuan-penemuan ilmu itu dapat lolos dari pengujian epistemologis. Rorty melihat bahwa usaha-usaha para filsuf belakangan ini, L. Wittgenstein untuk memperbaiki fondasi pengetahuan (teori “representasi”), Martin Heidegger (kategori-kategori filsafat yang lepas dari epistemologi), dan John Dewey (versi alamiah dari visi sejarah Hegel), berakhir pada *useless*¹⁴⁷.

¹⁴⁴ J. Sudarminta (2002), hlm.23.

¹⁴⁵ Kai Nielsen, “Richard Rorty”, dalam John R. Shook & Joseph Margolis (Eds.), (2006): 127.

¹⁴⁶ J. Sudarminta (2002), hlm.138.

¹⁴⁷ Hasilnya adalah kosakata refleksi filosofis abad ketujuhbelas tidak berguna dan tidak membawa kita kepada perubahan yang berarti.

Postmodernisme juga mengungkap bahwa representasionalisme¹⁴⁸ adalah bukan satu-satunya cara kita mendapat pemahaman tentang dunia. Representasionalisme adalah paham yang menyatakan bahwa pikiran/jiwa (kadang otak) beroperasi berdasarkan perepresentasian atas hal dan ciri yang kita pahami atau pikirkan. Pengetahuan adalah penampilan kenyataan “luar” di dalam “batin” manusia. Misalnya, Martin Heidegger memahami epistemologi modern sebagai awal dari kecenderungan global masyarakat teknologis untuk menguasai dunia. Ia memperlihatkan bahwa yang memungkinkan kita dapat merepresentasikan realitas sebenarnya adalah kenyataan dasar bahwa kita justru selalu merupakan bagian dari realitas tersebut.

Pemahaman tentang dunia (pengetahuan) dilihat oleh Rorty sebagai representasi realitas yang benar-benar bebas dari intervensi manusia. Maka dari itu representasionalisme sebagai teori pembenaran tidak koheren¹⁴⁹. Di satu pihak, ide-ide dapat diidentifikasi

¹⁴⁸ Richard Rorty (1998¹⁰), hlm. 393; Bdk. Kai Nielsen, “Richard Rorty”, dalam John R. Shook & Joseph Margolis (Eds.), (2006): 129-130.

¹⁴⁹ Koheren berarti berhubungan, Richard Rorty (1994), hlm.16-17; Kai Nielsen, “Richard Rorty”, dalam John R. Shook & Joseph Margolis (Eds.), (2006): 132: “Anti representationalists reject the very idea that beliefs can represent reality: they are neither realists nor anti-realists. Truth, they claim, is not an *explanatory* property”.

secara akurat dan dideskripsikan secara abstrak di dalam akal sendiri yang lepas dari dunia “luar”. Di pihak lain, ide-ide tersebut dianggap merepresentasikan kenyataan luar itu.

Kritik Rorty terhadap epistemologi tersebut di atas membawa konsekuensi pada konsep “kebenaran”. Ia menggunakan kritik atas fondasionalisme dengan perspektif pragmatisme. Baginya, tidak adanya suatu disiplin ilmu yang dapat melegitimasi dan memberi dasar bagi pengetahuan adalah bukan masalah besar. Hal ini menunjukkan bahwa kosa kata seperti “hakikat”, kebenaran, rasionalitas, kehendak, kebaikan, keindahan tidak berdampak pada kehidupan kita. Ungkapan filosofis seperti “Suatu kalimat itu sah hanya apabila memiliki korespondensi dengan kenyataan yang sebenarnya” adalah pernyataan metafisik yang kurus¹⁵⁰.

Kaum pragmatik memandang “Kebenaran” hanyalah nama bagi ciri yang dipunyai oleh semua pernyataan yang benar. Rorty meragukan bahwa kita dapat mengatakan sesuatu yang bersifat umum dan berguna tentang syarat untuk menjadi “baik” dan “benar”. Bagi Rorty, suatu tindakan itu baik hanya dalam kondisi tertentu saja. Jadi, kebenaran itu hanya merupakan persoalan “baik

¹⁵⁰ Kai Nielsen, “Richard Rorty”, dalam John R. Shook & Joseph Margolis (Eds.), (2006): 127-128.

pada saat ini dan dapat lebih baik kelak”. Kebenaran adalah suatu pengesahan bagi keyakinan yang hingga sekarang terbukti *usefully* sehingga upaya pengesahan lain tidak diperlukan lagi. Akhirnya, pertanyaan yang masih tinggal adalah bagaimana kita menemukan cara-cara untuk mendapatkan titik pandang yang bersifat antifilosofis¹⁵¹.

2. Etnosentrisme

Postmodernisme tidak mempercayai lagi segala bentuk cerita besar, seperti “Kemajuan”, Kebebasan Akal”, “Emansipasi”, dan seterusnya¹⁵². Maka para pemikir postmodern memiliki landasan sebagai titik berangkat mereka pada pluralitas permainan-bahasa dan bentuk kehidupan. Misalnya, Jean-François Lyotard (1924-1998) memberi saran untuk kembali ke “pragmatika Bahasa” versi Ludwig Wittgenstein. Maksudnya, kita mengakui bahwa kita memang hidup dalam macam-macam permainan-bahasa yang sulit dikomunikasikan secara adil dan bebas. Lyotard mengusulkan pemecahan masalah dalam pluralisme tersebut dengan pengaktifan *paralogy*. Strategi *paralogy* merupakan “gerakan menggerogoti permainan-bahasa yang telah mapan dan dominan dengan cara mengaktifkan perbedaan-

¹⁵¹ Bdk. Richard Rorty (1994), hlm.xxi.

¹⁵² I. Bambang Sugiharto (1996), hlm.58.

perbedaan, serta mengadakan inovasi dan eksperimentasi terus-menerus”¹⁵³.

Rorty tidak menyetujui pendapat Lyotard di atas. Karena ia melihat bahwa perbedaan budaya dan bahasa tidak perlu menjadi antagonis dan tidak terjembatani. Ia melihat perbedaan budaya sebagai perbedaan antara teori lama dan teori baru. Bagi Rorty, apa yang harus dilakukan adalah memperlawankan secara “bermain” macam-macam kebudayaan tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan cara berbicara dan bertindak yang lebih baik dalam dunia pluralistik. Hubungan antar-budaya senyatanya memiliki sifat saling menaklukkan, tetapi kenyataan ini tidak perlu menggunakan kekerasan. Jadi, Rorty melihat pluralisme sebagai proses pembelajaran hal-hal baru¹⁵⁴.

Maka Rorty meyakini bahwa etnosentrisme¹⁵⁵ masih dibutuhkan dalam situasi itu. Bahasa yang kita pelajari

¹⁵³ *Ibid.*, hlm.59.

¹⁵⁴ Bdk. Jürgen Habermas menarik masalah pluralisme “permainan bahasa” ke konteks hakikat komunikasi. Pada akhirnya, masalah komunikasi juga dilihat sebagai masalah kebutuhan dan kepentingan.

¹⁵⁵ Evan Simpson & Mark Williams, “Reconstructing Rorty’s Ethics: Styles, Languages, and Vocabularies of Moral Reflection”, dalam Gary B. Madison & Marty Fairbairn (Eds.), (1999): 122: “Rorty’s positive ethical theses complement his ethnocentrism insofar as they based on a set of agreements which distinguish our, broadly speaking, liberal point of view from less tolerant moral viewpoints”.

menentukan pemikiran kita. Setiap bahasa mewujudkan sebuah budaya khas; ia memiliki pandangan tersendiri mengenai dunia, kepercayaan, nilai-nilai, dan cita-citanya sendiri. Namun bahasa kita bersifat *kontigen*. Contoh, kita lahir sebagai orang Indonesia adalah suatu kesementaraan. Dia dilahirkan sebagai orang Italia juga merupakan suatu keniscayaan yang tidak abadi. Orang Indonesia memiliki bahasa dengan pandangannya¹⁵⁶ yang khas. Orang Italia juga memiliki filsafatnya sendiri. Jadi, kita tidak semestinya bertanya tentang kepercayaan dan keyakinan mana yang lebih benar, melainkan kita harus bertanya kepercayaan dan keyakinan mana yang lebih dapat membantu kita dalam kehidupan ini¹⁵⁷.

Setiap budaya memiliki peluang untuk mengusulkan cara untuk menyatukan masyarakat dunia dalam pertemuan yang bebas dan terbuka. Namun aturan main yang digunakan adalah persuasi. Misalnya, kaum liberal reformis mengatakan: “kami bagus sebab, lewat persuasi, perlahan-lahan orang lain akan melihat sendiri bahwa kami memang mampu membuat hal-hal bagus”¹⁵⁸. Kaum ini merasa hebat karena ia mampu berprestasi. Kelompok ini mampu untuk

¹⁵⁶ Apa yang kita pikirkan dan yakini bergantung pada *kosa kata* yang kita pergunakan, lih. Richard Rorty (1995), hlm. 3-22.

¹⁵⁷ Franz Magnis-Suseno (2000), hlm.243.

¹⁵⁸ I. Bambang Sugiharto (1996), hlm.60.

bersikap realistis dan wajar. Setiap budaya memiliki peluang untuk menempati posisi ini, yakni ia memiliki peluang untuk meyakinkan kepada budaya lain bahwa ia *excellent* karena menghasilkan sesuatu yang *excellent*¹⁵⁹.

Pesan yang mau disampaikan oleh Rorty kepada kita melalui penjelasan etnosentrisme adalah kita hanya dapat memandang sesuatu pada pertama kalinya dari sudut pandang diri kita sendiri.

3. Etika Pragmatis¹⁶⁰ Richard Rorty

Mengingat masing-masing filsuf merumuskan pragmatisme secara berbeda, tetapi ada satu ide inti yang dianut bersama yaitu, makna rumusan berbanding lurus dengan *efek-efek praktis* dari yang menganutnya¹⁶¹. Ajaran pragmatisme diringkas dalam pernyataan “kebenaran adalah apa yang membawa hasil”. Suatu pertimbangan itu “benar” apabila aku mencapai hasil yang berguna dalam tindakanku.

¹⁵⁹ Richard Rorty (1991), hlm.212-215.

¹⁶⁰ Usaha para etikawan untuk mencari kerangka etika pragmatis: Sami Puhlström (Ed.), (2011), hlm.62-138; Hugh LaFollette (Ed.), (2000), hlm.414-419; Stanley Cavell & Alexander Sesonske, “Logical Empiricism and Pragmatism in Ethics”, dalam *The Journal of Philosophy*, 48 (1951) 1: 5-17.

¹⁶¹ Bdk. Simon Blackburn (2013), hlm. 685. Huruf miring dari penulis.

3.1. Etika Pragmatis¹⁶²

Berbicara pragmatisme dan etika, kita tidak dapat menghindari dari pembahasan mengenai hubungan yang erat antara konsep kebenaran dan gagasan kebaikan. William James (1842-1910) menyatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan terletak di dalam “harga tunainya” (*cash value*). Yang benar bukan apa yang mencerminkan realitas dengan paling tepat, melainkan “yang paling baik bagi kita apabila kita mempercayainya”¹⁶³. Filsafat merupakan sarana pengembangan diri sang filsuf.

Kriteria pragmatis adalah “Apa perbedaan yang dihasilkan oleh pertimbangan-pertimbanganku di dalam pengalaman manusiawi?” Jadi, kebenaran tidak lagi diukur oleh keterbukaan budi terhadap kenyataan yang mengatasi hal-hal individual, tetapi dipandang melalui kacamata utilitarianisme kasar¹⁶⁴. Benar tidaknya ide dan tindakan

¹⁶² Usaha-usaha para etikawan untuk mengelompokkan etika pragmatismenya Richard Rorty: Evan Simpson & Mark Williams, “Reconstructing Rorty’s Ethics: Styles, Languages, and Vocabularies of Moral Reflection”, dalam Gary B. Madison & Marty Fairbairn (Eds.), (1999): 120-137; Aldo Vendemiati (2007), hlm.41-46; Mariano Fazio & Francisco Fernandez Labastida (2011), hlm.316-320.

¹⁶³ Richard H. Popkin & Avrum Stroll (1993), hlm. 275-278.

¹⁶⁴ William James menyatakan bahwa kebenaran sinonim dengan kegunaan atau manfaat. Karena ide yang benar adalah ide yang bermanfaat dalam pengalaman hidup manusia, dan ide yang berguna dalam pengalaman hidup manusia yang konkret adalah ide

tergantung pada konsekuensi praktis, kegunaan, efisiensi, buah hasil, dan kepuasan¹⁶⁵ yang diperoleh dari tindakan tersebut.

Prinsip dasar pragmatisme adalah melihat dunia realitas sebagai sebuah produk sosial itu sendiri. Pragmatisme seharusnya tidak melihat dunia realitas sebagai produk dari sesuatu yang melampaui manusia dan sosial seperti yang dilakukan oleh Heidegger. Ia menyoal bagaimana dapat sampai pada apa yang disebut Yang Ada (*Being*). Jadi, ia menyatakan bahwa tugas filsafat adalah pemahaman masalah secara benar. Pragmatisme bersikukuh pada “Segala sesuatu adalah konstruksi sosial” atau “Setiap kesadaran adalah urusan bahasa”¹⁶⁶. Apa yang dicari dalam pragmatisme adalah bukan kebenaran, melainkan kegunaan yang dapat dipenuhi dengan alat dan teknologi dan tujuan

yang benar. Kaum pragmatis menyatakan bahwa berlakunya ide yang bersangkutan dalam realitas kehidupan. Lih. A. Sonny Keraf (1987), hlm. 42.

¹⁶⁵ Kepuasan menurut James mengandung tiga pengertian: 1/Keyakinan yang dapat diverifikasi dalam pengalaman diri sendiri atau orang lain. 2/Keyakinan tersebut konsisten dengan keyakinan-keyakinan kita sebelumnya. 3/ Keyakinan tersebut secara subjektif lebih baik daripada keyakinan-keyakinan kita yang mengandung unsur 1/ & 2/. Bdk. A. Sonny Keraf (1987), hlm. 43.

¹⁶⁶ Richard Rorty (1999), hlm.48.

yang berbeda-beda¹⁶⁷. Pragmatisme hendak menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana “membebaskan dan memberikan manfaat pada kondisi manusia”, sehingga hasilnya dapat menciptakan kebaikan, kebahagiaan dan kesejahteraan pada manusia dan lingkungannya¹⁶⁸.

Metode pragmatis untuk menentukan baik atau buruk, sesuai atau tidak adalah sama dengan menentukan benar atau salah. Kita dapat bertanya pada masalah tingkah laku manusia, misalnya: “Bukankah dengan melakukan aksi yang pasti benar supaya menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi?” Jawaban atas pertanyaan tersebut diuji oleh pertanyaan “apakah aksi itu menghasilkan kepuasan”. Hal ini juga dikenakan bagi orang yang mendapat kesulitan ekonomi. Jalan yang tepat untuk mengatasi kesulitan ekonomi adalah merampok bank. Kita perlu mengevaluasi

¹⁶⁷ Yasraf Amir Piliang (2010³), hlm. 318. R. Rorty menjadi pragmatis walaupun demokrasi memiliki arti penting bagi hidupnya. Ia melihat agenda dan laku politik merupakan persoalan “pembaharuan yang pragmatis, jangka-pendek dan kompromi”. Ia menyimpan radikalisme dan *pathos* untuk saat-saat privat. Contoh persoalan pragmatis dalam politik adalah komentar Acok (Jurnelis [MetroTV], Minggu, 28 September 2014, pukul 22.30-23.30): “Ahok, jaga bacot lu!” kata lawan politik. Acok mengatakan: “Bacot Ahok membawa manfaat, PNS yang nggak benar dipecat, Ya terusin aja bacot Ahok!”

¹⁶⁸ Richard Rorty (2006¹⁰), hlm.27.

terlebih dahulu tentang akibat¹⁶⁹ yang mungkin dari perampokan bank. Kita sebenarnya menggiring orang untuk mengambil kesimpulan bahwa sebuah teori tidak berlaku karena segenap akibat tidak memuaskan diri perampok, yaitu hukuman penjara dan akibat yang tidak memuaskan bagi orang lain. Maka seseorang akan membuat kesimpulan bahwa jalan keluar bagi kesulitan ekonomi dengan perampokan bank adalah “keliru” (tidak memuaskan *liyan*). Sebaliknya, orang tersebut telah memiliki kesimpulan bahwa tindakan itu “benar” (memuaskan diri yang mengalami kesulitan ekonomi).

Sebuah aspek filsafat perlu mendapat perhatian kalau kita mau menjelaskan etika pragmatis menurut Rorty. Ia beranggapan bahwa filsafat merupakan sebuah pembicaraan dalam konteks bahasa tertentu. Masing-masing hadirin saling menantang dan merangsang untuk berpikir

¹⁶⁹ Bdk. William James memiliki prinsip bahwa kebenaran suatu ide perlu dilihat berdasarkan konsekuensi praktisnya atau apa yang berlaku dalam pengalaman (validasi dan verifikasi). Konsekuensi yang dimaksudkan oleh James adalah proses verifikasi ide dalam pengalaman konkret, A. Sonny Keraf (1987), 44; Pengalaman menunjukkan bahwa masing-masing bagian memiliki kepentingan sendiri yang sama esensialnya dan kita menghadapi dunia plural, yang berubah dan berkembang terus, A. Sonny Keraf (1987), 71.

lebih jauh dalam pembicaraan¹⁷⁰. Satu-satunya yang dapat memberikan kepastian tentang dirinya sendiri kepada kita adalah keinginan. Satu-satunya yang benar-benar nyata bagi kita adalah hasrat (*desire*). Pragmatisme adalah satu-satunya pencarian yang akan mampu sampai pada suatu *kenyataan*, yaitu dengan:

“...mengidentifikasi makna hidup dengan cara mendapatkan apa yang kita inginkan, dengan memaksakan kehendak kita. Satu-satunya kosmologi yang kita akui secara meyakinkan seperti yang direkomendasikan Plato adalah *potret dunia* kita sendiri (komunal atau individual), cara kita mengatur segala sesuatu untuk kegunaan, cara yang diperintahkan oleh hasrat”¹⁷¹.

¹⁷⁰ Richard Rorty (1998¹⁰), hlm. 377. Ia membongkar usaha filsafat untuk menemukan sebuah dasar rasional universal tak terbantah bagi pengetahuan manusia.

¹⁷¹ Richard Rorty (2006¹⁰), hlm.29.

Untuk memahami etika pragmatis Rorty, kita perlu merekonstruksi suatu tipologi praktek moral¹⁷². Ia menjelaskan konsepnya mengenai hubungan antara prinsip-prinsip dan praktek-praktek moral:

“Prinsip-prinsip moral seperti imperatif kategoris dan prinsip utilitarian hanya memiliki sebuah poin sejauh mana mereka bergabung ke keseluruhan lembaga-lembaga, praktek-praktek dan kosa kata moral serta pertimbangan politis. Semuanya merupakan pengingat-pengingat, singkatan-singkatan dari praktek-praktek demikian, bukan membenaran praktek-praktek demikian”¹⁷³.

Bagi Rorty, prinsip-prinsip moral umum tidak dapat menggantikan kedudukan praktek-praktek dari pertimbangan moral. Namun ada pengecualian, prinsip-prinsip moral umum sebagai sarana pedagogis untuk mentransmisikan praktek-praktek ini dari satu generasi ke

¹⁷² Gary B. Madison & Marty Fairbairn (1999), hlm.120.

¹⁷³ Richard Rorty (1995), hlm.58-59. Terjemahan dari penulis.

generasi. Tiada seorangpun menjalankan prinsip-prinsip membenarkan partisipasi dalam praktek-praktek ini. Ia menyetujui bahwa prinsip-prinsip tidak menyediakan dasar-dasar yang baik bagi praktek-praktek.

Etika pragmatis Rorty tidak membutuhkan pendasaran teoretis atau pertama-tama terjadi melalui pendasaran teoretis¹⁷⁴, melainkan memerlukan *kepekaan secara nyata* terhadap *liyan*. Hal ini dapat dipahami karena ia tidak membedakan antara pertanyaan “Mengapa aku harus bertindak secara moral?” dan “Bagaimana aku bertindak secara moral?” Pertanyaan “*Mengapa ...?*” memang tidak dapat diberi pendasaran.

Rorty menyarankan agar kita harus menjadi lebih peka, lebih ikut merasakan, lebih ingin tahu mengenai *liyan* dan lebih mengejek terhadap diri kita sendiri. Kita menjadi

¹⁷⁴ Rorty tidak menerima “gagasan Platon dan Kant tentang rasionalitas yang berpusat pada gagasan bahwa kita harus menampung tindakan-tindakan tertentu di bawah prinsip-prinsip umum apabila kita mau bersikap moral” (Richard Rorty [1995], hlm. 33). Ia juga menolak Habermas (meski mereka adalah sama-sama liberal). “Habermas dan orang-orang metafisik lain ... berpendapat bahwa kebebasan-kebebasan politik liberal membutuhkan semacam kesepakatan tentang apa yang manusiawi secara universal. Kami orang ironis yang juga liberal berpendapat bahwa kebebasan-kebebasan itu tidak membutuhkan kesepakatan tentang hal apa pun yang lebih mendasar kecuali tentang bahwa kita memang mengharapkan kebebasan-kebebasan itu” (Richard Rorty [1995], hlm. 84). Inilah gambaran manusia liberal menurut Rorty!

lebih peka karena bersentuhan dengan *liyan*. Karena satu-satunya yang dapat memberikan kepastian tentang dirinya kepada kita adalah keinginan. Satu-satunya yang benar-benar nyata bagi kita adalah hasrat (*desire*). Kita melihat bahwa dia itu orang dengan isteri dan anak kecil yang penuh dengan penderitaan. Hati nuraniku tidak akan mengijinkan “memusnahkan”. Jadi kita membangun kepekaan dengan belajar “ikut merasakan”.

3.2. “Manusia Ironis Liberal”

Richard Rorty mengenal dua “norma etis” dalam filsafat moral. Norma etis yang pertama adalah “Bersikaplah ironis terhadap dirimu sendiri”. Norma etis yang kedua adalah “Jangan bersikap kejam terhadap orang lain”¹⁷⁵. Pandangan Rorty mengenai etika dapat dirumuskan dengan istilah “Manusia ironis liberal”.

Sebuah teori sering terdengar seperti sebuah omong besar yang melupakan kenyataan bahwa hal kecil selalu ada yang tak tercakup pada zaman ini. Kita tidak dapat sepenuhnya memiliki harapan bahwa ada hal yang universal dalam kehidupan. Apalagi, konsep universal sebagai dasar dan tujuan bersama yang menyebabkan teori itu sah dan

¹⁷⁵ Richard Rorty (1995), hlm. xv.

akan disetujui oleh semua orang. Maka Rorty menganjurkan: “Mari kita hidup dengan ironi!” Kita tidak perlu bersikukuh dengan sebuah premis. Manusia ironis adalah orang yang menyadari bahwa keyakinan-keyakinannya tidak dapat dipertahankan lagi¹⁷⁶.

Hal tersebut di atas dapat dimengerti karena orang-orang “pasca-modernis” berduyun-duyun masuk ke dalam pengalaman dan mereka meragukan dengan bertanya adakah nilai universal? Rorty menunjukkan nilai-nilai selalu *contingent*, tergantung, kepada waktu dan tempat. Apa yang “baik” selamanya dipengaruhi konteks, bahkan keyakinan kita sendiri mengenai “baik” dan “buruk” perlu dicampur dengan satu porsi ironi yang berukuran besar.

Manusia ironis merupakan lawan manusia metafisik¹⁷⁷. Richard Rorty menolak dengan tegas segala sesuatu yang disebut pendasaran¹⁷⁸, termasuk kecenderungan metafisika sebagai pencarian dasar kebenaran dari realitas. Ia mengembangkan pemikiran yang

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm. xv.

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

¹⁷⁸ Richard Rorty menunjukkan bahwa manusia tidak memerlukan “prinsip etis yang luhur”. Soal keadilan, misalnya, tidak perlu dibebani oleh filsafat karena keadilan dapat dicapai dengan “muddling through” (mengatasi). Gambarannya adalah pada waktu seorang hakim harus memutuskan perkara yang sulit: ia mencari celah, tetapi ia selalu memperbaiki yang dianggap salah.

antimetafisika melalui pragmatisme. Ia melihat dunia kenyataan sebagai sebuah produk sosial itu sendiri. Beberapa ungkapan Rorty menunjukkan hal yang baru disebut, antara lain “Segala sesuatu adalah konstruksi sosial”¹⁷⁹; “Setiap kesadaran adalah urusan bahasa”¹⁸⁰. Ia cenderung melihat J. Derrida sebagai manusia “ironis”¹⁸¹ karena karyanya bertujuan untuk memenuhi tujuan “privat” (lawan “tujuan publik”).

MANUSIA IRONIS	MANUSIA METAFISIK
Ia bertanya: Apa yang menghina seseorang?	Ia bertanya: Mengapa jangan menghina seseorang?
Ia mengatakan: Satu-satunya ikatan sosial yang kita	Ia mengatakan: Sebagai ikatan sosial kita

¹⁷⁹ Richard Rorty (1999), 48: konstruksi sosial bukan urusan yang suprasosial.

¹⁸⁰ Richard Rorty (1999), 48: urusan bahasa bukan urusan Tuhan.

¹⁸¹ Bagi Derrida sendiri, ia hendak mengemukakan sesuatu yang tidak menghindari publik. Ia mengemukakan “yang rahasia”. Baginya, “yang rahasia” berada di sebuah wilayah yang tidak dapat disentuh yang berkuasa bahkan dalam sistem totaliter sekalipun. Namun orang semakin mengakui “yang rahasia”, dan menghargainya, ia akan terbuka tempat publik itu bagi *liyan*. Bagi Derrida, demokrasi musnah bila “yang-rahasia” hanya diletakkan sebagai persoalan privat. Hal ini terjadi pada waktu Stalin mencampakkan sajak Pasternak dan gereja atau para ulama yang mengusut kemurnian doa. Di situ, apa yang-rahasia dihabiskan. Lih. Richard Rorty (1995), hlm. 122-137.

**MENINJAU ULANG DAN MENYIKAPI
PRAGMATISME DEWASA INI
KATA PENGANTAR**

butuhkan adalah kesadaran bahwa kita semua sama-sama dapat terluka apabila kita dihina.	memerlukan sebuah prinsip (“hak asasi manusia”) sebagai orientasi.
Ia mengatakan: Solidaritas berdasarkan perasaan keterancaman bersama.	Ia mengatakan: Solidaritas berdasarkan milik atau kekuasaan bersama.
Ia memperhatikan apakah ada orang yang menderita.	Ia memperhatikan apakah terjadi pelanggaran hukum moral.

Perbedaan antara manusia ironis dan manusia metafisik menurut Detlev Horster¹⁸².

Mengapa Rorty menolak prinsip metafisik? Karena prinsip metafisik¹⁸³ berada dalam ranah teori dan teori tidak begitu kuat untuk mendorong kita untuk mengambil sikap

¹⁸² Kutipan dari Frans Magnis-Suseno (2000), hlm. 250.

¹⁸³ Tugas metafisika adalah memahami hakekat secara benar, sedangkan pragmatisme hendak menjawab pertanyaan penting lain, bagaimana “membebaskan dan memberikan manfaat pada kondisi manusia”. Manusia metafisik adalah orang-orang yang mendasarkan sikap-sikap mereka pada prinsip-prinsip metafisik. Contoh, aku melakukan A, karena Allah menghendaknya (etika teonom), aku melakukan B, karena manusia itu makhluk rasional dan arena itu harus dihormati (Kant), aku melakukan C, karena dia sama-sama manusia (humanism), lih. Yasraf Amir Piliang (2010³), hlm. 319.

positif (praktis-nyata) terhadap sesama¹⁸⁴. Metafisika dipenuhi oleh ketidakpastian tentang apa yang diklaim itu. Metafisika tidak memiliki cara untuk memperlihatkan wujudnya, baik yang bersifat internal (*cogito*) maupun yang bersifat eksternal (Tuhan, malaikat, *spirit*). Hasratlah yang memberi kepastian tentang dirinya sendiri dan kebenaran nyata bagi kita.

Manusia liberal hanya meyakini satu tuntutan dasar etika, yaitu “Jangan menyakiti makhluk lain atau membuat orang lain terhina”¹⁸⁵. “Norma etis” yang kedua ini memukul telak pemikiran ideologis. Pandangan tersebut di atas membuka ruang luas bagi toleransi. Manusia dewasa ini tidak dapat menjadi fanatik untuk memeluk ide-ide besar. Namun ia tidak memberi dasar yang cukup bagi langkah politik untuk membangun kebaikan bagi sesama. Bagi Rorty, kita tidak memiliki alasan untuk berdiam diri pada waktu kekejaman terjadi. Rorty memaksudkan “menolak bersikap kejam” dengan solidaritas. Manusia mau solider kepada *liyan* karena kita “ikut merasakan”. Kita *peka secara nyata* yang membuat kita untuk bersikap baik.

Rorty menolak pandangan metafisik bahwa sikap liberal - kebebasan sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan

¹⁸⁴ Frans Magnis-Suseno (2000), hlm.255.

¹⁸⁵ Richard Rorty (1995), hlm.xv.

bersama atau “tindakan paling buruk yang dapat kita lakukan adalah perbuatan kejam”¹⁸⁶ – memerlukan pendasaran filosofis. Ia menunjukkan bahwa solidaritas antar manusia terbangun karena kepekaan akan kenyataan bahwa *liyan* mudah terluka dan terhina. Manusia liberal tidak memaksakan nilai-nilai dan keyakinan tertentu kepada masyarakat, melainkan menjamin kebebasan di mana masing-masing individu dapat hidup menurut nilai dan keyakinan mereka sendiri¹⁸⁷.

Orang dapat menyatakan pendapatnya tanpa rasa takut. Ketentuannya adalah orang boleh mengungkapkannya. “Yang menentukan adalah bahwa kalau engkau meyakini sesuatu, engkau dapat mengatakannya tanpa dilukai. Yang menentukan adalah kemampuanmu untuk mengatakan kepada *liyan* mengenai hal-hal yang engkau anggap benar, bukan yang niscaya benar. Apabila kita menjamin kebebasan, kebenaran dapat menjamin dirinya sendiri”¹⁸⁸. Manusia liberal tidak perlu takut untuk mengatakan apa yang menjadi pendapatnya.

Rorty mendefinisikan manusia liberal sebagai “orang yang memiliki pendapat bahwa tindakan yang paling buruk

¹⁸⁶ Richard Rorty (1995), hlm.xv.

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm.60f.

¹⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 176.

yang dapat kita lakukan adalah perbuatan kejam”¹⁸⁹. Manusia liberal adalah orang yang tidak mau melukai, menyakiti atau merendahkan *liyan*. Manusia liberal hanya memiliki sebuah “imperatif kategoris” (bahasa Immanuel Kant), yaitu penolakan terhadap kekejaman. Manusia liberal akan melanggar kebebasan *liyan* kalau ia memperlakukan liyan dengan kejam.

Manusia ironis liberal ini dapat menciptakan solidaritas. Rorty memandang solidaritas antarmanusia sebagai tujuan yang harus dicapai. “Solidaritas tidak ditemukan melalui refleksi, melainkan diciptakan. Solidaritas diciptakan dengan meningkatkan kepekaan kita terhadap segi-segi rasa sakit dan keterhinaan *liyan*, orang yang belum kita kenal, secara terinci. Kepekaan meningkat berarti orang semakin tidak mudah untuk memarginalisasikan orang-orang yang berpikir berbeda dari kita”¹⁹⁰. Solidaritas adalah masalah kepekaan (ikut merasakan)!

Jadi, manusia ironis liberal adalah “orang-orang yang memuat di antara hasrat-hasrat tak berdasarkan itu harapan mereka sendiri bahwa penderitaan akan dikurangi, bahwa

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm. xv.

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm. xvi.

penghinaan manusia-manusia oleh manusia-manusia lain dapat berakhir”¹⁹¹.

3.3. Catatan

a. *Bagian yang Memperkuat Etika Rorty*

Kepekaan etis membuat anak-anak bersentuhan dengan kehidupan *liyan* sehingga mereka semakin dapat ikut merasakan kehidupan orang lain. Mendidik anak (termasuk orang dewasa) agar mereka menjadi orang baik. Akhirnya, mereka mudah memiliki solidaritas. Solidaritas diciptakan dengan meningkatkan kepekaan kita terhadap aspek-aspek rasa sakit dan keterhinaan secara terperinci.

b. *Bagian yang Melemahkan Etika Rorty*

Perasaan spontan tidak mencukupi untuk menghadapi masalah-masalah etis yang kompleks pada jaman modern. *De facto*, kita menghadapi berbagai alternatif secara moral yang dapat dibenarkan apabila kita dapat mempertanggungjawabkan. Argumentasi objektif mendasari pertanggungjawaban itu. Inilah yang mau didukung oleh etika.

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. xv.

Lebih jauh lagi, bagaimana rasa solidaritas antar manusia dapat memadai untuk membentuk sebuah kekuatan pembebas, jika keyakinan akan nilai-nilai universal mencair disebabkan oleh ironi? Ironi tidak cukup memberi dasar bagi langkah politik untuk membangun kebaikan bagi sesama. Rorty tidak menganggap kita dapat selamanya berdiri di tepi dengan senyum ironis.

Rorty lalai berpikir mengenai kenyataan bahwa masyarakat terstruktur. Apakah hukum atau peraturan dibuat karena peningkatan kepekaan? Kondisi dasar manusia adalah bahwa ia hidup bersama dalam suasana kekurangan. Kondisi itu tidak cukup kalau ditangani dengan larangan bersikap kejam. Suasana kekurangan menimbulkan persoalan tentang pembagian perhatian, tenaga, dana secara etis di antara berbagai pihak, yang tentu saja harapannya tidak dapat dipenuhi. Di sini tempat peran keadilan. Karena keadilan memberi orientasi etis bagaimana kita memilih mana yang kita lakukan terlebih dahulu dalam kondisi keterbatasan. Rorty hanya memperhatikan prinsip kebaikan (larangan bersikap kejam) dan melalaikan prinsip keadilan.

Daftar Acuan

1. Karya-Karya Richard Rorty

Rorty, Richard, *Objectivity, Relativism and Truth*, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.

_____, *Consequences of Pragmatism (Essays: 1972-1980)*, University of Minnesota, Minneapolis-USA, 1994.

_____, *Contingency, Irony, and Solidarity*, Cambridge University Press, USA, 1995.

_____, *Philosophy and the Mirror of Nature*, Blackwell, Oxford UK & Cambridge USA, 1998¹⁰ [1980].

_____, *Philosophy and Social Hope*, Penguin Books, 1999.

_____, *Essays on Heidegger and Others: Philosophical Papers*, Cambridge University Press, New York, 2006¹⁰.

2. Karya-Karya Pendukung

a. Buku-Buku

Fazio, Mariano & Labastida, Francisco Fernandez, *A History of Contemporary Philosophy: Nineteenth and Twentieth Centuries*, Scepter, New York, 2011.

Keraf, Sonny A., *Pragmatisme menurut William James*, Kanisius, Yogyakarta, 1987.

- LaFollette, Hugh (Ed.), *The Blackwell Guide to Ethical Theory*, Blackwell Publishers, Massachusetts-USA & Oxford-UK, 2000.
- Madison, Gary B. & Fairbairn, Marty (Eds.), *The Ethics of Postmodernity: Current Trends in Continental Thought*, Northwestern University Press, Evanston, Illinois, 1999.
- Magnis-Suseno, Frans, *12 Tokoh Etika Abad ke-20*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Piliang, Yasraf Amir, *Post-Realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika*, Jalasutra, Yogyakarta, 2010³.
- Popkin, Richard H. & Stroll, Avrum, *Philosophy Made Simple*, Doubleday, New York, 1993.
- Puhlström, Sami (Ed.), *The Continuum Companion to Pragmatism*, Continuum, London & New York, 2011.
- Shook, John R. & Margolis, Joseph (Eds.), *A Companion to Pragmatism*, Blackwell Publishing, USA, 2006.
- Sudarminta, J., *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- Sugiharto, I. Bambang, *Postmodernisme: Tantangan bagi Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1996.
- Vendemiati, Aldo, *Universalismo e Relativismo nell'Etica Contemporanea*, Marietti, Genova-Milano, 2007.

b. Artikel-Artikel

Cavell, Stanley & Sesonkske, Alexander, “Logical Empiricism and Pragmatism in Ethics”, dalam *The Journal of Philosophy*, 48 (1951) 1: 5-17.

LaFollette, Hugh, “Pragmatic Ethics”, dalam LaFollette, Hugh (Ed.), *The Blackwell Guide to Ethical Theory*, Blackwell Publishers, Massachusetts-USA & Oxford-UK, 2000: 414-419.

Simpson, Evan & Williams, Mark, “Reconstructing Rorty’s Ethics: Styles, Languages, and Vocabulries of Moral Reflection”, dalam Madison, Gary B. & Fairbairn, Marty (Eds.), *The Ethics of Postmodernity: Current Trends in Continental Thought*, Northwestern University Press, Evanston, Illinois, 1999: 120-137.

3. Kamus

Blackburn, Simon, *Kamus Filsafat: Buku Acuan Paling Terpercaya di Dunia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013 (Orig. Inggris, 2008).

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Third Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge, London & New York, 2000.

Hunnex, Milton D., *Chronological and Thematic: Charts of Philosophies & Philosophers*, Zondervan Publishing House, Michigan, 1986.

Popkin, Richard H., *The Columbia History of Western Philosophy*, Columbia University Press, New York, 1999.

Reale, Giovanni/Antiseri, Dario, *Il Pensiero Occidentale dalle Origini ad Oggi 3: Dal Romanticismo ai Giorni Nostri*, Editrice La Scuola, Brescia, 1996¹⁸.

**MENIMBANG ETIKA PRAGMATISME WILLIAM
JAMES DENGAN ETIKA KRISTIANI**

Oleh:

Xaverius Chandra H.

Pragmatisme dan utilitarianisme disebut oleh dalam *Veritatis Splendor* sebagai yang ada di balik ada “konsekuensialisme” dan “proporsionalisme” yang menyusun teori-teori etis yang diajukan sejumlah teolog moral.¹⁹² Seperti dapat dilihat dari namanya,

¹⁹²VS 74; Menurut Germain Grisez “konsekuensialisme” atau “proporsionalisme” adalah suatu pertimbangan moral yang didasarkan pada penilaian komparatif terhadap kebaikan atau manfaat dan keburukan atau mudarat yang dikandung dan ditawarkan oleh kemungkinan-kemungkinan untuk dipilih. (GERMAIN GRISEZ, *Christian Moral Principles*, Vol. I, Franciscan Herald, Chicago, 1983, 159); Teolog-teolog moral itu, antara lain: J. Fuchs yang membedakan keburukan pramoral dan keburukan moral. Suatu pertimbangan moral tindakan tidak dapat dibuat sebelum intensi pelaku karena itu tidak termasuk dalam pengujian tindakan manusia karena baik intensi maupun situasi adalah yang mendasari pertimbangan moral. Karena itu, sejumlah norma universal adalah sudah memadai untuk hidup keseharian meski tidak absolut. Selanjutnya J. Fuchs menandakan bahwa seseorang tidaklah bermaksud buruk ketika ia memilih melakukan yang buruk hanya sebagai suatu sarana proporsional untuk mencapai kebaikan yang lebih besar.; B. Sculler membedakan nilai-nilai nonmoral seperti hidup, kesehatan, dan kekayaan, dan nilai-nilai moral, seperti keadilan, kebenaran, dan kesetiaan. Norma-norma adalah berkenaan dengan nilai-nilai

nonmoral yang memiliki alasan pengecualian padanya. Semua nilai nonmoral harus ditimbang secara teleologis dari konkuensi-konsekuensianya.; L. Janssens menyebut keburukan ontis, yang tidak dimaksudkan sebagai suatu tujuan akhir, tetapi hanya tujuan antara yang terarah pada tujuan yang lebih tinggi. Nilai-nilai pramoral seperti hidup, kesehatan, pengetahuan, dsb., maupun yang bukan nilai, seperti penyakit, ketidaktahuan, kematian, dll, berkaitan dengan tindakan kita. Dalam situasi di mana nilai-nilai pramoral berkaitan dengan yang bukan nilai pramoral, kita harus memiliki alternatif yang menunjukkan preferensi kita pada yang bukan nilai pramoral yang lebih kecil. Norma-norma moral yang menunjuk pada yang bukan nilai pramoral ini hanya bahasa deskriptif, bukan istilah moral (bohong-dusta), Norma-norma demikian adalah relatif; Peter Knauer mengajukan pengertian baru atas prinsip “efek ganda” dengan menentang prinsip bahwa suatu keburukan moral terletak dalam pembolehan atau menyebabkan suatu keburukan fisik yang tidak bisa dibenarkan oleh karena alasan yang memadai-setara-nya. Menurutny “tujuan tidak menghalalkan cara” dapat diterapkan hanya pada keburukan moral yang dipakai sebagai sarana; J. G. Milhaven mengajukan pendekatan epistemologis yang didasarkan pada bukti empiris dimana suatu etika kasih didasarkan atas suatu evaluasi yang tepat atas konkuensi-konsekuensi dari tindakan-tindakan kita dalam terang kasih; C. E. Curran menyampaikan suatu model tanggung jawab-relasional di mana seseorang diperbolehkan menginkorporasikan unsur-unsur terbaik dari model teleologis. Ia mengajukan pula prinsip kompromi yang dilandaskan pada situasi keberdosaan manusia yang muncul karena hadirnya dosa di dunia. Menurutny semua nilai yang terpisah dari intensionalitas final adalah pramoral sehingga keburukan adalah pramoral, namun di sisi lain dimensi sosial dari dosa begitu mempengaruhi realitas sehingga ada keharusan untuk menerima suatu keburukan moral sebagai suatu konkuensi dari hadirnya dosa dalam dunia. Realitas dosa di dunia ini mempengaruhi manusia dalam semua relasinya sehingga dapat menjadi dasar bagi suatu teori kompromi yang mengauai keberadaan dosa yang membuat manusia harus melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan seandainya dosa itu tidak ada.; E. McDonagh

mengajukan moralitas tanggung jawab berdasarkan pengalaman panggilan moral dalam situasi manusia dengan dimensi-dimensi interpersonal, sosial, dan historisnya. Baginya “harus” tidak dapat ditarik dari “adalah”, tetapi sebaliknya. Alasan moral diaplikasikan dengan rasa proporsi dengan memperhatikan tingkat keburukan dan situasi mereka yang bertanggung jawab dengan komitmen yang bukan pada nilai yang abstrak, melainkan pada pribadi-pribadi secara komunitas; Richard A. McCormick mengakui peran menentukan dari konsekuensi-konsekuensi dalam teologi moral, di samping juga intensionalisme dan etika kristen yang menerangi pertimbangan terhadap konsekuensi-konsekuensi. Menurutnyanya adalah makna atau keberartian tindakanlah yang menghasilkan norma-norma moral konkret dengan pembatasannya, dan bukannya konsekuensi langsung. Ia mengajukan bahwa dalam situasi-situasi konflik, pilihan yang mengandung keburukan yang lebih kecil adalah yang seharusnya diambil. Alasan yang proporsional adalah yang diperoleh dari perbandingan antara manfaat dan mudarat dan dari situ ditentukan “lesser evil.” Ia mengatakan bahwa di mana suatu kebaikan yang lebih tinggi ada dalam bahaya dan satu-satunya sarana untuk melindunginya adalah dengan memilih melakukan suatu keburukan nonmoral, maka di sini kehendak tetap terbuka pada nilai-nilai yang menyusun kebaikan manusia karena di situ sudah ada alasan yang memadai sehingga di sini tujuan yang baik membenarkan sarana yang buruk secara moral, di mana sarannya adalah melakukan sesuatu yang buruk dan tujuannya adalah kebaikan yang secara proporsional lebih besar; Franz Bockle mengakui bahwa etika saintifik harus mengajukan pernyataan-pernyataan yang mengikat mengenai isi dari kewajiban moral sejauh kita dapat mengenali struktur esensial dari kodrat manusia. Akan tetapi, ini hanya bersifat sangat umum dan sampai abstrak tertentu abstrak. Ketika kita sampai pada panduan yang lebih konkret, maka hanya memperhatikan wawasan dan rumusan semacam ini adalah tidak cukup di hadapan perubahan kondisi kemanusiaan sehingga kita harus selalu mencari kembali makna eksistensi kita di dunia nyata keseharian kita. (GEORGE V. LOBO, *Guide to Christian Living*, Christian Classics, Westminster, 1989, 212-217; G. GRISEZ, *Op. cit.*, 145-146; WILLIAM E. MAY, *An Introduction to Moral Theology*,

konsekuensialisme merupakan teori etis yang meletakkan kriteria baiknya tindakan semata-mata pada kalkulasi atas konsekuensi-konsekuensi yang dapat diantisipasi dari pilihan-pilihan, sedangkan proporsionalisme merupakan teori etis, yang dengan menimbang berbagai nilai dan kebaikan, berfokus pada lebih memilih proporsi yang dapat diakui dari antara efek-efek yang baik dan yang buruk dari suatu pilihan memperhitungkan kebaikan yang lebih besar atau keburukan yang lebih kecil sedapat mungkin dalam situasi tertentu (VS 75). Bila konsekuensialisme dan

Our Sunday Visitor, Huntington, 1994, 111-116); Para teolog konsekuensialis-proporsionalis menolak absolut-absolut moral. Mereka itu misalnya Franz Boeckle, Charles E. Curran, Josef Fuchs, Bernard Haering, Louis Janssens, Richard McCormick, Timothy E. O'Connell, Richard Gula, Franz Scolz, Bruno Schueller. Apa yang absolut disebut teolog-teolog revisionis ini sebagai sekadar "prinsip-prinsip transenden" yang mengarahkan kita pada unsur-unsur keberadaan kita dengan melampaui yang material atau hanya mengakui kasih pada Tuhan dan sesama sebagai yang absolut. ada juga yang memandang yang absolut itu sekadar "formal" dalam arti mengartikulasikan disposisi dan sikap batiniah kita yang seharusnya sebagai kualitas-kualitas yang seharusnya mencirri orang yang baik secara moral. Ada yang lain yang menyebutnya sekadar "anjuran" alih-alih norma atau sekadar yang menyusun unsur absolut dalam moral. Yang absolut itu hanya berguna untuk mengingatkan kita akan apa yang sudah kita tahu dan menyarankan kita menghindari yang buruk secara moral serta pilih yang benar secara moral. Ada juga yang menyebut yang absolut sebagai norma "material" yang menunjuk pada jenis tindakan yang seharusnya dihindari sejauh mungkin. (W. E. MAY, *Op. cit.*, 111-112); Menurut G. Grisez istilah-istilah "pramoral", "nonmoral", "ontis", "fisik" menunjuk pada bahasa kaum proporsionalis (G. GRISEZ, *Op. cit.*, 144)

proporsionalisme dipandang begitu serius pengaruhnya oleh paus ada moral katolik sehingga perlu ditanggapi secara khusus dalam suatu ensiklik, betapa pada “Extension Course” Fakultas Filsafat Widya Mandala tahun ini yang mengangkat “pragmatisme” sebagai temanya, pragmatisme itu memicu rasa ingin tahu tentang apa sesungguhnya dia dan bagaimana wujudnya dalam etika serta bagaimana dia bisa mempengaruhi etika. Karena itu, etika pragmatisme yang dihadirkan di sini dicoba kami komentari dari sudut etika kristiani. Tidak seluruh etika pragmatisme yang diangkat, tetapi hanya etika pragmatisme William James.¹⁹³

¹⁹³ Ada banyak wajah dalam pragmatisme. Pragmatisme yang diikuti di sini adalah yang dari William James Cakupan pemikiran pragmatisme W. James lebih luas daripada para pemikir pragmatisme klasik lain. Dari W. James diperoleh pemikiran pragmatisme yang menyangkut baik eksistensi manusia maupun hidup dengan persoalan-persoalan praktisnya, termasuk ketika orang mau mencari korelasinya dengan etika religius.¹⁹³ Lebih daripada C. S. Peirce maupun J. Dewey, William James berusaha untuk menghubungkan pragmatisme pada banyak bidang kehidupan, termasuk agama, yang menjadi sasaran studi kami. Ini dikuatkan oleh W. James sendiri yang terkenal sebagai peneliti yang intens menyelidiki pengalaman-pengalaman religius dengan simpati dan kedalaman. W. James juga terbuka pada hampir semua ide yang membantu manusia dari untuk mengusahakan kemajuan kemanusiaan maupun yang sekadar memungkinkan seseorang untuk merasa diri lebih baik. Ini dapat dibandingkan dengan J. Dewey yang menekankan sains sebagai pemandu otoritatif pada kebenaran dan C. S. Peirce yang penyelidikannya pada kebenaran ditempuh lebih melalui jalan dialogis alih-alih individualisme. (RICHARD P. MULLIN, *The Soul of Classical*

1. Etika Pragmatisme William James

W. James ingin mengakhiri perdebatan tiada akhir antara sains dan agama sehubungan dengan makna dan kebenaran dengan mengajukan pragmatismenya.¹⁹⁴ Pendekatannya empiris murni. Apa yang ada di luar persepsi indrawi ditolak. Implikasi etisnya adalah pengajuan suatu metode untuk mengklarifikasi makna suatu konsep. Pragmatisme merupakan suatu metode untuk membuat klarifikasi atas konsep-konsep tanpa perlu berurusan dengan penentuan definisi sehingga di sini terhindarkan kemungkinan perdebatan karena titik berangkat apa yang metafisis. Pemikiran W. James berdasar pada pengalaman. Sensasi adalah hasil dari persepsi pada realitas. Mengada berarti dipersepsi. Realitas terdiri atas apa saja yang dipersepsi. Sesudah menetapkan tujuan, kehendak manusia kemudian mengkonstruksi realitas. Bagi W. James yang paling rasional adalah yang apa yang paling sesuai dengan pengalaman, paling bisa melayani tuntutan kehendak, dan yang paling konsisten.¹⁹⁵

American Philosophy, State University of New York Press, Albany, 2007, 125-126.)

¹⁹⁴*Op. cit.*, 3.

¹⁹⁵*Op. cit.*, 20.

Pada W. James etika seperti disiplin yang menguji dari pengalaman ide-ide hipotetis perseptif mana yang memiliki efek positif bagi perkembangan kemanusiaan ke arah yang lebih baik. Etika pada W. James adalah seperti “percobaan” berdasarkan pengamatan eksperiensial karena yang menentukan perkembangan kemanusiaan adalah pengalaman, dan karenanya tidak ada pertimbangan final. Dengan “percobaan” eksperiensial itu, maka sistem-sistem aturan yang tradisional dan berlaku tidak ada gunanya dan tidak perlu ada. Etika tidak punya batas untuk menawarkan hipotesa-hipotesa yang dapat salah. Bagi W. James perkembangan moral tercapai ketika seseorang berani menghadapi aturan-aturan dalam setiap dilema moral yang dihadapinya, yang mana setiap dilema itu merupakan suatu situasi yang unik sehingga etika tidak pernah dogmatis, melainkan selalu sugestif.¹⁹⁶ Tingkat kebenarannya ditentukan oleh tindakan-tindakan yang diambil untuk mengaplikasikan ide-ide perseptif yang diajukan sebagai hipotesa-hipotesa dalam tindakan-tindakan. Dari tindakan-tindakan yang “dicoba” itu kemudian ditinjau dari efek-efeknya yang mana yang

¹⁹⁶ WILLIAM JAMES, *The Will to Believe*, Harvard University Press, 1979, 158.

memenuhi harapan akan ideal kemanusiaan yang lebih baik dan mana yang tidak.

Etika seperti percobaan dalam ilmu alam ini dapat dimengerti dari titik berangkat pragmatisme yang memutuskan hubungan antara kebenaran dan kebebasan. Bagi pragmatisme pada umumnya kebenaran tidak terletak dalam kesesuaian pengetahuan dengan realitas.¹⁹⁷ Tidak ada alasan bagi siapapun, karena itu, untuk bingung atau cemas terhadap apa yang dapat membuat benarsesuatu karena suatu hal dapat benar tidak oleh sesuatu yang mutlak atau tetap. Siapa saja dipersilakan membuat sendiri keputusan untuk bertindak tanpa perlumenemukan atau menunggu kepastian tentang mana yang benar sebelum bertindak.¹⁹⁸ Sejarah etika kristiani dengan Ockhamisme dan nominalismenya memiliki kemiripan dengan ini. Bagi W.

¹⁹⁷Misalnya, dapat kita lihat pendapat R. Rorty berikut: "Bagi para pragmatis, kebenaran adalah sekadar apa yang ada pada semua pernyataan yang benar dan tidak ada yang lebih daripada itu. Suatu tindakan diakui baik tetapi tidak perlu dicari apa yang membuat tindakan itu baik. Kalau suatu tindakan adalah baik, cukuplah ia baik pada keadaan itu dan tidak perlu mencari unsur-unsur apa yang tetap yang membuat suatu tindakan yang memiliki unsur-unsur itu adalah baik." (RICHARD RORTY, *Consequences of Pragmatism: Essays, 1972-1980*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1982, xiii.)

¹⁹⁸W. JAMES, *Pragmatism*, Harvard University Press, 1975, xvi

James arti kebenaran adalah tak lebih dari sekadar identifikasi makna suatu ide dengan efek-efek indrawinya belaka.¹⁹⁹ Kebenaran disusun dari hasil pengamatan dan taksiran atas hipotesa-hipotesa berdasarkan efek-efek praktis dari tindakan-tindakan menurut keinginan dan tujuan subjek sendiri. Dengan demikian, kita tidak perlu mencari kebenaran dengan berteori, tetapi cukup dengan mengujicobakan ide-ide melalui aplikasi terhadapnya dalam tindakan-tindakan, lalu dengan melihat efek-efek praktisnya, kita dapat melihat yang mana dari ide-ide itu yang berfungsi secara praktis sesuai keinginan dan kepentingan kita. Dengan kata lain, satu-satunya yang perlu diperhatikan adalah tercapainya harapan seseorang, dan bukan apa yang benar itu sendiri dalam dirinya sendiri. Bagaimana ide-ide itu berfungsi secara praktis memenuhi harapan adalah yang menentukan apakah suatu konsep itu jelas, berarti dan bermakna, atau tidak. Proses ini dilakukan secara empiris saja. Hasil pengamatan dan evaluasi atas efek-efek yang dapat diamati menyusun kepercayaan (*belief*). Makna suatu ide atau objek disusun oleh *beliefs* ini. Dengan begitu, tidak diperlukan unsur-unsur yang metafisis dan juga karenanya tidak perlu ada perselisihan-perselisihan teoretis.

¹⁹⁹MICHAEL BACON, *Pragmatism: An Introduction*, Polity, Cambridge, 2012, 27.

W. James menangani fenomena religius melalui eksplorasi atas pengalaman-pengalaman religius. Metode pragmatismenya tampak di sana. Adalah performa yang paling khas yang dibidik dalam penyelidikan W. James atas pengalaman religius sebab dari sana dapat ditentukan makna suatu kepercayaan, konsep, atau ide. Performa yang paling khas ini ditangkap dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan yang spesifik yang dihasilkan dalam praktik. Apa yang disebut sebagai efek-efek praktis tak lain daripada perbedaan-perbedaan spesifik tersebut. Adalah tindakan-tindakan yang mengaplikasikan hipotesa-hipotesa yang perlu dilihat, ditaksir, dan dibandingkan efek-efek praktisnya. Menurut W. James adalah tugas filsafat untuk menemukan perbedaan apa yang akan terjadi pada kita jika suatu rumusan hipotesa adalah benar.²⁰⁰ Sebagai seorang empiris radikal W. James tidak dapat menerima bahwa kegiatan berfilsafat dapat dilakukan dengan mulai dari konsep-konsep abstrak. Penolakan ini didasarkan pada semua pengetahuan kita adalah seperti arus yang terus menerus mengalir, yang kemudian dipecah, dan dibekukan dalam konsep kita. Konsep tak lain dari kesadaran mental yang statis dan terpisah yang merepresentasikan aliran

²⁰⁰ W. JAMES, *Pragmatism*, *Op. cit.*, xxvii

pengalaman yang terus-menerus itu. Itulah sebabnya, tidak ada pengetahuan tanpa pengalaman sebagaimana tidak ada ide di luar pengalaman.

Konsekuensi-konsekuensi atau implikasi-implikasi praktis dari ide-ide atau teori-teori bagi hidup manusia dalam hidup sehari-hari adalah sangat menentukan dalam metode pragmatisme. Melanjutkan kata W. James tentang tugas filsafat di atas, menaksir implikasi-implikasi dan mengatasi perselisihan-perselisihan metafisikal adalah yang pertama-tama dan paling penting untuk dilakukan.²⁰¹ Dengan metode pragmatis diperoleh persetujuan-persetujuan atas opini-opini dan fakta-fakta baru, yang bila kemudian saling melengkapi dengan hambatan yang sekecil mungkin, akan tersusun *beliefs*. Selanjutnya, suatu organisasi menyeluruh yang terdiri atas *beliefs* yang seimbang dan kontinyumenyusun “kebenaran”. Dengan demikian, adalah persetujuan psikologis manusia setelah melihat aplikabilitas praktis dari hipotesa-hipotesa, yang menyusun suatu “kebenaran.” Kebenaran di sini merupakan kebenaran yang diperoleh secara subjektif dan karenanya relatif sebab bahwa bukan saja di samping pembuatannya dilakukan oleh tiap individu tanpa mengacu pada apapun yang absolut, ia

²⁰¹*Op. cit.*, 28

juga terbuka pada segala modifikasi seturut kebutuhan dan tujuan yang berbeda-beda pada subjeknya. Sandaran pada *beliefs* secara psikologis dapat membuat apa yang benar bagi sebagian orang dapat salah bagi sebagian yang lain dilihat dari apakah kebutuhan dan kepentingannya terpuaskan atau tidak. Karena ada keanekaan kebutuhan dan kepentingan, maka ada berbagai sudut pandang yang membuat tidak mungkin dihasilkan suatu kebenaran tunggal, tetap, dan berlaku universal. Di sini tampak bahwa bila dihubungkan dengan realitas, maka realitas itu tidak sama dengan bagaimana orang mengertinya sehingga tidak mungkin ada cara tunggal dalam mendekati realitas. Makna dan “kebenaran” tergantung dari metode interpretasi kita atas *beliefs*. Di sini tampak bahwa bukan kita yang bergantung pada realitas, melainkan realitaslah yang bergantung pada kita yang melakukan penafsiran dan pembuatan keputusan seturut bagaimana “bekerjanya” ide-ide seturut dan bagi tujuan-tujuan yang kita letakkan yang tidak sama pada satu orang dengan orang lainnya, termasuk dalam membuat melakukan pertimbangan dan penilaian secara psikologis. Paham akan kebenaran semacam ini berkonsekuensi pada etika.

2. Etika Pragmatisme W. James

Bagi pragmatisme etika merupakan kontruksi relasi-relasi antara ide-ide yang berangkat dari kebutuhan dan kepentingan melalui penilaian berdasarkan efek-efek yang dihasilkan oleh aplikasi ide-ide dalam melalui tindakan-tindakan. Singkatnya etika pragmatisme adalah etika yang berdasarkan pertimbangan atas *beliefs* yang diperoleh dengan metode pragmatisme untuk mencari yang mana ide yang paling bermakna berdasarkan tingkat kepuasan individu berdasarkan kebutuhan dan kepentingannya. Etika di sini hadir hanya sebagai “pembaca” hubungan di antara dua atau lebih “data” secara a posteriori. Ini menyerupai metode sains. Pekerjaan etika di sini adalah lebih sebagai penimbang bobot atau kadar pemuasan harapan dan tujuan subjek melalui evaluasi atas efek-efek praktis mana untuk mendapatkan yang mana yang paling optimal melayani keinginan dan kepentingan diri. Ini dilakukan tanpa perlu mengacu pada apapun yang lain, seperti aturan, kebiasaan, ataupun prinsip yang absolut. Apa yang merupakan prinsip-prinsip etis yang a priori disisihkan. Tidak perlu ada evaluasi atas nilai-nilai etis supaya daripadanya dapat ditarik imperatif-imperatif etis secara deduktif tidak dapat diterima. Dengan demikian, etika semacam ini adalah etika yang

sepenuhnya eksperiensial, atau yang didasarkan pada pengamatan dan takaran psikologis subjektif. Ia lebih tampak sebagai metode untuk memecahkan problem-problem moral secara arbiter dengan bertolak hanya dari konsekuensi-konsekuensi praktis yang dapat diamati secara empiris, di mana setiap orang menentukan sendiri kualifikasi etis tindakannya menurut persepsi dan pertimbangan psikologisnya sendiri. Apapun hasil evaluasi maupun afirmasi yang didapat dengan metode pragmatisme dianggap sebagai sah.

Dalam etika pragmatisme juga tidak ada yang absolut. Kebenaran etis disusun dari proses dalam waktu yang berdiri sendiri-sendiri yang tidak diasalkan secara konklusif dari prinsip-prinsip. Kebenaran akan “baik” dan “buruk” adalah arbiter, dan ini bergantung dari bagaimana individu menaksir secara psikologis *beliefs* dengan metode pragmatismeterhadap manfaat-manfaat yang ditimbulkannya.²⁰² Kebenaran akan baik dan buruk di sini lebih sebagai yang diciptakan sendiri oleh individu. Aku sendirilah pencipta kebaikan etis.

²⁰²*Op. cit.*, xii

Bagaimana dengan norma yang padanya individu menyesuaikan diri? Keberadaan norma di luar individu tidak ditolak oleh W.James.²⁰³ Akan tetapi, norma di sini bukannya norma yang didahului oleh paket nilai yang sudah ada lebih dahulu (a priori) maupun yang berdiri sendiri lepas dari yang pengalaman-pengalaman indrawi secara partikular. Norma yang diakui di sini tak lain adalah imperatif etis yang ditarik dari *beliefs* yang dihasilkan melalui proses metode pragmatis yang a posteriori. Norma bukan sesuatu yang sudah ada sebelum bertindak dan yang harus diikuti, melainkan *belief* yang tidak mengikatku secara wajib karena ia memang tidak dijadikan kebenaran yang mutlak.

Kehendak bebas menurut W. James berhubungan dengan intensionalitas manusia terhadap apa yang disebut sebagai ide-ide yang sukar, yang diletakkan berhadapan dengan segala kebiasaan dan keinginan. Kehendak bebas berhubungan dengan masa depan sebagai bidang yang padanya terbentang kemungkinan-kemungkinan untuk dipilih dan direalisasikan oleh “aku” yang dapat melakukan tindakan-tindakan apa saja dalam kebebasanku. “Aku” dengan kebebasanku dalam dan untuk merealisasikan kemungkinan-kemungkinan di masa depan yang terbuka luas

²⁰³ W. JAMES, *The Will to Believe*, *Op. cit.*, 142, 146

tanpa batas itu dapat menolak sekaligus mematahkan segala hambatan yang muncul dari semua yang tidak direfleksikan terlebih dahulu, yaitu apa yang umum, biasa, tradisional, langsung-dapat-segera, spontan. Dengan demikian, kebebasan manusia adalah kebebasan yang terarah pada aplikasi ide-ide yang memiliki daya untuk mengubah dunia atau membawa kebaikan bagi diriku dan yang lain. Kehendak bebas bukanlah intensionalitas yang sekadar mengikuti apa yang spontan ataupun tunduk pada kebiasaan atau aturan. W. James membedakan antara tindakan-tindakan kehendak dalam hidup keseharian dengan tindakan-tindakan yang menempuh pertimbangan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan.²⁰⁴ Memilih untuk membuat keputusan yang melibatkan pertimbangan terlebih dahulu atau yang tidak mengikuti apa yang umum-biasa-spontan itu berarti terbuka untuk menghadapi konflik ide dengan maksim-maksim moral yang sudah ada, sentimen-sentimen (misalnya kesenangan), pendapat populer, persepsi moral, hasil-hasil kesepakatan sosial, yang memang dalam kehidupan keseharian sudah biasa melandasi dan menguasai pilihan tindakan individu. W. James menolak bertindak

²⁰⁴ RUTH ANNA PUTNAM, "Pragmatisme. La Philosophie Morale des Philosophes Pragmatistes" dalam MONIQUE CANTO-SPERBER, *Dictionnaire d'Ethique et de Philosophie Morale*, PUF, Paris, 1996, 1182.

dengan mengacu pada apa yang biasa, spontan, dan langsung segera diikuti ini. Baginya individu sebenarnya bisa menolak tunduk pada pilihan tindakan keseharian yang tanpa refleksi sebelumnya semacam itu karena individu bisa memilih apa yang bertentangan dengannya.²⁰⁵ Penolakan mengikuti ide yang tanpa refleksi tadi dan refleksi yang dilakukan dengan memakai metode pragmatis sudah cukup sebagai dasar untuk mengajukan klaim kebenaran etis baru. Semakin sukar atau tidak mudah seseorang untuk menolak ide yang sudah biasa, langsung segera-spontan dan sehari-hari, semakin jelas dan besar keberadaan bobot deliberatifnya. Bagi W. James pertimbangan etis yang mengacu pada yang tradisional, konvensional, dan umum tidak bisa disesuaikan dengan dan diaplikasikan pada setiap kasus etis yang berdiri sendiri. Setiap kasus seharusnya dihadapi dengan pertimbangan etisnya sendiri yang tidak berlandaskan pada apapun yang a priori, tetapi yang dilakukan pada *beliefs* secara a posteriori-nya sebagai landasan bagi evaluasi etisnya. Karena empirisme Jamesian menempatkan pertimbangan psikologis dalam pertimbangan subjektif sebagai yang mengatasi segala yang diuniversalkan bagi semua, kapanpun, di manapun, dan dalam situasi apapun ini, maka juga tidak ada pengakuan

²⁰⁵ W. JAMES, *Principles of Psychology*, Dover, New York, 1950, 1164.

akan yang absolut dalam etika pragmatisme W. James. Tidak heran bahwa di sini hidup moral dapat dikatakan merupakan suatu medan pertempuran antara apa yang dipandang umum (konvensional) langsung segera dengan ide-ide hipotesis yang diuji dengan metode pragmatis. Ketidakpastian dalam setiap pertimbangan moral semacam inilah yang membuat dalam etika pragmatisme tidak dapat dilakukan proses menarik kesimpulan etis lalu mengenakan suatu prinsip maupun aturan umum bagi tindakan-tindakan etis partikular, termasuk sehubungan dengan menghadapi problem-problem moral konkret.²⁰⁶

Karena pada etika W. James tidak ada universalisme etis, maka hukum, aturan, kebiasaan, pandangan moral yang umum dan konvensional tidak bisa dipertahankan, tidak patut untuk dipilih, dan harus diganti. Etika W. James justru berkenaan dengan pengajuan ide-ide yang bertentangan dengan apa yang dianggap umum, tradisional, dan konvensional itu seperti pada aturan, perintah, dan hukum. Ide-ide yang berlawanan ini memang bisa saja salah, tetapi itu tidak jadi soal bagi etika pragmatisme yang lebih bersifat sugestif alih-alih dogmatis.²⁰⁷ Cukuplah bahwa tindakan-

²⁰⁶ W. JAMES, *Op. cit.*, 1276

²⁰⁷ W. JAMES, *The Will to Believe, Op. cit.*, 158

tindakan yang dipilih berdasarkan *beliefs* yang dipilih itu mempunyai efek-efek yang memenuhi harapan, maka etika sudah bekerja sesuai maksudnya untuk melayani keinginan manusia akan hidup yang lebih baik sesuai keinginan dan kepentingannya. Dengan semangat penolakan untuk tunduk terhadap teori-teori moral tradisional ini, etika dapat dipandang sebagai itu yang meninjau ulang sistem-sistem teori-teori moral tradisional dengan segala produknya. Tidak dapat diterima bahwa keberadaan aturan adalah sebagai pemandu dan penentu bagi pertimbangan moral. Lagipula, hidup manusia sendiri begitu kompleks sehingga tidak bisa dipecahkan problem-problem etisnya dengan merujuk dan mengaplikasikan peraturan-peraturan.

Semua klaim moral tidak ditolak oleh W. James. Akan tetapi, baginya klaim moral tersebut haruslah merupakan rumusan dari sesuatu yang baik yang diinginkan dan menuntut untuk dipuaskan. Ia dipuaskan bila sudah diatasi konflik antara suatu klaim dengan klaim-klaim lainnya. Itulah sebabnya, di sini tidak diperlukan lagi penalaran atas apa yang baik secara a priori, yang justru mengandaikan adanya tatanan pra eksistensi dari pengada-pengada. Pada etika pragmatisme ketika seseorang menghendaki sesuatu yang baik, yang seharusnya dilakukan

olehnya adalah membuat klaim untuk menampung dan mengungkapkannya. Klaim itu mendesakkan diri untuk dipuaskan. Akan tetapi, tidak mungkin setiap klaim dipuaskan. Yang dapat dilakukan adalah membuat tatanan bagi klaim-klaim itu berdasarkan pandangan bahwa baik buruknya pengada-pengada di luar manusia tergantung pada kontribusinya pada kebaikan manusia. Di hadapan semua klaim yang kita buat dan yang menuntut untuk dipuaskan, tugas etika adalah mencapai cakrawala etis yang dapat memuaskan sebanyak mungkin tuntutan dan dari sana menentukan yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Di sini keberadaan klaim-klaim yang mutlak, final, tetap, dan universal ditolak. Di samping menolak semua absolut moral karena tidak ada yang perlu diacu selain konsekuensinya bagi kebaikan yang lebih besar, W. James menolak juga aturan atau perintah tanpa syarat sebagai rujukan dalam bertindak. Sebagai gantinya, yang seharusnya dicari adalah suatu dunia keseluruhan yang terdiri atas kebaikan-kebaikan.²⁰⁸ Ideal-ideal yang lebih inklusif atau universallah yang seharusnya dicari dengan jalan metode pragmatisme. Di sini kepercayaan religius mampu membuat orang-orang beragama memiliki lebih besar *passion* dan energi untuk

²⁰⁸*Op. cit.*, 209

kebaikan-kebaikan yang universal itu. Kepercayaan religius inidipandang sebagai pemberi daya tahan, energi, keberanian, dan usaha untuk mengusahakan supaya kebutuhan-kebutuhan hidup terpenuhi menurut apa yang ideal. Kepercayaan religius di sini bukan soal kepatuhan pada aturan, melainkan pengakuan akan keberadaan Allah, yang meski tidak diketahui adanya, namun berguna untuk menstabilisasi proses pencarian makna moral karena ia dapat menjadi postulat yang melingkupi segala sesuatu dan sekaligus memiliki seperangkat tuntutan sebagai yang ideal.²⁰⁹

3. Etika Kristiani di Hadapan Pragmatisme

Etika kristiani merupakan etika religius yang bersumber dari Pewahyuan. Ia sebenarnya adalah iman yang hendak diwujudkan dalam tindakan dalam hidup. Perwujudan kebaikan kemanusiaan menurut kebenaran dari Allah yang diterima dari Pewahyuan maupun diletakkan Allah dalam kodrat manusia merupakan acuannya. Berbeda dengan etika religius yang lain, etika kristiani muncul sebagai tanggapan atas Yesus Kristus dan pusat pewartaan-Nya,

²⁰⁹RICHARD P. MULLIN, *Op. cit.*, 60-61.

yaitu Kerajaan Allah. Yesus memaklumkan kedatangan Kerajaan Allah dalam diri-Nya sebagai realitas yang sedang mulai tetapi masih dalam proses menuju kepenuhannya kelak, yang mana moral kristiani merupakan jawaban manusia dalam hidupnya atas kabar gembira tentang Kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah, sebagai kehadiran pemerintahan Allah yang mencintai manusia dan mengundang manusia untuk masuk ke dalam persekutuan kasih dengan-Nya sejak di dunia ini, merupakan tujuan akhir manusia yang diletakkan Allah dan dinyatakan oleh Yesus Kristus. Etika kristiani merupakan sistematisasi jawaban manusia terhadap bagaimana menjawab panggilan Allah tersebut, misalnya melalui pertobatan, iman, kemurnian hati, pelaksanaan hukum cinta kasih rangkap dua pada Allah dan sesama, dan mengikuti Kristus. Seperti yang ditunjukkan oleh Katekismus Gereja Katolik etika kristiani merupakan refleksi atas standar etis dari hidup sebagai anak-anak Allah dalam Kerajaan Allah yang bersumber dari Yesus Kristus (bdk. KGK 1709).

Karena bersumber dari Allah sebagai nilai dasarnya, maka ada sesuatu yang absolut pada etika kristiani. Panggilan Allah pada manusia pada tujuan akhir menuntut jalan atau sarana yang pasti dan tetap bagi mereka yang menjawabnya

dalam iman. Tanpa kebenaran yang tetap dan universal ini tidak dapat dimengerti pencapaian tujuan akhir tersebut. Itulah sebabnya, etika kristiani adalah etika yang berpegang pada hal-hal yang absolut dan ini dimungkinkan karena iman. Etika kristiani tidak pernah terpisah dari iman karena ia merupakan iman yang hendak diwujudkan dalam tindakan dan hidup. Kalau iman itu tidak dilandaskan pada sesuatu yang mutlak, bagaimana ia dapat dimengerti, diwujudkan, dan dikomunikasikan. Ketika dalam iman diakui bahwa Allah memanggil manusia pada tujuan akhir (“kebahagiaan di dalam Allah” atau “kerajaan Allah”) (KGK 1719-1720), maka pertanyaan dasar etika kristiani adalah bagaimana mencapainya seperti pertanyaan pemuda kaya dalam Mat 19, 16: apa yang seharusnya kulakukan untuk mencapai hidup yang kekal? Dalam ST II St. Thomas Aquinas membangun teologi moralnya sebagai uraian sistematis atas bagaimana manusia dapat mencapai tujuan tertinggi hidup seseorang (*visio beatifica*) dan ia mengajukan keutamaan-keutamaan sebagai jalannya, yang mana di sini seseorang harus menjadi pribadi yang berubah terlebih dahulu menjadi berkeutamaan. Tanpa bersandar pada kebenaran yang tetap dan absolut yang diacu, tidak mungkin dimengerti keutamaan maupun tindakan-tindakan berkeutamaan yang mengantar seseorang sampai pada tujuan terakhir

manusia karena keutamaan di sini tersusun dalam tatanan kodrati yang rasional, yang ditopang oleh kebenaran ilahi yang diwahyukan. Di atas dasar kebenaran rasional kodrati maupun adikodrati tentang manusia ini dibangun tindakan-tindakan moral sebagai jawaban manusia atas panggilan Allah yang melalui rahmat-Nya bekerja membawa manusia pada pemenuhannya (Bdk. KGK 1723-1724). Tampak bahwa kebebasan manusia dalam etika kristiani tidak terpisah dari kebenaran ilahi ini sebab kebebasan adalah untuk mewujudkan kebenaran tersebut. (Bdk. KGK 1732; VS 87)

Karena orientasinya adalah iman dalam hubungan dengan rencana dan panggilan Allah, maka etika kristiani bukanlah etika kewajiban atau etika peraturan. Absolutitasnya bukan terletak pada hukum yang wajib, melainkan pada Allah sebagai sumber nilai sekaligus nilai dasarnya. Ia merefleksikan tindakan apa yang baik di atas dasar kebenaran yang ditangkap dalam iman yang bersumber dari kebenaran ilahi yang dinyatakan dalam sumber-sumber Pewahyuan dan diteguhkan oleh Magisterium. Dengan tindakan-tindakan yang mengungkapkan keutamaan, pribadi seseorang yang melakukan menjadi baik. Etika kristen adalah etika

transformasi manusia menjadi baik seturut kebaikan yang ditetapkan Allah atau meniru Allah. Dengan perubahan hidup yang terwujud dalam tindakan-tindakan etis itu manusia mengungkapkan tanggapannya atas panggilan Allah pada manusia untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah. Tampak bahwa iman dan moral tidak terpisah. Hanya saja, pada etika kristiani orang-orang beriman sendiri harus diubah atau berubah terlebih dahulu menjadi baik serupa dengan Allah sebagai satu-satunya yang baik sebagai syarat agar ia layak mencapai tujuan terakhir, yaitu persatuan dengan Allah. Karena itu, pengetahuan akan kebaikan moral yang sejati yang bersumber dari Allah yang dapat ditangkap oleh akal budi dalam terang iman dari kodrat maupun Pewahyuan adalah tidak bisa tidak. Pengetahuan itu tetap, tidak berubah, universal. Etika kristiani memiliki salah satu tugas mengangkat kebaikan dari Allah itu menjadi jelas sehingga menjadi pedoman bagi orang beriman.

Dengan terang etika kristiani dapat diperiksa etika pragmatisme W. James. Pertama, dengan hanya bertolak dari yang empiris, maka jelas bahwa pragmatisme mengesampingkan dan menyisihkan Allah, yang baginya melampaui pengalaman dan tidak dapat diinderai. Empirisme pragmatisme yang menolak apa yang tidak

material yang tidak dapat dipersepsi tidak dapat menerima Allah sebagai nilai dasar etis sebagaimana ditemukan dalam etika kristiani. Allah tidak memiliki tempat dalam etika pragmatisme. Iman dan Allah tidak lebih dari sekadar postulat yang fungsional, yang tidak perlu dipersoalkan kebenaran tentang bagaimana keberadaan-Nya, namun dipandang sebagai ada gunanya untuk menjamin daya menuntut dari *beliefs* dibandingkan bila Allah tidak ada. Sementara itu, iman dipandang sekadar energi pendorong bagi pengejaran kemajuan kemanusiaan. Dengan adanya Allah dan iman, maka setelah dihitung efek dari bila ada keduanya, maka adalah lebih baik mereka ada dibandingkan bila mereka tidak ada. Etika pragmatisme yang tanpa dimensi transendental ini membuatnya tampak sebagai etika tanpa Allah. Allah tidak relevan maupun diperlukan dalam penentuan baik buruk dalam pertimbangan moral karena bagi W. James benar dan salah itu soal psikologis manusia. Cukup kepuasan perasaan psikologis subjektif manusia yang patut diperhatikan. Cukup manusia yang menentukan baik buruk. Ini bertolak belakang dengan etika kristiani di mana bukan manusia penentu baik buruk, melainkan Allah. Nilai-nilai dasar yang menentukan kebaikan dan keburukan etis yang ditentukan Allah itulah yang seharusnya dicari dan disingskapkan manusia, lalu diaplikasikannya dalam tindakan-

tindakan bebasnya. Pragmatisme sebagai etika produk manusia yang menentukan secara subjektif baik buruknya menempatkan manusia di tempat Allah yang adalah penentu yang baik dan buruk atau sumber nilai. Antropologi semacam ini menggeser dan menggulingkan Allah.

Kedua, pragmatisme dengan humanisme sekularnya bertentangan dengan etika kristiani yang berangkat dari antropologi kristiani yang menempatkan manusia lebih tinggi dan lebih luhur daripada visi antropologis pragmatisme. Manusia adalah ciptaan Allah yang diciptakan secitra dengan Allah, ditebus oleh Putra Allah, dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah serupa dengan Yesus Kristus (bdk. Rom 8, 29; GS 14, 17; KGK 1701-1709). Tidak bisa dimengerti ide kesempurnaan manusiawi pada pragmatisme karena di samping ditolak oleh pragmatisme apa yang metafisis, juga segalanya diletakkan dalam dimensi horisontal. Di sini kebenaran tetap tentang keluhuran martabat manusia sebagaimana diterima dalam iman kristiani dari Pewahyuan diabaikan begitu saja, dan sebagai konsekuensinya, sejumlah tindakan pada manusia yang bertentangan dengan keluhuran martabat itu dapat dilegitimasi bergantung pada tujuannya. Dapatkah kemajuan kemanusiaan diraih dengan tidak adanya pengakuan akan

keluhuran nilai manusia yang pasti dan tidak berubah? Ini menjadi seperti ironi karena di saat peradaban sudah maju dengan penghormatan hak-hak dasarnya manusia yang berdasar pada keluhuran martabatnya sebagaimana tidak pernah ditemukan pada masa lalu, namun pragmatisme dengan legitimasi pada instrumentalisasi manusia demi suatu tujuan subjektif, justru menarik mundur kemajuan itu dengan legitimasi pada perendahan martabat manusia di hadapan tujuan. Kemanusiaan yang kemajuannya dicita-citakan oleh pragmatisme dapat dikurbankan dengan pembenaran dengan metode pragmatisme. Ini justru bertentangan dengan tujuan kemajuan kemanusiaan yang diperjuangkan oleh W. James.

Ketiga, etika pragmatisme menolak segala yang absolut dan a priori untuk mempengaruhi pertimbangan etisnya. Di sini ada keterpisahan antara kebenaran dan kebebasan. Kebenaran disusun dari aplikasi kebebasan secara arbiter sehingga ia relatif. Pada etika kristiani tidak terpisah antara kebenaran dan kebebasan. Sumber dari kebenaran adalah Allah sendiri, yang menyusun nilai atau kebaikan, yakni “Kebijaksanaan Ilahi yang mengatur setiap yang ada menuju kepada tujuannya. Hukum abadi ini diketahui, baik oleh akal budi kodrati manusia (oleh

karenanya disebut ‘hukum kodrat’) maupun secara utuh dan sempurna oleh Pewahyuan Allah yang adikodrati (oleh karenanya disebut ‘hukum ilahi’)” (VS 72). Ada kebenaran yang a priori dalam etika kristiani, yang dapat ditemukan manusia dengan akal budinya pada kodratnya berupa kebaikan-kebaikan dalam kemanusiaan, yang hadir dalam perintah-perintah moral (VS 79; bdk. 43, 72, 78).

Keempat, pragmatisme dengan metodenya secara umum memiliki metode yang serupa dengan sains, dan ketika ini diterapkan dalam etika atau elaborasi atas kebaikan, nilai, baik buruk, maka sesungguhnya tidak tepat menyandingkan dan membandingkan apa yang empiris dengan yang metafisis. Kebaikan atau nilai atau baik buruk adalah metafisis. Metode sains bertopang pada pengamatandan pembuktian empiris, dan bagaimanakah ini diterapkan secara bulat dalam mencari kebenaran yang pasti tentang kebaikan maupun keburukan? Bila sains tidak pernah berhenti merangkul kebenaran baru yang menggantikan capaian yang lama, bagaimanakah juga perubahan terus menerus bergantung pada penemuan empiris ini dikenakan pada etika? Etika macam apa yang lantas muncul kalau bukan etika percobaan yang terus menerus tetapi tidak pernah ada kesepakatan di dalamnya

mengenai tujuannya yaitu mencari apa yang baik atau buruk secara etis? Apa yang disasar oleh etika, yaitu pengetahuan akan nilai yang mendasari pertimbangan etis, tidak akan pernah tercapai ketika tidak pernah akan diketahui apa yang baik maupun buruk tatkala semuanya masih dalam proses mencari, terbuka pada revisi terus menerus, dan bersifat sementara. Yang ada pada pragmatisme adalah data dari pengalaman yang ditangani dengan suatu metode yang diklaim untuk melayani perkembangan kemanusiaan yang kemudian daripadanya dihasilkan keputusan dari perbandingan secara psikologis dari antara *beliefs* mana yang lebih memuaskan untuk terpenuhinya harapan bagi kemajuan yang diinginkan itu. Akan tetapi, diragukan apakah yang dihasilkan kemajuan bila setiap orang dapat mengklaim tindakannya baik secara subjektif dengan metode seperti demikian dan itu disahkan dalam pragmatisme sehingga dengan mudah orang yang tindakannya melanggar batas seperti martabat dan hak-hak manusia dan menghasilkan kekacauan mendapatkan legitimasinya dengan metode pragmatisme.

Pretensi pragmatisme untuk menjadi etika yang rasional dengan metode yang rasional seperti sains justru tidak dapat memberikan apa yang dituntut oleh rasio

manusia tatkala membuat pertimbangan etis, yaitu pengertian akan nilai atau apa yang baik dan buruk. Ketidakpastian dan ketidakjelasan tentang nilai karena metode pragmatis yang menolak apa yang tetap dan universalitu justru bertentangan dengan tuntutan rasio yang menginginkan kebenaran yang pasti dan tetap. Ketika seseorang bisa mengklaim dengan metode pragmatis bahwa suatu alternatif adalah baik sesuai dengan pertimbangan subjektifnya, dan orang-orang yang lain berbuat yang sama pula, serta pragmatisme melegitimasi semua klaim itu karena yang diperhitungkan adalah keberadaan penaksiran secara empiris efek-efek untuk ditentukan yang mana yang membuat terpenuhi harapan-harapan seseorang, maka orang-orang lain juga dapat berbuat serupa dan menghasilkan klaim-klaim yang saling bertentangan dan sukar diperdamaikan, sementara rasio juga memiliki tuntutan atas kebenaran yang lebih pasti dan memuaskan dirinya secara kodrati di tengah berbagai klaim. Lantas, atas dasar apa konflik-konflik itu diselesaikan bila dilegitimasi setiap tafsiran atas kemajuan kemanusiaan? Bagaimana caranya menundukkan pluralitas klaim pada suatu ideal kemajuan kemanusiaan yang universal? Bila segala klaim disahkan berguna untuk tujuan kemanusiaan, yang manakah yang benar-benar merupakan tujuan kemanusiaan bila ukurannya

adalah taksiran kepuasan psikologis? Ketidakpastian akan kebenaran ini bertentangan dengan apa yang diinginkan rasio padahal pragmatisme berpretensi menjadi seperti sains. Ambisi pragmatisme menjadi pemecah kebuntuan dengan pendekatan rasionalnya justru pada akhirnya dapat dipandang tidak rasional karena tidak pernah bisa memberikan landasan kebenaran sebagaimana menjadi kecenderungan rasio. Bukankah penentuan benar salah atau baik buruk secara subjektif dari efek-efek dengan pengakuan masing-masing klaim yang dihasilkan berdasarkan beliefs tampak arasional?

Kelima, penentuan tujuan manusia pada pragmatisme yaitu mengusahakan kemajuan atau perkembangan kemanusiaan yang universal berbeda dengan etika kristiani yang menjadikan apa yang diletakkan Allah sebagai tujuan akhir manusia sebagai tujuannya, yang mana tujuan ini yang menyusun kebaikan moral manusia. Seperti pragmatisme tujuan akhir dalam etika kristen dicapai melalui tindakan-tindakan moral. Akan tetapi, dalam etika kristen tindakan itu harus sesuai dengan kebaikan pada manusia sebagaimana yang ditetapkan Allah dan dapat ditemukan manusia dengan akal budinya pada kodratnya maupun Pewahyuan (bdk Mat 19, 16). Bila pada pragmatisme tujuan

ditentukan menurut rekaan manusia belaka dan apa yang dimaksud dengan ideal kemajuan universal itu tidak jelas dan tidak pasti, pada etika kristen isi dari tujuan maupun sarana mencapainya lebih jelas dan pasti dengan bersumber dari Pewahyuan. Karena itu, dalam etika kristen dapat dikatakan dan dinilai bahwa suatu tindakan adalah baik secara moral bila mengungkapkan ketertataan pada tujuan akhirnya dan kebaikan manusiawi sebagaimana ditetapkan oleh Allah (VS 72). Dengan kata lain, etika kristiani juga teleologis, tetapi “telos”-nya bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh manusia secara subjektif, tetapi diterima manusia dari apa yang dinyatakan Allah sehingga baik dan buruk didefinisikan oleh tujuan yang diterima dengan iman yang pasti dan tidak berubah ini. Yohanes Paulus II menyebut bahwa tujuan-tujuan di luar yang pasti dan tidak berubah ini yang merupakan produk subjektif manusia bertentangan dengan etika kristiani ini (VS 74). Dalam *Veritatis Splendor* yang disasar oleh paus ini adalah teori-teori etis yang muncul dari sejumlah teolog moral yang tergolong ke dalam konsekuensialisme dan proporsionalisme yang disebut paus dipengaruhi oleh pragmatisme dan utilitarianisme. Diajukan oleh mereka bahwa moralitas tindakan-tindakan manusia didasarkan bukan pada tujuan akhir manusia, tetapi konsekuensi-konsekuensi yang sudah dapat diantisipasi dari

tindakan-tindakan yang diambil yang mengandung manfaat dan mudarat sehingga pertimbangan moral merupakan pertimbangan atas kadar keduanya secara a posteriori (VS 74-75). Yohanes Paulus II menyebut mekanisme etis konsekualis-proporsional semacam ini sebagai “mentalitas ilmiah, “pengaturan teknis”, “perhitungan mengenai sumber-sumber dan keuntungan”, “prosedur dari hasil-hasilnya”, dan “pembebasan dari paksaan-paksaan” yang “tanpa kekangan dan semauanya sendiri” (VS 76). Akan tetapi, seperti kata paus, kecenderungan tersebut adalah “tidak setia pada ajaran Gereja”, “bertentangan dengan perintah-perintah dari hukum ilahi dan hukum kodrat” dan tidak “berdasarkan tradisi moral katolik.” (VS 76). Karena itu, teori-teori di bawah konsekuensialisme dan proporsionalisme harus ditolak (VS 79; bdk. 82). Tidak bisa tujuan sembarang tujuan diterima, apalagi bila itu buatan subjektif manusia dengan mengabaikan Allah sebagai penentu tujuan seperti dapat ditemukan pada pragmatisme.

Keenam, etika pragmatisme membuka lahan bagi konflik-konflik nilai etis dalam hidup manusia karena keduanya memakai penilaian komparatif atas efek atau konsekuensi dari tindakan-tindakan yang mengaplikasikan kemungkinan-kemungkinan pilihan. Seperti pragmatisme,

baik proporsionalisme maupun konsekuensialisme merupakan suatu teori moral yang memandang suatu pertimbangan moral merupakan suatu evaluasi komparatif atas kemungkinan-kemungkinan yang tersedia untuk dipilih seseorang. Di sini tidak ada ruang bagi nilai maupun norma absolut karena manusialah pencipta nilai dan norma, yang mana nilai dan norma ini menunggu apa yang diputuskan oleh subjek setelah tindakan-tindakan dibuat dan efek-efeknya ditimbang menurut kadar manfaat dan mudaratnya. Pada proporsionalisme, misalnya, ukuran penilaiannya adalah proporsi manfaat di hadapan mudarat yang dapat muncul jika suatu kemungkinan dipilih dan dilakukan, yang mana seseorang harus memilih apa yang menawarkan kemungkinan manfaat daripada mudarat. Menurut G. Grisez proporsionalisme dapat menghitung manfaat dan mudarat yang terkandung secara inheren pada tindakan-tindakan dengan mempertimbangkan baik objek, intensi, maupun situasi tanpa terlalu mepedulikan perbedaan antara tindakan dan konsekuensi.²¹⁰ Akan tetapi, kebaikan maupun keburukan tidak dapat diukur secara komparatif seperti yang diajukan proporsionalisme ini. Salah satu sebab dari hal ini, menurut G. Grisez, adalah karena

²¹⁰ G. GRISEZ, *Christian Moral Principles*, Vol. I, 141-142

teori ini tidak mampu menunjukkan bagaimana konsekuensi-konsekuensinya baik yang bermanfaat maupun yang merugikan itu dihitung atau diukur.²¹¹

Ketujuh, pragmatisme etis W. James membuka lahan bagi relativisme etis. Ukuran etis pragmatisme, yaitu kesesuaian efek-efek praktis dengan harapan dengan seminimal mungkin tentangan, membuat setiap kasus moral berdiri sendiri dan kebenaran mengenai baik buruknya tidak perlu mengacu pada prinsip etis apapun yang absolut dan universal. Benar dan salah ditentukan sendiri oleh agen moral berdasarkan pertimbangannya sendiri dengan memperhatikan apa yang empiris saja. Tiap orang memiliki estimasi dan harapan sesuai keinginan dan kepentingannya, yang mana evaluasi atas efek praktis dari tindakannya juga tidak mungkin sama pada satu individu dengan individu yang lain. Dalam pragmatisme benar dan salah diganti oleh tepat atau tidak antara harapan dan hasil. Di sini evaluasi moral tidak pernah bisa dilakukan sebelum tindakan dilakukan. Sesudah tindakan dilakukan pun evaluasi moralnya hanya bisa dilakukan setelah dilakukan terlebih dahulu pertimbangan atas efek-efek dari tindakan-tindakan yang diambil. Tidak bisa sebelum seseorang bertindak

²¹¹*Loc. cit.*, 152.

dipredikasi apakah tindakan itu baik atau buruk karena belum tampak hasilnya. Tidak ada prediksi moral baik buruk yang berlaku universal. Inilah relativisme etis. Buah dari relativisme etis adalah kekacauan dalam hidup moral yang berefek pada tatanan hidup sosial. Dengan pragmatisme sebagai teori etis, maka tidak ada juga yang dapat dijadikan dasar acuan etis untuk hidup bersama secara harmonis dalam kerja sama. Setiap klaim pembenaran etis atas yang dilakukan setiap orang adalah legitim dan setara. Yang kuat akan lebih potensial merugikan yang lemah. Kebaikan hidup bersama (*bonum commune, common good*) sangat sukar diwujudkan karena ia mengandaikan apa yang kodrati, dan yang kodrati adalah secara kodrati mengikat semua dan tetap. Selanjutnya, kalau kekacauan itu mau dicegah dengan hukum, maka martabat manusia justru direndahkan di sini karena diandaikan di sini manusia sebagai yang potensial mengacau dan tidak mampu membangun kedamaian dengan akal budinya dirinya sendiri, dan itulah sebabnya ia perlu diatur oleh hukum. Bukankah justru pengaturan oleh hukum atau etika kewajiban inilah yang ditolak oleh pragmatisme? Relativisme etis yang membuat orang berpaling pada kekuatan hukum ini yang kemudian di samping menunjukkan kegagalan pragmatisme, juga memberi pesan bahwa otonomi mutlak yang diajukan

pragmatisme ternyata malahan tidak menunjukkan keluhuran martabat manusia sebagai makhluk rasional yang seharusnya bisa menentukan sendiri yang benar dan melakukan yang baik sekalipun tanpa perlu banyak diatur oleh hukum. Pretensi sandaran akan rasionalitas manusia justru menghasilkan apa yang merendahkan kodrat rasional manusia ini. Aborsi, misalnya, bertentangan dengan nilai hidup yang dapat dilihat oleh akal budi manusia hanya dari kecenderungan kodrati manusiawi akan pemertahanan dan pemeliharaan hidupnya. Akan tetapi, bagi pragmatisme itu tidak diakui sebagai absolut karena setiap orang sah memiliki pertimbangan etis sendiri menurut metode pragmatismenya, sehingga baik buruk aborsi secara etis adalah relatif bergantung pada apa efeknya bagi kebbaikannya dan kebaikan bersama. Karena tidak bisa dipandang sebagai buruk dan diperlakukan universal, maka tidak ada kepastian penilaian etis atas aborsi sehingga orang dengan mudah melakukan dan bekerja sama dengan praktik aborsi. Akan tetapi, daripada mengacaukan tatanan sosial, maka praktik aborsi diatur dengan hukum. Tanpa kepastian akan nilai atau mana yang baik dan mana yang buruk, maka kebebasan pada pragmatisme tampak sebagai kebebasan “budak” bagi keinginan-keinginan manusia itu sendiri yang mendapat pembenarannya dari rasionya. Akan tetapi, ini malahan

makin menunjukkan bahwa pragmatisme tak lebih dari sekadarsemacam retorika atau seni meyakinkan.

Pada etika kristiani tidak mungkin ditemukan relativisme moral karena ia berpegang secara tetap dan pasti pada kebenaran dari Allah yang dapat diketahui manusia dengan akal budinya dari Pewahyuan dan kodratnya serta dijamin oleh Magisterium. Ini disebabkan karena etika kristiani bukan etika konsekuensialisme, seperti etika pragmatisme, yang menjadikan konsekuensi dari tindakan sebagai dasar dari pertimbangan etis. Bukan konsekuensi yang menentukan baik buruk pertama-tama, melainkan objek tindakan yang bersumber pada kebaikan yang sejati. Etika kristiani memperhatikan objek moral, intensi pelaku, dan situasi, meski di antara ketiganya adalah objek moral yang paling menentukan (Bdk. KGK 1750-1751). Suatu perbuatan adalah baik secara moral bila objek moral, intensi pelaku, dan situasinya baik (KGK 1755). Bila objek moralnya buruk, meski intensi maupun situasinya baik, maka tindakan tertentu adalah buruk secara moral. Pada pragmatisme objek moral pada tindakantidak merupakan unsur yang paling menentukan karena ketika semua yang diketahui hadir sebagai yang dipersepsi, maka yang menentukan adalah pertimbangan subjek sesuai ukurannya sendiri menurut

kepentingan dan tujuan subjektifnya. Lagipula, pragmatisme tidak mengakui apa yang metafisis, termasuk konsep kebaikan yang ontologis. Karena itu, pada pragmatisme tindakan tidak mungkin memiliki nilai objektif karena pemberi nilai padanya adalah yang menentukan berdasarkan taksirannya sendiri atas efek praktis pilihan tindakan menurut ukuran ideal-ideal yang ditentukan secara subjektif pula. Sebaliknya dalam etika kristiani baik maksud maupun taksiran subjektif pelaku belaka tidak memadai sama sekali untuk menilai moralitas tindakan (KGK 1756). Katekismus menegaskan: “Tidak pernah diperbolehkan melakukan yang jahat, supaya yang baik dapat timbul darinya.” (KGK 1789)

Kedelapan, ada sekian hal yang ada dalam moral kristen yang tidak mungkin dapat didudukkan bersama dengan etika pragmatisme. Dengan pragmatisme tidak bisa dipikirkan keberadaan kasih yang merupakan keutamaan yang seharusnya mendasari dan menjiwai semua tindakan moral orang-orang kristen sebagai anak-anak Allah (bdk. KGK 1827-1828). Di samping itu, bagaimana mungkin dipikirkan keberadaan dosa yang menjadi bagian konstitutif dari semua etika religius, termasuk etika kristiani, dalam etika pragmatisme? Dosa mengandaikan relasi dengan Allah, sumber kebaikan sejati, yang mana justru ini yang ditolak

oleh pragmatisme. Etika kristiani yang bersumber dari iman menerima dan mengakui adanya penolakan terhadap Allah dalam bentuk tindakan-tindakan moral yang disebut dosa. Ima kristiani mengakui bahwa Allah menentang dosa dan kejahatan. Dengan pragmatisme bukan hanya dosa, melainkan Allah ditiadakan. Dengan pragmatisme tidak dapat dipikirkan keutamaan, yang dalam etika kristiani merupakan apa yang harus ada pada manusia untuk dapat mencapai tujuan terakhirnya (bdk. KGK 1803). Keutamaan mengandaikan kebenaran dan kebaikan yang tetap dan absolut. Bagaimana dapat dimengerti hati nurani tanpa absolut moral karena suplai pengetahuan moral yang menjadi dasar pertimbangan haruslah sesuatu yang a priori dan bersumber pada kebaikan yang tetap? Di samping itu, bagaimana pendidikan moral diadakan dengan etika pragmatisme? Bagaimana dapat diadakan pendidikan moral jika tidak ada pengakuan terhadap nilai maupun objek moral sebagai apa yang menspesifikasi tindakan? Mungkinkah pendidikan moral diadakan tanpa suatu nilai yang absolut, tetap, dan dapat diberlakukan secara universal? Pada pragmatisme pengetahuan moral apa yang bisa diperoleh dan diajarkan bila ditolak segala yang tradisional maupun a priori? Pendidikan hati nurani atau hidup berkeutamaan mengandaikan pengetahuan intelektual tentang nilai-nilai

yang tetap dan universal. Tanpa nilai-nilai semacam itu bagaimanakah diselenggarakan pendidikan moral pada kaum muda dan untuk kebaikan bersama?

Kesembilan, bagaimana orang dapat memakai metode pragmatis dalam bertindak maupun membuat evaluasi etis melihat bahwa orang harus melakukan antisipasi maupun pengujian atas konsekuensi-konsekuensi dari ide-ide praktis? Bagaimana hal yang tampak “teknis” tapi “subjektif” ini dilakukan? Bagaimana pragmatisme bisa membuat evaluasi etis atas fakta atau data empiris yang selalu berubah-ubah dengan taksiran subjektif pelaku maupun orang ketiga yang berbeda-beda dan dapat berubah-ubah? Bagaimana pula pragmatisme bisa meletakkan efek-efek praktis dalam penimbangan dan pengukurannya sebagai yang lebih bernilai atau lebih baik ketika sebenarnya nilai-nilai atau kebaikan-kebaikan itu tidak mungkin dapat dibandingkan, misalnya antara nilai atau kebaikan hidup manusia dengan nilai keindahan, atau persahabatan? Bagaimana melakukan penilaian moral atas dasar kebenaran yang tidak pernah bisa tetap? Apakah semua orang mampu membandingkan, menimbang dan menentukan takaran manfaat dan mudarat setiap akan bertindak atau melakukan evaluasi etis? Yohanes Paulus II mempertanyakan dapat

dilakukannya pertimbangan etis di bawah teori-teori konsekuensialisme dan proporsionalisme karena “setiap orang mengakui kesulitan, atau lebih lagi ketidakmungkinan, mengevaluasi semua konsekuensi dan efek baik dan buruk yang didefinisikan sebagai pramoral-dari tindakan-tindakan seseorang sendiri.” (VS 77).

Kesepuluh, pragmatisme justru mengabsolutkan metode pragmatismenya yang berpegang pada konsekuensi praktis yang dapat diamati. Ia tidak pernah lepas dari prinsip semacam “pilihlah selalu yang mendatangkan efek yang lebih baik sesuai kebutuhan untuk kemajuan kemanusiaan.” Akan tetapi, pemutlakan atas metode atau prinsip ini justru merupakan inkonsistensi dari penolakannya atas yang absolut. Dengan kata lain, ia tidak konsisten dengan penolakannya pada semua yang absolut. Di samping itu, dengan penolakannya pada yang material atau di luar pengalaman, pragmatisme bukan saja tidak mengakui keberadaan Allah, melainkan juga jiwa, kesadaran, perspektif orang pertama. Akal budi merupakan satu dari fakultas jiwa. Pragmatisme melakukan pertimbangan dengan resepsi psikologis atas apa yang ditampilkan dari pengalaman. Akan tetapi, bagaimana mungkin ia dapat melakukan evaluasi atas baik buruk, yang mana ini

merupakan suatu penalaran oleh suatu fakultas jiwa dan mengandaikan kesadaran, tetapi justru hal-hal ini ditolak keberadaannya oleh pragmatisme karena mereka adalah metafisis?

Bagaimanapun pragmatisme dapat mengingatkan teologi moral untuk banyak mendengarkan pengalaman konkret manusia sebagai unsur konstitutifnya di samping yang lain-lain. Kurangnya mendengarkan pengalaman manusia membuat iman semakin jauh dari hidup. Etika kristen yang cenderung memutlakkan prinsip umum atau hukum dan kurang memperhitungkan pengalaman manusia kurang dapat menjawab persoalan-persoalan eksistensial umat manusia dan karenanya, kehilangan kesempatan “menerangi” dunia dengan nilai-nilai Injili.

SUMBER PUSTAKA :

BACON, MICHAEL, *Pragmatism: An Introduction*, Polity, Cambridge, 2012.

CANTO-SPERBER, MONIQUE, *Dictionnaire d’Ethique et de Philosophie Morale*,

PUF, Paris, 1996.

GRISEZ, GERMAIN, *Christian Moral Principles*, Vol. I,
Franciscan Herald,

Chicago, 1983.

JAMES, WILLIAM, *Pragmatism, A New Name for Some Old
Ways of Thinking*,

Harvard University Press, 1975.

-----, *The Will to Believe*, Harvard University Press, 1979.

-----, WILLIAM, *Principles of Psychology*, Dover, New York,
1950.

LOBO, GEORGE V., *Guide to Christian Living*, Christian
Classics, Westminster,

1989.

MAY, WILLIAM E. *An Introduction to Moral Theology*, Our
Sunday Visitor,

Huntington, 1994.

MULLIN, RICHARD P., *The Soul of Classical American
Philosophy*, State

University of New York Press, Albany, 2007.

RORTY, RICHARD, *Consequences of Pragmatism: Essays, 1972-1980*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1982.

MELAWAN EKONOMI HYPERPRAGMATISME

Oleh:

Herlina Yoka Roida

Pendahuluan

Dialog antara Alvin Adam, pembawa acara *Just Alvin* di salah satu televisi swasta nasional dengan Dian Sastrowardoyo pada hari Minggu, 2 Nopember 2014 yang menanyakan mengapa memilih pendidikan pascasarjana Magister Manajemen (MM) konsentrasi keuangan sebagai pilihan studi, padahal pendidikan strata satu Dian adalah filsafat? Jawaban Dian Sastro adalah filsafat itu sastra dan karena kesulitan memperoleh pekerjaan, maka Dian Sastro memilih kuliah S2 yang lebih *pragmatis*, yaitu keuangan.

Pandangan Dian Sastro sontak membuat saya kaget dan menghentikan aktivitas saya untuk mencermati pemahaman sang penutur atas pragmatisme. Pertanyaan saya apakah publik memahami secara pasti apa itu pragmatisme? Keuangan bukan pragmatism tapi cara Dian berpikir saat menjatuhkan pilihan pada program studi MM keuangan adalah sikap pragmatis. Keuangan adalah aplikasi dari ilmu ekonomi yang berdasarkan pada konsep *science* baik dengan pendekatan teori maupun empiris.

Kajian-kajian terapan ilmu ekonomi berkembang mulai era tahun 1920an lahir dari ilmu ekonomi yang sering disebut sebagai moral filosofi dan saat ini berkembang menjadi ekonomi politik.

Lalu bagaimana pragmatisme muncul dalam ilmu ekonomi dewasa ini? Semua berawal dari sengkabut istilah antara *oikonomikos* sebagai asal muasal dan metamorfosis menjadi *oeconomicus* dalam istilah John Stuart Mill. Lewat Mill lah, Willian James merumuskan apa itu pragmatisme. *Self interest* juga memberi kontribusi yang menjadikan pragmatisme berubah menjadi hyperpragmatisme lewat rupa-rupa konsumerisme dewasa ini.

Oikonomikos* bermetamorfosis menjadi *Oeconomicus

Xenofon, filsuf Yunanai yang hidup sekitar 430-354 SM memakai judul karyanya, *Oikonomikoo*. Kata *oikonomikos* hanya berarti tata pengelolaan ladang. Menjadi petani penggarap ladang adalah pekerjaan masyarakat pada masa itu. Karya itu memuat dialog imajiner antara Sokrates dan Critobulun perihal bagaimana pengelolaan ladang agar menjadi sumberdaya memenuhi kebutuhan keluarga dan polis. Perlahan, makna dan pengertian ekonomi mulai bergulir , hingga memunculkan istilah manusia ekonomi atau *homo oeconomicus*.

Masa pencaharian arti ekonomi berakhir pada Adam Smith (1723-1790), itupun tidak satupun dalam karyanya, Adam

Smith menggunakan istilah *homo oeconomicus*. Begitu juga oleh John Stuart Mill (1806-1873) yang lebih mendefinisikan ekonomi politik sebagai ilmu. Ekonomi politik mengkaji manusia semata-mata hanya sebagai makhluk yang berhasrat memiliki harta, dan mampu menilai efektifnya sarana yang satu dibanding sarana lain dalam mengejar tujuan dengan sepenuhnya menepi hasrat dan motif manusiawi lain, kecuali berhasrat memiliki harta. Mill dikritik karena manusia tak lebih dari pengejar uang. Mill berargumen hanya ingin membedakan corak tindakan manusia untuk tetap fokus pada kajian ekonomi. Disinilah asal muasal metamorphosis tersebut, yang saya sebut sebagai falsifikasi Mill.

Arti *oikonomikos* hanya berarti tata pengelolaan ladang berubah menjadi *Oeconomicus* dalam arti tata kelola dan hasrat memiliki harta. Pertanyaannya mengapa perubahan itu bermuara pada hasrat memiliki kekayaan? Perubahan kondisi Eropa pada abad 18 dan 19 disinyalir menjadi penggerak perubahan tersebut dengan corak berpikir akumulasi kapital, akibatnya istilah Xenophon dengan *oikonomikos* berubah menjadi ciri akumulatif *oeconomicus* pada masa Mill. Tujuan akumulasi itulah yang menjadi gambaran yang diwarisi hingga saat ini. Mill sendiri, dalam hemat saya melakukan penghematan konseptual yang dilakukan Mill. Mill tidak memaksudkan bahwa manusia hanya pengejar kekayaan.

Konsep ini berkembang lewat Gary Becker dalam bukunya *The Economic Approach to Human Behavior* (1976) yang

mengatakan bahwa pendekatan ekonomi memberi semesta pendekatan memahami semua perilaku manusia; semua perilaku dapat dipandang sebagai maksimisasi utilitas.

***Utilitarian, Self interest* dan Pragmatisme**

Maksimisasi utilitas dipertegas dengan konsep *self interest* yaitu bahwa perilaku individu didasarkan pada preferensi masing-masing individu dalam konteks ekonomi. Di wilayah ini, *self interest* diyakini sebagai satu-satunya dasar bagi rasionalitas tindakan manusia. Menurut Amartya Sen, problem *self interest* yang menjadi penyangga bagi aplikasi dari teori ekonomi dan ilmu ekonomi pada dasarnya sangat egois. Egois karena dalam ekonomi diasumsikan bahwa tindakan manusia diungkapkan hanya karena *self interest*. Dalam kenyataannya tindakan manusia tidaklah melulu egois melainkan kombinasi dengan utilitarian. Artinya pada derajat tertentu manusia masih memikirkan kepentingan orang banyak. Dengan konsep *self interest*, tindakan manusia dilihat sebagai tindakan yang didasarkan pada preferensi atas dasar pertimbangan utilitas personal. Pilihan tindakan didasarkan pada kalkulasi tentang biaya yang dikeluarkan (*cost*) dan keuntungan yang akan diperoleh (*return*). Sementara biaya dan keuntungan bagi orang lain serta kolektivitas yang lebih luas cenderung dikesampingkan.

Self interest sebagai preferensi kalkulatif untung rugi untuk mencapai keuntungan maksimal individu. Dalam ilmu ekonomi, Sen menjelaskan bahwa konsep *self interest* hanya memadai untuk menjelaskan tindakan manusia dalam pemenuhan kebutuhan pribadi, sementara untuk pemenuhan kebutuhan publik, ada yang lebih penting dari *self interest* yaitu komitmen. Sayangnya terjadi reduksi atas makna ekonomi sebagai kiat menyeimbangkan kebutuhan saling melindungi, pengasuhan sehingga keluarga lebih baik, masyarakat lebih sejahtera, mengalami perubahan yang berdampak pada tidak terlindunginya yang lemah. Semua direduksi untuk memperoleh kenikmatan sebanyak mungkin dalam wujud profit dan pertumbuhan. Cita-cita kerumahtangaan hilang dan kehidupan bersama yang sejahtera dan mapan menjadi terancam. Muncullah pragmatisme sebagai roh kapitalisme yang menolak nilai dan relatif dalam penerapannya, sebab tidak ada kebenaran abadi dan mutlak, yang ada adalah kebenaran yang berguna dan tidak.

Pada bagian inilah, pemikiran William James dari segi ekonomi berangkat atas dasar pemikiran John Stuart Mill. Bahwa *theories thus become instruments, not answer to enigma we can rest...Pragmatism method means the attitude of looking away from the first things, principles, 'categories', supposed necessities and of looking to words last things, fruits, consequences facts (p.54-55)*. Pragmatisme menjadi sangat individualis dan rasio instrumental yang sempit. Pragmatisme juga mereduksi tujuan perusahaan hanya mendapatkan keuntungan

yang sebesar-besarnya serta mencapai *rule of game* dalam persaingan dan ekonomi. Pertumbuhan menjadi indikator keberhasilan sebuah negara untuk diminati investor, menjadi syarat mutlak aliran dana pihak lain, dan menjadi ladang ekonomi yang menguntungkan bagi pemodal atas nama akumulasi kapital.

Dibalik pragmatisme yang memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dilupakan. Dampaknya, disparitas atau kesenjangan masyarakat yang melebar justru menjadi kendala dalam pencapaian pembangunan ekonomi sebuah bangsa. Migrasi dari masyarakat berpendapatan rendah ke berpendapatan menengah merubah pola hubungan antara manusia dan ekonomi itu sendiri. Uang, nilai guna dan nilai tukar berubah wujud hanya menjadi nilai simbolik belaka. Pragmatisme disuburkan lewat modernisasi yang merubah segala hal menjadi sebuah gaya hidup.

***Leisure Class* dalam Masyarakat Pragmatis**

Evolusi pemikiran pragmatis yang dimulai baik oleh William James dan John Dewey hingga di era Thorstein Vablen lewat pemikirannya di awal industrialisasi Amerika melahirkan *The Theory of Leisure Class* (1899). *Leisure class* membentuk kelompok kelas dan pemikiran bahwa mereka tidak perlu melakukan kerja. Pola pemikiran ini mendarah daging di Amerika sehingga mereka meyakini tidak diperlukan suatu kekuatan abstrak atau alasan

rasional untuk menentukan apa yang terjadi di masyarakat. Evolusi ekonomi secara institusional dibedakan menjadi dua yaitu lewat akuisisi dan melalui produksi yang memungkinkan adanya eksploitasi. Vablen meyakini bahwa secara sosial ekonomi, masyarakat mengalami evolusi seperti yang diungkapkan oleh Darwin. Pergerakan sosial itu dilalui karena adanya *envy* atau kecemburuan antar kelas. Kelas yang lebih bawah akan men”cemburu-i” kelas yang lebih tinggi. Dengan begitu kelas bawah akan berupaya untuk meniru lewat mimikri atau naik ke kelas berikutnya sebagai seorang *social climber*. Spirit pragmatisme akan mendorong *practical habits* di kalangan masyarakat melalui *social pattern of life* dan konsumsi.

Sosok GI Joe, sosok super hero dalam masyarakat Amerika dari pasca perang Vietnam tahun 1960-an hingga era tahun 2000an saat ini mengalami evolusi yang mendasar, yaitu lewat *body image* GI Joe berubah dari sosok biasa saja menjadi pria berotot yang menggunakan steroid. Perubahan ini merupakan cermin pragmatisme masyarakat yang menginginkan memiliki tubuh besar ala Arnold Schwarzenegger dengan cara yang cepat dan praktis yaitu steroid. Kasus ini difilm-kan oleh sutradara Chris Bell lewat film dokumenter *Bigger Stronger Faster* dengan sangat lugas. Menjadi pemenang adalah tujuan hidup orang di Amerika dan untuk mencapai tujuan itu maka mereka akan melakukan segala cara. Penggunaan steroid yang dianggap ilegal pada banyak negara, bahkan dianggap sebagai hal yang biasa secara praktik

melalui iklan penjualan yang sangat marak. Apakah mereka sadar akan dampaknya? Ya, mereka sadar, toh memiliki otot ‘tembakan’ untuk menjadi *bigger, stronger, faster* adalah mimpi Amerika. *Steroid is not a problem; It is just a side effect to be an American.*

Sistem ekonomipun tak bisa mengoreksi keinginan masyarakat yang begitu ingin cepat naik ke *leisure class*. Perhatikan saja surat yang ditulis oleh Andrew Lahde yang dipublikasikan pada tanggal 17 Oktober 2008. Lahde adalah seorang pialang hasil sistem pendidikan yang mampu melipatgandakan dana nasabahnya sampai 1000 persen pada tahun 2007. Saat itu Lahde dipuji sebagai seorang yang sangat berhasil. Namun, penggalan dalam surat yang ditulisnya meyakini betapa pragmatisme menjangkiti masyarakat saat ini. Penggalan surat selamat tinggalnya seperti ini:

”...Ya, saya ada dalam permainan ini semata untuk uang. Dan di situ saya temui buah-buah ranum yang menggantung rendah di pohon, itulah para idiot yang orang tuanya telah bersusah payah membayar uang sekolah dan kuliah, di Yale lalu MBA di Harvard. Mereka bermain-main untuk dijarah. Orang-orang yang sama sekali tak pantas disebut terdidik itu lalu berkuasa di pucuk-pucuk pimpinan perusahaan seperti AIG, Bear Sterns, Lehman Brothers dan eselon tinggi pemerintah” (Basis, Maret – April 2009).

Hyperpragmatisme: Radikalisasi Pragmatisme Ekonomi

Pragmatisme merubah hubungan antara ekonomi dan manusia. Radikalisasi pragmatisme didorong oleh proses modernisasi yang menyimpan tiga keyakinan dasar yaitu kemajuan, rasionalitas, dan kebahagiaan, menghasilkan hyperpragmatisme. Rasionalitas instrumen mendasarkan tindakan pada perhitungan sarana paling efektif untuk mencapai tujuan. Keinginan seorang perempuan untuk mendapatkan tubuh yang ideal akan dicapai lewat cara yang tidak perlu mengeluarkan usaha besar untuk mendapatkannya yaitu lewat belanja pada *tv shopping*.

Norma konsumerisme memusatkan diri pada hidup sekarang. Individu hanya menitikberatkan pada ingin bebas dari hambatan dan hanya memikirkan kenikmatan dan kepenuhan diri. Budaya urgensi melahirkan manusia-manusia instant yang mendapatkan kenikmatan tidak melalui usaha yang setara dengan kenikmatan tersebut. Bahkan Jean Baudrillard lewat *The Customer Society*, hedonisme adalah gaya hidup untuk mendapatkan kenikmatan. Sayangnya kebutuhan yang diekspresikan di pasar tidak lagi mencerminkan keinginan riil karena semata-mata hanya cara mengkonseptualisasikan peran dalam sistem simbolik.

Masyarakat konsumen gagal menghasilkan kebahagiaan karena “kebutuhan” yang dipuaskan tidak lebih dari sebuah fungsi oleh logika sistem internal. Masyarakat hyperpragmatisme sebenarnya mempertukarkan barang dengan barang, karena

meningkatnya penawaran akan disertai dengan peningkatan permintaan. Hal ini tak lain karena penawaran atas suatu barang adalah permintaan akan yang lain. Pasokan sepatu lari meningkat karena permintaan atas pendukung kebutuhan lari juga meningkat. Kepemilikan atas sebuah barang yang ditandai dengan peningkatan konsumsi atau uang yg dikeluarkan untuk pembelian barang tersebut tidak semata-mata adalah medium yang transparan, namun uang menjadi penyimpan nilai.

Sebagai penyimpan nilai didukung peningkatan status sosial masyarakat modern dewasa ini maka bergeserlah makna utilitas dalam konsep ekonomi yaitu perbandingan antara pemakaian efektif dibandingkan dengan kemampuan maksimal dari barang tersebut, yang menandakan pemakaian sesuai kebutuhan, ke utilitas sebagai pemanfaatan sebesar-besarnya dari sebuah barang. Lihatlah bagaimana seorang pengusaha restoran ayam bakar yang memiliki istri di beberapa daerah dengan syarat si istri harus lulus S1. Ini bukanlah bentuk pencarian pasangan hidup tetapi lebih pada perekrutan karyawan terampil sekaligus menjadi istri. Bentuk utilisasi yang pragmatis untuk mencapai kemanfaatan maksimal. Ironis.

Piye le, rak isih penak jamanku to?

Sebagai anak bangsa yang mengalami masa pre reformasi maupun pasca reformasi, saya tidak ingin mengulang kembali masa orde baru, sekalipun *credo Piye le, rak isih penak jamanku to?* Seolah menghadirkan kembali lamunan pada masa yang lebih “stabil”. Pada masa itu pragmatisme ekonomi sudah dimulai di Indonesia sejak konsep kebijakan ekonomi pemerintah orde baru yang mendua antara sisi makro yang digawangi kaum teknokrat, namun sisi mikro yang dijalankan oleh kroni-kroni kekuasaan. Liberalisasi keuangan yang ditandai lewat penerapan *Washington Consensus* pada tahun 1960an, disusul tahun 1970an dengan proteksi dan subsidi, serta tahun 1980an lewat deregulasi ekonomi. Semua kebijakan tersebut dalam rangka pertumbuhan yang secara praktis mengakselerasikan pencapaian tujuan namun lupa mengisi nilai masyarakatnya. Disinilah pragmatisme ekonomi mencampuradukkan kriteria kebenaran ide dan gagasan ekonomi dengan kegunaan praktis yaitu memenuhi hajat hidup orang banyak dan bukan akumulasi kenikmatan melalui tindakan ekonomi yang praktis. Akal manusia digantikan oleh identifikasi instingtif yang tidak mendasar, namun cenderung demi pemenuhan keinginan serta relative atas pembuktian kebenaran.

Masyarakat yang dijangkiti hyperpragmatisme dalam jangka panjang tidak lebih dari masyarakat yang melupakan *other interest* dan melupakan bahwa komitmen ekonomi diperlukan dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi hajat hidup orang

banyak. Bahwa tindakan ekonomi haruslah memiliki nilai dan kebenaran tidaklah tergantung pada konsekuensi tindakan tersebut.

Referensi

- James, W., (1907), *Pragmatism: A New Name For Some Old Ways of Thinking*, Harvard University
- Pijl, K.V.D., (2009), *A Survey of Global Political Economy*, pp. 114-141, Centre for Global Political Economy University of Sussex

**MEWASPADAI KAUM PRAGMATIS
MACHIAVELLIAN**

Oleh:

Agustinus Pratisto Trinarso

Pengantar

Pragmatisme atau bersikap pragmatis dalam dunia perpolitikan di Indonesia nampaknya bukanlah sesuatu hal yang mengejutkan atau sesuatu yang baru bagi kita sebagai rakyat Indonesia. Media massa banyak mengungkapkan banyak kasus dan tindakan yang dilakukan oleh para politisi dan juga para aktivis partai dimana tindakan dan kebijakan mereka yang dinilai pragmatis dan tidak lagi memperhatikan ideologi atau kebenaran.

Makalah ini mencoba memaparkan pragmatisme di dunia politik dengan berangkat dari beberapa kasus di dunia perpolitikan di Indonesia, menganalisisnya dengan merujuk pada beberapa pemikiran pragmatisme dan di akhir, mencoba memberi beberapa catatan dampak dari pragmatisme di bidang politik yang dapat menjadi bahan diskusi dan refleksi bersama.

1. Selayang pandang kasus-kasus pragmatisme politik di Indonesia

Apabila kita cermati, ada sekian banyak kasus dalam dunia perpolitikan di negara kita, namun penulis mencoba mengetengahkan beberapa hal yang dapat dijadikan contoh dari kondisi lapangan perpolitikan kita khususnya di era setelah reformasi tahun 1998. Sebagai contoh, PKS dinilai makin pragmatis, lantaran ikut tahlilan. Anis Matta dan sejumlah pengurus PKS berziarah ke makam Sunan Kalijaga, berpakaian putih dan peci hitam seraya melafalkan kalimat-kalimat tahlil di hadapan makam tersebut. Kemudian menemui puluhan kiai di Pondok Pesantren Ponco, Desa Popongan, Beringin, Semarang. Langkah itu bertentangan dengan ideologi PKS, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, melihat yang demikian itu menunjukkan PKS kehilangan ideologinya. Direktur Lembaga Studi Sosial dan Agama Semarang, Tedi Kholiluddin menilai PKS tidak memiliki tradisi ziarah kubur dan tahlilan. Mereka, lanjutnya, sangat ketat terhadap apa yang dianggap bid'ah dan takhayul (*Koran Tempo*, 6/4 2013) Bagaimana respons Anis Matta? Presiden PKS ini menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi. Partainya memiliki cita-

cita yang sama dengan Wali Songo. Salah kalau menganggap PKS tak tahlilan. Bila dapat suara itu bonus.²¹²

Dalam pemilu 2014 yang baru digelar beberapa waktu yang lalu, masyarakat yang cenderung bersikap pragmatis makin banyak, hal ini nampak dari pengakuan sejumlah anggota DPR yang kembali maju menjadi calon anggota legislatif mengaku prihatin dengan pragmatisme warga masyarakat terkait politik uang (*moneypolitic*) menjelang pemilu 2014. Ketua Fraksi PPP di MPR, Irgan Chairul Mahfiz, mengaku dirinya menyiapkan Rp 1 miliar lebih untuk sosialisasi dirinya sebagai caleg di 2014. Dan itu pun masih kurang. Dia mengaku banyak dimintai uang oleh warga masyarakat.²¹³

Bentuk pragmatisme lain tampak ketika agama dijadikan alat justifikasi perilaku politik. Saat menjelang Pemilu, banyak pihak yang ingin mendapat legitimasi agama untuk kemenangannya. Para politisi pun banyak mendatangi pesantren dan merangkul para Kyai dan ulama. Padahal,

²¹² Lih. HUMAHYUN AKBAR, *Pragmatisme Politik Sebuah Keniscayaan* , dari laman <http://www.harianhaluan.com> diunduh pada hari sabtu, 1 november, pk. 22.30.

²¹³ HIZBUT TAHIR, *pragmatisme-politik-menistakan-politik* , dari laman <http://hizbut-tahrir.or.id> diunduh pada sabtu malam, pk. 23.15.

para politisi tersebut jelas-jelas sebelumnya sangat getol mengatakan agama jangan dibawa-bawa ke dalam urusan politik.

Contoh pragmatisme lainnya yakni sikap pragmatis dalam koalisi partai. Para aktivis partai dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak ada partai yang menang mutlak untuk dapat mengajukan calon presiden. Karena itu, realita mengharuskan mereka untuk berkoalisi. Mau tidak mau, beberapa partai bersatu tanpa memperhatikan lagi sekat-sekat ideologis yang ada. Visi dan misi serta *platform* partai yang digembar-gemborkan dalam kampanye Pemilu seolah tidak ada artinya lagi. Dalam pemilihan presiden tahun 2014, sikap pragmatis nampak dengan munculnya dua kubu politik yang memperjuangkan calon presidennya masing-masing. Koalisi Merah Putih (KMP) yang dimotori Partai Gerindra berkoalisi dengan PAN, Golkar, PPP, PKS dan Demokrat bersaing dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dimotori oleh PDI Perjuangan yang merangkul partai Nasdem, Hanura dan PKB. Golkar yang dulunya dikecam habis-habisan oleh partai lain sebagai partai Orde Baru, malah sekarang dirangkul oleh banyak partai atau oleh orang-orang yang dulu mengecamnya. Alasannya, juga

pragmatisme politik.²¹⁴ Selain mengabaikan ideologi, cara-cara dalam memperoleh suara untuk memenangkan kandidat presiden mereka juga dilakukan dengan cara-cara pragmatis, bahkan dengan menghalalkan segala cara agar pesaing yakni kandidat lawan bisa dikalahkan dengan merusak citra dsb . Maraknya kampanye hitam dan kampanye negatif yang amat dominan dirasakan oleh rakyat dalam pemilu capres tahun 2014 menunjukkan tingkat keparahan pragmatisme dalam politik di Indonesia dewasa ini.

2. Analisa perilaku politik yang pragmatis

Memperhatikan banyaknya kasus perilaku pragmatis dalam dunia perpolitikan di Indonesia dewasa ini, beberapa faktor yang dapat ditengarai sebagai penyebabnya antara lain:

a. Paham realisme politik versus idealisme politik

Mengikuti pemikiran Rum Rasyid, dosen pendidikan sosiologi Untan Pontianak yang melihat akar dari

²¹⁴ MUJIYANTO, *Bahaya Pragmatisme Politik*, dalam dari laman <http://mayarismagmailcom.blogspot.com/2012/07/> diunduh pada hari jumat 31 oktober 2014.

pragmatisme politik adalah realisme politik.²¹⁵ Ia melihat bahwa konstelasi politik pasca tumbanganya rezim orde baru menimbulkan euforia demokrasi yang dasyat. Partai politik menjamur dimana-mana, kebebasan berbeda pendapat menjadi hal yang lumrah dan lembaga legislatif tidak lagi menjadi antek pemerintah tetapi terlihat aktif mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun yang disayangkan adalah, hal tersebut tidak diimbangi dengan pembentukan karakter politik yang bermartabat.

Dasar pengambilan kebijakan para politisi bukanlah pada kepentingan rakyat banyak tetapi lebih pada kepentingan kelompok, primordialisme atau misi partainya masing-masing. Ambisi kekuasaan seakan mengalahkan flatform dan kebenaran ideologi partai yang diperjuangkan. Magnet kekuasaan menarik semua kelompok untuk tampil pada posisi eksekutif. Rosyid melihat bahwa politik yang mestinya bermazhab netral telah bermetamorfosis menjadi monster mengerikan yang membungkus kejahatan dengan label untuk rakyat, meninabobokan idealisme atas nama kekuasaan dan

²¹⁵ RUM ROSYID, *Pragmatisme Politik*, diunduh pada senin 27 oktober 2014, pk 22.38. dari laman <http://www.scribd.com>

jabatan. Ketika hasrat berkuasa merampok ideologi dan cita-cita politik, peluang yang selalu terbuka adalah sebetulnya oportunisme politik yang mendorong elite politik bertingkah sebagai perampok kekuasaan. Sosok perampok kekuasaan selalu berhitung dengan realitas yang mengitarinya, bukan dengan memuliakan idealitas yang menjadi keyakinannya.

Dalam kondisi cara berpikir realpolitik, maka bukan gejala yang aneh jika kemudian realpolitik membinasakan idealpolitik. Sebab, realpolitik merupakan rujukan bagi politik atau diplomasi yang secara primer didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan praktis ketimbang gagasan ideologis. Realpolitik hanya berhitung pada kekuasaan yang ingin didapatkan sambil dengan berbagai cara mematikan idealitas, moralitas, dan prinsip-prinsip humanitas. Realpolitik berkaitan erat dengan filsafat politik yang bernama realisme politik.²¹⁶ Pada aliran filsafat politik ini, kekuasaan menjadi dan bahkan keharusan untuk dijadikan sebagai tujuan

²¹⁶ Sejar dengan analisa dari mujiyanto, “ *ungkapan “kita harus realistis.” begitulah kalimat yang sering diucapkan oleh para analis dan politikus dalamn kaca perpolitikan. kalimat itu membawa implikasi yang sangat mendasar. ‘kita harus realistis’ lalu menjadi argumentasi dalam setiap tindakan politik, yang kemudian menimbulkan sikap pragmatis dalam kancah politik.”* Lih. MUJIYANTO.

utama tindakan politik. Sadar atau tidak, filsafat realisme politik itu sangat kuat tertancap dalam diri kalangan elite politik negeri ini. Memburu kekuasaan sesuai dengan kepentingan egoisme mereka telah demikian nyata terlihat, bahkan telah menjadi banalitas. Dan, setiap banalitas politik tidak hanya menyajikan kevlugaran tindakan meraih kekuasaan, tetapi juga kekasaran dalam mereduksi prinsip-prinsip etika politik.

b. Kapitalisme politik

Kapital berkaitan dengan modal atau dana usaha, apabila dikaitkan dengan politik akan berubah menjadi dana kapital atau modal apapun yang dibutuhkan oleh politisi maupun oleh partai politik untuk mendapatkan suara dukungan sebanyak-banyaknya sehingga diperoleh kemenangan yang pada nantinya sang pemenang akan memiliki kekuasaan untuk mengembalikan modal dana yang telah dikeluarkan dan melipatgandakannya selama masih memegang jabatan kekuasaannya. Agar eksistensi organisasi partai politik dapat bertahan dan mampu membiayai kompetisi politiknya dalam proses demokrasi, mereka sangat memerlukan pendanaan yang besar. Dalam realitasnya, dana yang bersumber dari iuran internal partai kurang memadai, sehingga perlu dukungan

dana yang besar dari eksternal partai, seperti dari para donatur, para pemodal, dan para simpatisan lainnya.²¹⁷

Dalam proses demokratisasi dewasa ini, mekanisme hidup partai politik seperti sebuah perusahaan yang berorientasi pada profit atau keuntungan dan akumulasi modal. Partai politik selalu menakar setiap kandidat atau kader partai yang diajukan dalam kampanye berdasarkan materi atau kemampuan uang yang dimiliki oleh si calon. Partai politik seolah kehilangan cara dan strategi yang lebih bermartabat sehingga logika yang terbangun di dalamnya cenderung ekonomistis. Yang terjadi dalam tubuh partai adalah jual beli dan transaksi politik sehingga partai politik tidak lagi bersikukuh pada kebijakan yang bersifat ideologis namun lebih cenderung memilih jalan pintas pragmatis dan oportunis. Manajemen partai politik yang berbasis kekuatan kapital dan berorientasi kekuasaan tersebut telah mendorong proses demokrasi dikelola secara “kartel politik”, yang oleh Slater dideskripsikan sebagai “relasi antar elite politik yang dicirikan dengan tingginya kekompakan elite,

²¹⁷ Bdk. SOEBAGIO, *Distorsi Dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*, MAKARA, *SOSIAL HUMANIORA*, vol. 13, no. 2, desember 2009, p. 111-116.

minimnya kekuatan oposisi, dan terlindungnya para elite dari realitas mekanisme akuntabilitas politik”.²¹⁸

Kapitalisme politik nampak pada kebijakan Partai politik yang mudah menerima kader-kader lain dari luar partai untuk dijadikan calon dalam pemilihan baik dalam pilkada maupun pileg. Apabila kader baru tersebut memiliki modal dana yang cukup banyak untuk pembiayaan kampanye, juga bagi kader baru yang memiliki modal sosial yang bersifat populis seperti artis maka partai politik akan siap untuk mengajukannya sebagai calon kader partai mereka. Dengan mekanisme demikian maka ideologi, idealisme dan *track record* kader tidak jadi penilaian atau pertimbangan utama untuk pencalonan. Dengan demikian berdampak pada kader-kader dalam partai sendiri menjadi tidak diprioritaskan oleh partai meskipun para kader tersebut sudah bekerja dan mengabdikan pada partai selama bertahun-tahun. Fenomena semacam ini seringkali menimbulkan konflik dalam tubuh internal partai dan menjadikan sejumlah kader sebuah partai pindah ke partai lain karena merasa tidak diprioritaskan dalam partainya.

²¹⁸ *Ibid.*

c. Lemahnya kesadaran berpolitik secara kritis dan rasional

Perilaku pragmatis para politisi dewasa ini sebenarnya tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya sebab kondisi dan mentalitas rakyat Indonesia juga dapat dinilai amat kondusif untuk tumbuhnya pragmatisme di dunia perpolitikan saat ini. Salah satu yang menjadi problem besar dari demokratisasi di Indonesia adalah ketidakmampuan rakyat bersikap secara mandiri, rasional dan kritis dalam melihat permasalahan bangsanya. Rakyat tidak memiliki kekuatan yang utuh dan Sebagian besar rakyat masih memiliki nalar pragmatisme yang cukup memprihatinkan. Sebagai indikasinya adalah ketika rakyat harus menentukan hak-hak politiknya dan pilihan politiknya kepada sebuah partai politik, rakyat tidak berangkat dari sebuah pemahaman yang utuh tentang ideologi, visi misi dan fungsi dari partai politik yang disuarakan oleh para calegnya dalam kampanye. Menurut Rosyid, Pilihan dan sikap politik rakyat sebagian besar tidak berangkat dari kesadaran kritis. Dalam kondisi demikian, memang tidak mudah untuk menemukan kesadaran rakyat yang secara sukarela bergerak dalam aktivitas dukung mendukung kepentingan politik

tertentu. Pilihan rakyat tidak hanya didasari kriteria kualitas kesalehan dan karisma serta popularitas dari capres, cawapres, dan caleg. Sering kali pilihan politik rakyat juga didasari alasan-alasan pengenalan dan kedekatan hubungan pemilih dengan tokoh yang dipilih. Melalui kedekatan dan pengenalan itu rakyat meyakini tokoh pilihannya adalah bagian dirinya sehingga dipercaya akan memperjuangkan kepentingannya. Rasionalitas semacam ini menjadi arena yang kondusif bagi suburnya budaya pragmatis dalam tubuh partai politik dengan mengusung calon-calon yang memiliki modal sosial kepopuleran dan kharisma pribadi untuk dimajukan dalam kampanye politik.

Dengan demikian, apapun yang dilakukan sebagai penyadaran politik menjadi mentah oleh sikap pragmatisme yang ada, sebab rakyat tidak memerlukan gagasan-gagasan yang berat dimana bagi rakyat hal idealis tersebut bersifat utopis.²¹⁹ Menjelang pemilu capres 2014, beberapa tokoh yang mengkaitkan dirinya dengan tokoh orde baru dirasa menguntungkan untuk mendulang suara rakyat. Mereka mencoba mengajak masyarakat mengingat kembali kemakmuran semu yang dibangun oleh Suharto,

²¹⁹ Bdk. HARI JULIAWAN, *Panggung Politik Para Badut dan Monster*, Majalah BASIS, no. 07-08, 2013, p. 9

sehingga rakyat langsung tersadarkan dan merasa rindu dengan kondisi ketika Suharto berkuasa. Kalaupun demokratisasi yang mulai terbuka lebar pasca lengsernya Suharto, yang diiringi oleh kebebasan partisipasi yang luar biasa, ternyata tidak diiringi oleh kesiapan mental dan sikap yang demokratis dari rakyat Indonesia. Kebebasan berpolitik, tidak ditopang oleh rasionalitas, kekritisian dan kemandirian berpikir dan bersikap dalam berpolitik. Dengan demikian wajah demokrasi yang muncul adalah anarkisme, kekerasan, perpecahan dan bukan perubahan yang paradigmatis dan konstruktif.

d. Orientasi rakyat pada ekonomi materialistik

Kondisi ekonomi masyarakat pasca krisis ekonomi tahun 1998, menunjukkan skala yang tidak stabil dan terasa dampaknya pada tahun-tahun selanjutnya hingga saat ini, tanpa disadari rakyat lebih terfokus pada kesejahteraan ekonomi dan mengukur semua hal serta mengkaitkan semua hal pada ukuran kesejahteraan ekonomi. Dalam dinamika politik, rakyat makin sadar diri untuk mau diajak bertindak kalau dibayar. Maka partai politikpun melihat hal ini sebagai peluang sehingga kepada rakyat yang mau memilih mereka akan diberi uang yang berguna bagi tambahan untuk ekonominya.

Dengan demikian politik uang telah menjadi ciri yang paling nyata adanya pragmatisme rakyat dalam dunia perpolitikan di Indoensia dewasa ini.

Kondisi rakyat yang berorientasi pada ekonomi materialistik, menurut Rosyid, selain akibat krisis, juga akibat dari menguatnya kapitalisme yang menawarkan dan meninabobokan masyarakat pada gaya hidup yang hedonis, serba mewah dan menempatkan materi di atas segala-galanya.²²⁰ Semua level masyarakat, berkompetisi untuk meraih materi sebanyak-banyaknya dan bersaing untuk mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih layak. Kapitalisme telah menjadikan segala sesuatu harus dihargai dengan materi. Sehingga tidaklah mungkin mengajak apalagi menggerakkan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dibidang ekonomi memikirkan format serta bangunan demokratisasi di Indonesia. Para politisi yang tersangkut berbagai kasus korupsi saat menjalankan mandatnya sebagai abdi negara jelas menunjukkan sikap dan budaya kapitalistik dan feodalistik dalam mengurus negara. Fenomena Korupsi seperti kasus Hambalang dan sengketa Pilkada di MK telah menunjukkan perilaku pragmatis dengan

²²⁰ *bdk.*, pemikiran Rosyid tentang pragmatisme politik

memanfaatkan jabatan publik untuk mengeruk keuntungan materi semata.

Partai Politik sebagai salah satu instrumen dan infrastruktur demokrasi justru bertindak pragmatis dengan memanfaatkan kebodohan, ketidakberdayaan serta irrasionalitas masyarakat pemilihnya. Dengan demikian mereka begitu mudah mendapat dukungan hanya dengan memberikan kepada rakyat berupa kepuasan materi dan janji-janji kampanye yang cenderung pada penyediaan dan pembangunan fasilitas umum.

3. Teori pragmatisme dalam politik

a. Pengertian pragmatisme

Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani *pragma* berarti perbuatan (*action*) atau tindakan (*practice*). *Isme* berarti ajaran, aliran, paham. Dengan demikian, pragmatisme berarti ajaran/aliran/paham yang menekankan bahwa pemikiran itu benar apabila memiliki implikasi dalam tindakan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pragmatisme berarti kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia. Sedangkan

pragmatis berarti bersifat praktis dan berguna bagi umum; bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan; hal-hal yang bersangkutan dengan nilai-nilai praktis. Karena itu, pragmatisme memandang bahwa kriteria kebenaran ajaran adalah ada pada guna atau manfaat dan ada hasil. Suatu teori atau pemikiran dianggap oleh pragmatisme menjadi benar jika membawa suatu hasil. Dengan kata lain, suatu teori itu menjadi benar jika berfungsi.

Pragmatisme mulai dirintis di Amerika oleh Charles S. Pierce (1839-1942) yang kemudian dikembangkan oleh William James (1842-1910) dan John Dewey (1859-1952). Munculnya paham tersebut tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ajaran/paham lainnya pada Abad Pertengahan (Renaissance), yaitu ketika terjadi pertentangan yang tajam antara gereja dan kaum intelektual.

Pragmatisme tolok ukurnya adalah asas manfaat, sejauh mana manfaat yang bisa diperoleh. Jadi yang utama dalam pragmatisme adalah manfaat. Dari hal tersebut dapat dilihat jika ide, gagasan, konsep, sikap, atau sesuatu tidak bisa memberikan manfaat atau hanya

memberikan manfaat terkecil maka tidak perlu dipertahankan, meski hal tersebut bersifat ideologis dan idealis.

Asas manfaat itu dalam pandangan manusia bersifat subyektif, bergantung pada individu dan kelompoknya. Manfaat juga bersifat situasional, bisa berubah sesuai situasi dan kondisi. Apa yang saat ini suatu hal dipandang bermanfaat dan dapat diambil hasilnya, pada waktu yang lain hal tersebut dapat tidak lagi memiliki nilai manfaat dan dapat ditinggalkan. Pragmatisme dalam bidang politik nampak pada pemikiran Machiavelli yang mengajarkan hal-hal praktis dalam berpolitik.

b. Pemikiran pragmatis Machiavelli dalam politik

Niccolo Machiavelli adalah seorang diplomat, senator dan filsuf politik italia yang lahir ahir di [Florence, 3 Mei 1469](#) dan meninggal pada umur 58 tahun. Dalam masa baktinya sebagai diplomat dan setelah dia pensiun, pendapatnya banyak diminta oleh para pemimpin dalam mensikapi permasalahan politik

praktis dijamannya. Machiavelli dikenal sebagai tokoh realitas politik dalam jaman renaissans.²²¹

Masa Renaisans merupakan titik balik dunia barat setelah kurang lebih 1000 tahun berada di bawah kungkungan kekuasaan gereja dan doktrin agama kristen. Pada masa itu, terjadi pertarungan sengit antara perkembangan ilmu pengetahuan dengan pengaruh gereja. Zaman Renaisans ini diwarnai dengan pemberontakan intelektual terhadap agama. Orang-orang di masa itu mengalami kemajuan pesat dalam hal pemikiran, ilmu pengetahuan, dan karya seni sehingga sulit dibendung lagi oleh doktrinasi agama dan gereja.²²² Jaman renaissans dianggap menjadi faktor yang mempengaruhi corak pemikiran Niccolo Machiavelli.

²²¹ Situasi politik selama masa Machiavelli merupakan situasi yang sulit. Italia terbagi menjadi 5 negara terpisah dan saling berperang yakni: Milan, Venice, Naples, Negara kepausan dan Florence. Negara-negara kecil ini menjadi bidak dari negara besar Perancis, Jerman dan Spanyol dalam usaha perebutan kekuasaan yang terus menerus berkecamuk. Perpecahan golongan, intrik politik, persekongkolan dan meluasnya kekerasan dan konspirasi menjadi situasi yang terus dialami oleh Machiavelli. Lih., HENRY J. SCHMANDT, *Filsafat Politik*, terj. Ahmad bidlowi & Imam Bahehaqi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, p. 249-250.

²²² Lih., ISAIAH BERLIN, *The Originality of Machiavelli*, dalam *Reading Political Philosophy, Machiavelli to Mill*, Nigel Warburton (ed), Routledge, London, 2000, p. 47-48.

Pemikirannya tentang realitas politik dituangkan dalam karyanya yang berjudul *Il Principe* (Sang Penguasa).²²³ Dengan tulisannya, ia berharap dapat memperbaiki kondisi pemerintahan di Italia Utara waktu itu, namun ternyata dalam perkembangan kemudian, tulisannya menjadi salah satu buku pegangan berpolitik hingga dewasa ini.²²⁴ Nama Machiavelli, kemudian diasosiasikan dengan hal yang buruk, untuk menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Orang yang melakukan tindakan seperti apa yang diajarkan olehnya disebut machiavellis atau machiavellian.

Dalam buku *Il Principe* atau *The Prince*, banyak diuraikan tindakan yang dapat atau perlu dilakukan seorang pemimpin atau penguasa untuk mendapatkan atau

²²³ Lih. NICCOLO MACHIAVELLI; *Sang Penguasa* (judul asli: *Il Principe*), I. Burt.. (ed.), diterjemahkan oleh c. Woekirsari, Gramedia, Jakarta 1987 p. xxvii

²²⁴ Buku *il Principe* dinyatakan terlarang oleh Paus Clement VIII. pihak gereja menyatakan bahwa machiavelli adalah pengajar kejahatan atau paling tidak mengajarkan immoralism dan amoralism. Gereja melihat ajaran machiavelli lebih cenderung mengajarkan kekejaman, kekerasan, ketakutan, dan penindasan.

mempertahankan kekuasaan.²²⁵ Beberapa ajaran dari amchiavelli yang bernilai pragmatis adalah:

1. **Paham Moralitas & Kekuasaan:** kekuasaan dan moralitas merupakan dua hal yang terpisah. Asumsi moral dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri. Moralitas merupakan bagian dari strategi kekuasaan, yang tidak selamanya terkait dengan persoalan baik dan buruk namun bersifat realistik dan obyektif serta tidak universal, ia bisa saja berubah-ubah setiap waktu tergantung pada kondisi masyarakat.²²⁶ Tindakan penguasa yang berlaku baik kepada rakyat dalam membangun tatanan sosial dan politik yang baru terbentuk, dianggap sebagai bagian dari strategi kekuasaan. Tujuannya adalah agar legitimasi kekuasaan bisa tercapai.²²⁷

2. **Paham Kekuasaan:** Kekuasaan merupakan sebuah tujuan. Moral ataupun agama adalah merupakan sarana

²²⁵ Buku *Il Principe* yang dipublikasikan tahun 1532 merupakan buku yang terkenal dan kontroversial, dan dianggap masih sangat relevan dalam melihat perpolitikan hingga dewasa ini. Lih., NIGEL WARBURTON, *Reading Political Philosophy*, p.1 -7.

²²⁶ Lih., MAUREN RAMSAY, *Machiavelli's Political Philosophy in The Prince*, dalam *Reading political....*p. 35-36

²²⁷ MACHIAVELLI, op.cit., p. 8, 34 - 39

dan cara-cara yang bisa digunakan untuk dapat menggapai kekuasaan. Kekuasaan bukanlah cara untuk meraih hal-hal lain, tapi kekuasaan merupakan inti dari apa yang diperbuat oleh seorang penguasa atau yang ingin berkuasa.²²⁸ Kekuasaan haruslah diperoleh, digunakan, dan dipertahankan semata-mata demi kekuasaan itu sendiri. Intinya ialah bagaimana ia dapat mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan tersebut. Di dalam salah satu karyanya, *The Prince*, disebutkan bahwa seorang yang telah memegang kekuasaan penting untuk dapat berbuat hal-hal yang terpuji dan tidak terpuji.²²⁹

3. Pencitraan adalah cara menjaga kekuasaan:

Seorang penguasa harus memiliki keinginan untuk dianggap murah hati dan tidak kejam. Memiliki semua kualitas positif akan membawa kehancuran langsung pada penguasa terhadap kekuasaannya sendiri dan tidak memberi manfaat kepadanya. Hal yang lebih penting ialah membuat rakyat atau orang lain dalam jumlah banyak merasakan bahwa penguasanya hebat dan murah hati atau mereka berpendapat bahwa sang

²²⁸ *Ibid.*, p. 11.-16

²²⁹ Lih. NIGEL WARBURTON, p. 10

penguasa memiliki seluruh karakteristik luhur tersebut.²³⁰ Pencitraan adalah langkah yang bisa diambil untuk bisa mendapatkan kondisi seperti itu.

4. Penggunaan segala cara demi kekuasaan dan negara: Machiavelli menasihati bahwa seorang penguasa berhak melakukan apapun yang diperlukan, sekalipun yang dilakukan adalah hal yang tercela bagi rakyat karena rakyat pada akhirnya hanya peduli dengan hasilnya, yang tidak lain adalah kebaikan bagi negara. Penguasa perlu bertindak sebagai pemimpin yang bertangan besi jika itu yang dapat dilakukan untuk dapat menjaga negara selama perombakan besar-besaran yang memerlukan kekuasaan. Penguasa tidak perlu merasa aneh dalam melakukan perbuatan tercela, dimana dengan tindakan itu negara dapat bertahan. Hal ini dikarenakan jika semua tindakan tercela tersebut dilakukan dengan hati-hati dan tidak terlalu mencolok maka rakyat atau orang lain bisa saja memandang tindakan tersebut sebagai sebuah kebaikan. Dalam

²³⁰ *Ibid.*, p. 63-67 dan p.73-74

suatu keadaan bisa saja sesuatu hal yang baik malah mendatangkan hal buruk bagi negara dan sebaliknya.²³¹

c. Karakter Machiavellian

Machiavellian adalah sebuah istilah yang mempunyai arti segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok politikus, yang terkait dengan kepentingan umum, dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri maupun kelompoknya, menggunakan cara-cara yang licik dengan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan moral sedikitpun. Istilah Machiavellian bukanlah diperkenalkan oleh Machiavelli itu sendiri. Istilah tersebut muncul seiring dengan populernya *The Prince* yang jika dilihat sepintas nampaknya banyak mengandung saran-saran dan nasehat-nasehat yang amoral. Buku tersebut disatu sisi dikecam karena mengandung pikiran-pikiran yang membolehkan seorang penguasa untuk berbuat lalim dengan hanya mempertimbangkan tafsir dan ukuran kebaikan secara pribadi dan tidak mengindahkan nilai moralitas pada umumnya. Machiavelli sebagai penulisnya dipandang sebagai guru dari para machiavellian yang mengajarkan

²³¹ *Ibid.*, p. 64.

para penguasa politik untuk mengesampingkan norma-norma dan nilai-nilai moral.

Karakter Machiavellian nampak pertama-tama pada usaha untuk memperjuangkan tujuan di bidang politik yang cenderung bukan untuk kepentingan umum tetapi untuk kepentingan diri sendiri maupun kelompoknya, seperti kekuasaan dalam masyarakat, jabatan politik maupun tampuk pemerintahan ataupun segala sesuatu yang terkait dengan kekuasaan. Karakter yang kedua adalah, bersikap pragmatis dalam mengejar tujuan tersebut, dengan mengabaikan aturan dan norma moral agar tujuan tersebut dapat tercapai. Karakter yang ketiga adalah dihidupi dan digunakannya cara-cara, siasat dan strategi yang licik semisal pencitraan, kamuflase, teror, sabotase, pengelabuhan, manipulasi, penghasutan, jebakan politik dan yang lainnya. Dalam hal ini cara-cara tersebut jelas bertentangan dengan etika berpolitik, keterbukaan/transparansi, fairplay, keadilan dan keselamatan. Karakter yang keempat dari machiavellian adalah menempatkan prinsip kemenangan diatas segala-galanya. Dengan pengutamaan atas nilai kemenangan, maka rakyat dan lawan politik hanya dipandang sebagai obyek dan sarana untuk mencapai kemenangan. Tidak

dihargainya rakyat sebagai pribadi yang bermartabat luhur akan mendorong timbulnya aksi-aksi kekerasan, diskriminasi, ketidakadilan sosial dan eksploitasi.²³²

4. Tinjauan Kritis atas pragmatisme dalam politik

a. Dampak dari pragmatisme politik

1. Reduksi makna politik menjadi dagelan

Pragmatisme dalam politik membuat idealisme dan ideologi yang dirumuskan dan dianut oleh partai politik dan diindoktrinasi bagi para kadernya menjadi sesuatu yang basi dan tidak penting lagi untuk diperjuangkan. Politisi atau parpol yang menganut pragmatisme menjadikan politik hanya sebagai panggung sandiwara atau dagelan untuk memuaskan libido kekuasaan dan mengeruk keuntungan semata. Dengan demikian maka dinamika politik dengan segala macam keriuhanannya sebenarnya merupakan basa-basi politik. Kedudukan rakyat hanya diposisikan sebagai penonton karena akses

²³² PIET GO dkk., *Etos & Moralitas Politik, Seni untuk kesejahteraan umum*, Kanisius, Yogyakarta, 2004, p. 214.

rakyat untuk memahami politik ditutup (depolitisasi) oleh para elite politik.²³³

Dalam memperjuangkan kepentingan pragmatis, tetap digunakan cara propaganda dengan mengidentifikasi pada sesuatu yang ideal dengan slogan “atas nama rakyat”, “untuk kepentingan rakyat”, “demi wong cilik”, “demi kebenaran dan keadilan”, “demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat” dan slogan-slogan sejenis.²³⁴ Tujuannya jelas, agar diidentifikasi seperti itu sehingga memikat perhatian pemilih. Namun semuanya hanya basa-basi dan dagelan saja karena janji politik dan sejenisnya bukan menjadi essensi atau yang utama lagi dalam perjuangan politik. Dalam hal ini pragmatisme telah mereduksi nilai politik dalam sebuah bisnis entertainen atau kegiatan proyek atau ritual kenegaraan yang tidak bermakna apapun. Kondisi

²³³ Lih. FRANZ MAGNIS, p. 26.

²³⁴ Frans Magnis Suseno menyebut ideologi yang disusupi oleh pragmatisme disebut dengan pragmatisme terselubung dalam tirai asap nilai-nilai dengan membawa-bawa nama kebaikan dan keadilan, yang sebenarnya merupakan strategi pragmatis dari penguasa itu sendiri. Lih. FRANS MAGNIS SUSENO, *Kuasa & Moral*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, p. 69..

tersebut sama seperti apa yang dikemukakan Baudrillard sebagai sebuah simulacrum, dimana rakyat hanya terlibat sebagai penonton yang aktif agar politik itu seperti nsmpsk seakan-akan sungguh politik, namun yang sebenarnya hanyalah panggung sandiwara modern.²³⁵ Politik pragmatis mengadirkan apatisme dan skeptisisme rakyat dalam hidup berbangsa dan bernegara.

b. Lenyapnya idealisme membangun bangsa

Pragmatisme di bidang politik telah menafikan pendidikan kader bangsa yang unggul dan terprogram sebab siapapun yang dinilai membawa keuntungan bagi partai dapat menjadi kandidat kuat dicalonkan sebagai pemimpin meskipun dapat diragukan sejauh mana pemahaman ideologi dan idealismenya. Hal ini nampak juga dalam transaksi politik sehingga juga membuat politisi dan parpol tuna identitas. Yang kemarin menjadi lawan, hari ini bisa menjadi kawan. Jika kemarin tampak berseteru, hari ini bisa dengan penuh senyum berangkulan dan bergandengan

²³⁵ Bdk., HARI JULIAWAN, *Panggung Politik...* p.4-10

erat. Koalisi pun bisa dijalin dengan siapapun, tidak lagi memperhatikan visi dan ideologi, selama semuanya dipertemukan oleh manfaat bersama. Ideologi hanyalah atribut yang bernilai tidak penting karena tidak menentukan lagi sebagai acuan dalam berpolitik.²³⁶ Dengan demikian pembangunan negara tidak memiliki dasar pijakan yang jelas untuk dikembangkan dan diarahkan pembangunannya. Tafsir atas arah pembangunan negara tergantung pada apa yang mendatangkan manfaat dan guna sesaat dan berjangka pendek. Dalam konteks pragmatisme politik, pendidikan politik untuk rakyat yang bertujuan membangun visi hidup berbangsa menjadi jauh dikesampingkan sehingga masyarakat rawan akan konflik kepentingan antar kelompok dan separatisme.

²³⁶ Ideologi dinilai semakin tidak menarik karena dunia modern yang bergerak dengan kecepatan dan percepatan ditunjang ekonomi kapitalisme sehingga menimbulkan gelombang perubahan yang cepat dan sulit diinterpretasi dalam pemikiran ideologi, demikian pendapat Daniel Bell, sosiolog Amerika. Lih. NUSWANTORO, *Daniel Bell, Matinya Ideologi*, Indonesia Terra, Magelang, 2001, p. 137-139.

2. Refleksi kritis atas pragmatisme dalam politik

- a. Paham pragmatisme sebenarnya telah mencampuradukkan kriteria kebenaran ide dan kriteria kegunaan praktis dan hasil. Kebenaran ide adalah suatu hal yang membutuhkan verifikasi logika dan jalan berpikir, sedangkan kegunaan praktis dan hasilnya membutuhkan verifikasi pengalaman. Kebenaran sebuah ide diukur dengan kesesuaian ide itu dengan realitas atau dengan standar-standar yang dibangun di atas ide dasar yang sudah diketahui kesesuaiannya dengan realita. Sedangkan kegunaan praktis suatu ide untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak diukur dari keberhasilan penerapan ide itu sendiri tetapi dari sisi kepuasan dan teralaminya di tingkat praksis. Jadi, kegunaan praktis dari sebuah ide tidak mengandung sama sekali implikasi kebenaran, tetapi hanya menunjukkan fakta terpenuhkannya kebutuhan manusia. Dalam perpolitikan semakin nampak kerancuan dimana posisi pemimpin sebagai yang pantas diteladani dalam bidang pemikiran dan

moralnya justru malah menunjukkan perbuatan yang hanya memuaskan kebutuhan pribadinya, sehingga jabatan publik yang bermartabat hanyalah alat pragmatis untuk memenuhi kebutuhan nalurinya saja.²³⁷

- b. Paham pragmatisme mengesampingkan peran akal budi dan kemampuan berpikir manusia dalam meraih kebenaran. Menetapkan kebenaran sebuah ide adalah aktivitas intelektual dengan menggunakan standar-standar tertentu seperti logis, sistematis, dan terukur. Sedangkan penetapan kepuasan manusia dalam pemenuhan kebutuhannya ada dalam ranah identifikasi tuntutan naluriannya. Memang, identifikasi naluriiah dapat menjadi ukuran kepuasan manusia dalam memuaskan kebutuhannya, tetapi tidak dapat menjadi tolak ukur atas kebenaran. Dengan demikian, pragmatisme sebenarnya telah mengesampingkan aktivitas berfikir manusia

²³⁷ Bdk. FRANS MAGNIS, *Etika dan Moral*, tentang pemerintahan yang bersih, p. 122.

dan lebih mengutamakan identifikasi naluri manusia. Dengan kata lain, pragmatisme telah menundukkan keputusan akal budi pada kesimpulan yang dihasilkan dari identifikasi naluri manusia. Dalam bidang perpolitikan, persaingan antar individu dan antar partai nampak lebih menjurus pada paham darwinisme yakni *survival of the fities*, pihak yang kuat yang menang, baik kuat secara modal ataupun dukungan, berlaku seperti persaingan dalam dunia kbinatangan yang mengesampingkan nilai moral dan kebenaran yang berlaku sebagai manusia.²³⁸

- c. Paham pragmatisme telah menimbulkan relativitas kebenaran karena kebenaran disesuaikan dengan perubahan pada subyek penilai yakni baik individu, kelompok, maupun masyarakat, serta mengikuti perubahan dalam waktu dan tempat. Padahal kebenaran pragmatisme itu sendiri *in se* baru dapat dibuktikan setelah melalui pengujian

²³⁸ Bdk., CHANDRA SAPUTRA PURNAMA, JAN PATOCKA: *Melawan pragmatisme dan Apatisme Politik*, Majalah BASIS, NO. 07-08, 2013, p. 52.

yang harusnya berlaku kepada seluruh manusia dalam seluruh waktu dan tempat. Hal ini tidak akan mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, pragmatisme berarti telah menjelaskan inkonsistensi internal yang dikandungnya dan menyangsikan dirinya sendiri. Dalam dunia politik, ideologi politik nampak menjadi dipertaruhkan kebenarannya karena tidak lagi menjadi acuan yang mendasar dan bernilai penting dalam sikap berpolitik. Hal ini mengindikasikan apakah faktor manusianya yang mulai hidup dalam relativisme sehingga selalu ragu dan tidak yakin akan kebenaran ideologi partainya atautkah ideologi partai tersebut belum mampu dibuktikan dan diverifikasi kebenarannya baik secara konseptual/ide maupun secara praksis oleh partai pengusungnya.

Penutup

Memperhatikan gelombang pragmatisme yang makin menderu dalam dinamika perpolitikan di

Indonesia jelas mengajak semua insan yang peduli akan nasib bangsa negara di bumi pertiwi ini untuk waspada dan berjuang keras serta berpikir ulang atas arti hidup bernegara dan berbangsa yang benar dijamin sekarang ini. Pragmatisme yang tidak disadari terus menguat dalam dunia perpolitikan dewasa ini secara perlahan tetapi pasti nantinya akan dapat menghancurkan sendi-sendi hidup bernegara dan akhirnya dapat menghilangkan kedaulatan dan keberadaan negara Indonesia itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

HENRY J. SCHMANDT, *Filsafat Politik*, terj. Ahmad bidlowi & Imam Bahehaqi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002

NIGEL WARBURTON, *Reading Political Philosophy, Machiavelli to Mill*, Routledge, London, 2000,

NICCOLO MACHIAVELLI; *Sang Penguasa* (judul asli: *Il Principe*), I. Burt (ed.), diterjemahkan oleh c.

Woekirsari, Gramedia, Jakarta 1987

PIET GO dkk., *Etos & Moralitas Politik, Seni untuk kesejahteraan umum*, Kanisius, Yogyakarta, 2004

FRANS MAGNIS SUSENO, *Kuasa & Moral*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

NUSWANTORO, *Daniel Bell, Matinya Ideologi*, Indonesia Terra, Magelang, 2001

CHANDRA SAPUTRA PURNAMA, JAN PATOCKA: *Melawan pragmatisme dan Apatisme Politik*, Majalah BASIS, NO. 07-08, 2013

HARI JULIAWAN, *Panggung Politik Para Badut dan Monster*, Majalah BASIS, no. 07-08, 2013

SOEBAGIO, *Distorsi Dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*, MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, vol. 13, no. 2, desember

2009

HUMAHYUN AKBAR, *Pragmatisme Politik Sebuah Keniscayaan*, dari laman

<http://www.harianhaluan.com>

HIZBUT TAHIR, *pragmatisme-politik-menistakan-politik*, dari laman <http://hizbut-tahrir.or.id>

MUJIYANTO, *Bahaya Pragmatisme Politik*, dalam dari laman <http://mayarismagmailcom.blogspot.com>

RUM ROSYID, *Pragmatisme Politik*, dari laman <http://www.scribd.com>

**EPILOG:
MELAMPAUI PRAGMATISME**

**Oleh:
Emanuel Prasetyono**

1. Sekilas Pandang Pragmatisme

Metode Pragmatisme disebut sebagai metode yang akan dikembangkan dalam filsafat masa depan. Ini adalah mimpi William James yang disampaikan dengan sangat percaya diri. Surat ini ditulis pada tanggal 2 Januari 1907 kepada teman William James, yaitu Theodore Flournoy. Dalam surat tersebut, James menyatakan kegembiraannya ketika ia melihat bahwa entusiasme terhadap pragmatisme sebagai sikap atau metode pendekatan terhadap realitas amat meningkat dan *digandrungi* banyak orang, terutama selama 8 (delapan) kali pertemuan dalam kuliahnya tentang pragmatisme di Boston.²³⁹ William James pun semula tak pernah menyadari “kedahsyatan” pragmatisme dalam mempengaruhi hidup begitu banyak orang sampai ia sendiri

²³⁹ Lih. Ruth Anna Puthnam, *Reflections on the Future of Pragmatism*, dalam: *100 Years of Pragmatism. William James' Revolutionary Philosophy*, edited by John J. Stuhr, Indiana University Press, Bloomington and Indiana Polis, 2010, hal. 185.

mempersiapkan kuliah-kuliah tentangnya dan menyadari kekuatannya.

Pragmatisme memang bukan sebuah sistem atau aliran pemikiran atau mazhab dalam filsafat. Meskipun demikian, sebagai sebuah sikap atau metode dalam berhadapan realitas, pragmatisme sangat subur berkembang dalam pelbagai perilaku dan pilihan-pilihan hidup masyarakat post modern. Sebagaimana diketahui, sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem-sistem berpikir di alam modern yang selalu mencari dasar-dasar pengetahuan (fondasionalisme) dengan tugas utama subyek untuk merepresentasikan realitas obyektif (representasionalisme), alam berpikir post modern tidak menyukai pemaknaan yang "njlimet" atau rumit. Alam berpikir post modernisme mengagungkan setiap upaya untuk mengungkapkan semua konsekuensi dari setiap pemikiran apa pun.²⁴⁰ Sebagai bagian dari kultur alam berpikir post modernis, pragmatisme meyakini bahwa apa yang bermakna adalah yang disukai karena memiliki dimensi kegunaan, kepraktisan, dan kepuasan tersendiri.²⁴¹ Dalam pragmatisme, setiap proposisi

²⁴⁰ Bdk. I. Bambang Sugiharto, *Postmodernisme. Tantangan bagi Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1996, hal. 32.

²⁴¹ Bdk. Sonny Keraf, *Pragmatisme Menurut William James*, Kanisius, Yogyakarta, 1987, hal. 11.

diuji kebenarannya di dalam konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkannya.²⁴²

Dalam pragmatisme, kita menemukan filsafat sebagai metode dan pendekatan terhadap realitas. Tetapi pendekatan ini berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh “tradisi” pemikiran yang berkembang dalam filsafat selama ini, yaitu rasionalisme dan empirisme. Kaum rasionalis secara statis dan mekanistik mendekati realitas melalui rasio sebagai instrumen untuk memperhatikan apa yang sudah terpola, tetap, dan pasti pada alam, guna melihat korespondensinya dengan asumsi-asumsi konseptual yang telah diandaikan sejak awal mula. Dalam hal ini, kaum rasionalis selalu menemukan keterpisahan atau jurang tak terselami antara ide-ide konseptual dan kenyataan aktualnya. Sementara itu, kaum empiris menunjuk kepada obyek-obyek yang dialami yang segera mempengaruhi subyek untuk membentuk bangunan pengetahuan, yang disebut dengan pengetahuan empiris. Dalam proses pengetahuan empiris, pikiran menunjuk kepada obyek-obyek di luar subyek

²⁴² Bdk. Aloysius Widyawan Louis Lic.Phil., dan Anastasia Jessica A.S. M.Phil., *Pragmatisme Awal*, Makalah Program Extension Course Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya pada Pertemuan ke 2, hal. 6. Dipresentasikan di Ruang Teater Unika Widya Mandala, Pakuwon City, Surabaya, pada tanggal 2 September 2014.

pengetahuan dan dibangun di atas dasar pengalaman akan obyek-obyek tersebut. Dalam hal ini, para pemikir pragmatisme memiliki sikap tersendiri dalam kaitan dengan ketegangan klasik antara tradisi berpikir rasionalis dan empiris. William James mengatakan bahwa pragmatisme sama sekali tidak berkaitan dengan empirisme radikal.²⁴³ Sementara menurut pemahaman pragmatisme a la Dewey, baik rasionalisme maupun empirisme bersikap tidak lebih sebagai penonton (*spectator*) realitas.²⁴⁴ Baik rasionalisme maupun empirisme tidak menunjukkan keterlibatan dan *passion* untuk mengambil bagian dalam kehidupan konkret. Dalam ranah pragmatisme, keduanya tidak memiliki fungsi dasar kemanfaatan, kepraktisan, dan fungsi sosial. Seperti telah disinggung sebelumnya, pragmatisme sangat menekankan konsekuensi-konsekuensi dari setiap pemikiran. Setiap pemikiran atau wacana dalam bentuk apa pun senantiasa ditinjau dari sudut kebergunaan atau kemanfaatannya; termasuk pula kepuasan yang dihasilkannya. Hal ini merujuk kepada teori macam apa pun

²⁴³ Bdk. Ruth Anna Puthnam, *Reflections on the Future of Pragmatism*, dalam: *100 Years of Pragmatism. William James' Revolutionary Philosophy*, edited by John J. Stuhr, Indiana University Press, Bloomington and Indiana Polis, 2010, hal. 185.

²⁴⁴ Bdk., Aloysius Widyawan Louis Lic.Phil. dan Anastasia Jessica A.S. M.Phil., *Pragmatisme Awali*, hal. 13.

yang dituntut untuk terlibat dengan realitas konkret. Dalam ranah pragmatisme, teori tidak pernah boleh merupakan teori yang bersifat spekulatif-teoretis. Setiap teori dilihat kebenarannya dari konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkannya. Inilah yang dimaksud dengan dimensi keterlibatan teori ke dalam praksisnya. Teori tidak pernah boleh tinggal di “menara gading” yang hanya mampu menjadi penonton yang menganalisis realitas tanpa terlibat dan menjadi bagian di dalamnya. Seorang pragmatis adalah orang yang terlibat dengan lingkungan di sekitarnya.²⁴⁵ Sebagai bentuk kritik terhadap kaum rasionalis maupun empiris yang dinilai sebagai penonton (*spectator*) realitas, yang merefleksikan atau merepresentasikan realitas dalam benak subyek pengetahuan, seorang pragmatis mengambil sikap sebagai *agent* dalam hidup keseharian. Realitas bukan

²⁴⁵ Kaum empiris dan para filsuf analitis dari abad ke 20 memandang pengalaman sebagai pengalaman dalam rasa-perasa inderawi (*sense experience*). Seorang pragmatis tidak merefleksikan tentang rasa-rasa perasa inderawi yang dihasilkan oleh pengalaman, tetapi memahami pengalaman sebagai keseluruhan pengalaman gembira-susah, jatuh-bangun, mengalami ketakutan atau berjingkrak penuh kegembiraan, mengalami rasa putus asa atau bersorak riang penuh harapan, dan lain sebagainya. Singkatnya pengalaman yang betul-betul dialami. Bdk., Ruth Anna Puthnam, *Reflections on the Future of Pragmatism*, dalam: *100 Years of Pragmatism. William James' Revolutionary Philosophy*, hal. 186.

hanya untuk ditonton atau direfleksikan, tetapi dihidupi secara konkret.

Dalam hal ini, sebagai metode dan sikap hidup (*attitude*) konkret berhadapan dengan realitas, pragmatisme bukan lagi melulu “milik” filsafat dalam pendekatan akademis. Pragmatisme sudah menjadi bagian dari jalan hidup (*way of life*) dari masyarakat pada umumnya. Dalam pragmatisme, filsafat memasuki ranah publik pada umumnya dan melampaui ranah akademis. Dalam pragmatisme, filsafat bersentuhan langsung dengan persoalan-persoalan manusia sehari-hari lebih dari pada persoalan-persoalan akademis-teoretis.²⁴⁶ Pragmatisme dengan demikian bisa dikatakan sebagai filsafat yang melampaui dirinya sendiri, yang “keluar” dari dunianya sendiri yang berkuat melulu pada keinginan untuk merepresentasikan realitas sebagai fondasi atau dasar kokoh pengetahuan.

Meskipun demikian, William James tetap berpendapat bahwa pragmatisme tetaplah suatu filsafat, tepatnya filsafat tentang metode yang bertujuan mau me-

²⁴⁶ Untuk itulah pragmatisme juga disebut humanisme ketika tujuannya adalah untuk membuat ilmu-ilmu mampu memberikan kegunaan praktis bagi hidup manusia yang lebih baik. Bdk. Bdk. I. Bambang Sugiharto, *Op. Cit.*, hal. 12.

redisposisi “duduk perkara” metafisika (yang selama berabad-abad menjadi *trending topic* yang seru untuk dipersoalkan dalam dunia filsafat).²⁴⁷ Pragmatisme menawarkan diri sebagai sebuah sikap yang berkaitan langsung dengan konsekuensi-konsekuensi praktis (manfaat dan kegunaan praktis) dari setiap olah pemikiran. Pragmatisme menjadi semacam transformasi dari filsafat yang berkuat pada asas-asas pertama, kategori-kategori, maupun proposisi-proposisi analitis, menuju ke filsafat yang berkecimpung dalam persoalan-persoalan konkret manusia, yang melihat “hal-hal akhir” (*last things; effects*) lebih dari pada “hal-hal pertama” (*first things; causes*) serta konsekuensi-konsekuensi lebih dari pada pemikiran-pemikiran spekulatif-teoretis. Ketika para filsuf menerapkan cara berpikir filosofis ke wilayah aktivitas manusia secara konkret dalam kehidupan sehari-hari (lebih dari pada filsafat yang sibuk dengan dirinya sendiri), akan kelihatanlah kontribusi dan

²⁴⁷ Sebagaimana dikatakan oleh William James, “Metode pragmatis pertama-tama berarti perubahan orientasi dalam bersikap, yakni sikap mengabaikan (term-term metafisika) hakikat, prinsip-prinsip pertama, kategori-kategori, keniscayaan, dan sikap mengarahkan diri pada tujuan terakhir, buah-buah, konsekuensi-konsekuensi, dan fakta-fakta”. Lih. William James, *Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking*, edited and with an introduction by Louis Menand, p. 98. Digital version from <http://www.guttenberg.org>. Diunduh pada tanggal 20 mei 2014, pk. 14.34 WIB.

peran filsafat bagi kehidupan manusia yang lebih luas.²⁴⁸ Di sinilah filsafat mengalami transformasi dari ranah spekulatif-teoretis ke ranah praksis sehari-hari.

Yang mau digarisbawahi di sini adalah bahwa dalam pragmatisme, filsafat bukanlah dogma dan sama sekali tidak bersifat dogmatis (dalam arti segala-galanya dipikirkan dan dipahami secara *taken for granted*). Menurut Dewey, filsafat (agar tetap berguna) harus berkecimpung dalam persoalan-persoalan kemanusiaan praktis. Filsafat harus “setia” pada pengalaman manusia agar sesuai dengan tujuannya untuk memberikan garis-garis pengarahannya bagi perbuatan dalam kenyataan hidup.²⁴⁹ Filsafat tidak boleh merupakan pelarian dari persoalan keseharian (dengan berdalih bahwa filsafat “hanya” persoalan merefleksikan atau mengartikulasikan realitas), melainkan (dan terutama) filsafat mesti membantu kita dalam melihat, menilai, dan terlibat dalam persoalan-persoalan hidup keseharian manusia secara jelas dan terpilah (*clear and distinctive*).

²⁴⁸ Bdk., Ruth Anna Puthnam, *Reflections on the Future of Pragmatism*, dalam: *100 Years of Pragmatism. William James’ Revolutionary Philosophy*, hal. 186.

²⁴⁹ Bdk., Aloysius Widyawan Louis Lic.Phil. dan Anastasia Jessica A.S. M.Phil., *Pragmatisme Awali*, hal. 12.

Setelah masa-masa kelahiran modernitas yang ditandai oleh “kelahiran” sistem-sistem berpikir dan ketegangan-ketegangan yang berkaitan dengan persoalan epistemologis (yang fenomenal tentu diskursus yang sangat “heboh” antara rasionalisme dan empirisme), pragmatisme boleh dikatakan sebagai masa “kelenturan” filsafat. Yang dimaksud tentu bukan soal kompromi metodologis, melainkan lebih sebagai kemampuan dalam mengakomodasi dan mengadaptasikan diri dengan aneka konteks dan situasi. Kelenturannya terletak pada peran dan otoritas pengalaman, pada kekuatan fakta-fakta. Yang menjamin pengetahuan kita adalah apa yang kita miliki secara eksperiensial yang mendasari perjumpaan kita dengan realitas.

2. Pragmatisme dalam Pelbagai Bidang Kehidupan

Dalam kacamata pragmatisme William James, pilihan-pilihan hidup manusia diarahkan oleh hasrat-hasratnya; dan suatu keyakinan selalu ditandai oleh tindakan-tindakan kita. Hal ini membawa konsekuensi dan eksese-eksese dalam pelbagai bidang kehidupan. Secara khusus, di sini konsekuensi dalam hidup beragama akan kami jadikan contoh dari sekian banyak dampak yang dihasilkan oleh sikap dan metode pragmatisme dalam praksis hidup sehari-hari.

Hidup beragama diraih karena hasrat manusia untuk menemukan ketenteraman kedamaian dengan kepercayaan yang diyakininya. Penghayatan agama sangat bersifat pribadi dan subyektif karena di sana terlibat dengan sangat kuat sentimen religius, emosionalitas, dan kondisi psikologis tertentu. Alasan orang hidup beragama dengan demikian bersifat pragmatis, yaitu demi memenuhi kebutuhan psikologis manusia. Hal ini tentu membawa konsekuensi pada semacam kecenderungan yang melulu bersifat imanen dan sifat kodratiah dalam motivasi beragama. Agama lantas melulu bersifat psikologis, kodrati, dan imanen. Ada reduksi terhadap dimensi transenden dan sifat revelasional dalam konteks pewahyuan ilahi.

Sumbangan pragmatisme dalam bidang kehidupan beragama terletak pada dimensi humanis. Pragmatisme (terutama pragmatisme William James) sangat menekankan humanisme dalam kehidupan beragama. Dalam cakrawala humanisme, kebenaran agama terletak pada “misinya” yang (diharapkan) dapat memperkaya hidup manusia dan membawa dunia kepada kehidupan yang lebih baik. Menurut Pius Pandor, “Humanisme semacam ini tidak berarti menolak kebenaran agama dan tidak berpegang teguh pada kebenaran filsafat, tetapi berusaha meletakkan segmen-

segmen tersebut dalam tilikan normatif-kritis”.²⁵⁰ Sebagai pembahasan kunci dalam makalahnya, Pius Pandor menilik humanisme dalam kehidupan beragama dengan meletakkan paham universalitas kemanusiaan sebagai kemendesakan yang harus didialogkan dalam setiap praktek hidup keagamaan.

Lalu apa kepentingan di balik penekanan humanisme terhadap kehidupan beragama? Kepentingannya adalah untuk membuka selubung-selubung yang dalam kehidupan beragama. Selubung apa? Yakni pelbagai bentuk penindasan dan pelecehan akal manusia yang sangat mungkin menyelinap dalam pelbagai bentuk ritualitas, formalitas, maupun dogma-dogma agama.²⁵¹ “Cara menyelinap” itu bisa bermacam-macam, tetapi yang mau diangkat di sini adalah praktek-praktek simbolisme beragama yang sudah tidak sakral lagi, yang telah mengalami proses profanisasi. Simbol-simbol yang seharusnya bersifat sakral telah berbelok arah tujuan untuk kepentingan-kepentingan sesaat, semisal politisasi simbol-

²⁵⁰ Bdk., Pius Pandor Lic.Phil., *Membuka Selubung Pragmatisme Agama: Belajar bersama William James*. Makalah Program Extension Course Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya pada Pertemuan ke 4, hal. 19. Dipresentasikan di Ruang Teater Unika Widya Mandala, Pakuwon City, Surabaya, pada tanggal 16 September 2014.

²⁵¹ *Ibidem*.

simbol agama. “Agama yang semestinya dibawa untuk mengejawantahkan idealisme peradaban dan nilai-nilai kemanusiaan justru dibajak untuk tujuan-tujuan profan yang sempit, dangkal, dan *libidinal*.”²⁵² Sejatinya, pragmatisme agama yang digagas oleh William James menjadi stimulasi bagi kita untuk bersikap kritis terhadap munculnya gejala desakralisasi simbol-simbol keagamaan dalam ranah publik kehidupan berbangsa Indonesia. Humanisme agama menempatkan kehidupan beragama dalam cakrawala yang luas dan optimistik, yang menolak setiap bentuk kepicikan, fanatisme, dan politisasi agama.

Pragmatisme juga membawa aneka perubahan dalam ranah kehidupan sosial dan budaya. Dalam dunia yang semakin pragmatis, perubahan-perubahan di bidang sosial-budaya semakin sulit dipahami, semakin sulit dilihat rekam jeaknya, semakin sulit diantisipasi dan diprediksi. Pragmatisme dalam perubahan sosial-budaya menjadikan pergerakan kehidupan manusia semakin dinamis dan berubah cepat. Dimensi kesejarahan hidup manusia (yang menekankan aspek reflektif-internal dari jati diri hidup manusia) terasa semakin dangkal. Variasi atau modifikasi

²⁵² Lih. Masdar Hilmy, *Agama dan Demokrasi*, Kolom Opini Kompas, Rabu 16 Juli 2014, hal. 6, sebagaimana dikutip oleh: Pius Pandor, *ibid.*, hal. 22.

dalam setiap aspek proses sosial yang menandai perubahan sosial mengalami peningkatan, dan itu berarti dinamika perubahan sosial terjadi sangat cepat.²⁵³ Bentuk-bentuk sosial dan hubungan antar manusia serta standar perilaku mengalami modifikasi yang cukup signifikan. Secara umum, orang lebih menyibukkan diri pada apa yang secara praktis memberinya kegunaan dan keuntungan (prestise, kehormatan, status sosial, kepuasan, kenikmatan, dan lain sebagainya) daripada mencari dan menemukan nilai-nilai sosial-etis yang memberikan martabat bagi kehidupan bersama umat manusia.

Dalam dunia yang pragmatis, orang cenderung dimotivasi oleh tindakan yang dengan cepat bisa memberikan hasil, kegunaan, dan kekuasaan secara maksimal. Oleh karena itu, kelemahan yang segera bisa dilihat dari kecenderungan pragmatis dalam dinamika perubahan sosial-budaya saat ini adalah semakin besarnya kekuatan pemegang kapital simbol. Yaitu, pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan kemampuan (sekurang-kurangnya

²⁵³ Bdk., Drs. Aribowo, M. Si, *Pragmatisme dan Perubahan Sosial Budaya*. Makalah Program Extension Course Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya pada Pertemuan ke 6, hal. 4. Dipresentasikan di Ruang Teater Unika Widya Mandala, Pakuwon City, Surabaya, pada tanggal 30 September 2014.

memberi jaminan) untuk tercapainya hasil yang dengan cepat bisa menunjukkan kegunaan dan memberikan “kekuasaan” secara maksimal.

3. Melampaui Pragmatisme: Menguk Hegemoni Pemaknaan oleh Kekuasaan dan Kapital dalam Pragmatisme

Pragmatisme menurut Pierce dipahami sebagai keseluruhan makna dari suatu konsepsi yang berada dalam seluruh rangkaian konsekuensi-konsekuensi praktisnya. Konsepsi dimaknai sejauh memiliki makna eksperiensial langsung dan “tunai” (*cash value*). Ini berarti bahwa dibutuhkan serangkaian observasi empirik yang mungkin di bawah kondisi-kondisi tertentu demi terumuskannya sebuah konsep yang bermakna.²⁵⁴ Dan seperti yang telah disinggung di bagian awal dari tulisan ini, yang bermakna adalah apa yang disukai karena memiliki dimensi kegunaan, kepraktisan, dan kepuasan tersendiri.

²⁵⁴ Bdk., Aloysius Widyawan Louis Lic.Phil. dan Anastasia Jessica A.S. M.Phil., *Pragmatisme Awal*, hal. 10.

Dengan alasan untuk menyerahkan proses pemaknaan sepenuhnya pada konsekuensi yang langsung didapat dari pengalaman langsung, pragmatisme mengabaikan kenyataan dari beberapa hal berikut ini.

Pertama, bahwa pengalaman adalah nama umum dan sangat luas untuk sebuah “wilayah” dalam hidup manusia yang masih membutuhkan tematisasi atau kategorisasi.²⁵⁵ Oleh karena itu, mengembalikan makna suatu

²⁵⁵ Pemahaman ini datang dari Edmund Husserl, yang mengangkat refleksi tentang “dunia-kehidupan” (*Lebenswelt*). Yang dimaksud adalah suatu gerak hidup spontan, yang mengalir begitu saja tanpa adanya tematisasi atau teorisasi ilmiah. Di “wilayah” ini (kata “wilayah” ditempatkan dalam tanda kutip untuk menyatakan bahwa ini bukan memaksudkan suatu wilayah spasial, tetapi memaksudkan cakrawala berpikir, merasa, dan bertindak), kita menghayati dan menjalani hidup tanpa “menamainya” atau mendefinisikannya. Kita hanya menghayatinya begitu saja. Yang menjadi dasar patokan bagi setiap tindakan atau pilihan-pilihan sikap di “wilayah” ini adalah *common sense*. Oleh karena itu, apabila ada sesuatu yang terjadi dan nampak berbeda di luar kebiasaan di “wilayah” ini, maka yang segera akan dikatakan adalah: “tidak normal”, “aneh”, “tidak masuk akal”, “tidak wajar”, dan lain sebagainya. “Wilayah” ini dengan demikian sangat luas dalam kehidupan keseharian manusia. Ketika pragmatisme mendasarkan kebenaran teori pada konsekuensi-konsekuensi dan praksis pengalaman, sesungguhnya pragmatisme memasuki “hiruk-pikuk” atau “kegaduhan” dari “wilayah” yang sangat luas ini. Dampaknya bisa beraneka macam, mulai dari disorientasi dan kebingungan eksistensial, sampai pada muak, jenuh, dan putus asa. Bdk. I. Bambang Sugiharto, *Postmodernisme. Tantangan bagi Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1996, hal. 36. F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas. Diskursus*

konsep kepada pengalaman langsung sesungguhnya seperti mengabaikan kenyataan bahwa pengalaman itu sendiri adalah suatu “padang belantara” tanpa tepi, mulai dari pengalaman-pengalaman yang dijalani secara rutin tanpa pertanyaan-pertanyaan kritis (pengalaman spontan sehari-hari), pengalaman-pengalaman mental (termasuk di dalamnya pengalaman spiritual), sampai pada “wilayah” pengalaman yang bisa berisiko berakhir pada ketiadaan nilai apa pun (nihil) dan absurditas.

Pengalaman langsung dari dunia manusia itu sendiri adalah suatu “wilayah” (kata “wilayah” ditempatkan dalam tanda kutip untuk menyatakan bahwa ini bukan memaksudkan suatu wilayah spasial, melainkan cakrawala berpikir, merasa, dan bertindak) yang sangat luas dan “tak bertuan” (artinya belum memperoleh tafsiran atau interpretasi dari ilmu-ilmu atau perspektif mana pun). Memang di sini ada yang disebut dengan akal sehat atau *common sense*, tetapi pengalaman langsung itu sendiri belum bisa diberi “nama” dan bisa didekati dengan interpretasi dari ilmu apa saja atau perspektif apa saja. Ini seperti realitas pengalaman yang dihayati tetapi belum diberi nama atau

Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hal. 25.

definisi, seperti seorang anak kecil yang masih belum bisa memahami arti kematian orang tuanya, yang masih mau bermain-main saat orang tuanya meninggal. Dengan kata lain, **berbicara tentang konsekuensi-konsekuensi dari pengalaman langsung itu belum membawa kita pada pemahaman bahwa tiap-tiap pengalaman langsung yang dialami oleh subyek selalu “mengkonstruksi” makna-makna atau nilai-nilai ke dalam pengalaman itu sedemikian hingga menjadi realitas bagi si subyek yang mengalaminya.** Singkatnya, makna atau nilai tidak pernah merupakan sesuatu yang otomatis dihasilkan oleh pengalaman langsung. Makna atau nilai itu dikonstruksi oleh manusia sebagai subyek yang mengalami, bukan disajikan secara *taken for granted* oleh pengalaman-pengalaman obyektif. Kalau pun pragmatisme menempatkan manusia sebagai yang mendapatkan manfaat-manfaat praktis dari setiap tindakan, tetapi “pengolahan” proses pemaknaan (signifikasi) dalam pengalaman-pengalaman tidak mendapatkan tempatnya. Dalam hal ini, kelemahan cara berpikir dan bertindak pragmatis yang menekankan dimensi konsekuensi-konsekuensi praktis dari tindakan yang diambil, jelas amat berisiko menjalani hidup serba *taken for granted*, tidak peduli pada proses pemaknaan, nilai-nilai, dan hirarkhi nilai yang membangun pertumbuhan kepribadian.

Ke dua, konstruksi makna-makna atau nilai-nilai dalam pengalaman-pengalaman langsung bukan datang dari obyek-obyek pengalaman tetapi dari subyek yang mengalami, dari si manusianya. Tetapi dalam mengkonstruksi makna-makna atau nilai-nilai dari sebuah pengalaman langsung, seseorang tidak pernah memahaminya dari dirinya sendiri. Dia mentafsirkan realitas dari pengalaman langsung itu lewat struktur-struktur simbolis yang sudah berakar dari faktor kesejarahan hidupnya, yaitu lewat keyakinan-keyakinannya, adat-istiadat yang dididikkan oleh lingkungan di sekitarnya, perspektif-perspektif yang membentuk sistem penilaiannya, opini-opini publik, dan lain sebagainya. Intinya, subyek selalu mengkonstruksi makna atau nilai dari pengalaman langsung itu dari “sejarah” pemaknaan dalam hidupnya. Dasarnya adalah bahwa setiap orang adalah *person* yang menyejarah dan karenanya setiap orang adalah produk dari suatu sistem sosialnya.²⁵⁶ Bila demikian halnya, pengalaman hidup

²⁵⁶ Pemahaman tentang sosok manusia individu dari kenyataan kesejarahannya diangkat oleh Wilhelm Dilthey. Dilthey meyakini bahwa setiap pemahaman dan interpretasi (proses pemaknaan) dari setiap individu dari sendirinya sudah tersituasikan oleh sistem-sistem eksternal, yaitu sistem-sistem dari luar dirinya di mana di dalamnya termasuk organisasi-organisasi sosial, religius, politik, dan ekonomi. Tetapi, menurut Dilthey, sosok manusia individu secara psikologis juga tidak selalu mau menjadi “korban” dari sistem-sistem

manusia bagaikan “lalu-lintas” pemaknaan yang ramai sekali, “hiruk-pikuk”, di mana di dalamnya ada sistem-sistem sosial, ideologi, agama, keyakinan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Bukan tidak mungkin bahwa “lalu-lintas” pemaknaan itu dikuasai dan didominasi oleh kekuasaan dan kekuatan tertentu lewat penciptaan atau manipulasi nilai-nilai atau makna-makna.

Yang menjadi persoalan adalah apakah subyek bisa menjadi “tuan” atas “hiruk-pikuk” pemaknaan dan nilai-nilai yang menguasai dan mendominasi (meng-hegemoni) di sepanjang sejarah hidupnya sedemikian rupa sehingga si subyek bisa mengkonstruksi hirarki nilai dan makna bagi dirinya? Atau subyek “kalah” oleh dominasi atau hegemoni makna atau nilai yang dikembangkan oleh wacana-wacana di sekelilingnya? Hegemoni makna atau nilai terjadi ketika ada kekuatan yang memberikan kontrol secara kuat atas apa

eksternalnya. Secara evolutif, dia bisa mengasimilasikan kondisi-kondisi eksternalnya dengan situasi batin-psikologis internalnya. Dalam hal ini, sosok individu bisa “merusak” sistem eksternal lewat pemberontakan sikap atau resistensi, atau justru meneguhkan lewat tindakan afirmatif atas kondisi-kondisi eksternalnya (yang disebut dengan internalisasi). Yang pasti, sosok manusia individu sebagai *person* menyejarah mengalami evolusi, jiwa (kepribadian) berubah dalam alur waktu kesejarahan yang tidak kelihatan, tetapi riil. Bdk., E. Sumaryono, *Hermeneutik. Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hal. 48-50.

yang “harus” bernilai atau bermakna bagi individu-individu sedemikian hingga individu-individu tidak sadar menempatkan nilai-nilai atau makna-makna fundamentalnya pada nilai-nilai atau makna-makna yang sudah dibuat atau ditentukan oleh si pemilik kontrol tersebut. Dari mana datangnya kekuatan kontrol tersebut? Yaitu dari akses kekuasaan dan kekuatan kapital (modal).

Misalnya, kita berhadapan dengan realitas masyarakat internasional (regional) yang mau dikembangkan oleh globalisasi lewat kebijakan bersama membentuk pasar bebas di wilayah Asia Tenggara. Ide dasar dari kebijakan ini bagus, yaitu membentuk kesejahteraan bersama dan kekuatan hidup bersama dalam ranah masyarakat bangsa-bangsa yang (kurang lebih) serumpun dalam budaya, geopolitik, maupun ekonomi. Peningkatan daya saing di pasar bebas dunia, pertumbuhan ekonomi yang signifikan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan taraf hidup di wilayah masyarakat ASEAN, adalah tujuan yang mau diraih lewat terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).²⁵⁷

²⁵⁷ Bdk., Maria Indira Aryani, *Pragmatisme Asean Economic Community*. Makalah Program Extension Course Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya pada Pertemuan ke 13, hal. 9.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, ketika arus kecenderungan globalisasi dan kebijakan pasar bebas ini tidak dihadapi dengan regulasi-regulasi yang melindungi warga negara dari gempuran ekonomi bangsa yang lebih maju, kebijakan dan situasi semacam ini tidak lebih daripada menghancurkan ekonomi di negeri sendiri oleh gempuran negara-negara maju. Masyarakat dibiarkan menjadi korban dari arus deras globalisasi, dari ketidak-siapan untuk berkompetisi secara global dan terbuka, seperti layaknya banjir bandang yang datang melanda apa pun yang dilewatinya. Masyarakat tidak mendapatkan kesempatan menjadi “tuan” atas nilai-nilai dan makna kesejahteraan bagi dirinya karena gempuran globalisasi lebih kuat yang menyeretnya. Dalam era globalisasi yang demikian kuat dan terbuka ini, hegemoni kekuasaan dan modal menjadi demikian dominan dan pada akhirnya sangat potensial menempatkan masyarakat pada sikap konsumtif dan memiliki keyakinan palsu, bahwa dengan kepemilikan atas suatu materi (produk) bisa bermakna bagi kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya. Berhadapan dengan hegemoni semacam ini, seseorang bisa sungguh-sungguh kehilangan orientasi tentang hirarkhi makna-makna atau nilai-nilai

Dipresentasikan di Ruang Teater Unika Widya Mandala, Pakuwon City, Surabaya, pada tanggal 18 November 2014.

fundamental yang perlu bagi hidupnya. Disorientasi hirarkhi nilai ini bisa membawa seseorang pada kehilangan pemahaman tentang mana yang mendesak, mana yang lebih penting, mana yang sungguh-sungguh diperlukan, dan mana yang baik dan boleh dilakukan. Bagi pemilik kekuasaan dan kapital, orientasi hidup manusia terletak pada lestarnya kekuasaan dan modal. Nilai kemanusiaan itu sendiri ditempatkan di bawah kepentingan kekuasaan dan modal. Oleh karena itu, ketika pragmatisme menempatkan begitu saja konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan dalam pengalaman sebagai kebenarannya, maka ada risiko sangat besar membiarkan manusia hidup dalam hegemoni dan “perang” dominasi. Ini bisa menjadi “berita buruk” bagi kemanusiaan universal. Sebab, ketika pragmatisme melihat bahwa kemanusiaan tidak harus didefinisikan sebagai “manusia ini” atau “manusia itu”, tetapi lebih dilihat sebagai objek yang bisa melanggengkan kekuasaan dan pengembangan modal, maka pragmatisme bisa amat berisiko menggiring kepada matinya pemahaman-pemahaman universal tentang kemanusiaan. Dan ini sebuah ironi bagi pragmatisme yang pada awalnya menginginkan konsekuensi-konsekuensi praktis yang berguna bagi kehidupan manusia. Ironi bagi pragmatisme yang (katanya) sekaligus adalah humanisme.

Seorang anak kecil yang diberi hadiah tablet atau Ipad di hari ulang tahunnya, misalnya, tidak pernah belajar secara bertahap untuk mengkonstruksi makna penggunaan barang-barang elektronik itu secara lebih luas dan integral. Makna yang langsung didapatnya secara instingtif adalah bahwa barang tersebut memberinya kepuasan untuk bermain. Dengan menghadiahkan barang elektronik kepada si anak di hari ulang tahunnya, orang tua seakan-akan “melemparkan” anak ke dalam hegemoni nilai konsumtif tanpa pernah memberinya kesempatan untuk belajar tentang nilai produktivitas, kemandirian, orientasi, kerja keras, usaha, dan lain sebagainya. Biasanya, orang tua beralasan, “Hidup saya dulu sudah susah. Saya tidak ingin anak saya hidup susah seperti saya. Saya berhak untuk menyenangkan dan memanjakan anak saya sendiri”. Padahal ini bukan persoalan membuat anak hidup susah atau senang, tetapi soal memberikan pembelajaran tentang pembentukan struktur nilai dan makna yang fundamental bagi hidup anak dalam jangka panjang.

Dengan demikian, pragmatisme yang menyandarkan pemaknaan pada konsekuensi-konsekuensi dari pengalaman langsung sesungguhnya bisa dianggap sebagai semacam tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ini seperti

membiarkan seseorang menjadi korban dari hegemoni nilai-nilai atau makna-makna oleh pemilik kekuasaan dan modal untuk menentukan apa yang paling bernilai dan bermakna bagi hidup manusia. Pragmatisme dengan kata lain bisa sangat menguntungkan para pemilik dan pengontrol pertumbuhan kapital dan sekaligus melestarikan posisi *status quo* para pemilik akses-akses kekuasaan.

Pragmatisme juga sangat berisiko pada hegemoni atas simbol, representasi, dan proses signifikasi dalam pencapaian kehidupan manusia yang integral. Simbol dan representasi dibutuhkan ketika pengalaman langsung tidak memadai untuk mengartikulasikan keseluruhan realitas yang mau ditampilkan. Simbol dan representasi yang konkret ada dalam bahasa, sementara bahasa tidak pernah menjadi simbol yang tuntas dalam merepresentasikan dan mengartikulasikan realitas yang mau ditampilkan. Pragmatisme dengan demikian juga nampak dalam bahasa-bahasa yang berwujud dalam ungkapan-ungkapan dalam “makna jangka pendek”, semacam bahasa gaul yang “seumur jagung”, digunakan dan populer dalam sesaat dan tidak digunakan lagi.

Yang juga sering diabaikan oleh pragmatisme adalah bahwa pergerakan jaman mengalami dinamika yang sangat tinggi. Hal itu berarti bahwa observasi dan pengalaman langsung itu tidak pernah tuntas dan dengan cepat mengalami perubahan. Pengalaman tidak pernah berbentuk tunggal. Pengalaman selalu merupakan rangkaian serial pengalaman-pengalaman bermakna. Proses signifikasi atau pemaknaan selalu merupakan sedimentasi dalam proses pemaknaan historis.

4. Catatan Akhir: Pluralitas sebagai Sebuah Keniscayaan

Di masa depan, pragmatisme masih akan menjadi bagian dari cara hidup kita. Pragmatisme masih akan menjadi bagian dari bagaimana manusia berada di dalam bagian utuh dari sebuah “kebudayaan”.²⁵⁸ Pragmatisme di masa depan masih meyakini bahwa manusia adalah makhluk sosial. Keyakinan itu bukan hanya soal bahwa kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita lewat kehidupan bersama dalam masyarakat, tetapi lebih-lebih perkembangan hidup kita senantiasa “tersituasikan” oleh

²⁵⁸ Bdk., Ruth Anna Puthnam, *Reflections on the Future of Pragmatism*, dalam: *100 Years of Pragmatism. William James' Revolutionary Philosophy*, hal. 190.

kenyataan di sekeliling kita di mana kita hidup dan ada. Dengan kata lain, perkembangan hidup manusia tersituasikan oleh lingkungan di sekitarnya di mana dia hidup, bertumbuh, dan ada. Bahkan boleh dikata, perkembangan kesadaran dan gambaran diri seseorang secara individual adalah hasil dari atau proyeksi atas lingkungan di sekitarnya. Dasar pemahamannya adalah bahwa pengalaman seseorang dalam suatu lingkungan bersifat demikian eksistensial dalam mempengaruhi hidup manusia individu, orang per orang. Seluruh perilaku dan tindakan-tindakan etis diputuskan dan diperbuat dengan dipengaruhi oleh pandangan-pandangan etis lingkungannya atau *common sense* yang berlaku.

Misalnya, seorang beriman akan bersikap dan bertingkah laku di dalam rumah ibadahnya sesuai dengan imannya, keyakinannya. Sikap dan tingkah laku ini tentu berbeda kalau si subyek adalah seorang wartawan, atau budayawan, atau seorang turis (yang melihat rumah ibadah sebagai cagar budaya) yang memasuki suatu rumah ibadah. Misalnya, Gereja Katolik Kelahiran St. Perawan Maria, Surabaya, dikunjungi oleh turis dari aneka agama yang berbeda, bangsa yang berbeda. Mereka masuk ke dalam gereja tersebut bukan (hanya) sebagai rumah ibadah, tetapi

(juga) sebagai cagar budaya yang dilindungi di wilayah kota Surabaya. Sikap para turis di dalam Gereja ini tentu berbeda dengan sikap seorang beriman yang datang ke Gereja tersebut untuk merayakan Ekaristi.

Benang merah yang dapat kita tarik dari contoh di atas adalah bahwa sikap mental (*mental attitude*) setiap orang dibentuk dan dipengaruhi oleh lingkungannya, persepsi-persepsinya, cara berpikir dan cara hidupnya, gambaran dirinya, dan lain sebagainya. Tetapi ini bukan soal relativisme dan penulis memang tidak sedang berbicara tentang relativisme. Dalam konteks pemahaman pragmatisme, yang satu berbeda dari yang lainnya bukan karena mau merelativir segala sesuatu, melainkan karena situasi-situasi yang melatarbelakangi sebuah pilihan tindakan dan yang menghasilkan konsekuensi-konsekuensi praktis secara spesifik dan secara konkret juga berbeda. Perbedaan latar belakang situasi konkret dan spesifik tidak sama dengan merelativir realitas. **Perbedaan dalam aneka pengalaman konkret itu ada bagi pragmatisme sebagai sebuah keniscayaan.** Pragmatisme dengan demikian mengandaikan pluralitas sebagai sebuah keniscayaan. Perbedaan dalam pluralitas ada bukan karena dibedakan, bukan pula karena keharusan, tetapi karena sebuah keniscayaan yang riil.

Menurut William James, yang seharusnya dilakukan berhadapan dengan perbedaan ini adalah sikap respek dan toleransi.²⁵⁹ Inilah kontribusi yang hebat dari pragmatisme bagi kehidupan bersama dalam masyarakat majemuk (berbhineka) seperti di Indonesia saat ini.

²⁵⁹ Bdk. Ruth Anna Puthnam, *Reflections on the Future of Pragmatism*, dalam: *100 Years of Pragmatism. William James' Revolutionary Philosophy*, hal. 191.

DAFTAR PUSTAKA

Aribowo, Drs., M. Si, *Pragmatisme dan Perubahan Sosial Budaya*.

Makalah Program Extension Course Fakultas
Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya pada
Pertemuan ke 6. Dipresentasikan di Ruang Teater
Unika Widya Mandala, Pakuwon City, Surabaya,
pada tanggal 30 September 2014.

Hardiman, F. Budi *Melampaui Positivisme dan Modernitas*.

*Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem
Modernitas*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.

Hilmy, Masdar, *Agama dan Demokrasi*, Kolom Opini

Kompas, Rabu 16 Juli 2014, hal. 6, sebagaimana
dikutip oleh: Pius Pandor, *Membuka Selubung
Pragmatisme Agama: Belajar bersama William James*.
Makalah Program Extension Course Fakultas
Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya pada
Pertemuan ke 4. Dipresentasikan di Ruang Teater
Unika Widya Mandala, Pakuwon City, Surabaya,
pada tanggal 16 September 2014.

Indira Aryani, Maria, *Pragmatisme Asean Economic Community*.

Makalah Program Extension Course Fakultas

Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya pada
Pertemuan ke 13. Dipresentasikan di Ruang Teater
Unika Widya Mandala, Pakuwon City, Surabaya,
pada tanggal 18 November 2014.

James, William, *Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking*, edited and with an introduction by Louis
Menand, p. 98. Digital version from
<http://www.gutenberg.org>. Diunduh pada tanggal
20 mei 2014, pk. 14.34 WIB

Keraf, Sonny, *Pragmatisme Menurut William James*, Kanisius,
Yogyakarta, 1987.

Louis, Aloysius Widyawan, Lic.Phil., dan Anastasia Jessica
A.S. M.Phil., *Pragmatisme Awali*, Makalah Program
Extension Course Fakultas Filsafat Unika Widya
Mandala Surabaya pada Pertemuan ke 2.
Dipresentasikan di Ruang Teater Unika Widya
Mandala, Pakuwon City, Surabaya, pada tanggal 2
September 2014.

Pandor, Pius, Lic.Phil., *Membuka Selubung Pragmatisme Agama:
Belajar bersama William James*. Makalah Program
Extension Course Fakultas Filsafat Unika Widya

Mandala Surabaya pada Pertemuan ke 4.

Dipresentasikan di Ruang Teater Unika Widya

Mandala, Pakuwon City, Surabaya, pada tanggal 16
September 2014.

Puthnam, Ruth Anna, *Reflections on the Future of Pragmatism*,
dalam: *100 Years of Pragmatism. William James' Revolutionary Philosophy*, edited by John J. Stuhr,
Indiana University Press, Bloomington and Indiana
Polis, 2010.

Sugiharto, I. Bambang, *Postmodernisme. Tantangan bagi Filsafat*,
Kanisius, Yogyakarta, 1996.

Sumaryono, E., *Hermeneutik. Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius,
Yogyakarta, 1999.

BIODATA PENULIS

1. **Agustinus Pratisto Trinarso, Lic. Phil**
Pengajar tetap di Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Surabaya.
2. **Dr. Agustinus Ryadi**
Pengajar tetap di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Surabaya.
3. **Aloysius Widyawan L., Lic. Phil**
Pengajar tetap di Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Surabaya.
4. **Anastasia Jessica Adinda S., M. Phil**
Pengajar tetap di Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Surabaya.
5. **Drs. Aribowo, M. Si**
Pengajar tetap dan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Surabaya.
6. **Emanuel Prasetyono, Lic. Phil**
Pengajar tetap di Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Surabaya.
7. **Herlina Yoka Roida, SE., M.Com.**
Pengajar tetap di Fakultas Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
8. **Pius Pandor, Lic. Phil**
Pengajar tetap di STFT Widya Sasana Malang.

9. Xaverius Chandra H., Lic. Theol

Pengajar tetap di Fakultas Filsafat Universitas Katolik
Widya Surabaya.

